

Agus Prianto
Winardi
Umi Nur Qomariyah

ON BECOMING A GLOBAL CITIZEN

Berbagai Tantangan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dalam Era Global

ON BECOMING A GLOBAL CITIZEN

Kegagalan menghadapi perubahan sebenarnya bisa dialami siapa pun, termasuk bagi Anda yang merupakan bagian dari generasi milenial sekalipun. Hal ini juga membawa pesan penting bagi dunia pendidikan agar cepat menyesuaikan diri dengan berbagai kecenderungan baru yang berkembang dalam kehidupan masyarakat global. Suka atau tidak suka, institusi pendidikan memegang peranan penting dan menjadi garda terdepan untuk mempersiapkan sebuah generasi agar selalu siap tampil sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Buku ini merupakan kompilasi dari berbagai kajian yang sudah dilakukan oleh penulis, dan memuat berbagai isu yang bermuara pada pembahasan tentang kesiapan suatu generasi dalam menghadapi berbagai kecenderungan yang terjadi dalam era global. Suka atau tidak suka, saat ini kita semua sudah menjadi bagian dari komunitas global. Buku ini hadir dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai bahan bacaan dan renungan untuk mempersiapkan diri sebagai bagian dari warga masyarakat global.

"Let's go to the global society!"

ON BECOMING A GLOBAL CITIZEN

*Berbagai Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dalam Era Global*

Agus Prianto
Winardi
Umi Nur Qomariyah

ON BECOMING A GLOBAL CITIZEN

*Berbagai Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dalam Era Global*

Inteligensia Media
Malang 2019

ON BECOMING A GLOBAL CITIZEN

Berbagai Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Global

Penulis:

Agus Prianto

Winardi

Umi Nur Qomariyah

ISBN:

Copyright @ November, 2019

Ukuran: 15,5cm x 23cm; Hal: xiv + 214

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit.

Cover: Rahardian Tegar Kusuma

Layout: Kamilia Sukmawati

Edisi I, 2019

Diterbitkan pertama kali oleh *Inteligensia Media*

Jl. Joyosuko Metro IV/No 42 B, Malang, Indonesia

Telp./Fax. 0341-588010

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Dicetak oleh **PT. Cita Intrans Selaras**

Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang

Telp. 0341-573650

Email: intrans_malang@yahoo.com

Pengantar Penulis ...

Penulis mengucapkan puji syukur, atas petunjuk, bimbingan, dan kekuatan dari Allah SWT buku ini pada akhirnya dapat hadir di hadapan para pembaca. Buku ini disusun berdasarkan rangkaian hasil kajian yang sudah dilaksanakan oleh penulis dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang baik langsung maupun tidak langsung ikut terlibat sampai dengan terbitnya buku ini.

Untuk sambutan pada buku ini, perkenankan penulis menceritakan peristiwa yang kelihatannya sepele. Tetapi dari cerita ini barangkali bisa sedikit menggambarkan bagaimana kualitas dan kesiapan dari sebagian generasi kita –generasi *milenial*- dalam memasuki era global, sebuah era yang ditandai dengan adanya fenomena perubahan yang sangat cepat dan bergerak dengan liar.

Suatu saat penulis dihampiri sepasang muda mudi. Dandanannya bajunya *keren*, dengan perangkat Android di tangannya, sehingga cukup untuk menggambarkannya sebagai bagian dari generasi *milenial*. Yang membuat tersentuh penulis adalah ketika mereka

bertanya, di mana rumah seorang anak muda yang kebetulan tetangga sebelah rumah. Anda bisa membayangkan, generasi *milenial* yang keren, membawa perangkat Android; tetapi kebingungan mencari rumah temannya yang kira-kira juga memiliki perangkat teknologi serupa.

Kenapa mereka tidak sama-sama menggunakan perangkat *Google Map* untuk urusan remeh-temeh: mencari alamat tempat tinggal? Lalu, untuk apa perangkat Android yang ada di tangannya? Atau, apakah mereka belum familier dengan perangkat teknologi tersebut? Pertanyaan terakhir ini sungguh naif jika harus ditunjukkan untuk generasi *milenial*! Tapi mungkin itulah faktanya, bahwa hingga saat ini masih ada generasi era sekarang yang belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan perangkat teknologi informasi. Masih banyak generasi era sekarang yang menggunakan perangkat teknologi informasi tidak lebih sekedar sebagai sarana untuk *having fun*. Sebagian dari mereka mungkin masih belum bisa mengoptimalkan pemanfaatan perangkat teknologi informasi untuk kegiatan yang lebih produktif.

Generasi *milenial* harus memiliki pemahaman yang mendasar bahwa perkembangan TIK telah mengubah kehidupan masyarakat global. Hal ini secara otomatis menuntut generasi era sekarang untuk membekali berbagai pengetahuan, sikap, perilaku, dan kecakapan yang harus kompatibel dengan berbagai kecenderungan baru yang berkembang di masyarakat. Situasi ini dalam era sekarang populer disebut sebagai gejala disrupsi. Generasi *milenial* harus memiliki pemahaman yang memadai tentang hadirnya fenomena disrupsi, agar ia tidak kaget dan gagap dalam mengikuti perkembangan jaman.

Menurut Khasali (2018), disrupsi sesungguhnya berkaitan dengan inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang syarat dengan material atau fisik, dengan teknologi baru berbasis digital yang semakin mudah dioperasikan, murah, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, hadirnya fenomena disrupsi juga berpotensi menggantikan pemain lama dengan pemain yang baru dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam dunia bisnis.

Setiap generasi akan menghadapi tuntutan yang berbeda, sesuai dengan tantangan kehidupan, situasi dan kondisi yang berlaku pada saat itu; yang secara otomatis juga memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi selamanya akan terus mengiringi kehidupan sebagai respons atas berbagai permasalahan kehidupan yang dialami oleh setiap generasi. Oleh karena itu, bisa dipahami jika generasi pertama akan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dan relevan untuk kebutuhan saat itu. Demikian halnya, generasi *milenial* juga harus mempelajari ilmu pengetahuan yang berkembang pada era sekarang, agar kehadirannya kompatibel dengan tuntutan yang berkembang dalam era *milenial*.

Dengan demikian generasi yang lahir sebelum era *milenial* akan berpotensi mengalami kegagalan, atau bahkan *shock*; karena mereka membawa sikap dan perilaku yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku dan dipelajari pada saat itu. Artinya, pedoman sikap, nilai-nilai, dan perilaku; serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh orang-orang tua atau kakek nenek kita; yang mungkin merupakan bagian dari *baby boomer*, atau beberapa generasi setelah itu; pasti tidak lagi kompatibel dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam era *milenial*. Hal inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan dalam menghadapi dunia yang terus berubah.

Kegagalan menghadapi perubahan sebenarnya bisa dialami siapa pun, termasuk bagi Anda yang merupakan bagian dari generasi *milenial* sekalipun, tetapi tidak memiliki kesiapan untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan era sekarang. Hal ini juga membawa pesan penting bagi dunia pendidikan agar cepat menyesuaikan diri dengan berbagai kecenderungan baru yang berkembang dalam kehidupan masyarakat global. Suka atau tidak suka, institusi pendidikan memegang peranan penting dan menjadi garda terdepan untuk mempersiapkan sebuah generasi agar selalu siap tampil sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Buku ini merupakan kompilasi dari berbagai kajian yang sudah dilakukan oleh penulis, dan memuat berbagai isu yang bermuara pada pembahasan tentang kesiapan suatu generasi dalam menghadapi berbagai kecenderungan yang terjadi dalam era global. Pendidikan merupakan faktor kunci yang diharapkan dapat mengantarkan suatu generasi agar mampu memasuki kehidupan dalam era global. Untuk itu, pada buku ini pertama-tama akan dipaparkan tentang berbagai kecenderungan yang terjadi dalam era global dan berbagai konsekuensinya yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan.

Pemahaman yang memadai tentang berbagai kecenderungan dalam era global diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk terus memperkuat peran pendidikan dalam mengantarkan generasi yang kehadirannya diharapkan akan selalu kompatibel dengan berbagai tantangan yang berkembang dalam era global. Persaingan yang semakin ketat membutuhkan kehadiran generasi yang terdidik dengan baik. Oleh karena itu, dalam buku ini juga akan dibahas tentang penguatan daya akses terhadap pendidikan. Setiap generasi seyogianya harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengakses layanan pendidikan yang bermutu sebagai bekal utama untuk menghadapi kehidupan dengan tingkat persaingan yang semakin ketat.

Melalui layanan pendidikan yang bermutu, diharapkan akan dapat dilahirkan generasi yang cerdas, inovatif, dan kreatif. Dari generasi seperti inilah diharapkan kelak akan dapat mewarnai kehidupan yang lebih bermartabat. Untuk itu, dalam buku ini juga akan dibahas tentang pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Melalui pembahasan tentang hal ini diharapkan dapat mengingatkan kita semua bahwa dalam era sekarang dan ke depan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif merupakan motor penggerak utama peradaban bangsa.

Generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif lazimnya akan memiliki kemampuan yang baik untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu, buku ini juga bermaksud mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya kesiapan suatu generasi untuk mengikuti perubahan yang terus terjadi di masyarakat. Generasi yang memiliki kesiapan untuk berubah lazimnya juga akan lebih siap untuk bekerja sesuai dengan spesifikasi pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan yang diminta oleh dunia kerja. Oleh karena itu, dalam buku ini juga dibahas tentang bagaimana membangun kesiapan bekerja.

Selain memiliki kesiapan untuk bekerja, generasi dalam era sekarang juga harus memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat. Orientasi kewirausahaan pada saat ini sudah menjadi sebuah pedoman hidup yang dijalani oleh berbagai generasi di berbagai negara di dunia. Kemajuan dan kekuatan perekonomian berbagai negara di dunia sangat dipengaruhi oleh kekuatan orientasi kewirausahaan dari warga negaranya. Berkaitan dengan hal itu, dalam buku ini juga dibahas tentang pentingnya penguatan orientasi kewirausahaan.

Suatu generasi yang memiliki kesiapan untuk berubah, siap bekerja, dan memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat dipastikan akan berkontribusi besar dalam memperkuat daya saing suatu bangsa. Jika suatu generasi memiliki daya saing yang kuat, niscaya ia tidak akan gamang untuk hidup dalam komunitas global. Dari situ kita boleh berharap tentang kehadiran generasi masa depan yang lebih percaya diri untuk tampil sebagai bagian dari komunitas global.

Suka atau tidak suka, saat ini kita semua sudah menjadi bagian dari komunitas global. Buku ini hadir dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh siapa pun –warga masyarakat, para pendidik, warga belajar, pengembang masyarakat, politisi, pemegang kekuasaan, dan yang lainnya—sebagai bahan bacaan dan renungan untuk mempersiapkan diri sebagai bagian dari warga masyarakat global. Buku ini diharapkan juga dapat memperkuat cara pandang yang lebih baik dalam menyikapi kehidupan masyarakat global yang terus berubah dan bergerak dengan sangat cepat. Dan penulis berharap, suatu saat Anda semua akan lebih mantap dalam berikrar: *“Let’s go to the global society!”*

Jombang, September 2019

Penulis

Pengantar Penerbit ...

Terdapat satu penuturan mencengangkan (cenderung mengerikan) yang dikutip sebagai kalimat pembuka dalam buku *Disruption* karya Prof. Rhenald Kasali, yakni tentang matinya Nokia, sebuah perusahaan ponsel kredibel dan ternama, secara tiba-tiba; tanpa dilatari satu kesalahan pun (yang mereka sadari). Membacanya, kita seperti disadarkan akan keberadaan musuh tidak terlihat yang siap menerkam kita. Dalam konteks wirausaha, musuh tidak terlihat itu bukanlah pemilik toko sebelah yang sama-sama berjualan sembako melainkan toko sembako digital yang lahir serentak dan menawarkan kemudahan yang tidak pernah terpikirkan. Menghadapinya, kita kalang kabut, tanpa persiapan, tanpa pedoman, dan merasa terancam.

Disrupsi digambarkan sebagai inovasi baru yang mengubah semua sistem lama dan bergerak secara cepat. Disrupsi berlaku seiring dengan perkembangan teknologi yang super cepat. Realitas saat ini tidak menutup kemungkinan akan berganti dengan realitas baru hanya dalam hitungan bulan bahkan minggu. Tanpa penyesuaian

(inovasi) kritis, taktis, dan efektif kita tak pelak akan tertinggal. Dalam lingkungan kerja misalnya, atasan yang masa bodoh terhadap perkembangan teknologi akan rugi. Perlahan tapi pasti, berawal dari adanya *generation gap* yang tidak teratasi, ketidakharmonisan suasana kerja akan berimbas pada tidak terlaksananya misi perusahaan dan tidak tercapainya visi atau target perusahaan mereka. Dalam lingkup yang paling kecil misalnya keluarga, orang tua yang tidak melek digital akan kesulitan mengimbangi dan mengawasi perkembangan anak-anak mereka. Dalam konteks global, negara yang tidak beranjak dari pola kembang lamanya akan luruh dari peradaban, tertinggal dari negara lain yang lebih inovatif dan dinamis.

Tantangan berat dan nyata namun tidak terlihat ini perlu dihadapi secara saksama; tidak bisa secara membabi buta melainkan harus berbekal pengetahuan terkini, dan ketangkasan masing-masing pribadi. Dengan demikian, dalam konteks yang lebih luas yakni negara, pemerintah perlu mencari strategi (langkah cepat) untuk mengatasi tantangan ini terutama melalui skema pendidikan. Contoh kasus sederhana sebagaimana diilustrasikan oleh penulis dalam buku ini adalah perilaku generasi muda yang terpenuhi secara kepemilikan produk teknologi namun tidak dalam hal penguasaan produk teknologi tersebut. Kenyataan ironis ini, jika tidak segera direspons oleh pemerintah “dalam hal ini melalui intervensi di sektor pendidikan dengan cara meng-*upgrade* sistem pendidikan” akan berakibat pada jebloknya kualitas bangsa ke depan. Tanpa antisipasi cepat tersebut, mau tidak mau, kita akan mendapati negara kita sebatas menjadi konsumen tidak terdidik dari para produsen yang kompetitif.

Mencermati gambaran di atas, kiranya perlu sesegera mungkin meng-*upgrade* berbagai sarana pengetahuan, penyadaran, dan pendorong perkembangan; ketimbang melulu berada dalam kekhawatiran. Buku ini, semoga dapat menjadi permulaan berarti untuk melahirkan generasi yang cerdas, inovatif, dan kreatif; yang mampu membawa bangsa pada posisi yang lebih bermartabat dalam kehidupan masyarakat global.

Selamat membaca!

Daftar Isi ...

Pengantar Penulis ... v

Pengantar Penerbit ... x

Bab 1. Berbagai Kecenderungan dalam Abad 21: Implikasinya terhadap Pendidikan ... 1

- A. Pengaruh Kehadiran Teknologi Informasi terhadap Pembelajaran ... 2
 - B. Pembelajaran Abad 21 ... 11
 - C. Mata Pelajaran Utama dalam Abad 21 ... 14
 - D. Tema-Tema Pembelajaran dalam Abad 21 ... 15
 - 1. Kesadaran sebagai Warga Masyarakat Global ... 15
 - 2. Literasi Keuangan ... 16
 - 3. Literasi Ekonomi ... 16
 - 4. Literasi Kewirausahaan ... 17
 - 5. Literasi Media Informasi ... 17
 - 6. Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ... 18
-

Bab 2. Memperkuat Peran Pendidikan dalam Menghasilkan Manusia Pembelajar ... 22

- A. Pendidikan Bermutu sebagai *Sokoguru* Kemajuan Bangsa ... 24
- B. Manusia Pembelajar ... 29
- C. Pembelajaran yang Membelajarkan ... 33

Bab 3. Memperkuat Daya Akses terhadap Pendidikan ... 40

- A. Pendidikan dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia ... 41
 - B. Pendidikan Bermutu untuk Semua ... 44
 - C. Memosisikan Pendidikan sebagai Hak Setiap Orang ... 47
 - D. Mengukur Daya Akses Masyarakat terhadap Pendidikan ... 51
 - E. Akses terhadap Pendidikan Tinggi Bermutu: Cita-Cita dan Realita ... 56
-

Bab 4. Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif: *Conditio Sine Qua Non!* ... 62

- A. Optimalisasi Kemampuan Berpikir dan Sikap Kritis ... 64
 - B. Kemampuan Berpikir Kritis Kreatif dalam Lingkungan Dunia yang Terus Berubah ... 67
 - C. Peran Kreativitas dalam Memperkuat Peradaban ... 71
-

Bab 5. Memperkuat Kesiapan Dini untuk Berubah ... 82

- A. Urgensi Membangun Kesiapan untuk Berubah ... 84
 - B. Berbagai Faktor Penentu Kesiapan untuk Berubah ... 86
 - C. Kesiapan untuk Berubah sebagai Sumber Inovasi dan Kreativitas ... 93
-

Bab 6. Kesiapan Bekerja ... 95

- A. Berbagai isu Ketenagakerjaan ... 96
 - B. Kecakapan Kerja ... 100
 - C. Kesiapan Bekerja ... 105
 - D. Ekspektasi Para Penyedia Kerja terhadap Para Pencari Kerja ... 109
 - E. Kesiapan Bekerja Para Pencari: Kasus Pencari Kerja di Jawa Timur ... 112
 - F. Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Kesiapan Bekerja ... 117
-

Bab 7: Penguatan Orientasi Kewirausahaan ... 122

- A. Indeks Kewirausahaan ... 123
- B. Penguatan Iklim Kewirausahaan ... 128
- C. Pengembangan Spirit Kewirausahaan ... 135
 - 1. Peran Lingkungan ... 136
 - 2. Peran Pendidikan ... 139

- D. Kajian Empirik Peran Pendidikan dalam Membentuk Orientasi Kewirausahaan ... 143
 - E. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Tumbuhnya Orientasi Kewirausahaan ... 146
 - F. Dampak Dukungan Lingkungan terhadap Tumbuhnya Orientasi Kewirausahaan ... 146
 - G. Dampak Pendidikan Kewirausahaan terhadap Tumbuhnya Orientasi Kewirausahaan ... 147
 - H. Dampak Kebijakan Pemerintah, Dukungan Lingkungan, dan Pendidikan Kewirausahaan terhadap Tumbuhnya Orientasi Kewirausahaan ... 148
-

Bab 8. Penguatan Daya Saing Bangsa ... 156

- A. Optimalisasi Pemanfaatan IT ... 156
 - B. Pemanfaatan IT dan Kesiapan Menghadapi Persaingan ... 159
 - C. Menakar Daya Saing Bangsa di Kawasan ASEAN ... 161
-

Bab 9. Let's Go to the Global Society ... 178

- A. Refleksi Aktivitas Pendidikan dalam Era IT ... 179
 - B. Tantangan Era Disruptif ... 182
 - C. Perlombaan Menuju Masyarakat Global ... 184
 - D. Catatan Akhir ... 193
-

Indeks ... 195

Daftar Pustaka ... 198

Tentang Penulis ... 211

- Bab 1 -

Berbagai Kecenderungan dalam Abad 21: Implikasinya terhadap Pendidikan

*“Ada satu hal yang susah Anda pahami saat hanya mempelajari
sesuatu dari buku, yaitu pengalaman”*

- BJ Habibie -

...

Anak-anak abad 21 menghadapi banyak tantangan dan berbagai kecenderungan yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendidik yang lahir pada abad 20. Berbagai aktivitas yang diminati oleh anak-anak yang hidup dalam abad 21 sangat dipengaruhi oleh aktivitas dalam kelompok. Dalam era sekarang, anak-anak sangat sibuk dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut di dalam keluarga, terdorong untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru, dan sangat toleran dengan keberagaman sosial ekonomi dan etnik.

Teknologi komputer sudah menjadi bagian kehidupan anak-anak dalam abad 21. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membuat anak-anak yang sedang menempuh pendidikan tidak cukup hanya mengingat materi pelajaran. Materi pelajaran yang pada hari ini sedang dikaji bisa cepat menjadi usang. Oleh karena itu, anak-anak dalam era sekarang dituntut mampu membuat keterkaitan antar materi pelajaran, mengaitkan materi pelajaran dengan isu yang terjadi di masyarakat, dan dituntut memiliki kemampuan memecahkan masalah. Anak-anak dalam era sekarang dituntut untuk mampu berpikir holistik dan kreatif, mampu melihat berbagai permasalahan kehidupan dari berbagai sudut pandang dan memiliki

banyak alternatif pemecahan masalah. Era sekarang menuntut kehadiran generasi yang berwawasan luas.

Proses pembelajaran dalam era sekarang tidak lagi menekankan kepada para siswa untuk mampu menyerap dan memahami materi pelajaran secara terpisah-pisah. Para siswa dituntut untuk menemukan makna materi pelajaran. Hal itu harus dilakukan dengan jalan menemukan keterkaitan antara materi pelajaran yang satu dengan pelajaran lainnya, antara materi pelajaran dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dalam era sekarang; tempat belajar para siswa menjadi semakin luas, tidak hanya tergantung kepada aktivitas belajar di sekolah. Berkembangnya teknologi informasi membuat aktivitas belajar para siswa menjadi tanpa batas, tanpa sekat ruang dan waktu.

A. Pengaruh Kehadiran Teknologi Informasi Terhadap Pembelajaran

Kehadiran teknologi informasi akan membuat kegiatan belajar dapat berlangsung sepanjang masa, tidak mengenal sekat ruang dan waktu; dan memungkinkan para siswa terus memperhatikan perubahan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepat membuat ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dan berubah dengan sangat cepat pula. Sudah semestinya, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat akan membuat materi pelajaran di sekolah atau bangku kuliah menjadi sangat cair, dan harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan belajar harus benar-benar menggerakkan siswa agar menjadi manusia pembelajar. Para siswa harus dibiasakan untuk mengarahkan dirinya sendiri (*learn how to learn*) untuk menggali ilmu pengetahuan dan dapat menemukan keterkaitan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Inilah basis kegiatan pembelajaran dalam abad 21.

Dalam sebuah era yang terus bergerak dengan sangat cepat, maka para siswa dituntut untuk mampu bekerja dalam tim untuk bersama-sama mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Kemampuan para siswa untuk bekerja dalam tim juga akan memungkinkannya untuk mempertemukan dan membuat kaitan antara informasi yang dimilikinya dengan informasi yang dimiliki oleh anggota tim yang lain. Mereka bisa saling mendiskusikan berbagai informasi terbaru, dan

bersama-sama membangun pemahaman tentang hal-hal yang baru yang dibangun berdasarkan berbagai informasi yang berbeda.

Dengan bekerja sama dan mendiskusikan informasi yang diperolehnya bersama-sama dengan teman-temannya, para siswa akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengalaman nyata bagaimana harus membangun pemahaman dan keterkaitan antar informasi sampai pada diperolehnya cara pandang yang baru tentang sesuatu hal. Mereka belajar tidak lagi hanya sekedar melalui kegiatan membaca dan mendengarkan ceramah dari guru.

Dalam era sekarang, kegiatan belajar akan semakin bermakna apabila lebih banyak diisi dengan aktivitas mental dan fisik secara bersamaan. Kegiatan belajar siswa beralih lebih banyak pada aktivitas visual dan kinestesis, sehingga siswa menjadi semakin aktif selama menempuh studi. Siswa akan dibiasakan untuk membangun pemahaman secara mandiri tentang apa yang sedang dipelajari.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang teknologi informasi; akan menumbuhkan budaya belajar yang baru. Siswa tidak lagi tergantung kepada keberadaan guru di dalam kelas. Siswa bisa saling bertukar informasi pengetahuan dengan para siswa lainnya. Kegiatan belajar menjadi kegiatan yang bisa semakin melibatkan banyak siswa dalam waktu yang bersamaan. Para siswa sekarang hidup dalam era ledakan *dotcom*. Kehidupan mereka dikelilingi dengan teknologi digital, audio dan teks. Oleh karena itu, mereka juga menginginkan kegiatan belajar di sekolah dapat diisi dengan aktivitas belajar yang melibatkan teknologi digital dan audio; di samping menggunakan teks.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membuat para guru tidak lagi sebagai tumpuan utama bagi para siswa untuk bertanya tentang sesuatu. Untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tertentu, para siswa dapat mengakses melalui *smartphone* yang dimilikinya; atau melalui komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Siswa yang belum memahami tentang tema pelajaran, maka ia akan dengan mudah dapat membuka mesin pencari data, *google*. Siswa tinggal memasukkan kata kunci dari tema pelajaran tersebut, dan dilanjutkan dengan menekan tombol "*search*"; maka akan muncul ribuan penjelasan untuk tema yang diinginkannya. Dalam situasi yang demikian, maka para guru tidak bisa lagi memaksakan para siswa untuk

hanya sekedar mendengarkan penjelasan tentang tema pelajaran tertentu yang didasarkan pada buku teks. Para siswa dipastikan tidak akan telaten untuk mendengarkan penjelasan para guru yang hanya didasarkan dari buku teks, lebih-lebih apabila buku teks yang digunakan tidak *membumi*, tidak *up to date*, atau sudah tidak relevan dengan perkembangan yang sedang terjadi di dalam kehidupan nyata.

Ketika teknologi internet dengan mudah dapat diakses oleh para siswa, maka mendengarkan cerita para guru tentang informasi yang diperoleh dari buku teks sering kali dianggap sebagai kegiatan yang membosankan. Karena kalau hanya untuk mendengarkan cerita para guru tentang sebuah tema pelajaran tertentu; hal itu dapat dilakukan para siswa dengan mengunduh dari internet. Melalui *youtube*, para siswa bahkan dapat mengakses informasi yang lebih lengkap dan interaktif, tidak hanya dalam bentuk teks; tetapi juga dilengkapi dengan audio visual sehingga informasi dapat disajikan dengan lebih jelas dan hidup. Pertanyaan yang harus dijawab oleh para guru dan sekolah adalah, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi yang akan terus tumbuh dengan sangat pesat itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar para siswa?

Hingga kini, masih banyak sekolah dan guru yang melarang para siswanya bersentuhan dengan internet. Tidak sedikit pula guru dan sekolah yang secara tegas melarang para siswanya membawa dan menggunakan *smartphone* ketika sedang belajar dan berada di lingkungan sekolah. Alasan guru dan sekolah melarang para siswa mengakses internet dan membawa *smartphone* adalah dikawatirkan para siswa hanya akan tertarik mengakses konten yang sifatnya negatif, seperti konten pornografi dan pornoaksi. Alasan ini masuk akal. Tetapi upaya guru dan sekolah untuk menjauhkan para siswa dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi juga patut dipertanyakan, karena terkesan mengingkari perkembangan jaman. Tentu akan lebih baik apabila sekolah mampu mengoptimalkan peralatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Artinya, para guru juga dituntut untuk tidak *gaptek*. Guru dituntut untuk berada pada barisan terdepan dalam hal pemanfaatan peralatan teknologi informasi dalam aktivitas pembelajaran di sekolah, misalnya dengan mengembangkan pembelajaran berbasis *e-learning*.

Berkembangnya teknologi informasi sesungguhnya juga memberikan kesempatan kepada guru untuk menggerakkan para siswa agar lebih mengetahui tentang berbagai tantangan yang kelak akan dihadapi. Guru juga berkesempatan untuk mengajak para siswa untuk mengemukakan berbagai solusi terkait berbagai permasalahan yang berkembang dan dihadapi masyarakat berdasarkan beragam kajian teori, data, dan fakta yang dapat diakses melalui internet. Dengan kata lain, teknologi internet akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu berpikir lebih luas dan holistik dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan.

Asa Firda Nihaya, dan populer dipanggil Afi; yang merupakan seorang siswi kelas 3 SMA Negeri Gambiran Banyuwangi; adalah contoh bagaimana generasi sekarang seharusnya dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial Facebook untuk penyampaian pesan damai (Kompas, 31/5/2017). Berkembangnya teknologi internet, dan didukung dengan kebiasaannya untuk membaca buku; menyebabkan ia mampu memberikan pandangan bagaimana harus hidup dalam sebuah negara yang plural seperti Indonesia. Pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk tulisan bertajuk “Warisan” di akun Facebook-nya menyebabkan ia menjadi terkenal, baik di media sosial maupun di media massa. Berbagai tulisannya yang disebarakan melalui akun Facebook-nya dinilai mampu menginspirasi ribuan generasi sebayanya untuk terus memperkuat semangat pluralisme. Dengan demikian yang harus dilakukan para guru dan orang tua sesungguhnya tidak harus membatasi para generasi era sekarang bersentuhan dengan perangkat teknologi informasi (TI), tetapi bagaimana mengarahkan mereka untuk mampu memanfaatkan TI untuk kegiatan yang lebih produktif.

Pelarangan penggunaan *smartphone* oleh para guru dan sekolah juga tidak bisa menjamin para siswa untuk tidak menggunakan teknologi internet dan *smartphone* setelah mereka usai kegiatan pendidikan di sekolah. Pelarangan penggunaan teknologi internet dan *smartphone* justru menguatkan rasa penasaran dan ingin tahu para siswa terhadap fitur dan konten yang ada di dalamnya. Hal ini dari sisi nilai edukasi juga terasa sangat aneh: di satu sisi para siswa dilarang menggunakan *smartphone*, tetapi pada saat bersamaan siswa menyaksikan warga masyarakat, para guru, dan orang tua setiap hari asyik berselancar dengan perangkat *smartphone* di hadapan para siswa.

Para guru dan sekolah perlu menyambut dengan gembira kehadiran teknologi internet yang semakin mudah diakses, terlebih sejak kehadiran teknologi *smartphone*. Para orang tua, guru, sekolah, sampai dengan tokoh agama tidak mungkin akan terus menjadi pengawas sepanjang waktu bagi para siswa agar tidak bersentuhan dengan teknologi internet. Saat ini adalah era ledakan *dotcom*. Menolak kehadiran teknologi internet, sama dengan hendak memutar jarum waktu untuk kembali ke era sebelum teknologi internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Hal ini tidak mungkin terjadi! Yang bisa dilakukan oleh para orang tua, guru, dan sekolah adalah bagaimana bisa bersahabat dengan teknologi internet. Persahabatan yang baik dengan teknologi internet akan mengantarkan para orang tua, guru, sekolah, dan para siswa untuk dapat mengambil sebanyak mungkin manfaat positif dengan kehadiran teknologi internet.

Banyak orang tua, guru, dan sekolah yang khawatir bahwa teknologi internet hanya akan meracuni para siswa dengan konten-konten yang negatif. Fakta membuktikan bahwa memang tidak sedikit siswa yang hanya memanfaatkan teknologi internet dan *smartphone* untuk sekedar *having fun*, bersenda gurau melalui Facebook atau WhatsApp, dan tidak sedikit yang mengakses konten pornografi dan pornoaksi. Tetapi para orang tua, guru, dan sekolah sesungguhnya bisa mengkondisikan dan membuat sibuk para siswanya untuk mengakses informasi-informasi aktual yang ada relevansinya dengan materi pelajaran yang harus ditempuh oleh para siswa. Para siswa dapat dikondisikan sibuk untuk membuat karya kreatif dan inovatif sesuai dengan tema materi pelajaran tertentu untuk diunggah di dunia maya. Antar siswa yang satu dengan siswa yang lain, bahkan bila memungkinkan antar siswa di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain; bisa saling mengamati, mengomentari, mengkritisi, dan mengevaluasi hasil karya masing-masing siswa. Pada saat seperti inilah para siswa bisa mengembangkan dan melengkapi terhadap salah satu karya yang sudah dihasilkan oleh teman-temannya.

Pembelajaran dalam era ledakan *dotcom* mestinya sudah tidak cocok lagi dengan kegiatan yang didominasi oleh ceramah dari para guru. Guru dan siswa, serta antara siswa yang satu dengan siswa yang lain harus menjadi sebuah tim kerja yang mengkaji tentang tema pelajaran tertentu. Pendekatan pembelajaran akan lebih banyak diisi dengan

model pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Teknologi internet memungkinkan para siswa untuk berkolaborasi dengan siswa lainnya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ini adalah bentuk kolaborasi yang benar-benar tanpa batas. Secara tidak langsung, para siswa juga akan belajar untuk membangun jejaring. Para guru juga berkesempatan untuk mengembangkan model *blended learning*, yang merupakan perpaduan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara *online*, misalnya dengan memanfaatkan teknologi *blog* atau *e-mail*.

Dalam era sekarang, evaluasi belajar siswa oleh guru sudah seharusnya tidak lagi menggunakan pendekatan *sumatif*, yang hanya menuntut para siswa untuk mengungkapkan kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari. Para guru dituntut untuk mengevaluasi ketuntasan belajar siswa dengan menggunakan pendekatan *formatif*, yang akan menggunakan penilaian portofolio untuk mengukur ketuntasan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan pendekatan tes *formatif*, para siswa tidak hanya dituntut untuk menjawab tentang “apa”, tetapi juga harus mampu menjawab tentang “bagaimana” dan “mengapa”. Hal ini akan membiasakan dan menuntut para siswa untuk berpikir pada level tertinggi (*high order thinking*). Kualitas proses keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar menjadi tolok ukur yang menentukan keberhasilan belajar siswa.

Kegiatan pembelajaran akan selalu melibatkan guru, sebagai pengajar dan pendidik; dan para siswa yang sedang belajar dan dididik. Dalam era sekarang, ketika teknologi internet begitu gampang diakses oleh semua lapisan masyarakat; maka kegiatan pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas. Kelas bahkan dikategorikan oleh Rodgers & Raiderroth (2006) sebagai ruang belajar yang bersifat tradisional. Hadirnya teknologi internet telah memunculkan sebuah kelas virtual (*virtual class*) yang memberikan kesempatan para siswa untuk belajar dan saling membelajarkan dengan teman sejawatnya kapan pun dan di mana pun mereka berada.

Para orang tua, guru, dan sekolah seyogianya melihat positif kehadiran kelas-kelas virtual ini. Sifatnya yang fleksibel dan tanpa sekat membuat kehadiran kelas virtual sebagai tempat belajar yang digemari oleh siapa pun; termasuk oleh para siswa dan guru. Oleh karena itu, dalam era sekarang; kegiatan dan waktu pembelajaran harus dibuat menjadi lebih luwes. Artinya, kegiatan pembelajaran dapat dipadukan

melalui kegiatan tata muka di kelas (*face to face learning*) dan tatap muka secara *online* (*online learning*). Kombinasi kegiatan pembelajaran yang bersifat *face to face* dan *online* inilah yang kemudian memunculkan pendekatan pembelajaran *blended learning*.

Tidak dapat dibantah, bahwa para siswa jaman sekarang adalah generasi yang sudah sedemikian familier dengan teknologi internet. Sesekali mari kita bertanya kepada para siswa, adakah di antara mereka yang tidak pernah mendengar istilah internet? Nyaris semua siswa sudah mendengar istilah itu. Adakah di antara para siswa yang pernah mengakses internet? Jawabnya, juga nyaris semua siswa pernah mengakses internet. Singkatnya, para siswa jaman sekarang sudah begitu akrab dengan internet. Istilah *download*, *upload*, *chatting* dan yang sejenis dengan itu sudah sangat akrab di kalangan para siswa. Inilah generasi baru dalam abad 21 yang sering disebut sebagai “net-generation” yang juga hidup dalam dunia baru, yang disebut dengan dunia maya; yang di dalamnya nyaris tanpa ada sekat, benar-benar transparan. Artinya, apa pun yang ingin diketahui oleh para siswa, seketika itu pula langsung dapat diakses melalui jaringan internet.

Bisa dibayangkan, kalau jaringan internet itu ada di *smartphone* yang ada di genggamannya para siswa; maka informasi tentang apa saja langsung dapat diketahui oleh para siswa saat itu juga! Tidak pakai lama! Artinya, seandainya para guru pada awal kegiatan pelajaran menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran lengkap dengan tema atau materi pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa; maka kapan saja para siswa dapat mengunduh materi pelajaran tersebut dari internet.

Dalam era internet, para siswa mestinya tidak harus menunggu para guru di kelas untuk memperoleh informasi tentang tema pelajaran tertentu. Kecenderungan ini harus dipahami oleh para guru dan siswa agar pembahasan materi pelajaran tidak hanya tergantung pada keberadaan guru, ruang kelas, waktu tertentu, dan buku teks. Belajar tidak selalu harus dikaitkan dengan sekolah dengan berbagai perangkat yang ada di dalamnya. Jangan sampai generasi era sekarang masih berpandangan bahwa sekolah adalah tempat belajar, dan hanya akan belajar ketika berkaitan atau berada di lingkungan sekolah. Belajar bisa terjadi di mana pun dan kapan pun, baik di sekolah, di rumah, di ruang-ruang publik; dan di mana pun siswa berada.

Dalam era sekarang, sekolah sudah harus naik level dari sekedar sebagai tempat kegiatan belajar menjadi tempat kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran hanya akan terjadi jika ada siswa yang belajar dan guru yang mengajar tentang materi pelajaran tertentu. Dalam kegiatan pembelajaran, ada interaksi edukatif antara guru dan siswa yang memungkinkan kedua belah pihak untuk saling belajar dan membelajarkan. Dalam sebuah era, ketika informasi, pengetahuan, dan teknologi berkembang dengan sangat cepat; maka ruang-ruang kelas dan sekolah justru harus menjadi tempat terdepan bagi para guru dan siswa untuk saling belajar dan membelajarkan. Dari ruang-ruang kelas seperti inilah kelak diharapkan akan lahir manusia-manusia pembelajar, yang ditandai dengan adanya kesadaran untuk terus menerus belajar, memperbaharui pengetahuan dan kecakapan yang sudah dimiliki.

Teknologi internet memungkinkan para siswa untuk mengakses informasi, pengetahuan, dan teknologi terbaru dari berbagai bidang ilmu. Oleh karena itu, kehadiran teknologi internet bisa membuat informasi dan pengetahuan yang disajikan dalam buku teks menjadi tampak cepat usang. Kegiatan pembelajaran akan dirasakan para siswa menjadi sangat membosankan apabila para guru hanya menggunakan sumber belajar dari buku teks. Kegiatan pembelajaran yang hanya mengandalkan buku teks sebagai sumber belajar hanya akan membuat kegiatan pembelajaran menjadi kering dan tidak membunsi.

Informasi yang mudah diakses dari internet sesungguhnya memberikan kesempatan kepada guru dan siswa untuk mengkaji suatu tema pelajaran dengan didasarkan pada berbagai sudut pandang. Ruang belajar dalam era sekarang menjadi jauh lebih luas, dan tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang kelas dan waktu. Kecenderungan ini harus dilihat sebagai sebuah berkah dari berkembangnya teknologi internet. Para guru dan siswa berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sepanjang waktu dengan dukungan data-data paling mutakhir.

World view para siswa tentang suatu isu dapat dibangun dengan efektif dengan memanfaatkan beragam informasi yang ada kaitannya dengan tema pelajaran yang dikaji di dalam kelas. Melalui teknologi internet para siswa juga akan dibiasakan untuk mengembangkan berbagai kecakapan yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pemilihan, pengklasifikasian, pengorganisasian dan menganalisis

keterkaitan antara data yang satu dengan data yang lain tentang tema pelajaran tertentu. Pembelajaran yang demikian secara otomatis akan mendorong para siswa untuk bertindak dan berpikir aktif-proaktif, logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Para siswa secara otomatis juga akan dibiasakan untuk membangun jejaring dan berkolaborasi dengan sesama temannya. Dengan demikian kemampuan siswa untuk bekerja dalam sebuah tim (*teamwork*) juga akan berkembang dengan optimal.

Ketersediaan data-data kontemporer tentang tema pelajaran yang diakses oleh para siswa dari internet secara tidak langsung akan memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang lebih autentik (*authentic learning*). Para siswa berkesempatan untuk mengkaji isu-isu dengan didukung oleh fakta-fakta terbaru yang dengan mudah dan cepat dapat diunduh dari internet. Kajian materi menjadi lebih riil, membumi, dan mudah dipahami para siswa. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran autentik, kegiatan belajar di sekolah menjadi lebih egaliter, tidak elitis, karena akan selalu dekat dengan problem riil yang berkembang di masyarakat.

Sudah menjelang dua dasa warsa kita hidup dalam abad 21 dengan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penopang utama dalam menjalankan berbagai bidang kehidupan. Internet nyaris menjadi kebutuhan pokok semua umat manusia. Telepon seluler atau *smartphone* saat ini sudah tidak lagi menjadi barang eksklusif. Semua orang, apa pun profesinya, baik tua maupun muda; nyaris tidak bisa lepas dengan produk teknologi tersebut. Dalam era sekarang, nyaris tidak ada aktivitas kehidupan manusia yang tidak memerlukan dukungan teknologi informasi.

Kemampuan semua orang untuk menggunakan peralatan IT guna mengakses informasi telah mengubah pola interaksi antar manusia. Pola hidup dan tata cara kerja dalam berbagai bidang kehidupan berubah total bila dibandingkan dengan periode kehidupan sebelumnya. Semuanya menjadi semakin ringkas dan simpel. Strata kehidupan dan jarak kekuasaan pun semakin tipis. Tidak ada lagi orang yang tidak dapat disentuh, siapa pun dia! Bayangkan, dengan perangkat telepon seluler dan *smartphone*; bagaimana mudahnya orang-orang di kampung dari berbagai pelosok negeri melalui media sosial dapat berkomunikasi dengan presiden sekali pun! Saat ini, orang tidak perlu berlama-lama menunggu sebuah berita melalui koran. Peristiwa yang terjadi di berbagai belahan bumi, saat itu juga dapat diakses melalui *smartphone*

yang terkoneksi dengan internet. Pembelajaran dalam era sekarang dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuan literasi peserta didik, literasi dalam bidang pemanfaatan informasi, literasi media, dan literasi bidang teknologi informasi dan komunikasi.

B. Pembelajaran dalam Abad 21

Apakah kegiatan pembelajaran di sekolah sudah sejalan dengan kecenderungan baru dalam abad 21? Mengacu kajian *Partnership for 21st Century Learning* (P21), pembelajaran dalam abad 21 setidaknya harus mampu mengembangkan berbagai kecakapan berikut:

- Kegiatan pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran yang terjadi pada masyarakat global.
- Pembelajaran harus mampu mengembangkan kemampuan literasi para peserta didik, terutama dalam bidang ekonomi, keuangan, bisnis, dan kewirausahaan.
- Pembelajaran harus mampu mengembangkan kesadaran para peserta didik sebagai bagian dari warga masyarakat lokal, nasional, dan global.
- Pembelajaran harus mampu mengembangkan kesadaran para peserta didik tentang pentingnya hidup sehat.
- Pembelajaran harus mampu mengembangkan kesadaran para peserta didik tentang kesehatan dan kelestarian lingkungan.
- Pembelajaran harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif para peserta didik.
- Pembelajaran harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah.
- Pembelajaran harus mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi para peserta didik.

Berbagai kecenderungan yang akan terjadi di masyarakat pada masa yang akan datang, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya akan sangat tergantung oleh kualitas sumber daya manusia yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus dilaksanakan dengan dilandasi sikap visioner untuk menjawab tantangan masa depan.

Sekolah adalah miniatur masyarakat. Artinya, akan seperti apa kualitas masyarakat pada masa depan; hal itu dapat diprediksi dari

aktivitas pendidikan di sekolah pada saat ini. Untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat dalam abad 21, maka aktivitas pendidikan di sekolah harus lebih banyak menekankan pengembangan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Kegiatan penelitian dan pengembangan harus menjadi aktivitas yang melekat pada kegiatan pendidikan di sekolah.

Untuk menghadapi berbagai kecenderungan dalam abad 21, Nichols (2013) menjelaskan 4 pokok prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan di sekolah, yaitu:

Pertama, kegiatan pembelajaran harus berpusat pada siswa. Siswa harus diposisikan sebagai subyek utama dalam kegiatan pembelajaran. Siswa harus didorong untuk mampu mengembangkan minat dan berbagai potensi yang dimilikinya. Dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang akan membantu para siswa agar mampu mengaitkan berbagai pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan berbagai pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya. Guru juga akan lebih banyak berperan sebagai pembimbing yang akan membantu siswa mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada siswa akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memaksimalkan proses kegiatan belajarnya. Dengan kata lain, siswa akan lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya. Para siswa akan menyadari bahwa keberhasilan belajarnya akan lebih banyak ditentukan oleh dirinya sendiri. Siswa akan didorong untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Kelak, sikap mandiri para siswa ini menjadi hal yang sangat berharga ketika mereka berinteraksi dalam kehidupan masyarakat global.

Kedua, pembelajaran harus mendorong kemampuan siswa untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, para siswa harus sejak dini dibiasakan untuk mampu berkolaborasi dengan teman-temannya di sekolah. Dengan berkolaborasi, para siswa akan dibiasakan untuk menghadapi berbagai perbedaan pemikiran. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membiasakan siswa agar bersikap terbuka terhadap berbagai kecenderungan yang terjadi di luar dirinya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, juga memberikan kesempatan yang luas kepada para siswa untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya dari berbagai belahan dunia. Keterbukaan terhadap dunia di luar dirinya menjadi modal penting dan dibutuhkan

oleh para siswa kelak pada saat mereka harus hidup dalam lingkungan masyarakat global.

Ketiga, pembelajaran yang dikembangkan di sekolah harus bersifat kontekstual. Pembelajaran yang diikuti oleh para siswa akan semakin bermakna bila dikaitkan dengan berbagai kecenderungan terbaru yang berkembang di masyarakat. Upaya guru untuk mengaitkan aktivitas pembelajaran dengan berbagai permasalahan di masyarakat akan membuat kegiatan belajar menjadi lebih riil, tidak abstrak, dan mudah dipahami oleh para siswa. Melalui pembelajaran kontekstual, para siswa diajarkan untuk memiliki kepekaan dengan berbagai permasalahan yang sedang terjadi di lingkungannya. Pembelajaran kontekstual benar-benar diarahkan untuk menyiapkan para siswa agar kelak lebih siap untuk hidup di masyarakat global dengan berbagai problematika yang menyertainya. Para siswa juga akan dibiasakan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap hidupnya terkait dengan apa yang sedang dipelajarinya.

Keempat, kegiatan pembelajaran seyogianya terintegrasi dengan lingkungan masyarakat. Untuk mempersiapkan para siswa agar kelak mampu tampil sebagai insan yang siap hidup dalam komunitas global, maka kegiatan pembelajaran juga harus dikaitkan dengan lingkungan sosialnya. Pembelajaran akan bermakna, apabila apa yang dipelajari para siswa di sekolah dapat diaplikasikan di masyarakat. Untuk itu, sekolah dapat mengembangkan pembelajaran berbasis layanan (*service learning*), misalnya dengan mengirimkan siswa untuk terlibat dalam kegiatan di masyarakat. Siswa dapat terlibat pada berbagai program bidang pendidikan, kegiatan sosial, pelestarian lingkungan hidup, kesehatan, kesenian, dan keagamaan yang ada di masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan para siswa untuk membangun jejaring dengan komunitas global yang diarahkan untuk mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini juga diyakini akan membantu kesiapan dini para siswa untuk kelak segera bisa menjadi bagian dari komunitas global.

Kegiatan pembelajaran dalam era yang bergerak dengan sangat cepat harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar sebanyak mungkin. Sebagaimana diingatkan oleh Bapak Teknologi Indonesia, BJ Habibie; peserta didik yang hanya belajar dari buku teks tidak akan memberikan pengalaman belajar yang mendalam. Pengalaman belajar hanya akan didapatkan jika

seseorang menjalani aktivitas dari apa yang dipelajari dari buku teks. Dengan kata lain, belajar dalam era sekarang tidak cukup untuk mencari pemahaman saja. Memahami sesuatu sesungguhnya merupakan tujuan antara, yang harus dilanjutkan dengan aktivitas mengaplikasikan dalam kehidupan dari apa yang sudah dipahami. Gabungan antara memahami apa yang dipelajari, dan kemampuan menerapkan dalam kehidupan dari apa yang sudah dipahami akan membentuk sikap dan karakter positif. Inilah prinsip belajar tuntas yang harus dipedomani oleh siapa pun yang terlibat dalam aktivitas pendidikan, terutama dikaitkan dengan kecenderungan dalam berbagai bidang kehidupan yang berubah dan bergerak dengan sangat cepat.

Abad 21 ditandai dengan kehidupan masyarakat di dunia yang semakin menyatu, sehingga memungkinkan semua warga antar negara untuk saling berinteraksi dan bertransaksi. Hal ini menuntut semua warga untuk memiliki bekal pengetahuan dan kecakapan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat global. Untuk itu, berbagai institusi pendidikan dituntut untuk benar-benar memberikan bekal pengetahuan dan kecakapan kepada para peserta didik, agar kelak setelah selesai menempuh studi dapat dihasilkan lulusan yang kompeten untuk bisa hidup dalam pergaulan masyarakat global.

Dalam rangka untuk mempersiapkan para peserta didik untuk bisa akses dalam era global, *Partnership for 21st skills* (2008) telah merangkum berbagai mata pelajaran inti dan berbagai tema pembelajaran yang direkomendasikan untuk diperkuat dalam kegiatan pembelajaran.

C. Mata Pelajaran Utama dalam Abad 21

Pelajaran utama yang direkomendasikan untuk mendapatkan penguatan dalam pembelajaran di sekolah dalam era mendatang meliputi: (1) Bahasa Inggris, kemampuan membaca, dan menggunakan bahasa dan seni, (2) penguasaan bahasa asing yang dipergunakan dalam interaksi masyarakat global. Hal ini lazimnya dikaitkan dengan bahasa asing dari negara yang potensi kekuatan ekonominya besar, seperti Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Jerman, dan tentu saja Bahasa Inggris. Penguasaan terhadap berbagai bahasa asing akan memungkinkan siapa saja untuk lebih bisa terlibat dalam kegiatan transaksi ekonomi dengan berbagai negara berkekuatan ekonomi besar, (3) Seni, (4) matematika, (5) ekonomi, (6) ilmu pengetahuan alam, (7) geografi, (8) sejarah, (9) pemerintahan dan ketatanegaraan (Fadel, 2018).

Berbagai pelajaran inti sebagaimana disebutkan sangat dibutuhkan oleh para peserta didik agar kelak lebih memiliki kesiapan untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan kehidupan masyarakat global. Penguasaan di bidang seni, misalnya; sangat diperlukan untuk membekali peserta didik agar lebih terbiasa untuk berperilaku keluwesan dan fleksibel. Hal ini sangat dibutuhkan ketika seseorang harus melakukan negosiasi dengan pihak lain.

Penguatan dalam bidang matematika dan ekonomi sangat dibutuhkan ketika seseorang harus membaca berbagai peluang usaha dan membuat prediksi tentang potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Penguatan dalam bidang ilmu pengetahuan alam, geografi, sejarah dan pemerintahan dan ketatanegaraan sangat dibutuhkan agar seseorang memiliki kemampuan untuk melihat potensi masyarakat yang bisa dikembangkan dengan memperhatikan dimensi geografis, kesejarahan, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di berbagai negara.

D. Tema-Tema Pembelajaran dalam Abad 21

Berbagai tema pembelajaran yang direkomendasikan oleh *Partnership for 21st skills* (2008) untuk dikembangkan di sekolah meliputi: (1) kesadaran sebagai warga masyarakat global, (2) Literasi bisnis dan finansial, (3) literasi ekonomi, (4) literasi kewirausahaan, (5) literasi media informasi dan, (7) literasi teknologi informasi.

1. Kesadaran Sebagai Warga Masyarakat Global

Kesadaran sebagai warga masyarakat global perlu terus diperkuat di kalangan peserta didik, karena mereka adalah generasi penerus yang akan mewarnai kehidupan masyarakat global. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh masyarakat global. Institusi pendidikan harus mengembangkan kurikulum pendidikan yang linear dengan berbagai isu dan tantangan dalam kehidupan masyarakat global yang terus bergerak dan berubah dengan sangat cepat. Salah satu kecakapan utama yang harus dipersiapkan oleh para peserta didik adalah bagaimana mereka harus benar-benar menjadi manusia pembelajar, yang ditandai dengan kemampuan untuk terus menerus belajar, memperbaharui ketrampilan dan kecakapan sesuai dengan tantangan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat global. Kemampuan bertindak proaktif, inovatif, dan kreatif merupakan kemampuan yang akan terus dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat global yang berubah dengan sangat cepat.

2. Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan pengetahuan dan kecakapan yang digunakan untuk memahami risiko keuangan, dan sebagai dasar membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penekanan mengenai pentingnya inklusi finansial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari literasi finansial. Seseorang dengan tingkat literasi finansial yang baik ditunjukkan dengan kemudahan dalam mengakses bidang keuangan (<http://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/buku-literasi-finansial/>). Sedangkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well being*) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi (<https://www.wartaekonomi.co.id/read220393/apa-itu-literasi-keuangan.html>).

Dalam kehidupan era global yang menyatu, seseorang yang memiliki literasi keuangan yang baik akan memungkinkannya untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan hidupnya. Generasi masa depan harus memiliki literasi keuangan agar ia tidak mudah tertipu, mudah tergiur dengan iming-iming keuangan dengan cara-cara yang tidak rasional. Hingga saat ini masih banyak orang yang tergiur untuk kaya mendadak melalui cara yang tidak masuk akal. Kesejahteraan dalam bidang keuangan hanya bisa dilakukan dengan pengelolaan keuangan yang rasional dan dibarengi dengan upaya bekerja dengan keras.

3. Literasi Ekonomi

Menurut Mathews (1999), literasi ekonomi adalah merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai konsep ekonomi dan mengembangkan kemampuan berpikir ekonomi, serta menggunakannya sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan. Seseorang yang memiliki literasi ekonomi akan lebih mampu untuk membuat berbagai keputusan ekonomi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga akan lebih mampu melihat berbagai peluang usaha, dan mampu

memanfaatkan peluang itu untuk dijadikan dasar melaksanakan kegiatan usaha. Secara spesifik, Mathews (1999) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki literasi ekonomi yang baik akan mampu memahami tentang berbagai indikator ekonomi, seperti pentingnya menabung, mampu membuat skala preferensi atau skala prioritas, tingkat inflasi, dan mampu memahami berbagai risiko usaha dan membaca berbagai peluang usaha.

4. Literasi Kewirausahaan

Seseorang yang memiliki literasi kewirausahaan yang kuat ditunjukkan dengan dimilikinya berbagai perilaku, karakter dan sikap kewirausahaan yang sangat mendukung keputusan seseorang untuk menjadi 'wirausahawan' yang tangguh. Seseorang yang memiliki literasi kewirausahaan memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya kewirausahaan bagi kehidupan dirinya, keluarganya, lingkungan masyarakat, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Literasi kewirausahaan bagi para generasi masa depan harus diperkuat, agar kelak mereka dapat berkontribusi nyata bagi peningkatan kualitas perekonomian suatu bangsa.

5. Literasi Media Informasi

Berkembangnya teknologi digital mempengaruhi hadirnya keterbukaan dan kebebasan dalam mengakses informasi. Teknologi digital ikut memperkuat tumbuhnya media digital, yang ditandai dengan berkembangnya *smartphone* dengan berbagai variannya. Generasi saat ini dan yang akan datang hampir dapat dipastikan tidak dapat melepaskan diri dengan kehadiran *smartphone*. Teknologi digital ini sudah menjadi kebutuhan utama hampir semua lapisan masyarakat.

Berkembangnya teknologi digital sebagai media komunikasi membawa berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dari berkembangnya teknologi digital tentu saja berkaitan dengan penyebaran informasi yang semakin mudah, murah, dan cepat. Harus diakui bahwa media digital telah menciptakan kesejajaran di antara berbagai kelompok sosial dalam hal akses informasi. Semua lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi apa pun yang dibutuhkan.

Pada sisi yang lain, berkembangnya media informasi berbasis teknologi digital menyebabkan berbagai pengaruh negatif. Melalui

media digital, generasi era sekarang tidak sekedar mendapatkan informasi, pengetahuan, dan hiburan; tetapi pada saat yang sama juga bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain. Media digital telah menanamkan berbagai gaya hidup baru, budaya konsumtif, dan lebih gampang meniru model sikap dan perilaku para aktor yang dipopulerkan oleh media digital. Dalam konteks inilah berkembangnya media digital yang kian masif harus diimbangi dengan literasi media. Literasi media informasi diperlukan agar setiap generasi mampu memilih media secara tepat sesuai dengan kebutuhannya, dan mampu membedakan mana konten yang baik dan berguna bagi kehidupannya, dan mana konten sampah yang berpotensi untuk melemahkan potensi dirinya.

6. Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Literasi TIK merupakan prasyarat untuk mengukur kesiapan suatu generasi dalam mengoptimalkan kegunaan TIK untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Kecakapan ini dibutuhkan agar suatu generasi memiliki kesiapan mental dalam menghadapi kehadiran TIK, sehingga dapat memanfaatkannya secara positif dan optimal. Menurut *Ministry of Communication and Information Technology* (2006), seseorang dikatakan sampai pada tahap literasi TIK, jika mampu melalui tahapan berikut: (1) *information literacy*, (2) *computer literacy*, (3) *digital literacy*, dan (4) *internet literacy*.

Salah (2015) yang mengutip berbagai pendapat para ahli menjelaskan *information literacy* adalah kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai bentuk: buku, surat kabar, video, dan CD-Rom. *Digital literacy* adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber yang disajikan dalam perangkat teknologi digital. *Internet literacy* adalah kemampuan menggunakan pengetahuan teoretis dan praktis mengenai internet sebagai media informasi dan komunikasi, termasuk pengambilan informasi melalui perangkat teknologi internet. Dengan demikian literasi TIK merupakan gabungan dari berbagai kemampuan dalam mempergunakan teknologi digital, teknologi internet untuk mengakses berbagai informasi yang tersaji dalam perangkat teknologi digital secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Telematika Indonesia (2004) telah mengembangkan 5 kategori literasi TIK, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Level	Keterangan
0	Jika seseorang sama sekali tidak mengetahui dan tidak peduli tentang pentingnya teknologi informasi untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
1	Jika seseorang pernah memiliki pengalaman satu dua kali, dimana informasi merupakan sebuah komponen penting sebagai sarana pemecahan masalah, dan telah menggunakan teknologi informasi untuk mencari berbagai informasi yang berguna untuk pemecahan masalah.
2	Jika seseorang telah berkali-kali menggunakan teknologi informasi untuk membantu memecahkan masalah sehari-hari, dan telah menggunakan secara berulang-ulang.
3	Jika seseorang telah memiliki standar penguasaan dan pemahaman terhadap informasi maupun teknologi informasi yang diperlukan, dan secara konsisten menggunakan standar tersebut sebagai acuan aktivitas kehidupan sehari-hari.
4	Jika seseorang telah sanggup meningkatkan secara signifikan kinerja aktivitas kehidupan sehari-hari melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5	Jika seseorang telah menganggap teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas hidup sehari-hari, dan secara langsung maupun tidak langsung telah mewarnai perilaku dan budaya hidupnya. Seseorang telah merupakan bagian dari <i>information society</i> .

Selain itu, untuk mempersiapkan generasi dalam memasuki era mendatang juga direkomendasikan berbagai kecakapan yang meliputi: (1) kecakapan berpikir kreatif dan inovatif, (2) Kecakapan berpikir kritis dan kecakapan memecahkan masalah, (3) kecakapan komunikasi dan berkolaborasi. Sedangkan berbagai kecakapan hidup yang diharapkan dimiliki oleh generasi masa depan meliputi: (1) kemampuan bertindak fleksibel dan adaptif, (2) kemampuan

berinisiatif dan mengarahkan diri sendiri, (3) kecakapan untuk hidup dalam komunitas lintas budaya, (4) kemampuan bertindak produktif, dan (5) kepemimpinan dan tanggung jawab.

Berbagai data dan informasi yang tersedia dalam perangkat teknologi digital harus mampu dimanfaatkan oleh generasi mendatang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, berpikir kritis, dan mampu menggunakannya sebagai dasar untuk memecahkan masalah. Kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan kritis dapat dikembangkan melalui penggabungan berbagai data dan informasi untuk menghasilkan cara kerja baru yang lebih baik. Demikian halnya, berbagai data dan informasi yang tersaji dalam teknologi digital dapat digunakan secara kreatif dan kritis sebagai informasi pendukung untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini hanya akan berjalan dengan efektif jika seseorang mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dalam sebuah tim kerja yang kuat. Generasi mendatang sudah tidak lagi hidup dalam era kompetisi yang saling mematikan dan meniadakan. Generasi mendatang harus diajarkan untuk mampu hidup bekerja sama, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, memiliki sikap tanggung jawab, dan mampu berkolaborasi dengan sesama pemilik sumber daya untuk saling memperkuat dan menghidupkan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan lain berupa kecakapan mengarahkan diri sendiri, mengambil inisiatif yang diperlukan untuk memperkuat jalinan kolaborasi.

Kolaborasi dalam sebuah tim kerja akan berjalan kokoh jika didukung oleh para individu yang memiliki kesadaran lintas budaya, menghargai perbedaan pandangan, dan menghargai nilai-nilai yang dikembangkan oleh masing-masing pribadi. Generasi mendatang sebagai bagian dari warga masyarakat global harus memiliki bekal sikap respek yang kuat, agar kehadirannya dapat diterima dengan baik dalam komunitas global. Tanpa kesadaran lintas budaya yang kuat, generasi mendatang pasti akan teralienasi dalam kehidupan dan terkucil dalam lingkup pergaulan global.

Institusi pendidikan dalam era sekarang memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan berbagai kecakapan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat global sebagaimana diuraikan di atas. Untuk itu diperlukan perangkat kurikulum yang lebih berorientasi dengan tantangan kehidupan yang terus berubah cepat dalam

kehidupan masyarakat global. Kurikulum pendidikan harus memiliki sifat yang luwes, dan mudah mengikuti perubahan yang terjadi dalam komunitas global. Sebab bila tidak demikian, dikawatirkan dari institusi pendidikan hanya akan lahir manusia yang terasing dengan kehidupannya dalam era mendatang. Pendapat ini diperkuat oleh Jerald (2009) yang menyatakan bahwa para peserta didik yang mampu mengembangkan berbagai kecakapan yang dibutuhkan oleh masyarakat global, seperti kemampuan mengakses informasi dengan sikap kritis, memecahkan masalah dengan cara-cara yang baru, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi, mampu mengkreasikan berbagai produk atau cara kerja baru, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat; maka mereka inilah yang kelak akan menjadi pemenang dalam kehidupan masyarakat global.

- Bab 2 -

Memperkuat Peran Pendidikan dalam Menghasilkan Manusia Pembelajar

Pendidikan merupakan miniatur masyarakat. Artinya, seperti apakah tampilan masyarakat pada masa depan; hal itu dapat diproyeksikan dari bagaimana kondisi pendidikan yang ada di dalam masyarakat pada saat ini. Dengan kata lain, ada hubungan interdependensi antara pendidikan dan masyarakat. Berbagai negara mampu mewujudkan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi karena ditopang oleh institusi pendidikan yang bermutu. Pemerintah, para pengelola pendidikan, dan para pendidik ditantang untuk mewujudkan aktivitas pendidikan yang berkualitas guna menghasilkan manusia pembelajar, yang ditandai dengan kebiasaan berpikir kreatif, inovatif, selalu terdorong untuk memperbaharui pengetahuan dan teknologi, dan terus mengembangkan kemampuan berkomunikasi sehingga tumbuh keyakinan untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam komunitas global.

Bangsa Indonesia masih dihadapkan berbagai permasalahan terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses terhadap pendidikan, beberapa saat setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. Data *The Global Competitiveness Report 2017-2018* menunjukkan daya akses masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia masih berada pada peringkat terbawah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti: Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Dari 147 negara di dunia, daya akses penduduk di Indonesia terhadap pendidikan dasar berada di peringkat 106, akses terhadap pendidikan menengah

berada di peringkat 85, dan akses terhadap pendidikan tinggi berada di peringkat 91. Hal ini terlihat langsung mempengaruhi kualitas ketenagakerjaan yang terlihat dari dimensi efisiensi ketenagakerjaan di Indonesia yang berada di peringkat 96 dari 137 negara yang diteliti, dan berada di bawah 5 negara ASEAN sebagaimana disebutkan di atas (Schwab, K. (Ed), 2017).

Setidaknya ada tiga permasalahan SDM di Indonesia yang hingga kini menjadi sorotan masyarakat, terutama dari kalangan dunia kerja. Ketiga permasalahan tersebut adalah: *pertama*, tingginya angka pengangguran dari kalangan terdidik; *kedua*, rendahnya spirit *entrepreneurship* dari para lulusan; dan *ketiga*, rendahnya *soft skills*, terutama berkaitan dengan sikap, etika, dan moral kerja. Institusi pendidikan di Indonesia menjadi salah satu pihak yang paling disorot berkenaan dengan rendahnya kualitas SDM. Kualitas pendidikan di Indonesia masih berada di peringkat 71 dari 149 negara di dunia (The Legatum Prosperity Index 2018 12th Edition. Legatum Institute - www.prosperity.com). Dibandingkan dengan 5 negara kawasan ASEAN terpilih, sebagaimana disebutkan di atas; kualitas pendidikan di Indonesia juga masih berada di peringkat di bawah Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

Tingginya angka pengangguran, terutama dari kalangan terdidik; mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara kurikulum pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Rendahnya spirit *entrepreneurship* dari para lulusan diduga disebabkan oleh aktivitas pendidikan di sekolah atau di bangku kuliah yang terlalu padat pada aktivitas kajian teori, tetapi minim kegiatan praktik. Etika, sikap, dan moral kerja tidak akan dapat terbangun dengan baik apabila aktivitas pendidikan lebih mementingkan kajian teori dan mengesampingkan kegiatan praktik. Berbagai kecenderungan praktik pendidikan yang terlalu padat kajian teoretik diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para lulusan kurang siap dan sigap ketika harus menghadapi dunia kerja. Inilah awal mula terjadinya pengangguran dari kalangan terdidik. Angka pengangguran kelompok lulusan perguruan tinggi bahkan setiap tahun menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.

Beberapa ahli pendidikan menyatakan bahwa pendidikan merupakan miniatur masyarakat. Artinya, seperti apakah tampilan masyarakat pada masa depan; hal itu dapat diproyeksikan dari bagaimana kondisi pendidikan yang ada di dalam masyarakat pada saat

ini. Dengan kata lain, ada hubungan interdependensi antara pendidikan dan masyarakat. Berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga di dunia, seperti UNDP dan WEF membuktikan ada keterkaitan yang erat antara kualitas pendidikan dengan kualitas kehidupan masyarakat suatu negara.

Berbagai data membuktikan berbagai negara mampu mencapai tingkat kemajuan sosial ekonomi karena didukung oleh keberadaan institusi pendidikan yang berkualitas. Data dari Webometric, sebuah lembaga yang mengeluarkan peringkat kualitas pendidikan tinggi di dunia; merilis institusi pendidikan tinggi yang berkualitas ada di negara-negara maju (www.webometrics.info). Hal sebaliknya terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah, masyarakat, para pengelola institusi pendidikan, dan para pendidik harus memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan aktivitas pendidikan yang bermutu, guna menghasilkan SDM yang berkualitas. Apabila semua itu dapat diwujudkan, maka cita-cita untuk mewujudkan kehidupan sosial ekonomi yang maju dan berkembang akan dapat diwujudkan.

A. Pendidikan Bermutu sebagai Sokoguru Kemajuan Bangsa

Pendidikan merupakan sebuah sub sistem dan berkaitan dengan sub sistem lain yang ada di masyarakat. Sebagai sebuah sub sistem, pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan kehidupan masyarakat. Salah satu peran penting pendidikan adalah untuk menyiapkan tenaga terdidik dan terlatih yang dibutuhkan oleh sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Ketika definisi masyarakat menjadi semakin luas spektrumnya, misalnya dengan hadirnya "Masyarakat Ekonomi ASEAN" (MEA); maka institusi pendidikan juga ditantang untuk mampu menghasilkan spesifikasi lulusan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang lebih luas, jauh melintasi batas negara. Singkatnya, pendidikan pada saat ini ditantang untuk selaras dengan berbagai kecenderungan yang berkembang di masyarakat agar mampu menyiapkan SDM yang dibutuhkan masyarakat global.

Para pemimpin dunia yang mampu membawa bangsanya mencapai tingkat kemajuan sosial ekonomi sangat meyakini dalil keterkaitan antara kualitas pendidikan dan tingkat kemajuan masyarakat.

Singapura, Malaysia, dan China adalah merupakan contoh negara yang mampu membangun perekonomian sangat pesat karena ditopang oleh SDM berkualitas yang dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu selalu ditandai dengan berkembangnya kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development, R&D*). Maka penguatan budaya mengkaji, meneliti, dan mengembangkan harus menjadi kegiatan utama dari setiap aktivitas pendidikan.

Harus diakui, alokasi anggaran untuk kegiatan R&D di Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan negara tetangga pesaing utama di kawasan ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sebagai gambaran, anggaran R&D Indonesia pada tahun 2009 hanya sebesar 0,08% dari PDB. Bandingkan dengan Singapura yang mencapai 2,43%, Malaysia sebesar 1,01%, dan Thailand yang sudah menyentuh angka 0,25% dari PDB (www.worldbank.org). Penguatan budaya meneliti dan mengkaji tidak akan terbangun dengan kokoh apabila tidak ada dukungan anggaran yang memadai. Itulah sebabnya publikasi ilmiah hasil kajian, penelitian, dan pengembangan dari para peneliti di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Apabila kita membuka halaman scimago.com terlihat ternyata sangat sedikit jurnal ilmiah dari Indonesia yang terindeks sebagai jurnal bereputasi di tingkat global.

Pendidikan yang bermutu juga ditandai dengan kemampuannya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki spirit *entrepreneurship* dengan ditopang oleh berbagai kecakapan *soft skills* yang kuat. Oleh karena itu, pengembangan *entrepreneurship* dan kecakapan *soft skills* harus melekat dalam aktivitas pembelajaran pada berbagai jenjang pendidikan. Inilah salah satu tantangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang selama ini cenderung hanya fokus pada pengembangan aspek kognisi, dan kurang menyentuh pengembangan konasi dan afeksi para peserta didik. Hal ini berpengaruh pada *entrepreneurial attitudes* dari para lulusan pendidikan di Indonesia jauh berada di belakang Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina (Acs, et al, 2018). Itulah sebabnya peringkat budaya kewirausahaan Indonesia juga tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

Pada saat ini, proporsi jumlah wirausahawan dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia masih sangat kecil, berada pada kisaran 3%; dan jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura yang

sudah menyentuh angka 7,2%, serta Malaysia dan Thailand masing-masing sebesar 4% dan 4,1%. Hal ini berdampak pada buruknya kualitas perekonomian Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, sebagaimana tampak pada tabel 1. Data sebagaimana dipaparkan pada tabel 1 menunjukkan peringkat kewirausahaan dan peluang kerja di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Ada hubungan interdependensi antara spirit kewirausahaan dengan terciptanya peluang kerja.

Tabel 1. Peringkat Kualitas Perekonomian Indonesia dan Beberapa Negara ASEAN Tahun 2018 (Dari 149 Negara di Dunia)

Negara	Kualitas Perekonomian	Kualitas Pendidikan	Indeks Kewirausahaan*)
Singapura	2	3	27
Malaysia	22	41	58
Thailand	34	70	71
Vietnam	47	51	87
Phillipina	57	60	84
Indonesia	50	71	94

Sumber: The Legatum Prosperity Index 2018 12th Edition. Legatum Institute. www.prosperity.com

*) Sumber: Acs, Z.J.; Szerb, L.; Lloyd. 2018. The Global Entrepreneurship Index 2018. (peringkat dari 137 negara)

Peluang kerja akan dapat dikreasikan dengan memperkuat spirit kewirausahaan. Peluang kerja dan spirit kewirausahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas pertumbuhan dan kualitas aktivitas ekonomi. Spirit kewirausahaan yang kuat akan membuat pertumbuhan akan lebih *sustainable* dan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih berkualitas. Sudah bukan rahasia bahwa kegiatan ekonomi kita masih banyak pada kegiatan mengeksploitasi alam, yang berdampak pada terdegradasinya kualitas lingkungan alam. Lihatlah, bagaimana kegiatan pembakaran dan penjarahan hutan serta bahan tambang di Indonesia menjadi isu global yang nyaris tidak ada habisnya.

Oleh karena itu, berbagai negara di dunia terus berupaya memperkuat peran pendidikan sebagai motor penggerak pengembangan budaya wirausaha. Untuk bisa mencapai tingkat kemampuan ekonomi yang kuat, para pemimpin Singapura menargetkan setidaknya 5% dari penduduk harus memiliki jiwa wirausaha yang tangguh. Untuk mewujudkan angan-angan tersebut, pendidikan kewirausahaan dikembangkan dengan sangat serius oleh para perancang pendidikan Singapura. Kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan menekankan pada aktivitas kajian, penelitian, dan pengembangan. Pengembangan kreativitas dan inovasi akan lahir melalui budaya riset dan pengembangan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki jiwa wirausaha yang tangguh inilah terbukti Singapura bisa tampil sebagai sebuah negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang sangat besar.

Malaysia, yang kini juga mulai tampil sebagai negara maju dengan dukungan kemampuan ekonomi yang kuat; juga diawali dengan membangun, memperkuat, dan mengembangkan budaya kewirausahaan melalui pendidikan. Untuk tujuan itu, bahkan Pemerintah Malaysia pada masa lampau tidak malu dan ragu untuk meminjam para guru dari Indonesia. Hasilnya, tidak sampai dalam tiga dasawarsa Malaysia mulai tampil sebagai negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang dapat diandalkan. Hal yang sama juga dilakukan oleh China, yang mengejar ketertinggalan negaranya dengan jalan membangun pendidikan yang berkualitas, dan dapat diakses seluas-luasnya oleh warganya. Semua orang tahu, kemampuan China untuk menyediakan SDM yang bermutu pada saat ini terbukti ikut mendukung ledakan pertumbuhan ekonomi yang ada di sana. Jauh sebelum itu, Jepang yang akhir abad 19 masih menjadi bangsa yang tertutup berusaha membangun bangsa melalui gerakan Restorasi Meiji dengan mendatangkan para cerdik pandai dari negara-negara Eropa. Pendidikan bermutu yang dapat diakses oleh semua warga menjadi *key point* yang tidak dapat diganggu gugat.

Gambaran di atas adalah merupakan bukti dari kebenaran *statement* bahwa “Pendidikan merupakan miniatur masyarakat”. Artinya, seperti apakah gambaran masyarakat pada masa depan, dapat diproyeksikan dari aktivitas pendidikan yang ada di sebuah negara pada saat ini. Sebagai sebuah miniatur masyarakat, maka aktivitas pendidikan dituntut untuk selalu dekat dengan berbagai kecenderungan yang terjadi di masyarakat. Salah satu kecenderungan di masyarakat

yang harus kita hadapi bersama pada era sekarang adalah adanya perubahan masyarakat dengan tingkat kecepatan yang sangat dahsyat (*mega speed*).

Sejak jauh hari, kajian Barkema, *et.al* (2002) merekomendasikan bahwa perubahan masyarakat yang sangat cepat akan memicu tingkat persaingan menjadi kian ketat, dan pada tataran berikutnya menuntut semua orang untuk bisa membuat keputusan secara cepat, tepat, cepat belajar, dan cepat mengembangkan inovasi baru. Berbagai kecenderungan baru sebagai dampak dari perubahan yang sangat cepat inilah yang menyebabkan umur produk, baik berupa barang dan jasa; menjadi kian pendek. Pengetahuan dan kecakapan pun juga menjadi tampak cepat usang dan perlu untuk terus diperbaharui. Berbagai kecenderungan pada kehidupan masyarakat yang terus berubah ini harus menjadi landasan utama dalam kegiatan pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Artinya, para peserta didik harus sejak dini dibiasakan untuk membaca, mengkaji, mengamati, mengembangkan, mengaitkan antar fakta, memperbaharui, dan mengkreasikan sesuatu.

Berbagai kecenderungan baru beserta dampak ikutannya tersebut harus menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan, pengelola, dan pelaku pendidikan di Indonesia. Sebab bila tidak dijadikan perhatian, maka dikhawatirkan hal itu akan membuat pendidikan di Indonesia akan semakin tertinggal dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Semakin tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi yang menganggur sesungguhnya juga menjadi sinyal yang kuat bahwa praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus lebih cepat menyesuaikan dengan berbagai kecenderungan yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, pendidikan di Indonesia cenderung menghasilkan lulusan dengan kualifikasi ilmu dan kecakapan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Kualifikasi keilmuan dan kecakapan para lulusan yang tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat oleh Barkema, *et.al*. (2000) dikatakan sebagai lulusan yang usang.

Salah satu ciri lulusan yang usang ditandai dengan ketidakmampuannya untuk menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Berbagai peluang usaha dan peluang kerja yang ada tidak mampu dimanfaatkannya dengan baik. Bagaimana posisi SDM kita dibandingkan dengan negara tetangga dalam hal kesiapan menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Peringkat Kesiapan Menghadapi Perubahan dan Memanfaatkan Peluang

Indikator	Negara				
	Indonesia	Singapura	Malaysia	Thailand	Vietnam
Kemampuan Industri	38	1	23	16	77
Kapabilitas Usaha Bisnis	27	1	13	12	70
Kapabilitas Pemerintah	50	1	33	23	79
Pasar Tenaga Kerja	47	1	3	17	14
Inovasi, R&D	28	2	16	38	89
Lingkungan Bisnis	49	1	16	24	82
Kapabilitas penduduk	40	5	27	30	64

Sumber: 2013 Change Readiness Index, dalam <http://www.kpmg.com/global>

Data-data pada tabel 2 menunjukkan kemampuan SDM Indonesia dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Untuk indikator pasar tenaga kerja, Indonesia bahkan tertinggal dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Peringkat pasar tenaga kerja yang rendah jelas mengindikasikan tertinggalnya kualitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara tetangga. Data-data ini dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengevaluasi apakah aktivitas pendidikan di Indonesia sudah relevan dengan tuntutan perkembangan masyarakat global.

B. Manusia Pembelajar

Agar dapat menghasilkan lulusan yang selalu selaras dengan perkembangan masyarakat global, maka aktivitas pendidikan di Indonesia harus dirancang untuk mengantarkan para peserta didik

sebagai *manusia pembelajar*. Para manusia pembelajar ditandai dengan kemampuannya untuk membaca berbagai kecenderungan baru yang berkembang di masyarakat. Mereka akan mampu mengikuti tren dan selera pasar. Mereka akan terdorong untuk terus berkreasi dan berinovasi yang didasarkan pada hasil kajian, pengamatan, penelitian, dan pengembangan. Singkatnya, para manusia pembelajar adalah mereka yang mampu bersikap proaktif, sehingga melalui karyanya; mereka akan mampu menjadi *market leader*.

Untuk menghasilkan lulusan berpredikat *manusia pembelajar*, institusi pendidikan harus mampu menjadi lahan yang subur bagi berkembangnya aktivitas membaca, mengkaji, mengamati, meneliti, dan mengembangkan konsep atau produk pemikiran dari para peserta didiknya. Peserta didik tidak cukup hanya didorong untuk "*belajar tentang*", tetapi ia juga harus dibiasakan untuk "*belajar menjadi*". Seorang peserta didik dikatakan telah tuntas belajar (*mastery*) tidak cukup hanya dilihat dari kemampuannya untuk *mengungkapkan sesuatu*, tetapi juga akan dilihat dari kemampuannya untuk *menjalankan sesuatu*. Keberhasilan belajar peserta didik tidak cukup hanya dilihat dari kemampuannya *menyebutkan* sebuah ajaran, tetapi juga harus dilihat apakah ia mampu *menjalani* sebuah ajaran.

Harus diakui, sebagian besar aktivitas pendidikan di Indonesia, di berbagai jenjang pendidikan; masih didominasi dengan aktivitas "*belajar tentang*", dan belum dominan dengan aktivitas "*belajar menjadi*". Kegiatan pendidikan didominasi dengan aktivitas mengangankan atau membayangkan sesuatu, dan belum sungguh-sungguh mendorong peserta didik untuk berupaya mewujudkan apa yang diangankan dan dibayangkan. Akibatnya, banyak dijumpai para lulusan yang fasih berbicara tentang sesuatu, tetapi tidak fasih melaksanakan sesuatu. Mungkin karena hal ini, konon banyak orang di negeri ini yang piawai membuat peraturan tetapi sulit untuk melaksanakannya dengan konsisten.

Aktivitas pendidikan di Indonesia di berbagai jenjang pendidikan harus dirancang untuk mengantarkan lahirnya *manusia pembelajar*, yang ditandai dengan kemauan dan kemampuan yang kuat untuk terus meng-*update* pengetahuan, teknologi, dan kecakapan yang dibutuhkan dan berlaku di masyarakat. Dengan dilandasi sikap tersebut, *manusia pembelajar* akan mampu menghasilkan karya inovatif dan kreatif. Ia akan memiliki energi yang cukup untuk berkreasi tiada

henti, berkekrativitas tanpa batas, terus meng-*update* pengetahuan, teknologi, dan kecakapan, serta berupaya untuk memperluas dan mengembangkan jejaring.

Dalam era persaingan yang kian ketat, tugas utama institusi pendidikan adalah menghasilkan SDM yang inovatif dan kreatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Suyanto (2015), keunggulan negara dalam era MEA sebagian besar akan ditentukan oleh SDM yang inovatif dan kreatif, mampu membangun jejaring, dan menguasai pengetahuan dan teknologi terkini. Selanjutnya dikatakan oleh Suyanto (2015), kreativitas dan inovasi, kemampuan membangun jejaring, dan penguasaan pengetahuan dan teknologi masing-masing memberikan kontribusi bagi keunggulan negara sebesar 45%, 25%, dan 20%.

Bagaimana kualitas SDM Indonesia dilihat dari berbagai indikator sebagaimana diungkapkan? Tabel berikut ini menjelaskan posisi kualitas SDM Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.

Tabel 3. Peringkat Global Innovation Index

Negara	Skor (0-100)	Rasio Efisiensi	Ranking Dunia	Ranking Asia Pasifik
Singapura	59,24	0,61	7	1
Hongkong	56,82	0,66	10	2
Malaysia	45,60	0,74	33	8
Thailand	39,28	0,76	48	9
Vietnam	34,89	0,95	71	11
Indonesia	31,81	0,96	87	12

Sumber: The Global Innovation Index 2014: The Human Factor in Innovation

Berdasarkan tabel 3, terlihat kemampuan berinovasi SDM Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Belum kuatnya budaya inovasi terbukti juga berkaitan dengan budaya kreasi. Tabel 4 memaparkan kemampuan kreativitas SDM Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.

Dari indikator kreativitas, SDM Indonesia juga tampak tertinggal bila dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Talenta dan kemampuan memanfaatkan teknologi

orang Indonesia juga tertinggal bila dibandingkan dengan negara tetangga. Berbagai data tentang kualitas SDM tersebut memberikan indikasi tertinggalnya kualitas pendidikan Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini diperkuat dengan laporan UNDP tahun 2013 tentang peringkat indeks pendidikan Indonesia yang masih berada pada posisi 108, tertinggal dengan Singapura (9), Brunei Darusalam (30), Malaysia (62), dan Thailand (89) (www.hdr.undp.org/education).

Tabel 4. Peringkat Global Creativity Index

Negara	Indeks Kreativitas	Indeks Talenta	Pemanfaatan Teknologi
Singapura	1	3	11
Malaysia	40	50	54
Filipina	59	64	52
Thailand	68	56	64
Vietnam	74	78	68
Indonesia	76	80	74

Sumber: Florida, et al (2011)

Tertinggalnya kemampuan berinovasi, berkreasi, dan pemanfaatan teknologi informasi berdampak langsung pada kualitas aktivitas ekonomi, budaya wirausaha, dan peluang kerja. Kualitas aktivitas ekonomi Indonesia berada pada peringkat 44. Bandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura (1), Malaysia (17), Thailand (13), Vietnam (40), dan Filipina (43). Budaya wirausaha dan peluang kerja di Indonesia juga baru berada pada peringkat 80. Bandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura (14), Malaysia (36), Thailand (53), Vietnam (78), dan Filipina (70) (www.prosperity.com/rankings.aspx).

Institusi pendidikan di Indonesia harus ikut bertanggung jawab terhadap tertinggalnya kualitas SDM Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga. Tugas utama setiap institusi pendidikan, terlebih dengan hadirnya era persaingan yang kian ketat; sesungguhnya adalah untuk melahirkan *manusia pembelajar*. Untuk mewujudkan misi mulia tersebut, setiap institusi pendidikan harus merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mendorong tumbuhnya kebiasaan untuk

berpikir kreatif, inovatif, selalu terdorong untuk memperbaharui pengetahuan dan teknologi, dan terus mengembangkan kemampuan berkomunikasi sehingga tumbuh keyakinan untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam komunitas global. Pada era global, institusi pendidikan tidak hanya ditantang untuk menghadirkan SDM yang mampu membaca teks, tetapi juga harus mampu membaca konteks untuk menemukan makna dari sebuah kecenderungan yang sedang terjadi. Dengan bahasa senada, Suyanto (2015) yang mengutip pendapat Tofler menyatakan bahwa “*the illiterate of the 21st century will not be those who can not read dan write, but those who can not learn, unlearn, and relearn*”. Dengan merujuk pendapat Tofler, maka misi utama setiap institusi pendidikan untuk menghadirkan manusia pembelajar merupakan *condition sine qua non!*

C. Pembelajaran yang Membelajarkan

Kegiatan pembelajaran seperti apakah yang harus dikembangkan oleh setiap institusi pendidikan agar mampu menghadirkan *manusia pembelajar*? Pendekatan *scientific* yang menjadi ciri khas dari K13 sebenarnya layak untuk diterapkan pada setiap institusi pendidikan yang bermaksud untuk menghasilkan *manusia pembelajar*. Konsep *pendekatan scientific* itu sendiri sebenarnya bukan hal yang baru. Pada akhir tahun 1980-an kegiatan pembelajaran di Indonesia ramai dengan pembicaraan tentang konsep cara belajar siswa aktif (CBSA), yang dimaksudkan untuk membuat siswa aktif belajar. Artinya kegiatan pembelajaran saat itu diarahkan untuk membuat siswa aktif mencari, menemukan, dan mencoba apa yang sedang dipelajari. Tetapi sayang konsep CBSA yang sebenarnya bagus kemudian dipelesetkan dengan akronim *catat buku sampai abis*, sebuah pelesetan yang menggambarkan ketidaksungguhan dunia pendidikan pada saat itu untuk menghadirkan kegiatan pembelajaran yang bermakna (*meaningful learning*).

Dalam Kurikulum 2013 dikenal dengan pendekatan *scientific*, yang sampai saat ini masih terus menjadi kontroversi seiring dengan adanya perubahan politik kekuasaan. Sebagaimana CBSA pada masa lalu, *pendekatan scientific* juga dimaksudkan untuk menghadirkan aktivitas pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa untuk belajar. Pendekatan ini paling tidak dilaksanakan dengan tiga model pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*), dan

pembelajaran dengan penemuan (*discovery learning*). Pendekatan *scientific* menekankan pada lima aktivitas utama yang harus dijalankan oleh siswa bersama para pendidiknya, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan (5M).

Secara teoritik, *pendekatan scientific* sesungguhnya dapat digunakan sebagai instrumen untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, karena peserta didik tidak hanya disibukkan dengan aktivitas menghafalkan teori sebagaimana tercantum dalam buku teks. Kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, kebiasaan untuk meng-*update* pengetahuan dan teknologi, dan keberanian untuk mengkomunikasikan ide-ide baru dapat dikembangkan melalui model pembelajaran penemuan, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek yang didukung dengan aktivitas 5M. Tetapi sayang, bangsa kita tampaknya sedang terjankit “sindrom ketidaksempurnaan”, sehingga munculnya berbagai permasalahan yang mengiringi implementasi K13 digunakan sebagai justifikasi untuk menyatakan bahwa K13 tidak layak untuk dilaksanakan. Penundaan, atau bahkan peniadaan K13 untuk selanjutnya diganti dengan kurikulum apa pun namanya; bagi penulis tidak terlalu penting, sepanjang hal itu tidak diikuti dengan pembuangan pendekatan pembelajaran yang diyakini mampu mendorong lahirnya *manusia pembelajar*.

Para pendidik pada berbagai jenjang pendidikan seyogianya jangan terlalu sibuk dan ribut dengan pekerjaan administratif, yang justru membuat mereka tidak memiliki waktu dan energi yang cukup untuk melaksanakan pembelajaran yang bermakna (*meaningful learning*), guna mendorong lahirnya manusia-manusia pembelajar. Para pendidik jangan *lebay* dengan ikut terlibat dalam alunan paduan suara pro dan kontra terhadap kehadiran K13. Para pendidik jangan takut dengan rumitnya administrasi kegiatan pembelajaran, karena tugas utama mereka bukan pada ranah administratif; tetapi pada aktivitas membangkitkan minat, memancing rasa ingin tahu, dan mendorong keberanian peserta didik untuk mengemukakan pikiran atas persoalan yang sedang dipelajari.

Para pendidik tidak boleh lupa, bahwa tugas utama mereka adalah untuk *membuka pintu hati* peserta didik agar tumbuh minat, perhatian, dan “rasa cinta” terhadap materi yang sedang dipelajari. Untuk menuju level itu, kegiatan pembelajaran tidak bisa lagi

dilaksanakan sebagaimana layaknya *business as usual*, melalui ceramah oleh para pendidik di dalam kelas. Para pendidik jangan sampai lupa, bahwa dalam era sekarang aktivitas pendidikan tidak lagi identik dengan kegiatan belajar di sekolah atau bangku kuliah. Pada era sekarang, para peserta didik dapat mengakses informasi melalui *virtual school* atau *virtual campus* seiring dengan berkembangnya perangkat IT. Informasi pengetahuan dan teknologi yang menjadi bahasan dalam suatu materi pelajaran sudah terpampang dan tersaji dalam perangkat IT. Tugas pendidik adalah membangkitkan minat peserta didik agar mampu merangkai antar informasi, sehingga aktivitas pembelajaran yang dikembangkannya dapat menumbuhkan kemampuan berkreasi dan berinovasi.

Tugas para pendidik dalam era sekarang berubah, dari padat kegiatan ceramah untuk membuat sebuah deskripsi, menuju padat kegiatan untuk menampilkan peristiwa dan fakta agar peserta didik memperoleh sebuah inspirasi. Dengan demikian para pendidik ditantang untuk mampu menjadi inspirator pembelajaran. Bila kegiatan pembelajaran dapat dikembangkan dengan baik oleh para pendidik, yakinlah bahwa sesungguhnya (dalam era sekarang) para peserta didik memiliki energi dan sumber informasi yang melimpah untuk belajar mengembangkan diri, kreasi, dan inovasi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik harus diarahkan agar memiliki kesiapan dini untuk hidup dalam lingkungan masyarakat yang kian mengglobal dan kompetitif. Para peserta didik harus memiliki berbagai kecakapan belajar, yang meliputi kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berkolaborasi, dan berkomunikasi. Peserta didik harus dipersiapkan untuk memiliki kecakapan literasi dalam pemanfaatan informasi, media, dan teknologi. Peserta didik juga harus memiliki berbagai kecakapan hidup, yang meliputi kemampuan berpikir fleksibel, penuh inisiatif, kecakapan sosial, produktif, dan memiliki jiwa kepemimpinan (<http://thoughtfullearning.com/resources>). Untuk *eksis* dalam abad 21, maka para peserta didik harus memiliki bekal berbagai kecakapan dasar, meliputi: kepemimpinan, mampu menggunakan teknologi digital, mampu berkomunikasi dalam komunitas global, memiliki kecerdasan emosi yang kuat, memiliki jiwa wirausaha, memiliki kesadaran sebagai bagian dari masyarakat global, mampu memecahkan masalah,

dan mampu bekerja dalam tim. Para pendidik harus mengkreasikan kegiatan pembelajaran agar para peserta didik dapat mengembangkan berbagai kecakapan dasar tersebut.

Berbagai model dan kegiatan pembelajaran yang melekat pada K13 sesungguhnya dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai kecakapan dasar tersebut. Penerapan model pembelajaran kooperatif dengan berbagai variasi model yang ada, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran dengan penemuan; sesungguhnya dapat diterapkan untuk memancing tumbuhnya jiwa kepemimpinan, membangun kemampuan berkomunikasi, memperkuat kecerdasan emosi, mengasah kemampuan memecahkan masalah, memperkuat jiwa wirausaha, dan membiasakan diri untuk bekerja dalam tim. Kepekaan, kemampuan berpikir, kemampuan berkreasi dan berinovasi, serta keberanian untuk mengkomunikasikan pikiran dapat dikembangkan melalui kegiatan 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan).

Melalui kegiatan pengamatan, para peserta didik akan dibiasakan untuk mengasah kepekaan terhadap berbagai fenomena yang ada dilingkungan kehidupannya, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Dengan melakukan pengamatan, para peserta didik akan dibiasakan untuk membuat analisis dari sebuah fenomena yang sedang terjadi. Dengan demikian para peserta didik tidak sekedar sibuk menghafal atau mengkhayalkan sebuah teori, tetapi melalui kegiatan pengamatan, para peserta didik didorong untuk mampu membangun pemahaman secara mandiri di bawah bimbingan para pendidik.

Para peserta didik juga harus dipertajam kemampuannya untuk mempertanyakan suatu teori, konsep, atau sebuah fenomena. Perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecakapan yang sangat cepat dapat menjadi sebuah jebakan apabila para peserta didik tidak dibiasakan untuk bersikap kritis. Sebagaimana dikemukakan oleh Barkema, *et al* (2002) perubahan yang sangat cepat dapat membuat orang yang merasa unggul menjadi *shock*, karena di belahan dunia yang lain ternyata ada orang yang jauh lebih unggul. Karena itu, dalam era sekarang para peserta didik harus dibiasakan untuk mempertanyakan keabsahan teori dan informasi yang sedang dipelajarinya. Dari kebiasaan untuk mempertanyakan sesuatu, maka para peserta didik akan terdorong untuk terus memperbarui pengetahuan dan kecakapan yang sudah dikuasainya. Singkatnya, aktivitas pembelajaran yang membiasakan

para peserta didik untuk mempertanyakan sesuatu akan dapat membuat penampilan mereka selalu tampak *trendy*, tidak ketinggalan jaman.

Karya inovatif dan kreatif hanya akan dapat lahir melalui aktivitas mencoba, *trial and error*. Para peserta didik harus dibiasakan untuk akrab dengan kegagalan dari sebuah percobaan, sebagaimana kisah Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar (www.swearersparks.org). Selama ini, banyak peserta didik yang tidak berani mencoba melakukan suatu aktivitas karena takut dengan kegagalan. Maka muncul budaya aneh yang mengakar kuat pada institusi pendidikan di Indonesia: menertawakan atau menyoraki temannya yang mengalami kegagalan dalam sebuah proses aktivitas percobaan. Kesalahan dalam proses percobaan sering kali lebih dijadikan sorotan dibandingkan dengan ikhtiar dan keberanian peserta didik untuk mencoba melakukan sebuah tindakan. Hal inilah yang menyebabkan para peserta didik pada berbagai institusi pendidikan di Indonesia umumnya bersifat pasif. Mereka lebih memilih sebagai penonton daripada menjadi aktor dalam proses percobaan. Inilah tantangan bagi para pendidik untuk membiasakan para peserta didik agar berani mencoba.

Melalui kegiatan pembelajaran, para peserta didik akan diasah kemampuannya untuk menalar (*reasoning*). Inilah salah satu aktivitas utama pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan rasio para peserta didik, agar kelak mereka dapat tampil sebagai sosok yang rasional. Martabat kemanusiaan dan kemuliaan para peserta didik akan terangkat apabila mereka mampu berperilaku secara rasional. Para pendidik dapat mengasah kemampuan menalar para peserta didik dengan menggunakan pendekatan deduktif (*deductive reasoning*) maupun secara induktif (*inductive reasoning*) (www.csun.edu/reasoning/index). Dengan mengembangkan kemampuan menalar, para pendidik dapat mengajak para peserta didik untuk menguji keabsahan sebuah teori atau konsep melalui pengamatan suatu peristiwa nyata (*deductive reasoning*). Atau sebaliknya, para pendidik dapat mengajak para peserta didik untuk menginventarisir berbagai peristiwa sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah pemahaman atas suatu konsep atau teori (*inductive reasoning*). Inilah esensi pendidikan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan bernalar para peserta didik, agar kelak mereka tampil sebagai sosok yang rasional.

Dalam lingkungan masyarakat global yang kian menyatu, kemampuan berkomunikasi sangat diperlukan. Kegiatan pendidikan harus memberikan ruang yang cukup bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Pengembangan kemampuan komunikasi diperlukan agar kelak para peserta didik dapat meyakinkan para relasinya. Berbagai ide, pendapat, produk, dan keunggulan dapat disebarluaskan melalui proses komunikasi. Singapura, Malaysia, dan Thailand dikunjungi jutaan turis mancanegara karena kepiawaian mereka dalam berkomunikasi. Indonesia, sebuah negeri yang sangat indah juga dapat menarik jutaan wisatawan bila kita mampu mengkomunikasikan keindahan alam dan budayanya dengan para wisatawan. Ini adalah contoh riil tentang pentingnya institusi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dari para peserta didik, agar kelak mereka dapat menjadi aktor utama dalam relasi pergaulan di dunia global.

Berbagai data dan hasil kajian menunjukkan adanya keterkaitan antara kualitas pendidikan dengan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu semua pihak, mulai pemerintah, masyarakat, pengelola institusi pendidikan, dan para pendidik harus berupaya maksimal untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu ditandai dengan kegiatan pembelajaran yang mampu mendorong para peserta didik untuk menjadi manusia pembelajar. Institusi pendidikan ditantang untuk menghasilkan manusia pembelajar yang ditandai dengan kebiasaan berpikir kreatif, inovatif, selalu terdorong untuk memperbaharui pengetahuan dan teknologi, dan terus mengembangkan kemampuan berkomunikasi sehingga tumbuh keyakinan untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam komunitas global.

Untuk mendukung lahirnya manusia pembelajar, institusi pendidikan dapat mengkreasikan kegiatan pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran dengan penemuan; dan berbagai model pembelajaran lain yang dapat merangsang tumbuhnya jiwa kepemimpinan, membangun kemampuan berkomunikasi, memperkuat kecerdasan emosi, mengasah kemampuan memecahkan masalah, memperkuat jiwa wirausaha, dan membiasakan diri untuk bekerja dalam tim. Kepercayaan, kemampuan berpikir, kemampuan berkreasi dan berinovasi, serta keberanian untuk mengkomunikasikan pikiran dapat dikembangkan melalui

kegiatan pengamatan, pengkajian, *trial and error*, menalar, dan mengkomunikasikan. Berbagai pendekatan pembelajaran ini diyakini dapat mendorong tumbuhnya manusia pembelajar yang berperan penting untuk mewujudkan kemajuan kehidupan masyarakat dalam era persaingan yang kian ketat. Institusi pendidikan di berbagai jenjang, para pendidik, dan para peserta didik diharapkan memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman dalam melaksanakan praktik pembelajaran yang selama ini dinilai kurang mampu mendorong tumbuhnya kemampuan berpikir kreatif dan inovatif.

- Bab 3 -

Memperkuat Daya Akses terhadap Pendidikan

Tidak akan ada yang bisa membantah bahwa maju atau mundurnya suatu bangsa antara lain sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat bangsa tersebut bisa mengakses pendidikan. Semua warga masyarakat, apa pun latar belakang sosial ekonomi mereka; sangat menyadari bahwa pendidikan ibarat sebuah kendaraan yang akan bisa mengantarkan umat manusia dari “jalan kegelapan” menuju kepada “jalan yang terang benderang”. Artinya, semua umat manusia sejak awal sangat menyadari bahwa apabila mereka tidak mampu untuk mengakses pendidikan yang memadai, maka hal itu merupakan lonceng pertanda kegelapan kehidupan yang mungkin kelak harus mereka hadapi. Ketidakmampuan umat manusia untuk mengakses pendidikan akan bisa memerosotkan mereka pada kondisi kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Tidak dapat dibantah, kemiskinan dan keterbelakangan manusia sesungguhnya dipicu oleh kebodohan yang mendera mereka. Kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan merupakan sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diurai. Warga masyarakat yang miskin tentu tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses pendidikan, bahkan pada standar yang paling minimal sekalipun. Oleh karena itu, warga yang miskin hampir juga ditandai dengan kebodohan. Karena bodoh, maka warga yang miskin selalu ditandai dengan ketidakmampuan mengakses berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat dibutuhkan dalam alam kehidupan modern. Mereka yang miskin, bodoh, dan terbelakang jelas tidak

akan mampu bersaing dengan mereka yang berkecukupan, berpendidikan, serta mampu mengakses dan meng-*update* berbagai pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh masyarakat modern.

A. Pendidikan dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Terhadap adanya ribut-ribut tentang problem kemiskinan yang dialami berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia; maka hal itu sesungguhnya bisa diatasi dengan memperluas layanan pendidikan yang bisa diakses oleh semua warga masyarakat. Studi yang dilakukan oleh *The World Bank* (2010) menyatakan bahwa perluasan pembangunan pendidikan, yang merupakan bagian dari investasi dalam modal manusia, merupakan hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Pengalaman dari berbagai negara lain yang lebih dulu mampu menapaki kemajuan pun juga menunjukkan bahwa capaian kemajuan yang mereka raih juga sangat ditentukan oleh keseriusan mereka untuk membangun pendidikan yang bisa diakses oleh warga masyarakatnya. Demikian halnya, negara-negara yang mampu menggenjot angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya juga dipicu oleh ketersediaan sumber daya yang berkualitas dengan latar belakang pendidikan yang memadai.

Fakta-fakta tersebut mestinya harus bisa menumbuhkan komitmen bersama di antara semua komponen bangsa kita untuk tidak ragu akan pentingnya untuk membangun pendidikan yang memungkinkan bisa diakses oleh semua warga masyarakat; lebih-lebih bagi mereka yang miskin dan kekurangan. Lebih-lebih konstitusi negara kita sesungguhnya juga menjamin bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara. Untuk mewujudkan keberadaan pendidikan yang bisa diakses oleh semua warga masyarakat, konstitusi kita pun bahkan mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran pada APBN. Maka yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah pemerintah kita sudah memiliki *political will* untuk mendudukkan layanan pendidikan sebagai strategi utama untuk mengentaskan sebagian besar warga masyarakat dari kubangan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Pendidikan yang berkualitas apabila bisa dengan mudah diakses oleh warga masyarakat yang miskin, maka hal itu akan dapat

memfasilitasi terciptanya inklusi sosial. Melalui pendidikan yang berkualitas, maka warga masyarakat miskin yang selama ini cenderung terpinggirkan dan terabaikan pada akhirnya akan bisa mengatasi berbagai hambatan sosial dan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Maka, pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh semua kelompok warga masyarakat sesungguhnya juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meminimalkan terjadinya kesenjangan sosial. Tidak dapat diingkari, munculnya berbagai persoalan sosial, seperti tindak radikalisme, kejahatan, dan konflik horizontal; hal itu antara lain dipicu oleh adanya kesenjangan sosial yang dalam. Dengan demikian jelaslah bahwa perluasan akses pendidikan untuk semua warga sesungguhnya merupakan media yang sangat efektif yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan sosial yang hingga kini masih menghantui bangsa kita.

Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia bahkan juga menyimpulkan bahwa ketersediaan pendidikan yang baik, yang bisa diakses oleh masyarakat luas; akan bisa digunakan sebagai wahana untuk menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan (Lopez, et al, 2008). Salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh bangsa kita adalah berkaitan dengan kondisi lingkungan yang kian hari tingkat kerusakannya kian parah. Di kota-kota besar, sampah yang tidak terurus dengan baik nyata-nyata merupakan ancaman yang serius, yang dapat mendegradasikan kesehatan lingkungan. Sampah telah menyebabkan lingkungan menjadi tampak kumuh dan kotor, dan merupakan sumber penyakit yang akan terus meneror kesehatan warga masyarakat. Di pedalaman, kekayaan hutan kita hingga kini terus dibabati oleh tangan-tangan serakah yang ingin memperoleh keuntungan; sementara masyarakat yang hidup di sekitar hutan menjadi terus terteror dengan bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan hutan tersebut. Banjir bandang yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya. Semua bencana lingkungan itu bisa terjadi antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan warga masyarakat.

Pendidikan yang rendah membuat warga masyarakat tidak memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup, yang dapat digunakan sebagai bekal untuk menghadapi berbagai tantangan hidupnya. Kreativitas dan kepekaan mereka menjadi kurang terasah. Pola pikir mereka menjadi cenderung bersifat reaktif, kurang mampu

bersikap proaktif. Maka jangan heran bila mereka cenderung berperilaku primitif. Membuang sampah dan kotoran di sungai atau di selokan dianggap sebagai hal yang lazim. Membabat hutan dan mengeruk material di lingkungan lahan konservasi dianggap sebagai hal yang lumrah dengan alasan kepentingan ekonomi jangka pendek. Mereka cenderung tampak “cuek” dengan lingkungan sosialnya yang kumuh dan kotor. Mereka enggan merasa berdosa melihat lingkungan alam yang terdegradasi. Mereka biasanya baru sadar bahwa perilaku primitifnya itu keliru, setelah berbagai bencana datang menerpanya, seperti banjir dan timbulnya berbagai penyakit. Tetapi kesadaran itu sering kali datangnya terlambat, dan itulah yang disebut dengan sikap reaktif; yang merupakan cerminan dari rendahnya tingkat kesadaran dan kepekaan sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan.

Kebalikan dari sikap reaktif adalah sikap proaktif, yang ditandai dengan adanya kepekaan. Kepekaan itulah yang mengantarkan umat manusia mampu membaca tanda-tanda yang diberikan oleh alam dan lingkungan. Manusia yang mampu bersikap proaktif, pasti sangat memahami bahwa praktik penggundulan hutan yang tiada henti akan dapat menyebabkan banjir bandang dan kekeringan dalam jangka panjang. Manusia yang proaktif juga akan mampu “menjaga jarak” dengan lingkungan. Mereka tidak akan menyerah dengan berbagai tantangan yang diberikan oleh lingkungan. Dalam konteks inilah, barangkali Pemerintah Singapura memang lebih mampu bersikap proaktif, sehingga keberadaan sampah –yang di negara kita dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna dan menimbulkan berbagai masalah- bisa digunakan untuk membuat sebuah pulau!

Negara-negara tetangga yang kini mampu mencapai tingkat kemajuan barangkali memang lebih mampu bersikap proaktif, sehingga sejak awal dalam menjalankan kegiatan pembangunan mereka telah memosisikan pendidikan sebagai prioritas utama. Dan, dengan memosisikan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama itulah mereka tampak lebih mampu untuk menjalankan pembangunan pada berbagai bidang lainnya, misalnya bidang ekonomi. Pendidikan yang baik akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas; dan ke semuanya itu akan dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Dengan demikian jelaslah bahwa untuk menyikapi berbagai persoalan bangsa kita, seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya

tingkat kesehatan, rentannya berbagai permasalahan sosial, dan kian terdegradasinya lingkungan alam kita; maka hal itu bisa diatasi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang salah satu indikatornya adalah mampu berperilaku proaktif. Untuk menghadirkan SDM yang berkualitas harus dilakukan dengan membangun pendidikan yang berkualitas yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama untuk warga yang miskin. Hal ini sesungguhnya merupakan investasi untuk jangka panjang, tetapi dari berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara tetangga membuktikan bahwa pilihan untuk membangun pendidikan yang baik akan dapat memberikan *multiplier effect* yang positif dan lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Salah satu tolok ukur yang bisa digunakan untuk menilai apakah *education for all* sudah diimplementasikan dengan konsekuen adalah sejauh mana layanan pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh semua komponen warga; apa pun latar belakang sosial ekonomi mereka.

B. Pendidikan Bermutu Untuk Semua

Pemerintah sangat menyadari pentingnya pendidikan berkualitas untuk semua. Hadirnya program beasiswa Bidikmisi, meski jumlahnya relatif terbatas; harus dilihat sebagai bentuk kesadaran tentang pentingnya pendidikan berkualitas untuk semua. Beasiswa Bidikmisi memang hanya diberikan kepada calon mahasiswa yang memiliki kecerdasan, tetapi menghadapi hambatan dalam hal pembiayaan. Yang dikawatirkan adalah jika kecerdasan berhubungan linear dengan keberadaan lingkungan keluarga yang secara sosial ekonomi dalam kategori berkecukupan, sehingga mampu memberikan fasilitas belajar yang memadai. Sumber daya manusia yang hebat dan unggul tetapi lahir dari lingkungan sosial ekonomi rendah harus diakui tidak banyak jumlahnya. Artinya, kelompok masyarakat yang secara sosial ekonomi dalam kategori sosial ekonomi rendah akan selalu menghadapi hambatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

Meskipun ada fasilitas beasiswa Bidikmisi bagi siswa yang cerdas dan tidak mampu, akses kelompok masyarakat miskin terhadap pendidikan –terutama pendidikan yang berkualitas- masih dirasakan sebagaimana layaknya membeli barang mewah. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan yang masih harus ditanggung oleh masyarakat. Dengan biaya pendidikan yang tinggi, maka bisa dipastikan

hanya kelompok masyarakat yang berkemampuan ekonomi mapan sajalah yang kelak akan dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

Bila pendidikan yang berkualitas merupakan bekal utama bagi warga masyarakat untuk bisa bersaing, maka kita harus khawatir bahwa, dalam era mendatang; keberadaan pendidikan di Indonesia hanya akan menciptakan eksklusi sosial. Warga yang berkecukupan, karena mampu mengakses pendidikan yang berkualitas, akhirnya akan lebih mampu bersaing bila dibandingkan dengan warga miskin yang hanya berbekal pendidikan ala kadarnya. Kondisi inilah yang akan terjadi, apabila negara kita abai untuk menyediakan pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh semua kelompok masyarakat (*education for all*). Meminjam istilah Paulo Freire, keberadaan pendidikan pada akhirnya hanya akan mempertahankan *status quo*: Orang yang kaya akan semakin kaya, yang miskin kian bertambah miskin dan terpinggirkan. Pendidikan, yang idealnya bisa digunakan untuk menciptakan inklusi sosial (sebagaimana yang diyakini oleh Bank Dunia dan hampir semua negara maju); akhirnya justru menciptakan eksklusi sosial dan memicu timbulnya kesenjangan sosial yang lebih dalam.

Oleh karena itulah, para pemimpin negeri ini diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk menyediakan pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh semua warga, termasuk bagi mereka yang miskin. Inilah makna sesungguhnya dari konsep *education for all*. Dan, hingga saat ini kita semua sedang bermimpi hadirnya *education for all*. Semoga hal ini bukan merupakan sebuah impian kosong!

Sudah menjadi keyakinan umum dari semua negara di dunia bahwa pendidikan merupakan salah bagian aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, salah satu tolok ukur utama untuk menilai kualitas kehidupan masyarakat dalam suatu negara antara lain akan diukur sejauh mana pendidikan dapat diakses oleh semua warga masyarakat. Pendidikan dinilai sebagai investasi yang sangat berharga, yang dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat untuk terciptanya transformasi sosial.

Pendidikan memegang peranan penting untuk menyiapkan anak-anak, agar kelak setelah menjadi manusia dewasa bisa tampil sebagai warga negara yang demokratis, toleran, dan bertanggung jawab untuk kehidupan dirinya sendiri, dan mampu berperan aktif untuk meningkatkan kualitas kehidupan lingkungan dan masyarakat yang

lebih luas. Pendidikan hingga saat ini masih dianggap sebagai strategi yang tidak tergantikan yang bisa digunakan untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kualitas kehidupan sosial, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan.

Pendidikan dianggap sebagai soko guru dari kualitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Artinya, pembangunan dan pengembangan kualitas kehidupan manusia pertama-tama harus dimulai dari penguatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat. Warga masyarakat yang terdidik dengan baik akan memberinya kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang ekonomi, sosial, dan politik. Warga yang terdidik akan memberinya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonominya, sehingga memungkinkannya untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, termasuk kebutuhan dalam bidang kesehatan.

Warga yang terdidik dengan baik, lazimnya akan memiliki standar kehidupan yang baik dan terjaga kesehatannya. Warga yang kualitas kesehatannya baik, juga akan memberikan kesempatan yang besar untuk mampu mengembangkan potensi dirinya dengan maksimal, sehingga kelak akan mampu tampil sebagai warga negara yang mandiri dan mampu lebih bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Dengan demikian tersedianya kesempatan yang luas bagi warga masyarakat untuk mengakses pendidikan yang baik merupakan titik awal dari terciptanya kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Itulah sebabnya berbagai lembaga dunia selalu menggunakan parameter akses pendidikan untuk masyarakat luas sebagai ukuran penting untuk menilai kualitas pembangunan manusia dalam suatu negara. Dan sejarah membuktikan bahwa negara-negara maju di dunia ini selalu ditandai dengan keberadaan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses dengan merata untuk semua warga masyarakatnya. Hal ini memberikan pesan yang sangat jelas untuk semua negara di dunia, jika ingin menjadi negara maju, maka terlebih dulu bangun dan kembangkan pendidikan yang bermutu dan merata untuk semua warga masyarakat. Sebagaimana halnya disampaikan oleh UNDP (2012), misalnya; bahwa pertumbuhan indeks pembangunan manusia selalu berkaitan dengan pertumbuhan pengeluaran negara untuk sektor pendidikan.

Meskipun semua negara mengakui peran penting pendidikan untuk terciptanya kemakmuran yang setara untuk semua warga masyarakat, berbagai kajian dari para ahli mengungkapkan bahwa

kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang miskin, baik masyarakat di dalam suatu negara maupun antara negara semakin lama semakin melebar (Unesco, 2013; Singh, 2014). Selanjutnya dikatakan oleh Singh (2014), bahwa di berbagai negara yang sedang berkembang kesenjangan untuk mengakses pendidikan yang bermutu antara kelompok masyarakat kaya dan miskin semakin lama semakin tajam. Tanpa disadari, sebagaimana sudah sejak lama diperingatkan oleh salah seorang tokoh pendidikan alternatif dari Brazil, Freire (1993), bahwa pendidikan bermutu bila tidak dapat diakses secara merata oleh semua warga pada akhirnya hanya akan mempertahankan *status quo*. Mereka yang berasal dari kelompok kaya yang akan lebih mampu mengakses pendidikan yang bermutu, dan kelak mereka inilah yang akan menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, mereka yang berasal dari kelompok miskin akan mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan yang bermutu, dan karenanya mereka selamanya akan terus terpinggirkan. Pada akhirnya pendidikan juga berpotensi menciptakan segregasi sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin atau tetap miskin. Dengan demikian, cita-cita ideal dari pendidikan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi semua warga masyarakat akan terus menjadi sebuah ilusi. Atas dasar inilah maka Singh (2014) menekankan bahwa negara harus benar-benar tampil dan memberikan kepastian adanya prinsip dasar terciptanya kesetaraan dan tersedia asas imparsial untuk layanan semua jenjang pendidikan bagi semua warga. Negara harus tunduk pada prinsip dasar tersebut jika benar-benar berkomitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat.

C. Memosisikan Pendidikan sebagai Hak Setiap Orang

Deklarasi universal tentang hak asasi manusia telah menekankan bahwa pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa mengenal ras, kelompok sosial, dan golongan tertentu. Unesco sejak tahun 1960 juga telah mengeluarkan konvensi tentang pelarangan adanya diskriminasi dalam layanan pendidikan (Singh, 2014). Dalam konteks negara kita, konstitusi jelas mengamanatkan tentang tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; dengan menekankan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Konstitusi memang tidak secara tegas menyatakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sampai jenjang tertentu, misalnya jenjang

pendidikan tinggi. Demikian halnya, belum ada penjelasan yang lebih detail dari kalimat “hak untuk mendapatkan pendidikan”. Yang selama ini menjadi pemahaman umum, hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap orang, yang pemanfaatannya atas hak tersebut tergantung pada masing-masing individu.

Bila kita menggunakan konsep hak sebagaimana tersebut di atas, maka mestinya ada pihak lain yang berkewajiban menyediakan layanan untuk keperluan pemenuhan hak. Dengan demikian bila dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga, maka negara berkewajiban menyediakan layanan pendidikan sampai pada sebuah kondisi dimana hak setiap warga untuk layanan pendidikan tersebut sudah terpenuhi. Konvensi Unesco Tahun 1960 tentang pelarangan adanya diskriminasi dalam layanan pendidikan harus menjadi instrumen yang digunakan negara untuk menyediakan layanan pendidikan secara menyeluruh. Hal ini akan menjadi prinsip universal yang bisa memberikan kesempatan semua orang dapat mengakses pendidikan secara setara. Inilah sesungguhnya yang menjadi pilar dari konsep pendidikan untuk semua (*education for all*).

Semua negara yang ikut menandatangani konvensi Unesco tentang layanan pendidikan tanpa diskriminasi wajib mengembangkan, membuat, dan menerapkan kebijakan untuk terciptanya keadilan dan kesetaraan bagi semua warga masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang wajib disediakan oleh negara. Konsep pendidikan untuk semua juga sejalan dengan konvensi tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya (*ecosoc*) yang mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan dasar yang bisa diakses oleh semua warga masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan konvensi tentang hak anak, dan mewajibkan negara untuk memberikan prioritas kepada kelompok anak yang kurang beruntung dan termarginalisasi, seperti anak-anak dari golongan keluarga yang tidak mampu.

Begitu penting dan strategisnya peran pendidikan bagi masyarakat, maka bagi para pekerja migran beserta anggota keluarganya yang ada di suatu negara pun juga berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan; sebagaimana tercantum dalam *International Convention on The Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Buruh Migran Beserta Anggota keluarganya). Pasal 30 dalam konvensi ini menyatakan bahwa setiap anak dari para buruh migran memiliki hak dasar untuk mengakses

layanan pendidikan yang setara, termasuk mendapatkan pelatihan dan penguatan keterampilan. Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan merupakan hak yang melekat pada setiap orang yang ada dalam suatu negara. Terlebih bagi seseorang yang berstatus sebagai warga negara, maka mereka mestinya mendapatkan hak penuh untuk layanan pendidikan yang bermutu, dan negara wajib untuk memenuhinya; terutama untuk level pendidikan dasar.

Beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia; sudah mencanangkan kewajiban bagi semua warga negara untuk mengenyam pendidikan dasar. Dalam konteks Indonesia, kewajiban untuk menempuh pendidikan dasar adalah sampai dengan jenjang SMP (pendidikan dasar 9 tahun). Untuk layanan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tentu tergantung pada kemampuan setiap negara. Meskipun demikian, negara diharapkan tetap mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan semua warga negara mampu mengakses pendidikan secara setara pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya, negara diharapkan memiliki kebijakan yang memungkinkan semua orang dari kelompok sosial ekonomi mana pun mereka berasal mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan. Singkatnya, warga dari kelompok sosial ekonomi bawah diharapkan mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga dari kelompok sosial ekonomi atas.

Penerapan prinsip imparisial dalam layanan bidang pendidikan untuk semua warga juga berkaitan dengan akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu (Singh,2014). Artinya, pendidikan yang bermutu harus bisa diakses oleh semua warga masyarakat tanpa kecuali, baik untuk mereka yang berasal dari kelompok kaya maupun kelompok miskin. Kesamaan kesempatan bagi semua warga dari berbagai latar belakang sosial ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu juga merupakan bagian dari prinsip dasar hak asasi.

Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya terhadap layanan pendidikan yang bermutu, terutama kepada kelompok masyarakat sosial ekonomi bawah; dapat digunakan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Melalui layanan pendidikan yang bermutu, kelompok masyarakat sosial ekonomi bawah diharapkan memiliki bekal untuk melakukan transformasi sosial dan memperbaiki kualitas hidupnya (Lazenby,2016). Inilah peran penting pendidikan yang hingga sekarang masih diyakini sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat tidak cukup hanya dilakukan dengan menyediakan layanan pendidikan yang bisa diakses semua warga. Lebih dari itu, layanan pendidikan yang disediakan juga harus memenuhi standar mutu. Inilah tantangan yang akan terus dihadapi oleh semua negara di dunia dalam menghadirkan kesetaraan akses warga masyarakat terhadap layanan bidang pendidikan.

Berbagai negara di dunia umumnya sudah hampir selesai untuk urusan pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan dasar, yang di Indonesia menggunakan ukuran pendidikan dasar 9 tahun, sampai pada jenjang sekolah menengah pertama. Pemenuhan hak atas pendidikan justru menemukan titik persoalan yang lebih serius ketika warga masyarakat hendak mengakses layanan pendidikan sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi. Sebagaimana dinyatakan oleh Singh (2014), tidak semua negara di dunia mampu memberikan akses yang setara kepada warga masyarakat untuk layanan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Hingga saat ini, hak masyarakat untuk mengakses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih menghadapi tantangan yang besar. Kondisi ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, berbagai negara maju pun juga menghadapi persoalan serupa. Akan selalu ada kelompok masyarakat dari golongan tertentu yang tidak dengan mudah bisa mengakses pendidikan sampai pada jenjang menengah, apalagi hingga jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas indeks pembangunan manusia, karena harapan masyarakat untuk mengakses pendidikan sampai pada level pendidikan tertinggi dan rerata lama menempuh pendidikan merupakan ukuran utama untuk menilai kualitas pembangunan manusia (<http://hdr.undp.org>).

Unesco (2011) mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama untuk mengakses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi adalah berkaitan dengan masalah pendanaan. Tidak semua warga masyarakat memiliki kemampuan yang setara untuk membiayai pendidikan sampai pada jenjang pendidikan tinggi. Pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi relatif sangat besar, yang meliputi uang SPP, biaya transportasi, biaya hidup, biaya buku, dan berbagai biaya lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesempatan seseorang untuk mengakses pendidikan. Itulah sebabnya pemenuhan hak warga dalam

bidang pendidikan, khususnya bagi mereka dari golongan ekonomi bawah; belum sepenuhnya bisa menyentuh sampai pada level pendidikan tinggi. Layanan pendidikan tinggi, apalagi pendidikan tinggi yang berkualitas; belum bisa dinikmati secara setara oleh berbagai kelompok masyarakat.

Untuk mengakses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, para orang tua siswa atau mahasiswa harus menyisihkan anggaran pendidikan yang sangat besar. Biaya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi mengambil sebagian besar dari proporsi pendapatan para orang tua. Semakin besar proporsi biaya pendidikan dari pendapatan seseorang menandakan adanya akses pendidikan yang semakin kecil. Sebaliknya, Semakin kecil proporsi biaya pendidikan dari pendapatan seseorang menandakan adanya akses pendidikan yang semakin besar. Akses pendidikan yang kecil juga menjadi pertanda adanya ketidaksetaraan akses masyarakat dalam bidang pendidikan. Sebaliknya, akses pendidikan yang besar menandakan adanya kesetaraan akses masyarakat dalam bidang.

D. Mengukur Daya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan

Perbandingan antara rata-rata biaya pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan rata-rata pendapatan masyarakat merupakan formula yang dapat digunakan untuk mengukur daya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan pada jenjang tertentu. Besaran rata-rata pendapatan masyarakat dapat ditentukan dari besaran pendapatan per kapita per tahun. Prinsip dasar yang digunakan untuk mengukur daya akses terhadap pendidikan dengan melihat besarnya proporsi biaya pendidikan terhadap pendapatan. Semakin kecil proporsi biaya pendidikan terhadap pendapatan menunjukkan adanya daya akses terhadap pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, semakin besar proporsi biaya pendidikan terhadap pendapatan menunjukkan daya akses terhadap pendidikan yang rendah.

Daya akses masyarakat terhadap pendidikan dapat dibedakan dalam 5 kategori, yaitu: kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Panjang kelas interval pada masing-masing kategori dilakukan dengan menentukan besarnya rentangan, yang merupakan selisih antara skala terendah (1) dengan skala tertinggi (5), kemudian dibandingkan dengan jumlah kategori awal (5). Dengan demikian didapatkan panjang kelas interval sebesar 0,8, dan diperoleh 5 kelas

interval. Namun kalsifikasi 5 kategori kemudian menyisakan 2 kategori di luar perhitungan, yaitu titik terendah dan titik tertinggi yang merupakan 2 titik di luar kelas interval normal dalam skala 1 – 5. Dengan demikian daya akses kemudian dikembangkan menjadi 7 kategori, sebagaimana tampak pada tabel.

Berdasarkan ukuran tersebut kemudian dapat ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan prosentase bagian dari pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membiayai pendidikan. Berbagai ukuran inilah yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan kategori kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 1: Kategori Daya Akses Masyarakat terhadap Pendidikan

No	Kelas Interval	Proporsi Biaya Pendidikan terhadap Pendapatan	Kategori Daya Akses terhadap Pendidikan
1	< 1	< 20%	Bebas Biaya Akses
2	1,00 – 1,80	20% - 36 %	Sangat Tinggi
3	1,81 – 2,60	36,1% - 52 %	Tinggi
4	2,61 – 3,40	52,1% - 68%	Cukup
5	3,41 – 4,20	68,1% - 84%	Rendah
6	4,21 – 5,00	84,1% - 100%	Sangat Rendah
7	> 5	> 100%	Tidak Terjangkau

Dengan menggunakan formula sebagaimana tabel tersebut kita bisa menganalisis daya akses masyarakat terhadap pendidikan. Berikut disampaikan beberapa skenario kondisi yang dihadapi masyarakat untuk kemudian dilihat bagaimana kemampuan daya aksesnya terhadap pendidikan pada jenjang tertentu. Berbagai skenario berikut dibuat dengan asumsi jumlah anak yang menjadi tanggungan keluarga dan hendak menempuh studi hanya seorang. Dengan demikian berapa jumlah anak yang menjadi tanggungan dalam keluarga tentu akan sangat mempengaruhi daya akses terhadap layanan pendidikan.

Contoh Kasus 1:

Seseorang karyawan pabrik memiliki pendapatan per bulan sebesar Rp2.500.000 atau per tahun sebesar Rp30.000.000. Ia hendak mengirim anaknya untuk menempuh studi program kedinasan pada jenjang pendidikan tinggi di kota dengan fasilitas beasiswa penuh dari pemerintah. SPP dan semua biaya hidup, dan semua biaya lainnya ditanggung pemerintah. Orang tua hampir tidak mengeluarkan biaya apa pun untuk pendidikan kedinasan bagi anaknya. Jika masih ada biaya, komponen biaya yang mungkin masih harus ditanggung orang tua meliputi: Biaya transportasi dan komunikasi insidental dan biaya lain-lain, misalnya rerata per bulan Rp300 ribu; atau 3,6 juta/tahun. Dengan demikian proporsi biaya pendidikan dibandingkan dengan pendapatan adalah sebesar $3,6 \text{ juta} / 30 \text{ juta} = 12\%$. Dengan kata lain, 12% dari total pendapatan seseorang akan tersedot untuk biaya pendidikan. Artinya, akses seseorang terhadap layanan pendidikan tinggi kedinasan dalam kategori bebas biaya.

Contoh Kasus 2:

Seseorang karyawan pabrik memiliki pendapatan per bulan sebesar Rp2.500.000 atau per tahun sebesar Rp30.000.000. Ia hendak mengirim anaknya untuk menempuh studi pada jenjang pendidikan tinggi di kota dengan fasilitas beasiswa bidik misi dari pemerintah. SPP ditanggung pemerintah dan mendapatkan bantuan biaya hidup Rp.600 ribu per bulan. Komponen biaya pendidikan yang masih harus ditanggung meliputi: Biaya transportasi, makan, biaya tempat tinggal, biaya buku, biaya lain-lain rerata per bulan 1,75 juta atau 21 juta/tahun. Karena mereka mendapatkan bantuan biaya hidup Rp600 ribu/bulan atau 7,2 juta/tahun, maka biaya pendidikan yang masih harus ditanggung sebesar Rp.13,8 juta/tahun Dengan demikian proporsi biaya pendidikan dibandingkan dengan pendapatan adalah sebesar $13,8 \text{ juta} / 30 \text{ juta} = 46\%$. Dengan kata lain, 46% dari total pendapatan seseorang akan tersedot untuk biaya pendidikan. Artinya, akses seseorang terhadap layanan pendidikan tinggi dalam kategori tinggi. Dengan fasilitas beasiswa untuk anaknya, keluarga tersebut dinilai mampu untuk mengakses layanan pendidikan tinggi.

Contoh Kasus 3:

Seseorang karyawan pabrik memiliki pendapatan per bulan sebesar Rp2.500.000 atau per tahun sebesar Rp30.000.000. Ia hendak mengirim anaknya untuk menempuh studi pada jenjang pendidikan tinggi favorit di kota. Komponen biaya pendidikan meliputi: SPP sebesar 10 juta/semester atau 20 juta/tahun. Biaya transportasi, makan, biaya tempat tinggal, biaya buku, biaya lain-lain rerata per bulan 2 juta atau 24 juta/tahun. Dengan demikian rerata biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung per tahun sebesar Rp44 juta. Dengan demikian proporsi biaya pendidikan dibandingkan dengan pendapatan adalah sebesar $44 \text{ juta} / 30 \text{ juta} = 147\%$. Dengan kata lain, total pendapatan keluarga tersebut tidak mencukupi untuk biaya pendidikan. Artinya, keluarga tersebut tidak mampu mengakses layanan pendidikan tinggi favorit yang ada di kota.

Contoh Kasus 4:

Seseorang karyawan pabrik memiliki pendapatan per bulan sebesar Rp2.500.000 atau per tahun sebesar Rp30.000.000. Ia hendak mengirim anaknya untuk menempuh studi pada jenjang pendidikan tinggi di kota. Komponen biaya pendidikan meliputi: SPP sebesar 500 ribu/semester atau 1 juta/tahun. Biaya transportasi, makan, biaya tempat tinggal, biaya buku, biaya lain-lain rerata per bulan 1,75 juta atau 21 juta/tahun. Dengan demikian rerata biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung per tahun sebesar Rp22 juta. Dengan demikian proporsi biaya pendidikan dibandingkan dengan pendapatan adalah sebesar $27 \text{ juta} / 30 \text{ juta} = 90\%$. Dengan kata lain, 90% dari total pendapatan seseorang akan tersedot untuk biaya pendidikan. Artinya, akses seseorang terhadap layanan pendidikan tinggi dalam kategori sangat rendah. Keluarga tersebut dinilai sangat sulit untuk mengakses layanan pendidikan tinggi.

Contoh Kasus 5:

Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebesar \$ 3.932 dengan kurs dolar terhadap rupiah \$1 = Rp.14.250, dengan demikian penduduk di Indonesia memiliki rerata pendapatan per bulan sebesar Rp4.669.250 atau per tahun dibulatkan sebesar Rp56.000.000. Ia hendak mengirim anaknya untuk menempuh studi pada jenjang pendidikan tinggi di kota. Komponen biaya pendidikan

meliputi: SPP sebesar 5 juta/semester atau 10 juta/tahun. Biaya transportasi, makan, biaya tempat tinggal, biaya buku, biaya lain-lain rerata per bulan 2.25 juta atau 27 juta/tahun. Dengan demikian rerata biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung per tahun sebesar Rp37 juta. Dengan demikian proporsi biaya pendidikan dibandingkan dengan pendapatan adalah sebesar $37 \text{ juta} / 56 \text{ juta} = 66\%$. Dengan kata lain, sebanyak 66% dari total pendapatan seseorang akan tersedot untuk biaya pendidikan. Artinya, keluarga tersebut termasuk dalam kategori cukup mampu untuk mengakses layanan pendidikan tinggi.

Contoh Kasus 6:

Seseorang memiliki rerata pendapatan per bulan sebesar Rp15.000.000 atau per tahun sebesar Rp180.000.000. Ia hendak mengirim anaknya untuk menempuh studi pada jenjang pendidikan tinggi di kota. Komponen biaya pendidikan meliputi: SPP sebesar 10 juta/semester atau 20 juta/tahun. Biaya transportasi, makan, biaya tempat tinggal, biaya buku, biaya lain-lain rerata per bulan 4 juta/bulan atau 48 juta/tahun. Dengan demikian rerata biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung per tahun sebesar Rp68 juta. Dengan demikian proporsi biaya pendidikan dibandingkan dengan pendapatan adalah sebesar $68 \text{ juta} / 180 \text{ juta} = 37,8\%$. Dengan kata lain, sebanyak 37,8% dari total pendapatan seseorang akan tersedot untuk biaya pendidikan. Artinya, akses seseorang terhadap layanan pendidikan dalam kategori tinggi. Keluarga tersebut dinilai mudah untuk mengakses layanan pendidikan tinggi.

Formula di atas dapat digunakan untuk mengukur daya akses masyarakat terhadap pendidikan pada semua jenjang. Untuk itu dibutuhkan data-data riil tentang besaran pendapatan masyarakat, besaran biaya pendidikan, biaya hidup, biaya transportasi, biaya buku, dan berbagai komponen pembiayaan lainnya. Data-data tentang besaran biaya pendidikan tentu sangat beragam antara lembaga pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Demikian halnya, besaran pendapatan masyarakat juga sangat beragam tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing. Apabila data-data riil sudah diketahui, maka semua warga masyarakat akan dapat mengukur sejauh mana daya akses mereka terhadap layanan pendidikan.

Masyarakat yang memiliki daya akses tinggi terhadap pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu juga dapat dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya hak atas layanan pendidikan pada jenjang tersebut.

Sebaliknya, masyarakat yang memiliki daya akses rendah terhadap pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu menunjukkan hak mereka atas layanan pendidikan belum dapat dipenuhi pada jenjang tersebut.

Daya akses yang tinggi terhadap pendidikan bisa dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi seseorang. Kasus 6 menggambarkan seseorang dengan kemampuan ekonomi yang tinggi akan tetap mampu mengakses layanan pendidikan dengan baik, meskipun harus menanggung biaya pendidikan yang sangat besar. Sebaliknya, pada kasus 4 digambarkan seseorang dengan kemampuan ekonomi yang rendah akan tetap menghadapi problem daya akses meskipun biaya pendidikan yang harus ditanggung juga rendah. Mereka menghadapi kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi di kota karena terbentur problem biaya hidup di kota yang tinggi. Tetapi pada kasus 1, meskipun kemampuan ekonominya rendah, karena mereka mendapatkan fasilitas beasiswa kedinasan yang ditanggung penuh oleh pemerintah; maka mereka dapat menikmati layanan pendidikan tinggi dengan skema bebas biaya akses.

E. Akses Terhadap Pendidikan Tinggi Bermutu: Cita-Cita dan Realita

Bagaimana posisi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan tinggi berkualitas di Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara, dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3.

Tabel 2: Besaran Biaya Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pendapatan Per Kapita Berbagai Negara

Negara	Biaya SPP/Tahun	Biaya Hidup/Tahun	Total Biaya Pendidikan	Pendapatan per Capita ^{*)}
Singapura	\$ 18.937	\$ 20.292	\$ 39.229	\$ 64.567
Malaysia	\$ 2.453	\$ 10.488	\$ 12.941	\$ 11.079
China	\$ 3.844	\$ 6.886	\$ 10.729	\$ 10.200
Taiwan	\$ 3.338	\$ 8.573	\$ 11.911	\$ 24.971
Indonesia	\$ 4.378	\$ 8.527	\$ 12.905	\$ 3.932

Sumber: HSBC Value of Education Survey 2018

*) www.ceicdata.com/en/indicator

Tabel 3: Rasio Biaya SPP dan Biaya Pendidikan Tinggi Berkualitas terhadap IPC Berbagai Negara

Negara	Rasio Biaya SPP terhadap IPC ^{*)}	Daya Akses Warga terhadap Pendidikan Tinggi Berkualitas	Rasio Biaya Pendidikan Terhadap IPC ^{*)}	Daya Akses Warga Terhadap Pendidikan Tinggi Berkualitas
Singapura	29,3%	Sangat Tinggi	31,4%	Sangat tinggi
Malaysia	22,1%	Sangat tinggi	96,6%	Sangat Rendah
China	37,7%	Tinggi	67,5%	Cukup Terjangkau
Taiwan	13,4%	Bebas Akses	34,3%	Sangat Tinggi
Indonesia	111,3%	Tidak Terjangkau	216,9%	Tidak Terjangkau

*) Dihitung berdasarkan data pada tabel 2

Akses terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu ukuran untuk menyatakan apakah semua warga masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang adil (Singh,2014). Bagi kelompok warga dari golongan sosial ekonomi rendah, kesempatan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas merupakan jembatan menuju kualitas kehidupan yang lebih baik (Lazenby, 2016). Tabel 2 dan tabel 3 menggambarkan bagaimana rata-rata daya akses masyarakat Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.

Data HSBC (2018) menunjukkan bahwa biaya SPP pendidikan tinggi berkualitas di Indonesia ternyata lebih mahal dibandingkan dengan Taiwan, China, Singapura, dan Malaysia. Padahal besaran pendapatan per kapita (IPC) Indonesia adalah seperlima dari rata-rata IPC di ketiga negara tersebut. Data-data tersebut langsung dapat menggambarkan betapa sulitnya masyarakat Indonesia untuk

mengakses pendidikan tinggi yang bermutu. Biaya pendidikan yang sangat tinggi telah memosisikan layanan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang berkualitas; sebagaimana layaknya barang mewah yang tidak semua orang mampu menjangkaunya.

Dengan memperhatikan besaran rasio biaya SPP terhadap IPC, maka diketahui Indonesia memiliki rasio 111,3%. Bandingkan dengan Taiwan (13,4%), Malaysia (22,1%), Singapura (29,3%), dan China (37,7%). Jika menggunakan pedoman pengukuran daya akses sebagaimana tercantum dalam tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata daya akses masyarakat Indonesia terhadap layanan pendidikan tinggi berkualitas berada dalam kategori “tidak dapat dijangkau”. Sedangkan masyarakat di empat negara pembanding memiliki daya akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas dalam kategori daya akses “sangat tinggi”. Taiwan bahkan memiliki rasio sebesar 13,4%, sehingga dapat menggambarkan masyarakat di negara tersebut termasuk dalam kategori “bebas biaya akses” untuk pendidikan tinggi yang berkualitas.

Bila pengukuran daya akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas dimasukkan komponen biaya hidup dan berbagai biaya penunjang pendidikan, maka rata-rata daya akses masyarakat Indonesia terhadap layanan pendidikan tinggi paling berkualitas akan semakin jauh dari harapan (lihat tabel 3). Daya akses penduduk di Indonesia terhadap pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dibandingkan dengan beberapa negara tetangga dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4: Prosentase Partisipasi Penduduk Terhadap Pendidikan dan Peringkat dari 137 Negara

Indikator	Indonesia	Malaysia	Thailand	Filipina	Vietnam	Singapura
Pendidikan dasar	89,7% (106)	98,1% (32)	90,8% (100)	96% (66)	98% (36)	100% (1)
Pendidikan menengah	85,8% (85)	77,6% (92)	129% (8)	88,4% (80)	92,5% (68)	108,1% (25)
Pendidikan tinggi	24,3% (91)	26,1% (89)	48,9% (59)	35,8% (77)	28,8% (84)	92,2% (4)

Sumber: The Global Competitiveness Report 2017-2018 dalam Schwab (Ed.) (2017)

Data-data yang dikeluarkan oleh *The Global Competitiveness Report 2017-2018* menggambarkan betapa masyarakat masih menghadapi problem daya akses terhadap pendidikan. Daya akses penduduk di Indonesia terhadap pendidikan, baik pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi berada di bawah negara Asean lainnya. Khusus untuk jenjang pendidikan tinggi, angka partisipasi penduduk untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi baru berada pada angka 24,3%, berada di bawah Vietnam dan Malaysia; serta relatif tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura, Thailand, dan Filipina. Oleh karena itu, jika ada salah seorang warga masyarakat dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah yang mampu mengakses layanan pendidikan tinggi berkualitas; maka hal itu dipastikan akan menjadi berita heboh di tengah kehidupan masyarakat. Singkatnya, masyarakat belum sepenuhnya mampu menggunakan hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi, dan pendidikan yang berkualitas.

Data-data di atas juga menggambarkan bahwa dalam masyarakat Indonesia konsep pendidikan untuk semua, *education for all*; khususnya untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, apalagi pendidikan yang berkualitas masih sepenuhnya belum dapat diwujudkan. Pendidikan yang berkualitas, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi; dipastikan masih menjadi *privilege* kelompok masyarakat sosial ekonomi kaya. Asas kesetaraan (*equality*) dalam mengakses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, terlebih konstitusi kita memerintahkan kepada negara untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan. Beruntung, dalam konstitusi dan penjelasannya belum diungkapkan secara eksplisit bahwa pemenuhan hak masyarakat atas layanan pendidikan itu sampai menyentuh pada jenjang pendidikan tertentu dan dengan derajat kualitas layanan tertentu.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan pendidikan yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat (*education for all*) dapat ditempuh melalui beberapa formula, sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas pendidikan gratis, sebagaimana yang selama ini ditempuh pemerintah untuk jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Di berbagai pemerintah daerah tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi bagus, pendidikan gratis bahkan sudah

- menyentuh pada level pendidikan menengah. Pendidikan gratis, lebih-lebih bila diselenggarakan dalam area yang terjangkau para warga akan memungkinkan mereka untuk mengakses dengan baik.
2. Penentuan biaya pendidikan, terutama untuk pembayaran SPP yang beragam, sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Konsep uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan pendekatan ini. Penentuan besaran SPP yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi para warga juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengakses layanan pendidikan. Hanya saja, SPP hanyalah salah satu dari berbagai komponen lain yang juga menentukan besaran biaya pendidikan, seperti biaya hidup, biaya transportasi, biaya buku, dan yang sejenisnya. Oleh karena itu, SPP yang terjangkau oleh keluarga tidak serta merta menjamin meningkatkan daya aksesnya terhadap pendidikan. Biaya hidup di kota (*living cost*) bahkan kerap menjadi *handicap* bagi keluarga yang hendak mengirimkan putra putrinya untuk menempuh studi di luar kota;
 3. Perluasan layanan pendidikan diikuti dengan pemerataan mutu pendidikan. Layanan pendidikan yang secara geografis terjangkau oleh sebuah keluarga akan berperan besar dalam meningkatkan daya akses masyarakat terhadap pendidikan. Tetapi hal ini kerap tidak berjalan optimal jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang setara dengan layanan pendidikan yang berada di kota. Sebagaimana diketahui, kualitas pendidikan yang bagus, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; selama ini terpusat di kota-kota. Untuk layanan pendidikan tinggi, bahkan seseorang harus berburu ke ibu kota provinsi atau di luar provinsi untuk bisa mengakses layanan pendidikan yang dianggap bermutu. Hal ini tentu akan meningkatkan biaya hidup dan transportasi, sehingga akan berdampak langsung dengan daya akses seseorang. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan yang merata harus menjadi prioritas utama bila ingin memperkuat daya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.
 4. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi akan memudahkan mereka untuk mengakses layanan pendidikan pada berbagai jenjang. Oleh karena itu, pemerataan ekonomi menjadi agenda

penting yang bisa ditempuh pemerintah melalui berbagai program pembangunan. Kemampuan ekonomi masyarakat yang tinggi dan merata dipastikan akan berdampak positif pada daya akses mereka terhadap layanan pendidikan di berbagai jenjang. Kemampuan ekonomi masyarakat lazimnya akan berhubungan selaras dengan kemampuan masyarakat mengakses pendidikan. Semakin tinggi daya akses terhadap pendidikan sampai pada jenjang tertinggi, akan semakin tinggi pula kemampuan ekonomi seseorang. Dengan demikian ada hubungan interdependensi antara kemampuan ekonomi dan daya akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, pemberian kesempatan yang luas untuk mengakses pendidikan sampai pada jenjang pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung dapat menjadi *shortcut* dalam meningkatkan daya akses masyarakat terhadap pendidikan, demi mewujudkan konsep pendidikan untuk semua.

- Bab 4 -

Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif: *Conditio Sine Qua Non!*

Manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang diturunkan ke dunia dalam kondisi belum “jadi”, belum “final”. Bersamaan dengan itu, manusia harus menghadapi dan menghidupi alam lingkungannya yang juga dalam keadaan belum “jadi”, belum “final”. Oleh karena itu, tugas terbesar yang diemban oleh setiap manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia adalah menjadikan diri dan lingkungannya agar benar-benar tampil dalam keadaan yang lebih manusiawi. Kelak kita akan dapat memahami, justru karena setiap manusia turun ke dunia dalam keadaan belum “jadi”, dan menghidupi dunia juga dalam kondisi belum “jadi”; maka manusia berkesempatan untuk tampil sebagai satu-satunya makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan.

Dalam hal-hal tertentu ada kemiripan tampilan manusia dan binatang dalam menjalani kehidupannya di dunia. Manusia makan, minum, bernafas, dan berkembang biak. Pun demikian halnya dengan binatang: makan, minum, bernafas, dan berkembang biak. Manusia dianugerahi Tuhan dengan berbagai macam nafsu, binatang hidup di dunia dengan nafsu. Perbedaan utama antara manusia dan binatang adalah terletak pada pikiran. Manusia dianugerahi Tuhan berupa pikiran, sedangkan binatang tidak memiliki pikiran. Oleh karena adanya kemiripan tampilan manusia dan binatang, Darwin dengan teori evolusinya pernah melontarkan tuduhan bahwa nenek moyang manusia adalah binatang, yaitu kera. Maka muncullah istilah yang kemudian disematkan pada manusia: disebut sebagai *hayawanun natiq*, atau hewan yang berpikir.

Pikiran, itulah yang membedakan manusia dan binatang. Karena adanya pikiran, maka pada setiap diri manusia memiliki rasa, perasaan. Adanya pikiran membuat manusia mampu berkarya. Karena adanya pikiran pula yang membuat manusia mampu menampilkan kehendak yang dilandasi akal dan budi, bukan sekedar dituntun dan dikendalikan oleh nafsu sebagaimana layaknya binatang berperilaku. Perhatikan, dengan memiliki pikiran, perilaku manusia jauh lebih halus bila dibandingkan dengan binatang. Cara manusia menjalani kehidupan juga jauh lebih keren bila dibandingkan dengan binatang. Lihatlah, bagaimana cara manusia menjalani salah satu aktivitas kehidupan yang paling asasi, misalnya makan. Manusia makan tidak asal *nyosor* sebagaimana layaknya binatang. Kalau ada manusia makan seperti binatang, maka yang demikian itu kemudian dikategorikan sebagai perilaku yang tidak manusiawi.

Sebagai manusia, kita tidak perlu cemburu dengan binatang yang tampil dan menjalani kehidupan dalam keadaan sudah “jadi” dan “final”. Sebagai makhluk yang sudah “final”, binatang tinggal menghidupi lingkungan sebagaimana adanya. Binatang tidak usah repot-repot mengintervensi diri dan lingkungannya. Binatang tinggal menghidupi lingkungannya dengan apa adanya, men-*satu* dengan alam. Oleh karena itu, manusia tidak usah iri kalau ada binatang tidak harus repot memasak makanan ketika hendak makan. Binatang tinggal *nyosor* makanan yang sudah disediakan oleh Tuhan di alam. Binatang tidak perlu repot membuat peralatan masak, membuat bumbu dapur, dan segala aneka racikan makanan. Kita juga tidak usah iri kalau ada binatang yang asal *embat* ketika ada lawan jenis duduk di sebelahnya. Mereka tidak perlu repot-repot bikin acara ritual kehidupan. Singkat cerita, binatang tinggal menghidupi diri dan lingkungannya sebagaimana ada adanya, tinggal men-*satu* dengan alam. Diri dan alam lingkungan binatang dikatakan sudah “jadi”, “final”, sudah “tuntas” dan “selesai”. Kita tidak perlu kaget kalau ternyata kera tidak merasa nyaman tidur di hotel berbintang lima, karena sejak dari dulu lingkungan alamnya sudah “final”: hutan belantara.

Berbeda dengan binatang yang tinggal men-*satu* dan menghidupi diri dan lingkungan apa adanya, sebagai makhluk yang belum “jadi”; manusia harus men-*jadi*-kan diri dan lingkungannya agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka manusia tidak serta merta tunduk pada alam, ia harus men-*dua*, menjaga jarak dengan alam.

Dengan berpikir *men-dua* dan menjaga jarak dengan alam, kita menyaksikan tampilan manusia yang heterogen. Manusia diberi Tuhan keleluasaan dan ruang yang luas untuk mengkreasi kehidupan sesuai dengan tuntutan alam, cita rasa, dan budayanya. Karena itulah, tampilan kehidupan manusia akan terus berkembang dari waktu ke waktu, semakin lama semakin tampak gemerlap. Hal ini akan bertolak belakang dengan tampilan binatang yang homogen dan statis sepanjang masa.

A. Optimalisasi Kemampuan Berpikir dan Sikap Kritis

Apa yang membuat manusia mampu berpikir *men-dua*, menjaga jarak dengan alam? Ia tidak lain adalah adanya pikiran yang disematkan oleh Tuhan kepada setiap umat manusia. Pikiran yang membuat manusia mampu berpikir kritis. Sikap kritis ditandai dengan kebiasaan manusia untuk selalu mempertanyakan segala hal yang dihadapi dan dihidupi. Maka setiap manusia dalam menjalani kehidupannya akan selalu mengemukakan kata “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana”. Dengan kata-kata tersebut, manusia akan mendapatkan kesempatan untuk *membaca* tanda-tanda yang diberikan alam untuk diterjemahkan dan dimaknai agar lingkungan alam dapat dihidupi selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka jangan heran, tugas utama dan pertama yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umat manusia adalah membaca, *iqra'*!

Sikap kritis juga merupakan bukti kemampuan manusia untuk menjaga jarak dengan alam, dan tidak sekedar menghidupi alam sebagaimana adanya. Inilah puncak perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia mengkreasi lingkungan alam sesuai dengan kemampuan pemaknaan sebagai akibat dari adanya kegiatan membaca. Kemampuan membaca tanda-tanda alam antara manusia satu dengan yang lain sangat berbeda-beda. Perbedaan daya baca ini dipengaruhi oleh perbedaan intensitas penggunaan pikiran. Ada manusia yang mengoptimalkan penggunaan pikiran. Tetapi ada juga manusia yang memarkir pikirannya. Intensitas penggunaan pikiran inilah yang kelak akan membedakan sikap kritis seseorang terhadap lingkungannya. Maka, dalam kehidupan ini kita melihat tampilan manusia yang beraneka ragam. Ada tampilan manusia yang tampak “keren”, tetapi tidak sedikit pula tampilan manusia yang masih *ndeso* dan *katrok*.

Semakin kritis seseorang, biasanya semakin membuat ia mampu memaknai alam sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan. Anda tidak perlu kaget ketika melihat orang memaknai kayu sebagai “kayu bakar”. Tetapi di hadapan orang yang kritis, kayu bisa dimaknai lebih dari sekedar “kayu bakar”. Ia bisa saja dimaknai sebagai sebuah “ukiran indah” yang bernilai tinggi. Berbagai peralatan kehidupan yang dihasilkan manusia ada puluhan, ratusan, dan mungkin sampai berbilang ribuan item. Coba perhatikan! Untuk menuju kepada sebuah aktivitas “makan”, ada berapa item peralatan yang dikreasikan oleh manusia? Kuantitas dan kualitas peralatan yang dikreasikan manusia untuk menuju pada satu aktivitas “makan” sangat banyak macamnya. Dan, item peralatan itu tidak bersifat final. Ia akan terus berkembang dari waktu ke waktu.

Nenek moyang kita dulu memasak makanan di tungku dengan menggunakan tembikar berbahan bakar tanah liat. Pemanasnya menggunakan kayu bakar. Beberapa waktu kemudian ia bergeser menjadi kompor minyak dengan menggunakan peralatan masak berbahan aluminium. Proses memasak seperti itu mengharuskan manusia bertarung dengan asap dan jelaga yang bisa membuat mata terasa pedih. Tapi kini, dengan sekali klik pada sebuah alat masak berbasis elektronik, dalam waktu sekejap kita sudah mendapatkan nasi yang siap saji. Perubahan kuantitas dan kualitas jauh lebih dahsyat terjadi dalam bidang teknologi modern. Umur produk teknologi modern semakin lama terlihat semakin pendek.

Varian produk teknologi yang hari ini disebut canggih, ternyata hanya dalam hitungan bulan dapat dilahirkan peralatan kehidupan yang jauh lebih canggih, lebih mudah dan nyaman digunakan, dan lebih terjangkau untuk bisa dibeli oleh banyak orang. Inilah berkah *ketidaksempurnaan* dan *kebelum-jadi-an* yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ketika seseorang melihat ada ruang ketidaksempurnaan atas sebuah produk, maka terbuka kepada orang yang mau dan mampu berpikir kritis untuk lebih menyempurnakannya. Kehidupan manusia akhirnya diisi dengan perlombaan untuk terus menyempurnakan sebuah produk. Penyempurnaan produk inilah yang membuat kehidupan manusia akan terus berkembang, semakin berkualitas; dan tentu saja diharapkan akan semakin *manusiawi*.

Barangkali saat ini Anda harus mengirimkan berita rekomendasi medis yang bersifat darurat kepada pihak lain yang membutuhkan.

Anda bisa saja melakukan itu dengan menggunakan paket surat pos, dan memerlukan waktu 24 jam untuk sampai di tempat tujuan. Tetapi dengan kehadiran teknologi informasi, berita rekomendasi medis tadi bisa saja sampai di tempat tujuan hanya dalam beberapa detik dengan menggunakan perangkat email. Dan rekomendasi medis tadi dalam detik itu juga bisa digunakan oleh pihak yang berkompeten untuk menyelamatkan kehidupan seorang pasien. Bayangkan kalau informasi medis yang sedemikian penting itu masih terseok-seok di perjalanan, dan baru sampai kepada pihak yang sangat membutuhkan pada keesokan harinya. Bisa jadi pasien yang sedang sakit tidak tertolong jiwanya. Inilah amaliah seseorang yang terus berpikir kritis, yang tidak berhenti untuk mengembangkan produk teknologi sehingga mampu membuat kehidupan menjadi lebih *manusiawi*.

Kita lihat, sikap kritis seseorang telah mengantarkannya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Seseorang yang memiliki kebiasaan untuk mempertanyakan tentang sesuatu akan memungkinkannya untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Ia tidak menggunakan kaca mata kuda untuk melihat sebuah persoalan. Dan karena itu, ia akan mampu tampil sebagai sosok yang berwawasan luas dalam menyikapi persoalan yang dihadapinya. Orang yang berwawasan luas akan menggerakkan dirinya untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian final tentang apa yang dihadapinya. Ia menyediakan ruang cukup bagi pikirannya untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Ia pun memiliki stok toleransi yang cukup ketika melihat sebuah alpha dari produk pemikiran.

Orang yang terbiasa berpikir kritis lazimnya adalah orang yang sangat bijak. Ia bukanlah tipikal orang yang gampang memvonis salah pada pemikiran orang lain yang berbeda dengan pemikirannya. Orang yang kritis justru akan terdorong untuk melihat sisi terang dari sebuah kegelapan. Ia gampang menemukan sisi keunggulan dari sebuah kelemahan. Ia piawai mengambil sisi kebaikan dari sebuah keburukan. Dan Anda lihat, di tangan orang yang mampu berpikir kritis; sampah yang berbau busuk pun bisa diubah menjadi sebuah produk yang bernilai. Di tangan orang-orang yang terbiasa berpikir kritis, hal-hal yang bagi orang lain tampak sederhana bisa ditampilkan menjadi rangkaian produk yang menakjubkan.

Orang-orang besar adalah mereka yang konsisten untuk berpikir kritis. Mereka mampu mengubah hal-hal kecil menjadi sesuatu yang

bernilai besar. Penulis hebat adalah mereka yang mampu menuangkan tulisan dari tema-tema sederhana, tapi mampu menginspirasi dan menghipnotis banyak orang karena pesan-pesan besar yang disampaikannya. Sebaliknya, orang-orang kerdil adalah mereka yang terbiasa membesar-besarkan hal yang tidak penting.

Kebiasaan membesar-besarkan hal yang tidak penting sesungguhnya merupakan buah dari tumpulnya sikap kritis. Ketika seseorang kehilangan sikap kritis, pada saat itulah ia akan gampang terperosok ke dalam perdebatan yang tidak produktif. Ini sesungguhnya adalah buah dari cara pandang dengan menggunakan perspektif kacamata kuda. Ia buru-buru menganggap pemikirannya yang paling sah. Dampaknya, ia akan buru-buru memvonis salah pemikiran orang lain yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Bayangkan kalau orang lain memiliki kualitas pemikiran yang serupa. Yang muncul kemudian adalah berbagai perdebatan yang tidak bermutu. Dan jangan berharap dari tangan mereka akan mampu dilahirkan karya-karya besar. Mereka telah membuang percuma potensi sikap kritisnya. Dan mereka pun kehilangan kesempatan emas untuk menghasilkan karya-karya besar.

B. Kemampuan Berpikir Kritis Kreatif dalam Lingkungan Dunia yang Terus Berubah

Keunggulan orang-orang berpikir kritis yang paling utama adalah kemampuannya yang mumpuni untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Dalam kehidupan yang semakin kompleks, maka kemampuan memaknai kehidupan dari berbagai sudut pandang menjadi hal yang harus dimiliki oleh semua orang. Setiap saat Anda akan dihadapkan pada berbagai persoalan yang menuntut Anda untuk mampu mengambil keputusan secara komprehensif, cepat, dan tepat. Hal ini hanya akan mungkin Anda lakukan kalau sejak dini sudah membiasakan diri untuk berpikir kritis.

Menurut Friedman (2006), kehidupan dunia yang cepat berubah, dan tuntutan persaingan yang semakin menggila hanya akan bisa dihadapi dengan terus mengasah kemampuan berpikir kritis. Berikut ini adalah beberapa buah yang dapat dipetik oleh siapa pun yang membiasakan diri untuk berpikir kritis:

Pertama, orang yang terbiasa berpikir kritis akan lebih mudah untuk bersikap fleksibel. Ia akan lebih mudah melihat persoalan dari

berbagai sudut pandang. Ia juga akan mampu menjadi sosok yang mudah memahami pendapat orang lain. Ia tidak akan terpaku dengan cara pandang sebagaimana yang ia pikirkan. Keuntungan orang yang terbiasa berpikir fleksibel adalah dimilikinya berbagai alternatif jawaban ketika harus menjawab sebuah persoalan.

Kedua, orang yang terbiasa berpikir kritis akan lebih mudah menemukan cara kerja dan berbagai peluang. Konon, dalam dunia yang terbuka dan berubah cepat juga berdampak pada berbagai peluang usaha. Hanya faktanya, tidak semua orang mampu menangkap peluang, meski peluang itu sudah ada di depan mata. Kajian yang dilakukan Prianto (2013) menemukan bahwa kemampuan seseorang untuk menangkap peluang usaha sangat berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya dikatakan oleh Prianto (2013) bahwa salah satu indikator orang yang mampu berpikir kritis adalah ketajamannya dalam membuat analisis masalah, membuat orang lebih cepat menemukan peluang, dan memperkuat kesiapan orang untuk memasuki lapangan kerja.

Ketiga, orang yang terbiasa berpikir kritis akan mampu menjaga independensi. Ia tidak akan gampang terpengaruh dengan perubahan *tren*. Ia mampu menjadi sosok yang otonom, dan tetap mampu menjaga jarak dengan berbagai persoalan di luar dirinya. Ia tidak akan gampang terbawa arus perubahan. Sebaliknya, dengan sikap kritisnya; ia akan mampu menganalisis perubahan yang terjadi dan mampu mengambil sisi positif dari berbagai perubahan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang yang mampu berpikir kritis tidak akan gampang *shock* ketika menghadapi perubahan yang sering kali terjadi secara tiba-tiba. Banyak sekali para pekerja yang *shock*, ketika ada tuntutan perubahan spesifikasi kecakapan kerja. Lazimnya, orang yang terbiasa berpikir kritis sudah mampu melihat kecenderungan perubahan tuntutan kerja sejak jauh hari; dan ia sudah jauh hari pula meng-*update* pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Keempat, puncak kebiasaan berpikir kritis adalah tumbuhnya kreativitas. Orang yang terbiasa berpikir kritis secara otomatis akan terbiasa untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Kemampuan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang akan mengantarkannya sebagai sosok yang kreatif. Ia berkesempatan untuk menggabungkan berbagai ide, gagasan, dan cara pandang untuk dihasilkannya sebuah pemikiran yang lebih segar dan baru. Jika Anda

menghadapi suatu persoalan, maka Anda akan memiliki banyak opsi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berpikir kritis akan membuat Anda tidak akan kehabisan ide-ide segar, kreatif, dan inovatif.

Berpikir kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengembangkan berbagai ide baru, mencari cara kerja baru, cara pandang baru terhadap berbagai hal yang ada dalam diri dan lingkungannya. Sejak lebih dari 60 tahun yang lalu, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melihat satu persoalan dari berbagai sudut pandang (*divergent thinking*) (Batey & Furnham, 2006). Kaufman & Sternberg (2010), mendefinisikan kreativitas baik dari dimensi *convergent thinking*, yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk berpikir cepat, tepat, dan logis; serta dimensi *divergent thinking*, yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah. Menurut Batey & Furnham (2006) dan Kaufman & Sternberg (2010) kreativitas seseorang akan menunjukkan fungsi optimalnya ketika ia mampu mengembangkan *convergent thinking* dan *divergent thinking* secara simultan. Artinya, orang kreatif yang berfungsi optimal apabila ia memiliki berbagai ide dan terobosan baru, dan pada saat yang sama ia juga mampu mengaplikasikan temuannya dalam karya nyata.

Kreativitas membutuhkan proses yang berlangsung terus menerus, diawali dari kegiatan analisis dari apa yang sudah dikreasikan, untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Dalam kaitan ini, diperlukan kemampuan berpikir kreatif, yang meliputi kemampuan: berimajinasi-bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan: “apa yang terjadi jika”, eksperimentasi, menemukan solusi, mengelaborasi berbagai alternatif pemikiran, menguji efektivitas berbagai alternatif, dan mengkomunikasikan hasil temuan (Batey & Furnham, 2006).

Livne & Milgram, (2006) mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh langsung antara kecakapan bidang matematika dan kemampuan berpikir kreatif. Dengan kata lain, orang yang kreatif tidak selalu cerdas dalam bidang akademik, atau sebaliknya orang yang cerdas tidak secara otomatis akan menjelma menjadi sosok yang kreatif. Temuan ini membawa pesan kepada siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran bahwa pengembangan kreativitas dapat dilakukan pada semua orang di level apa pun. Albert Einstein, dan Thomas Alva Edison adalah sosok kreatif yang pada saat mengenyam bangku pendidikan sempat dianggap sebagai orang yang berkemampuan

akademik rendah. Belakangan dua orang ini menjadi orang-orang hebat yang mengubah tampilan kehidupan umat manusia di dunia berkat sentuhan pemikiran kreatifnya.

Orang yang kreatif selalu berhati lapang, karena cara pandangnya yang luas terhadap setiap persoalan. Orang yang kreatif tidak akan terburu-buru untuk membuat kesimpulan tentang segala sesuatu. Orang yang kreatif pasti tidak akan menyimpulkan sampah sebagai sumber masalah, karena ternyata ditangan mereka ia bisa dikreasikan menjadi komoditas yang lebih bernilai. Lihatlah, orang yang kreatif ternyata juga menunjukkan kemampuannya untuk berbaik sangka terhadap segala hal. Ia selalu berpikiran positif (*positive thinking*) terhadap segala hal. Ia selalu berhati damai karena mampu mengontrol diri dan lingkungannya. Ia tidak gampang tersulut emosinya, atau gampang patah hati ketika menghadapi persoalan.

Albert Georgyi, pemenang hadiah Nobel sekaligus penemu vitamin C; membuat gambaran sederhana tentang orang-orang yang kreatif. Orang kreatif adalah mereka yang berpikir tentang segala sesuatu yang tidak dipikirkan oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, kita sering menyaksikan orang kreatif yang mengkreasikan tentang hal-hal baru yang bagi orang lain dianggap mustahil untuk bisa dilakukan. Ia adalah penemu jalan baru, di saat kebanyakan orang menghadapi jalan buntu. Ia adalah pencipta produk yang menjadi kebutuhan hidup manusia, di saat belum ada seorang pun yang menyadari bahwa produk tersebut memang dibutuhkan. Hal ini mengingatkan kita pada ajaran Plato pada ribuan tahun yang lalu bahwa kebutuhan adalah induk dari penemuan.

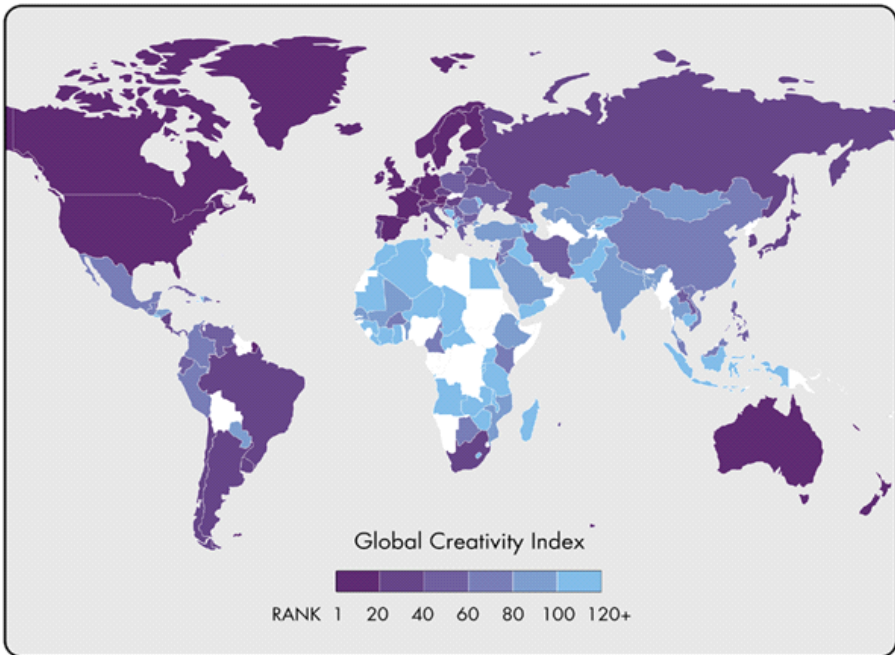
Manusia merasakan adanya kebutuhan apabila mendapatkan tekanan hidup. Oleh karena itu, berbagai temuan baru sering kali ditemukan oleh orang-orang yang tinggal di lingkungan yang keras. Pelaut ulung pun juga hanya akan lahir dari samudra yang ganas. Lingkungan yang nyaman, yang menyediakan dengan cuma-cuma apa pun yang diperlukan manusia untuk hidup sering kali justru membuat orang-orang yang tinggal di dalamnya menjadi sosok yang tidak terasah kreativitasnya. Plato pun menyatakan bahwa kadar kreativitas seseorang akan ditentukan oleh kadar tekanan hidup yang dirasakan. Artinya, orang yang tidak merasakan adanya tekanan hidup, maka upaya kreatifnya tidak akan muncul.

C. Peran Kreativitas dalam Memperkuat Peradaban

Entah apakah merupakan sebuah kebetulan atau tidak, berbagai negara maju umumnya memiliki lingkungan alam yang keras. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari indikator iklim yang ekstrem, pada saat musim dingin tiba temperatur cuaca sampai berada di jauh titik nol derajat. Sebaliknya, pada saat musim panas temperatur cuaca jauh di atas batas normal. Lingkungan alam yang keras tampaknya membuat orang-orang yang tinggal di negeri tersebut untuk menemukan berbagai cara agar mereka tetap bisa nyaman di dalamnya (*survive*). Kondisi alam yang keras tampaknya memicu munculnya berbagai temuan baru di berbagai bidang.

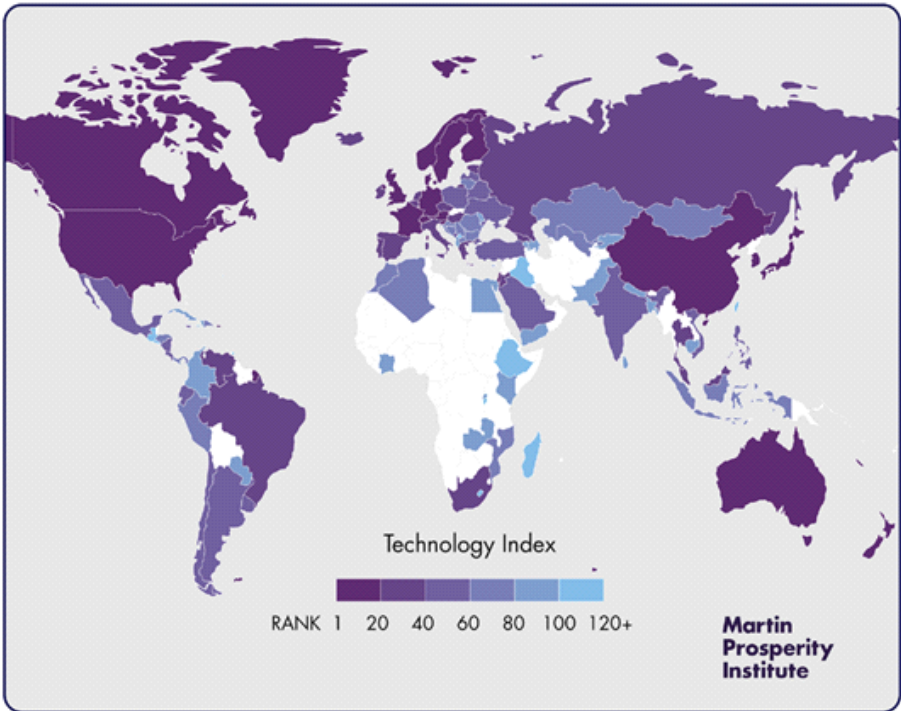
Berbagai temuan di bidang teknologi yang menjadi cikal bakal hadirnya teknologi canggih, yang membuat kehidupan dunia ini bisa segemerlap sekarang; juga lahir dari negeri yang lingkungan alamnya ganas. Di Asia, lihatlah Jepang atau Korea. Dua negeri ini mampu menjelma menjadi negeri yang modern, padahal negara tersebut dihadiah Tuhan dengan lingkungan alam yang sangat keras. Negeri tetangga yang sangat maju dan modern, Singapura; tidak hanya merupakan negara yang sangat mini dari sisi luas wilayah. Alam Singapura juga memberi bekal yang sangat terbatas bagi orang-orang yang dulu tinggal di dalamnya. Tapi alam yang keras itu tampaknya justru menjadi pemicu munculnya upaya kreatif, yang membuat berbagai negeri itu tampil sebagai negeri maju dan modern. Singkatnya, kita perlu menghadirkan berbagai tekanan yang harus dapat dirasakan oleh siapa pun yang hendak mengembangkan kemampuan kreativitasnya.

Laporan Global Creativity Index (GCI) tahun 2015 menggambarkan peringkat kreativitas penduduk di berbagai negara di dunia (lihat gambar 1). Terlihat jelas bahwa negara-negara dengan peringkat kreativitas tinggi adalah negara-negara industri maju dan menguasai teknologi mutakhir. Termasuk dalam kategori ini adalah negara-negara kawasan Eropa, Amerika termasuk beberapa Negara Amerika Latin, Australia, Singapura, Jepang, Hong Kong, dan Korea. Mengacu pada peta GCI 2015, kreativitas penduduk Indonesia relatif tertinggal bila dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darusalam, Filipina, dan Vietnam. Indeks kreativitas manusia Indonesia relatif sejajar dengan Kamboja.



Gambar 1: Global Creativity Index,2015 (GCI,2015)

Negara-negara yang memiliki peringkat indeks kreativitas sangat baik ternyata ikut memengaruhi perkembangan teknologi (lihat gambar 2). Negara-negara yang menguasai teknologi mutakhir adalah negara-negara yang didukung oleh penduduk yang kreatif. Peta berikut ini menggambarkan peringkat negara di dunia dalam penguasaan teknologi. Posisi Indonesia dalam hal penguasaan teknologi di kawasan ASEAN nyaris sama persis dengan posisi indeks kreativitas. Hal ini membuktikan bahwa sejauh mana suatu negara mampu menguasai teknologi modern akan sangat ditentukan oleh indeks kreativitas.



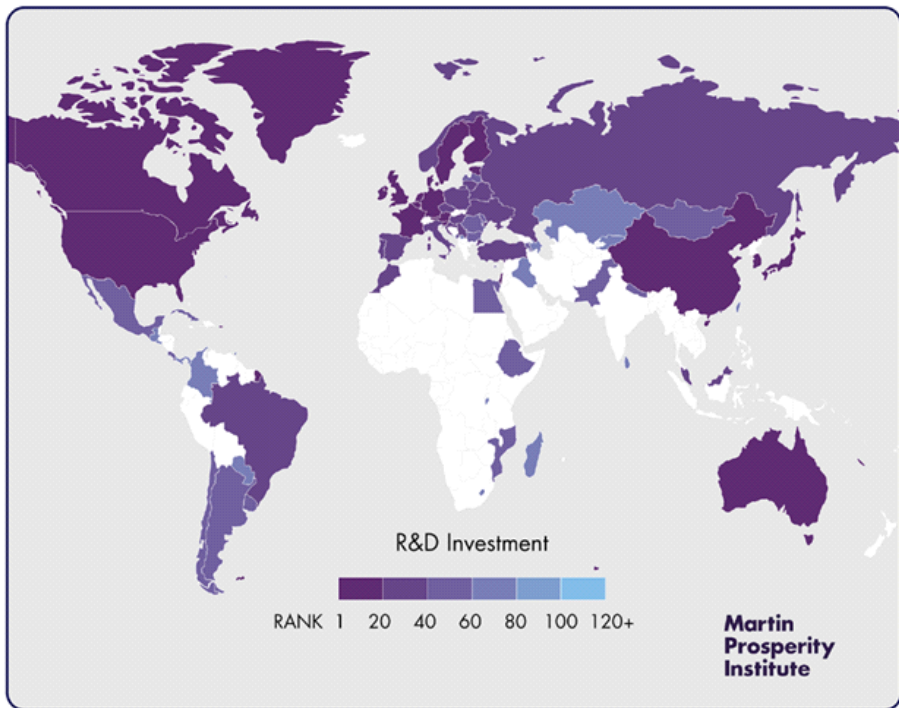
Gambar 2: Global Technology Index, 2015 (GCI, 2015)

Tingkat kreativitas dan kemampuan penguasaan teknologi ternyata juga tidak dapat dipisahkan dengan budaya penelitian dan pengembangan (*research and development, R&D*). Budaya penelitian dan pengembangan tentu tidak dapat dipisahkan *political will* pemerintah. Sesungguhnya Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Tetapi bukan rahasia lagi bahwa kebanyakan dari mereka tidak tinggal di Indonesia karena rendahnya dukungan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Banyak orang Indonesia yang hebat, tetapi memilih tinggal di negara-negara maju, yang memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Gambar 3 memperlihatkan bagaimana posisi Indonesia dalam memberikan dukungan investasi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Gambar 3 memperlihatkan negara-negara yang memberikan pendanaan besar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Negara-negara maju adalah mereka yang memberikan investasi besar untuk bidang penelitian dan pengembangan. Di kawasan ASEAN. Singapura, Malaysia, dan Brunei Darusalam lebih dulu memberikan

perhatian yang besar untuk penelitian dan pengembangan. China, yang kini tampil sebagai raksasa ekonomi dunia juga memberikan perhatian yang amat besar untuk penelitian dan pengembangan. Posisi peringkat negara-negara yang memberikan perhatian besar pada kegiatan penelitian dan pengembangan juga nyaris sama dengan peringkat kreativitas dan penguasaan teknologi.

Ada hubungan interdependensi antara investasi dalam hal penelitian dan pengembangan dengan indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi.



Gambar 3: R&D Investment Index, 2015 (GCI,2015)

GCI (2015) telah melakukan kajian dengan menganalisis korelasi antara besaran indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi dengan berbagai variabel yang meliputi: pendapatan per kapita, daya saing bangsa, kemampuan kewirausahaan, indeks sumber daya manusia, kemampuan melakukan mobilitas sosial, dan pengurangan ketidakadilan. Sampel penelitian diambil dari negara-negara Asia, Asia Pasifik, Amerika, Eropa, dan Afrika.

Kajian GCI (2015) mengungkapkan 5 fakta empirik yang menarik untuk disimak. *Pertama*, ada korelasi positif antara besaran pendapatan per kapita suatu negara dengan indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi. Indeks kreativitas berhubungan positif dengan pendapatan per kapita, dengan koefisien korelasi $r = 0,648$. Sedangkan indeks penguasaan teknologi berhubungan positif dengan pendapatan per kapita, dengan koefisien korelasi $r = 0,533$. Dengan kata lain, indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi memberikan kontribusi (r^2) bagi terbentuknya pendapatan per kapita masing-masing berada pada kisaran 42% dan 28%. Fakta empirik ini juga membuktikan bahwa kemampuan ekonomi dan warga masyarakat, bangsa dan negara tidak selalu ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam. Sepanjang suatu negara didukung oleh sumber daya manusia yang kreatif, maka perekonomian negara secara otomatis akan terangkat. Gambar 1 membuktikan bahwa berbagai negara yang memiliki peringkat kreativitas teratas adalah negara-negara yang kemampuan ekonominya kuat. Fakta lain menunjukkan bahwa kreativitas menjadi pemicu peningkatan kualitas perekonomian negara.

Kedua, besaran indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi berhubungan positif dengan daya saing bangsa di tingkat global. Indeks kreativitas berhubungan positif dengan daya saing bangsa di tingkat global, dengan koefisien korelasi $r = 0,777$. Sedangkan indeks penguasaan teknologi berhubungan positif dengan daya saing bangsa di tingkat global, dengan koefisien korelasi $r = 0,763$. Dengan kata lain, indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi memberikan kontribusi (r^2) terhadap daya saing bangsa di tingkat global masing-masing berada pada kisaran 60% dan 58%. Kajian GCI memberikan gambaran betapa besarnya peran indeks kreativitas dan penguasaan teknologi dalam membangun daya saing bangsa. Daya saing bangsa merupakan salah satu indikator utama yang menentukan sebuah negara untuk dijadikan tujuan investasi. Semakin tinggi investor global masuk ke suatu negara, maka akan semakin tinggi pula intensitas kegiatan ekonominya, dan hal itu secara otomatis akan berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Ketiga, besaran indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi berhubungan positif dengan indeks kewirausahaan. Indeks kreativitas berhubungan positif dengan indeks kewirausahaan, dengan koefisien korelasi $r = 0,827$. Sedangkan indeks penguasaan teknologi berhubungan

positif dengan indeks kewirausahaan, dengan koefisien korelasi $r = 0,723$. Dengan kata lain, indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi memberikan kontribusi (r^2) bagi tumbuhnya kemampuan berwirausaha masing-masing berada pada kisaran 68% dan 52%. Indeks kreativitas dan penguasaan teknologi berperan besar dalam membangun budaya kewirausahaan. Sebagaimana diketahui, kewirausahaan merupakan salah satu penggerak penting dari kegiatan ekonomi di sebuah negara. Kewirausahaan juga diyakini sebagai pilar utama untuk terciptanya lapangan kerja, sehingga dapat meminimalkan angka pengangguran. Kajian GCI membuktikan bahwa upaya untuk memperkuat budaya wirausaha dapat dilakukan dengan memperkuat indeks kreativitas. Penguatan kemampuan kreativitas harus menjadi perhatian utama di berbagai jenjang pendidikan.

Keempat, besaran indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi berhubungan positif dengan kualitas sumber daya manusia. Indeks kreativitas berhubungan positif dengan kualitas sumber daya manusia, dengan koefisien korelasi $r = 0,782$. Sedangkan indeks penguasaan teknologi berhubungan positif dengan kualitas sumber daya manusia, dengan koefisien korelasi $r = 0,715$. Dengan kata lain, indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi memberikan kontribusi (r^2) bagi kualitas sumber daya manusia masing-masing berada pada kisaran 61% dan 51%. Kajian ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan memperkuat kemampuan berpikir kreatif. Dengan kata lain, semua pihak terutama pemerintah dan institusi pendidikan, termasuk para orang tua; harus mengambil peran untuk mendorong para generasi muda agar membiasakan diri untuk berpikir kreatif.

Kelima, besaran indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi berhubungan negatif dengan ketidakadilan sosial. Indeks kreativitas berhubungan negatif dengan ketidakadilan sosial, dengan koefisien korelasi $r = -0,230$. Sedangkan indeks penguasaan teknologi berhubungan negatif dengan ketidakadilan sosial, dengan koefisien korelasi $r = -0,186$. Dengan kata lain, indeks kreativitas dan indeks penguasaan teknologi berkontribusi (r^2) untuk menekan ketidakadilan sosial masing-masing berada pada kisaran 5,3% dan 3,4%. Kajian ini membuktikan bahwa semakin tinggi indeks kreativitas dan penguasaan teknologi di suatu negara, maka koefisien ketidakadilan sosial akan semakin bisa diturunkan. Hal ini wajar, karena kalau sebuah negara didukung oleh

penduduk yang kreatif dan mampu menguasai teknologi maka budaya wirausaha akan tumbuh kuat, pendapatan per kapita akan meningkat, daya beli akan bertambah, mobilitas sosial akan semakin berkualitas; dan pada akhirnya kesenjangan sosial akan dapat diminimalkan.

Enam fakta empirik tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengembangan kreativitas bagi para generasi penerus. Semua komponen masyarakat dan negara harus bersatu dalam sikap dan pandangan untuk menjadikan pengembangan kreativitas sebagai bagian penting dalam membangun bangsa dan negara. Kajian GCI (2015) bahkan juga mengungkapkan bahwa pengembangan kreativitas juga dapat digunakan untuk memperkuat sikap toleransi. Masyarakat pada sebuah negara yang memiliki sikap kreativitas yang telah mengakar kuat akan memiliki sikap terbuka dengan siapa pun, termasuk mereka yang termasuk dalam kategori minoritas.

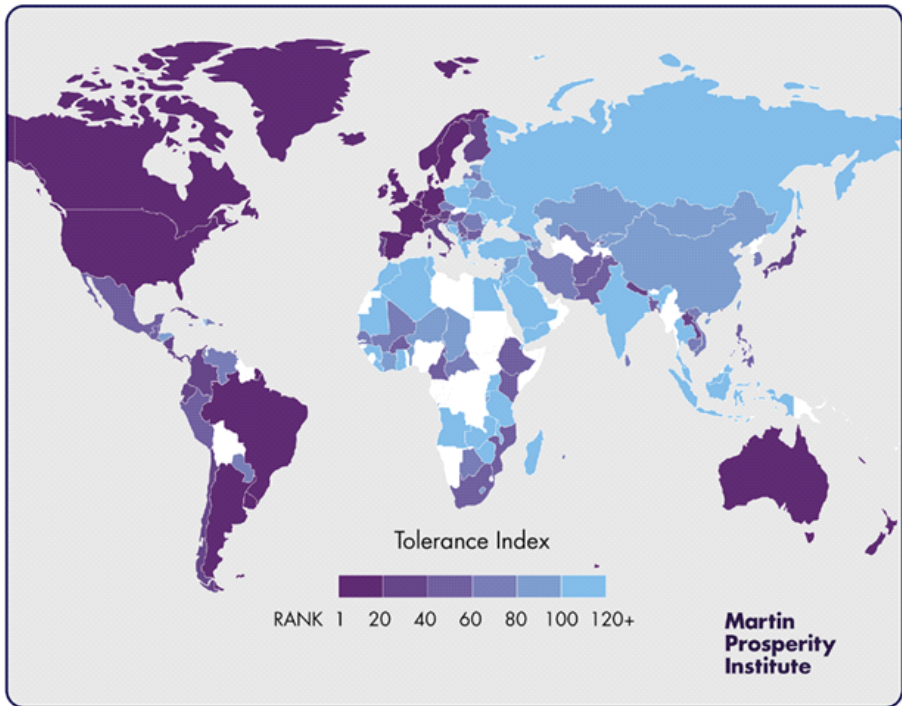
Bagi masyarakat yang kreatif, isu-isu yang berkaitan dengan ras, etnis, dan kelompok minoritas dan yang sejenisnya dianggap sebagai bukan hal yang perlu diperdebatkan sepanjang kehadiran mereka memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Mereka terbuka dan menghargai ide-ide kreatif dari siapa pun tanpa memedulikan latar belakang ras dan etnis. Itulah sebabnya, tidak sedikit orang-orang kreatif dan cerdas dari negara kita justru merasa lebih nyaman tinggal di negara-negara maju, yang memiliki budaya toleransi dan pengembangan kreativitas yang kuat.

Entah sebuah kebetulan atau bukan, di negara kita; yang kebetulan budaya kreativitas belum mengakar kuat, setidaknya dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju; isu-isu yang berkaitan dengan primordialisme sering kali dianggap lebih seksi dibandingkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan prestasi dan kemampuan kreativitas seseorang. Beberapa waktu yang lalu kita pernah menghabiskan banyak energi untuk memperdebatkan keabsahan Arcandra Tahar, seorang profesional muda yang ahli di bidang perminyakan. Sebagaimana diketahui, sebelum dipanggil pulang oleh Presiden Joko Widodo untuk bergabung menjadi menteri ESDM; Tahar sudah lebih dari 15 tahun bekerja di perusahaan perminyakan, dan puncaknya menjadi Presiden *Petroneering*, sebuah perusahaan minyak di Amerika Serikat. Bahkan begitu hebat keahlian yang dimiliki Tahar, pemerintah Amerika konon sampai memberi fasilitas kewarganegaraan kepada Tahar. Belakangan problem *double citizenship* inilah yang kemudian menggelincirkan

seorang Tahar dari kursi kabinet, yang hanya sempat diduduki selama 3 minggu; meski beberapa waktu kemudian keahliannya kembali dipergunakan oleh negara.

Jauh sebelum itu, ada putra terbaik Indonesia yang menggemparkan Jerman; karena temuannya dalam bidang kedirgantaraan. Ia adalah Baharudin Jusuf Habibi. Jerman memberikan apresiasi yang luar biasa besarnya kepada BJ Habibi, sehingga meskipun BJ Habibi menolak dengan tawaran pindah kewarganegaraan; tetapi pemerintah Jerman memberikan keleluasaan kepada BJ Habibi dan keluarganya untuk tinggal di Jerman sampai sekarang. Singkatnya, negara-negara maju yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki budaya kreativitas kuat ternyata memiliki sikap toleransi yang tinggi, lebih-lebih kepada mereka yang berprestasi unggul. Oleh karena itu indeks toleransi terbaik juga ada di negara-negara yang maju (lihat gambar4). Negara-negara maju tidak akan berpikir lama untuk memberikan fasilitas istimewa kepada mereka yang berprestasi.

Sebagai pembelajaran, bandingkan dengan negara kita. Kita dulu memiliki atlet bulu tangkis, warga negara keturunan China. Namanya Ivana Lie. Ivana Lie resmi menjadi atlet bulu tangkis penghuni Pelatnas pada usia 16 tahun. Ketika itu, ia dan orang tua tidak memiliki kewarganegaraan, meski tinggal di Indonesia. Pada tahun 1979, ketika menginjak berusia 19 tahun; ia berhasil menorehkan prestasi juara tunggal putri Denmark Open dan meraih medali emas SEA Games. Tahun 1980, bersama tim putri Indonesia, Ivana Lie meraih *runner up* kejuaraan dunia bulu tangkis di Jakarta. Bertahun-tahun ia bepergian keluar negeri tanpa paspor, walaupun mewakili Indonesia. Ia baru diakui sebagai warga negara Indonesia pada akhir tahun 1982, setelah berbicara langsung tentang problem kewarganegaraannya kepada Presiden Soeharto.



Gambar 4: Tolerance Index,2015 (GCI, 2015)

Yang lebih heboh adalah Susi Susanti. Ia adalah atlet bulu tangkis Indonesia pertama yang mempersembahkan medali emas pada Olimpiade Barcelona, Spanyol. Tapi tahukah Anda, bahwa saat itu ia belum 100% diakui sebagai warga negara Indonesia. Saat itu ia hanya memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa ia adalah *warga negara sementara!*

Berbagai kajian membuktikan bahwa kreativitas merupakan salah satu kunci dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Sebagaimana diuraikan pada bagian awal tulisan ini, bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan dalam keadaan belum final. Manusia juga merupakan satu-satunya makhluk Tuhan yang menghidupi alam yang juga dalam keadaan belum tuntas. Tugas utama manusia adalah untuk men-jadi-kan diri dan lingkungannya akan mampu tampil lebih manusiawi. Dengan berbekal pikiran yang dianugerahkan oleh Tuhan, maka manusia berkesempatan untuk mengembangkan akal budinya untuk mengkreasikan berbagai kebutuhan hidup dan kehidupannya. Dalam kaitan inilah, kadar kreativitas akan menjadi penentu sejauh mana manusia mampu membangun peradaban yang semakin bermartabat dan manusiawi.

Plato menyatakan bahwa *creativity is a skill, not a gift!* Kreativitas adalah berkaitan dengan kecakapan, ia bukan hadiah yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang. Artinya, semakin sering seseorang mengasah kemampuan untuk menemukan berbagai ide dan cara kerja baru; maka kadar kreativitas seseorang akan semakin meningkat. Berbagai temuan baru selalu dihasilkan oleh orang-orang yang secara konsisten mengkreasikan secara terus menerus, sampai dihasilkan temuan yang *fit*. Lihatlah bagaimana cerita heroik seorang Thomas Alva Edison dalam menemukan bola lampu pijar. Konon ia mengkreasikan temuan itu sampai seribu kali percobaan. Hal ini tidak mungkin bisa terjadi kalau Edison bukan orang yang konsisten.

Berbagai produk teknologi yang sekarang hadir di tangan Anda juga menjalani proses serupa. Jangan menganggap produk teknologi yang Anda gunakan sekarang adalah produk final. Ada ribuan orang kreatif yang menawarkan ide untuk lebih menyempurnakan produk yang sekarang sedang Anda gunakan. Jangan heran apabila di hadapan Anda hadir sebuah produk teknologi canggih; tiba-tiba bulan depan ada produk teknologi serupa yang jauh lebih spektakuler tingkat kecanggihannya. Orang-orang kreatiflah yang membuat berbagai peralatan hidup kita menjadi semakin *smart*, mudah digunakan, nyaman, dan dapat dijangkau oleh sebanyak mungkin orang. Kita wajib berterima kasih kepada mereka, karena tanpa kehadiran mereka; dunia tempat kita berpijak ini mungkin masih tetap gelap gulita. Singkat cerita, orang-orang kreatif memegang peran utama yang menentukan berkembangnya kehidupan masyarakat di suatu negara. Oleh karena itu pengembangan kemampuan berpikir kreatif dan kritis harus menjadi agenda utama dalam membangun bangsa. Aktivitas pendidikan, baik formal, non formal, dan informal harus meletakkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis sebagai sasaran utama.

Sikap kritis dan kreativitas akan hanya mampu berkembang dengan baik apabila diikuti oleh kesediaan seseorang untuk mengoptimalkan penggunaan pikiran. Kegiatan pendidikan harus berorientasi pada upaya yang sangat kuat untuk mengembangkan daya berpikir dan daya baca. Izinkan saya untuk curiga apabila ada yang mengatakan bahwa telah terjadi degradasi kreativitas dan sikap kritis di kalangan kaum terdidik. Jangan-jangan degradasi kreativitas dan sikap kritis itu terjadi karena banyak kaum terdidik yang berpikiran kosong. Mereka punya pikiran, tetapi pikirannya sedang diparkir.

Jangan-jangan institusi pendidikan juga kurang serius dalam mengembangkan kemampuan berpikir para warga didiknya. Jangan lupa, salah satu tujuan mulia dari aktivitas pendidikan adalah untuk membantu manusia mengoptimalkan daya pikirannya. Kalau kini ada yang mengatakan telah terjadi degradasi kreativitas dan sikap kritis, jangan-jangan itu merupakan lonceng kematian aktivitas pendidikan. Maka saran saya sangat sederhana, apabila Anda menginginkan selalu mampu berpikir kreatif dan berpikir kritis, jangan sering-sering pikiran Anda sedang terparkir!

Memperkuat Kesiapan Dini untuk Berubah

Dalam era persaingan yang ketat dan diikuti dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka berbagai kecenderungan baru menjadi lebih cepat berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik pada tataran masyarakat lokal maupun global. Menghadapi fenomena tersebut, beberapa pakar pengembang organisasi, baik organisasi privat maupun publik menganjurkan agar semua warga organisasi untuk menyegerakan langkah dalam mengembangkan budaya kerja baru.

Barkema, *et al* (2002) menjelaskan beberapa budaya kerja baru yang harus dikembangkan oleh semua organisasi antara lain adalah budaya bekerja cepat, cepat mengambil keputusan, cepat belajar, serta cepat untuk mengembangkan kreasi dan inovasi kerja. Fenomena lain yang terjadi dalam era baru antara lain ditandai dengan gejala umur produk, ilmu pengetahuan, dan teknologi; serta tata kerja dalam organisasi yang menjadi tampak cepat usang sehingga perlu untuk segera diperbaharui. Artinya era sekarang dan ke depan sangat membutuhkan keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan dan mengikuti perubahan dengan cepat. Orang-orang yang mampu cepat mengikuti perubahan akan selalu eksis dalam lingkungan dunia yang terus berubah dan dalam iklim persaingan yang sangat ketat.

Menurut Samson & Terziovksy (1999), kesiapan untuk berubah antara lain dipengaruhi oleh sejauh mana pengetahuan dan teknologi baru bisa diadopsi oleh warga organisasi. Selanjutnya Simpson

menyarankan tentang perlunya untuk memperkenalkan pengetahuan dan teknologi baru ke dalam program pengembangan organisasi. Untuk itu dibutuhkan pimpinan organisasi yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu membuat program yang memungkinkan warga organisasi bisa menerapkan metode kerja baru dengan menggunakan teknologi baru. Program kerja baru tersebut akan berjalan lebih efisien apabila didukung dengan kesiapan institusi dan warga organisasi untuk menerapkan budaya kerja yang baru. Dalam kaitan inilah pimpinan organisasi perlu mengkreasikan iklim kerja dan membudayakan nilai-nilai kerja yang baru.

Berkaitan dengan fenomena sebagaimana diungkapkan di atas, beberapa peneliti seperti Armenakis, *et.al.* (1993) dan Lehman, *et.al.* (2002) menyimpulkan bahwa individu dan organisasi yang memiliki kesiapan untuk berubah ternyata lebih memiliki kemampuan untuk tetap eksis dan kian berkembang dalam kancah persaingan global. Hal senada juga dikatakan oleh Friedman dalam bukunya "The Lexus and The Olive Tree" (2000) yang menyatakan bahwa dalam menghadapi era sekarang dan era masa datang, individu dan organisasi hanya akan memiliki dua pilihan, yaitu menjadi bagian dari organisasi yang *cepat* atau menjadi organisasi yang *lambat*. Individu dan organisasi yang memiliki kesiapan untuk berubah akan mampu mengantarkan dirinya sebagai bagian dari organisasi yang cepat dan akan mampu untuk bersaing dalam kancah persaingan. Sebaliknya individu dan organisasi yang lambat bisa dipastikan tidak akan mampu bersaing dalam alam persaingan yang kian ketat.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa kemajuan masyarakat suatu negara antara lain akan sangat tergantung dengan kualitas lembaga pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya (Abrahamson,2000). Lembaga pendidikan yang berkualitas akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, yang selanjutnya akan sangat memengaruhi eksistensi bangsa negara dalam kancah persaingan global. Apakah sumber daya manusia Indonesia dan lembaga pendidikan di Indonesia memiliki kualitas yang mencukupi untuk menghadapi perubahan yang berjalan dengan sangat cepat? Jawaban atas pernyataan ini dapat ditelisik dari seberapa besar derajat kesiapan manusia Indonesia dan institusi pendidikan untuk mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu faktor yang ikut menentukan eksis tidaknya sebuah lembaga pendidikan di tengah-tengah komunitas global yang terus bergerak dan berubah dengan cepat adalah menyangkut keberadaan sumber daya manusia, yang meliputi para staf administrasi, para staf pendidik dan unsur pengelola pendidikan yang memiliki visi ke depan (Desplaces, 2005). Institusi pendidikan yang memiliki staf admisi yang profesional, tenaga pendidik yang berkualitas, dan didukung oleh keberadaan pengelola pendidikan yang visioner akan memungkinkan berkembangnya lembaga pendidikan di tengah persaingan yang kian ketat.

Dikaitkan dengan situasi dunia yang terus berubah, para staf admisi, tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan diharapkan untuk terus mengikuti berbagai kecenderungan baru yang berkembang di masyarakat. Dalam kaitan ini, kesiapan individu untuk berubah menjadi variabel yang sangat menentukan.

Berbagai kajian dan hasil penelitian mengungkapkan beberapa konstruk yang memengaruhi kesiapan individu dan organisasi untuk berubah, yaitu dimilikinya nilai-nilai dan sikap baru yang sesuai dengan perubahan, iklim kerja yang kondusif, dan adanya dukungan organisasi. Kajian dan hasil penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa derajat kesiapan individu untuk berubah juga diasumsikan berkaitan erat dengan kinerja (Manos, 2007).

Berbagai faktor penentu kesiapan seseorang untuk berubah dapat diidentifikasi dari aspek motivasional, kebiasaan belajar yang terus diperkuat, kepemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk menghadapi perubahan masyarakat, serta sifat-sifat dan nilai-nilai yang dikembangkan seseorang dalam menghadapi perubahan (Rafferty & Simons, 2001). Kajian tentang kesiapan untuk berubah dapat digunakan untuk mengintrodusir model pengembangan budaya kerja baru, yaitu budaya kerja yang lebih sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

A. Urgensi Membangun Kesiapan Untuk Berubah

Penguatan kesiapan individu dan institusi pendidikan untuk berubah memiliki nilai urgensi yang tinggi dan memiliki sejumlah kemanfaatan, yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Integrasi dan keterbukaan pasar adalah merupakan ciri utama dalam era global. Kehadiran era global ditandai dengan meningkatnya konstelasi global yang menyebabkan tingkat persaingan menjadi

kian ketat. Dalam era persaingan yang ketat, maka semua organisasi ditantang untuk bisa menampilkan kinerja yang terbaik, yang antara lain ditandai dengan kesiapan dan kesigapan mereka untuk menghadapi dan melakukan perubahan. Individu dan lembaga pendidikan yang memiliki kesiapan untuk melakukan perubahan akan bisa mengantarkannya untuk bisa menjelma menjadi institusi yang adaptif dan siap menghadapi persaingan. Individu dan lembaga pendidikan yang siap menghadapi persaingan inilah yang kelak akan mampu mendorong tingkat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa tumbuh kembangnya masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan institusi pendidikan dan individu yang adaptif, inovatif, berorientasi pada mutu dan terbuka terhadap perubahan yang berkembang di masyarakat.

2. Pembahasan tentang kesiapan menghadapi perubahan diharapkan dapat digunakan untuk mengkaji perilaku warga organisasi (*organizational citizenship behavior*). Bidang kajian ini memiliki dinamika yang tinggi sejalan dengan perubahan yang berkembang di masyarakat. Salah satu komponen penting dalam organisasi adalah keberadaan warga organisasi. Kesiapan dan kesigapan organisasi untuk berubah sangat ditentukan oleh bagaimana perilaku warga organisasi, baik mereka yang berposisi sebagai staf maupun pimpinan. Oleh karena itu, berbagai atribut yang melekat pada warga organisasi diduga juga akan memengaruhi kinerja organisasi.
3. Pembahasan tentang kesiapan menghadapi perubahan diharapkan juga bermanfaat bagi pengembangan pendidikan pada umumnya, terutama dikaitkan dengan perlunya untuk mengembangkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk menghadapi perubahan. Nilai, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk menghadapi perubahan dapat disebarkan kepada generasi mendatang melalui aktivitas pendidikan. Dalam kaitan inilah penting untuk dikaji dan didalami tentang nilai-nilai baru yang berlaku secara global, dan diharapkan dapat dipahami oleh generasi mendatang.

Menurut Lehman, et al (2002), kesiapan organisasi untuk berubah antara lain dipengaruhi sejauh mana pengetahuan dan teknologi baru bisa diadopsi oleh warga organisasi. Selanjutnya dikatakan oleh Lehman et al (2002) tentang perlunya untuk memperkenalkan pengetahuan dan teknologi baru ke dalam program pengembangan

organisasi. Pimpinan organisasi diharapkan segera membuat program yang memungkinkan warga organisasi bisa menerapkan metode kerja baru dengan menggunakan teknologi baru. Program kerja tersebut akan dapat berjalan dengan efisien apabila didukung dengan kesiapan institusi dan warga organisasi untuk menerapkan budaya kerja yang baru. Dalam kaitan inilah pimpinan organisasi perlu mengkreasikan iklim kerja dan membudayakan nilai-nilai kerja positif kepada semua warga organisasi.

Ketersediaan aspek motivasional dari para staf dan pimpinan organisasi (yang antara lain akan terlihat dari dirasakannya sebuah kebutuhan dan desakan untuk melakukan perubahan), bila diikuti dengan ketersediaan nilai-nilai positif yang melekat pada setiap warga organisasi, maka hal ini akan dapat menumbuhkan budaya inovasi dalam sebuah organisasi (Lehman, *et.al.*,2002). Menurut Kasali (2005), organisasi yang mampu mengembangkan budaya inovasi akan lebih memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk bisa melakukan perubahan. Hasil penelitian yang dilakukan Prianto (2007) juga menemukan bahwa sikap inovatif yang dikembangkan staf berpengaruh langsung terhadap kemandirian dalam bekerja, serta berpengaruh tidak langsung terhadap komitmen kerja. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Armenakis, *et.al.* (1993) menunjukkan bahwa aspek komitmen merupakan salah satu faktor yang menentukan kesiapan organisasi untuk berubah.

B. Berbagai Faktor Penentu Kesiapan Untuk Berubah

Kajian yang dilakukan oleh Jabnoun (2001) serta Rafferty & Simons (2001) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber dana, dukungan manajemen, dan nilai-nilai yang dikembangkan staf merupakan faktor yang menentukan kesiapan organisasi untuk berubah. Bila kesiapan untuk berubah telah melekat kuat dalam semua warga organisasi, maka hal ini akan bisa memunculkan budaya kerja baru yang disebut dengan budaya untuk berubah (Lewis,1998). Menurut Jabnoun & Sedrani (2005), budaya berubah, atau minimal adanya kesadaran untuk berubah dari warga organisasi merupakan prasyarat utama bagi munculnya orientasi pada mutu atau prestasi kerja. Organisasi yang mampu mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada mutu terbukti akan lebih siap untuk menghadapi perubahan dan lebih mampu bertahan dalam menghadapi persaingan (Smith,*et.al.*,2002; Kanji & Yui,1997).

Kesiapan organisasi untuk berubah, menurut Lehman et al (2002) antara lain dapat dideteksi dari beberapa variabel, seperti variabel motivasional, ketersediaan sumber daya, nilai-nilai dan sikap positif yang dikembangkan para staf, serta iklim organisasi yang mendukung perubahan. Dalam aspek motivasional akan terlihat apakah pada organisasi: *pertama*, memiliki program pengembangan yang didasarkan atas analisis kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi; *kedua*, apakah organisasi memiliki program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan baru bagi para staf, dan *ketiga*; apakah seluruh anggota organisasi merasakan adanya desakan untuk berubah. Ketersediaan sumber daya dalam organisasi akan mencakup nilai-nilai organisasional yang baru, ketersediaan fasilitas kerja, dan ketersediaan staf yang terlatih.

Untuk mengevaluasi apakah sebuah organisasi memiliki kecukupan sumber daya, dapat dideteksi dari 3 hal, yaitu: *pertama*; ketersediaan ruang kantor yang memadai, *kedua*; dimilikinya staf yang terlatih dan memiliki program pengembangan dengan dukungan dana yang memadai, dan *ketiga*; akses terhadap peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan staf yang didukung oleh nilai dan sikap baru juga akan mendukung kesiapan organisasi untuk berubah. Hal ini akan mencakup beberapa hal, sebagai berikut: *pertama*, dikembangkannya nilai-nilai profesionalisme dalam bekerja; *kedua*, apakah staf memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam bekerja, *ketiga*; apakah organisasi memiliki staf yang mampu memengaruhi anggota staf lain untuk mengembangkan kemampuan dan kecakapan yang baru, dan *keempat*, apakah organisasi memiliki staf yang dapat beradaptasi dengan situasi yang baru.

Sedangkan iklim organisasi yang akan mendukung kesiapan organisasi untuk berubah akan tampak dari: *pertama*, Staf memiliki pemahaman yang jelas tentang visi, misi, dan tujuan lembaga; *kedua*, tersedianya tim kerja yang tangguh; *ketiga*, tersedianya staf yang memiliki kemandirian dalam bekerja; *keempat*, adanya keterbukaan dalam proses komunikasi; *kelima*, sejauh mana staf merasakan adanya tekanan dari dalam diri untuk selalu menampilkan kinerja yang terbaik, dan *keenam*, keterbukaan seluruh warga organisasi terhadap perubahan.

Dellana dan Hausser (1999) mengidentifikasi faktor budaya yang dikembangkan oleh masing-masing individu dan kelompok yang dapat mendukung program peningkatan mutu kerja. Budaya yang

dikembangkan oleh masing-masing individu meliputi kreativitas kerja, keberanian untuk mengambil risiko dalam bekerja, dan jiwa kepemimpinan yang kreatif, dikembangkannya tim kerja yang solid, dan adanya kesediaan untuk berpartisipasi dalam bekerja. Menurut Lehman,*et.al.* (2002), kreativitas kerja, keberanian untuk mengambil risiko, kepemimpinan kreatif, terbangunnya tim kerja yang tangguh, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam bekerja juga merupakan faktor yang menentukan kesiapan organisasi untuk berubah. Dengan demikian adanya hubungan kausalitas antara kesiapan untuk berubah dengan mutu kerja. Organisasi yang mampu bertahan dalam iklim persaingan yang keras adalah organisasi yang mampu menampilkan mutu kerja yang tinggi (Kasali, 2005).

Pengelolaan organisasi yang berorientasi pada mutu secara luas telah dipercaya akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja (Hendricks dan Singhal,1997), kepuasan pelanggan (Choi dan Eboch,1998), dan kualitas output (Agus,2005). Beberapa peneliti lain menemukan adanya keterkaitan antara pencapaian mutu kerja dengan faktor-faktor budaya kerja (Jabnoun,2001; Smith, et al, 2002; Souza-poza,*et.al.*,2001).

Penelitian yang dilakukan oleh Powel (1995) menunjukkan adanya hubungan positif antara budaya orientasi kepada mutu yang dikembangkan organisasi dengan kinerja organisasi. Selanjutnya dikatakan oleh Powel bahwa program pengembangan yang dijalankan organisasi tanpa disadari adalah merupakan faktor penting yang akan memunculkan berbagai budaya kerja yang baru, seperti budaya terbuka terhadap nilai-nilai dan kecenderungan baru, tersedianya program pemberdayaan staf, serta meningkatkan komitmen pimpinan untuk membawa kemajuan organisasi.

Samson dan Terziovski (1999) yang meneliti berbagai organisasi swasta di Australia dan New Zealand menemukan adanya keterkaitan antara diterapkannya orientasi budaya pengembangan mutu dengan kinerja organisasi. Studi yang mereka lakukan menemukan bahwa budaya orientasi kepada mutu dan model kepemimpinan berdampak positif terhadap kualitas kerja dan kelancaran kerja para staf. Studi lain yang dilakukan oleh Dowe & Sampson (1999) menemukan bahwa berbagai komponen dari budaya orientasi terhadap mutu kerja, seperti komitmen para staf, pemahaman staf tentang visi, misi, dan tujuan organisasi; dan orientasi kepada pelanggan secara bersama-sama berhubungan positif dengan mutu kerja.

Hasil berbagai kajian sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa ternyata berbagai unsur dari budaya orientasi kepada mutu kerja berdampak positif terhadap kinerja dan kelangsungan hidup organisasi. Hal ini juga senada dengan kajian dari Lehman, *et.al.* (2002) yang mengemukakan bahwa berbagai unsur dari budaya orientasi kepada mutu berhubungan positif dengan kesiapan organisasi untuk menghadapi perubahan. Dengan kata lain, untuk mempersiapkan organisasi dalam menghadapi perubahan, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyebarkan budaya kerja baru kepada semua warga organisasi.

Budaya kerja baru yang harus disebarkan kepada semua warga organisasi tersebut antara lain adalah budaya untuk melakukan pengembangan terus menerus. Kajian yang dilakukan oleh Cole (2001) menunjukkan bahwa budaya untuk melakukan pengembangan yang secara terus menerus ditekankan oleh pimpinan organisasi akan membantu upaya pimpinan organisasi untuk mengembangkan budaya orientasi kepada mutu dan akan lebih mampu menyiapkan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat.

Menurut Manos (2007), budaya pengembangan secara terus menerus cocok untuk diterapkan pada organisasi dikaitkan dengan konteks adanya gejala pertumbuhan ekonomi yang lamban. Untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurut Imai, hal itu tidak cocok apabila hanya dengan menerapkan budaya pengembangan. Untuk menghadapi perubahan masyarakat yang cepat, maka setiap organisasi diseyogikan untuk mengembangkan terobosan inovatif dalam bekerja. Budaya inovatif inilah yang juga perlu dikembangkan oleh setiap organisasi yang hidup dalam era persaingan yang ketat.

Terwujudnya budaya kerja baru pada sebuah organisasi yang lebih berorientasi pada perubahan juga sangat ditentukan oleh figur pimpinan organisasi. Studi yang dilakukan oleh Campbell (2004) menyatakan bahwa beberapa praktisi manajemen, baik pada sektor publik maupun privat, seperti Rudi Giuliani Sang Wali Kota New York, Jack Welch Sang CEO General Electric, serta John Kotter guru besar manajemen yang berminat pada kajian tentang perubahan budaya organisasi; kesemuanya bersepakat bahwa transformasi budaya organisasi dan peningkatan kinerja organisasi tidak dapat hanya dapat diserahkan kepada para bawahan. Transformasi budaya organisasi juga menuntut adanya keterlibatan yang tinggi dari pimpinan organisasi. Transformasi budaya organisasi dan peningkatan kinerja organisasi juga sangat ditentukan

oleh pimpinan organisasi yang kuat, penuh komitmen, dan berdisiplin tinggi. Model kepemimpinan inilah yang selanjutnya akan mewarnai terwujudnya nilai-nilai baru yang akan mendukung tercapainya kinerja organisasi.

Menurut Desplaces (2005) perubahan yang terjadi dalam organisasi sering kali membawa dampak ikutan yang tidak selalu menguntungkan. Bahkan menurut Abrahamson (2000), perubahan itu akan menimbulkan kejadian yang “dramatis” yang harus dihadapi oleh semua warga organisasi. Oleh karena itu beberapa praktisi menyatakan bahwa sesungguhnya perubahan itu tidak selalu penting dan mendesak untuk dilakukan (Schein,1996; de Jager,2000). Menurut Schein dan De Jager, perubahan adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena hal itu memerlukan kesediaan semua warga organisasi untuk kembali belajar, menata ulang pemikiran dan perilaku kerja yang baru.

Desplaces (2005) menyatakan bahwa kebijakan perubahan yang dilakukan oleh organisasi hanya memberikan manfaat positif bagi organisasi sebesar 38%. Meskipun perubahan organisasi tidak langsung memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan organisasi, namun beberapa praktisi tetap meyakini tentang pentingnya suatu organisasi untuk melakukan perubahan. Kasali (2005) juga menunjukkan banyak bukti tentang organisasi yang sigap untuk melakukan perubahan ternyata justru terus berkembang dan lebih mampu untuk menghadapi persaingan dan keluar dari situasi krisis. Kajian ini jelas menunjukkan betapa pentingnya faktor kesiapan organisasi untuk berubah dikaitkan dengan situasi persaingan yang kian ketat.

Dalam konteks organisasional, kesiapan individu untuk berubah diartikan sebagai kesediaan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan organisasi setelah perubahan berlangsung dalam organisasi tersebut (de Jager, 2000). Menurut Desplaces (2005), kesiapan individu untuk menghadapi perubahan akan menjadi daya pendorong yang membuat perubahan itu akan memberikan hasil yang positif. Beberapa kajian terbaru tentang konstruk variabel kesiapan untuk berubah menjelaskan bahwa sesungguhnya kesiapan individu untuk berubah dapat diidentifikasi dari sikap positif individu terhadap perubahan, iklim kerja yang dirasakan individu apakah mendukung perubahan, persepsi dari keseluruhan warga organisasi untuk menghadapi perubahan, dukungan organisasi terhadap perubahan, dan rasa percaya diri individu dalam menghadapi perubahan.

Sikap individu terhadap perubahan dapat dilihat dari tanggapan individu terhadap perubahan, apakah mereka menerima atau menolak perubahan. Kesiapan individu untuk menghadapi perubahan akan memengaruhi pola pikir, perasaan, dan perhatian individu sebagaimana tercermin dalam sikap dan perilakunya. Peredit (2000) menjelaskan bahwa sebagai sebuah konstruk sikap, kesediaan individu untuk berubah akan dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan perhatian.

Sikap individu terhadap perubahan dipengaruhi oleh respons individu terhadap perubahan yang sedang dihadapinya. Individu yang merespons positif terhadap perubahan maka ia akan mendukung proses perubahan tersebut. Sebagaimana dikatakan Desplaces (2005) bahwa untuk terlibat dalam sebuah sistem organisasi yang berubah, sekedar berpikir dan berpandangan positif terhadap perubahan saja adalah tidak cukup. Lebih penting dari itu adalah apakah individu siap untuk terlibat dalam proses perubahan untuk tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, sangat diperlukan keberadaan perangkat kerja yang ikut memperlancar terjadinya perubahan. Berbagai perangkat kerja sebagaimana dimaksud antara lain mencakup: *pertama*, struktur organisasi apakah cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan; *kedua*, faktor-faktor sosial seperti pola hubungan atasan bawahan apakah bersifat kaku atukah cukup longgar; *ketiga*, pola bangunan fisik dalam organisasi apakah cukup *pro* terhadap perubahan, dan *keempat*, ketersediaan teknologi yang lebih sesuai dengan tuntutan perubahan yang berkembang di masyarakat. Teknologi mutakhir yang dimiliki organisasi diasumsikan akan mendukung terjadinya perubahan.

Faktor lain yang mendukung terjadinya perubahan dalam organisasi adalah berkaitan dengan dukungan organisasi yang dirasakan staf. Dukungan organisasi yang dirasakan berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi apakah mendukung para warga organisasi untuk mengembangkan karier. Nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi akan mendukung terbentuknya komitmen afeksi dari para warga organisasi. Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa dukungan organisasi yang dirasakan staf akan dapat membantu staf dalam mengadopsi nilai-nilai, cara kerja, budaya kerja, dan teknologi terbaru (Desplaces, 2005).

Menurut Rhoades & Eisenberger (2002) dan Smith, et al (2002), ada 3 dimensi utama yang menunjukkan adanya dukungan organisasi,

yaitu: *pertama*, sikap *fairness* yang berkembang dalam organisasi yang menunjukkan semua warga organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan berbagai sumber daya yang ada di dalam organisasi; *kedua*, dukungan supervisi yang menunjukkan kepedulian dari supervisor terhadap keberadaan para staf; *ketiga*, berkembangnya sistem imbalan dan dukungan organisasi yang ditujukan kepada staf yang memiliki kinerja yang baik. Kajian ini sejalan dengan pendapat Desplaces (2005) yang menyatakan bila para staf beranggapan bahwa perlengkapan kerja yang ada dalam organisasi, lingkungan sosial, dan peralatan teknologi mendukung terjadinya perubahan; maka para staf juga akan beranggapan tentang adanya peningkatan dukungan yang dirasakan dari organisasi. Dengan kata lain, dukungan organisasi yang dirasakan staf akan ikut membantu kesiapan staf untuk menghadapi perubahan.

Kesiapan individu untuk menghadapi perubahan juga sangat dipengaruhi oleh rasa percaya diri dari para staf. Menurut Bandura (1977), rasa percaya diri menunjukkan adanya kepercayaan pada diri individu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya dikemukakan oleh Bandura bahwa keputusan individu untuk terlibat dalam sebuah aktivitas sangat dipengaruhi oleh kepercayaan individu untuk membuat keputusan sikap. Oleh karena itu, rasa percaya diri pada individu diasumsikan memegang peranan penting yang akan mengantarkannya untuk mengadakan perubahan perilaku.

Kesiapan individu untuk berubah juga sangat dipengaruhi kepercayaan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menampilkan perilaku baru (Desplaces, 2005). Hasil kajian yang dilakukan oleh Silver, *et.al.* (1995) menemukan bahwa rasa percaya diri para staf berhubungan positif dengan kemampuan mereka untuk menampilkan kinerja yang terbaik dan kesediaan mereka untuk mengadopsi nilai-nilai yang baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dukungan organisasi yang dirasakan staf dan rasa percaya diri dari para staf akan meningkatkan kesiapan individu untuk berubah.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa nilai-nilai dan sikap baru yang relevan dengan tuntutan perubahan yang berkembang di masyarakat, suasana atau iklim kerja yang kondusif dan mendukung setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, dan adanya dukungan organisasi kepada setiap warga organisasi untuk terus mengikuti dan melakukan perubahan akan memengaruhi kesiapan individu untuk berubah. Para individu yang memiliki kesiapan untuk

berubah sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi yang juga harus menghadapi tuntutan perubahan yang berkembang di masyarakat.

C. Kesiapan untuk Berubah sebagai Sumber Inovasi dan Kreativitas

Kesiapan para individu untuk berubah akan memengaruhi kinerja organisasi. Era sekarang sangat memerlukan kehadiran para individu dan institusi pendidikan yang memiliki kesiapan untuk terus berubah. Inilah salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh individu dan organisasi yang hidup dalam era yang ditandai dengan perubahan tanpa henti dan terus bergerak dengan sangat cepat. Organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya, baik privat maupun bisnis yang sigap menghadapi dan melakukan perubahan dipastikan akan tetap eksis dalam dunia yang terus bergerak dan berubah dengan sangat cepat. Tetapi bila yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, maka kita akan menyaksikan tumbangannya berbagai institusi; sebesar apa pun kapasitas yang dimiliki oleh institusi tersebut pada era kejayaannya. Hal inilah yang dialami oleh berbagai pusat perbelanjaan atau bisnis ritel, serta anjloknya laba perusahaan yang dialami oleh berbagai perusahaan taksi di tanah air dan di berbagai negara di dunia.

Fenomena perubahan dan berbagai dampak ikutannya memberikan pesan penting kepada individu dan organisasi yang hidup dalam era sekarang dan yang akan datang untuk terus melakukan perubahan dan pembaharuan. Hampir lebih dari dua dasawarsa yang lampau, Barkema, et al (2002) melalui tulisannya yang sangat terkenal: "Management Challenges in A New Time" sudah mengingatkan berbagai kecenderungan yang akan terjadi dalam sebuah era yang terus berubah. Berbagai kecenderungan itu antara lain adalah: (1) tingkat persaingan antar individu dan organisasi yang semakin tajam, (2) ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tampak cepat usang dengan hadirnya pengetahuan dan teknologi yang lebih baru, (3) umur produk barang dan jasa menjadi semakin singkat, seiring dengan kehadiran produk yang lebih baru, dan (4) tata kerja organisasi menjadi cepat berubah dan semakin ringkas dan efisien dalam penggunaan sumber daya, yang berdampak pada pengurangan penggunaan sumber daya manusia dalam jumlah yang sangat besar.

Lalu apa yang harus dipersiapkan oleh para individu dan organisasi dalam menghadapi perubahan yang semakin masif. Menurut Barkema et al (2002), ada satu kalimat kunci yang harus selalu dipegang oleh

siapa pun ketika menghadapi persaingan dan perubahan yang semakin masif dan bergerak dengan sangat cepat sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan era sekarang: “Cepat belajar, cepat berinovasi dan berkreasi, dan cepat membuat keputusan, inovasi tiada henti, kreativitas tanpa batas!”

- Bab 6 -

Kesiapan Bekerja

Salah satu parameter penting yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah sejauh mana kesiapan bekerja para pencari kerja, terutama bagi mereka yang baru lulus dari bangku sekolah. Kesiapan bekerja para lulusan baru juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas kegiatan pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kesiapan bekerja juga dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas hampir dapat dipastikan akan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Berbagai laporan dari lembaga internasional tentang tingkat kemajuan ekonomi suatu negara hampir selalu menggunakan ukuran kualitas sumber daya manusia sebagai indikator yang utama. Dengan demikian kesiapan bekerja dapat digunakan sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana kesiapan suatu bangsa dalam memasuki era baru, yang ditandai dengan tingkat persaingan yang semakin ketat dan perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan yang sangat cepat.

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi dan stabil. Bahkan ketika krisis global melanda berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara yang menjadi pasar utama produk ekspor; perekonomian Indonesia tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif. Tren pertumbuhan ekonomi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, sehingga beberapa lembaga internasional

menempatkan Indonesia sebagai kekuatan baru dalam perekonomian dunia (Prianto, 2013).

Selanjutnya dikatakan oleh Prianto (2013) bahwa kinerja perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan berbagai faktor di luar variabel ekonomi. Pemerintah harus benar-benar mampu menjadi pemimpin dan “dirigen” yang memungkinkan berbagai variabel non ekonomi ini benar-benar terawat, tumbuh, dan berkembang dengan baik; seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penilaian tentang kinerja dan kualitas perekonomian suatu negara harus diikuti dengan penilaian tentang berbagai variabel di luar ekonomi tersebut.

A. Berbagai isu Ketenagakerjaan

Untuk mendukung penguatan kinerja perekonomian nasional ada salah satu hambatan serius yang perlu mendapatkan penanganan segera dari pemerintah. Hal ini tidak lain adalah berkaitan dengan belum memadainya ketersediaan tenaga kerja terdidik dan terampil yang bisa disediakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagai gambaran, pada awal Maret 2012 permintaan pasar tenaga kerja tercatat 113 juta orang, sedangkan jumlah tenaga terdidik dan terampil tercatat 104 juta orang (<http://merdeka.com>, diakses 5 Maret 2012). Dengan demikian ada permintaan tenaga kerja terdidik dan terampil sebanyak 9 juta orang yang tidak bisa segera langsung disediakan oleh masyarakat dan pemerintah. Bukan rahasia lagi, kurangnya tenaga terdidik dan terampil merupakan salah satu faktor penghambat kegiatan usaha bisnis di dalam negeri. Kelak, potensi kesempatan kerja yang besar ini hampir pasti akan diisi oleh tenaga kerja dari luar. Kemungkinan ini sangat besar seiring dengan kian terbukanya pasar tenaga kerja di berbagai negara kawasan ASEAN. Singkatnya, besarnya potensi ekonomi Indonesia ternyata tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh warga masyarakat dalam negeri; tetapi sebagian besar juga dinikmati warga negara asing (Prianto, 2013).

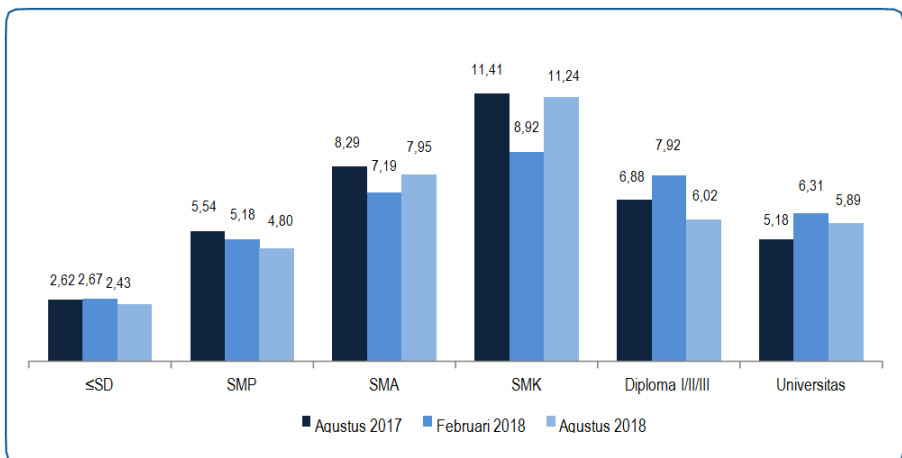
Berdasarkan data dari Balitfo Depnakertrans (2012), jumlah pengangguran terbuka nasional mencapai angka 7.700.086 orang (<http://depnakertrans.go.id>, diakses 12/12/2013). Rincian jumlah pengangguran dilihat dari latar belakang pendidikan dan tempat tinggal tampak pada tabel 1.

Tabel 1. Pengangguran Terbuka Nasional Menurut Pendidikan dan Lokasi Per Agustus 2011

No.	Pendidikan	Daerah		Jumlah
		Perkotaan	Pedesaan	
1.	≤SD	970.078	1.027.277	1.997.355
2.	SMTp	1.064.536	826.219	1.890.755
3.	SMTA Umum	1.355.019	688.074	2.043.093
4.	SMTA Kejuruan	805.610	226.243	1.031.853
5.	Diploma I/II/III/Akademi	189.677	55.010	244.687
6.	Universitas	341.291	151.052	492.343
	Jumlah	4.726.211	2.973.875	7.700.086

Sumber: Pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id (diakses 12/12/2013)

Terlihat ada persoalan serius berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Ketika dalam rentang waktu yang hampir bersamaan ada permintaan tenaga terdidik dan terampil pada kisaran 9 juta tenaga kerja, pada saat yang sama kita menghadapi jumlah pengangguran yang mencapai 7,7 juta orang. Dari jumlah pengangguran tersebut, sebanyak 90% berlatar belakang pendidikan SMA ke bawah; dan 10% berpendidikan diploma dan sarjana.



Data yang lebih baru yang dirilis oleh BPS masih menunjukkan problem serupa dengan periode sebelumnya, sebagaimana terlihat dalam bagan berikut (Berita Resmi Statistik, 2018):

Data ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2018, sebagaimana dilaporkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penduduk usia kerja sebanyak 194,78 juta orang. Penduduk yang berkategori sebagai angkatan kerja sebanyak 131,01 juta orang, yang bekerja sebanyak 124,01 juta orang; sehingga penduduk yang menganggur tercatat sebanyak 7 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,24 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,95 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selengkapnya TPT dilihat dari latar belakang jenjang pendidikan tampak sebagaimana gambar berikut:

Tingginya TPT, khususnya lulusan SMK; menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dan kecakapan antara apa yang dipelajari siswa selama di sekolah dengan apa yang menjadi tuntutan dunia kerja. Hal ini juga menunjukkan belum adanya keselarasan antara sekolah dengan dunia kerja. Selain itu, TPT yang tinggi juga mengindikasikan adanya ketidaksiapan lulusan untuk berwirausaha. Data-data ini menjadi tantangan para guru dan pengelola SMK yang memang diharapkan mampu menyiapkan para lulusannya untuk siap bekerja atau berwirausaha.

Tingkat pengangguran yang besar dari kelompok usia muda sebenarnya bukan hanya menjadi masalah di Indonesia. Berbagai negara Eropa juga menghadapi problem serupa. Tingkat pengangguran kelompok usia muda di Eropa selalu lebih dari dua kali lipat angka pengangguran kelompok usia dewasa. Sebagaimana di Indonesia, negara-negara Eropa juga menghadapi problem ketenagakerjaan dari kelompok usia muda (Manolova, et al, 2014). Untuk mengatasi hal ini, maka penguatan minat wirausaha bagi kelompok usia muda harus dilaksanakan dengan intensif melalui pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan dengan intensif terbukti

dapat membantu individu untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dan menjadi mesin pencipta lapangan kerja bagi pihak lain (Manolova, et al, 2014).

Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwa besarnya angka pengangguran di Indonesia ternyata bukan disebabkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan semata, tetapi juga disebabkan oleh ketidaksiapan calon tenaga kerja untuk mengisi pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kecakapan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh penyedia pekerjaan. Dengan mayoritas latar belakang pendidikan yang maksimal hanya sampai pada jenjang SMA, maka sulit diharapkan para pencari kerja akan mampu bersaing dengan para pencari kerja yang berpendidikan lebih tinggi. Bagi mereka yang berpendidikan diploma dan sarjana pun juga tidak menjamin mampu mengisi kebutuhan kerja apabila tidak didukung dengan kecakapan dan ketrampilan sebagaimana yang dibutuhkan oleh para penyedia kerja.

Tantangan yang harus dihadapi oleh para pencari kerja dan para pengangguran di Indonesia akan semakin tinggi apabila pasar tenaga kerja di kawasan regional benar-benar terbuka. Tingkat persaingan antara para calon tenaga kerja dari dalam negeri dengan calon tenaga kerja dari luar negeri akan semakin tinggi. Untuk mengantisipasi ketatnya persaingan di bidang ketenagakerjaan di masa mendatang, maka diperlukan adanya kesiapan dini dari para calon tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. Antisipasi penyiapan calon tenaga kerja ini sangat diperlukan agar tingkat pengangguran tidak semakin besar yang disebabkan oleh ketidaksiapan untuk bekerja.

Mencermati masih tingginya angka pengangguran berlatar belakang pendidikan tinggi (di atas SMA), maka hal ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara kecakapan yang diinginkan oleh para penyedia kerja dengan kecakapan para pencari kerja. Tampaknya para pencari kerja perlu memiliki pendidikan tambahan untuk masuk pada pasar kerja. Para penyedia kerja sering kali masih harus memberikan pendidikan dan latihan tambahan kepada para pencari kerja sebelum mereka benar-benar terlibat dalam aktivitas kerja. Hal ini menunjukkan adanya problem kesiapan untuk bekerja dari para pencari kerja. Oleh karena itu diperlukan kajian guna mengetahui bagaimana kesiapan untuk bekerja dari para calon tenaga kerja. Kesiapan untuk bekerja dari mereka yang sedang menempuh pendidikan, baik pada lembaga pendidikan formal maupun non formal; perlu segera diketahui agar kita

dapat mengambil langkah dini dalam menyiapkan calon tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja.

B. Kecakapan Kerja

Kecakapan kerja seperti apakah yang harus dimiliki oleh para pencari kerja agar mereka diterima di pasar tenaga kerja, dan dapat meraih kesuksesan di tempat kerja? Dalam era globalisasi, yang kemudian membuat pasar tenaga kerja menjadi semakin terintegrasi, maka pertanyaan selanjutnya yang dapat diajukan adalah: "Kecakapan apa yang harus dimiliki oleh para pencari kerja dalam menghadapi tuntutan pasar tenaga kerja dalam era global?" Pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh para pencari kerja sebelum mereka masuk pada pasar tenaga kerja. Ketidakmampuan para pencari kerja dalam menjawab pertanyaan tersebut dipastikan dapat menjadi penghalang untuk masuk ke pasar kerja, dan inilah awal mula penyebab terjadinya pengangguran.

Kemampuan para pencari kerja dalam menjawab pertanyaan di atas juga mencerminkan kesiapan mereka untuk bekerja. Problem kesiapan untuk bekerja yang disebabkan oleh rendahnya kecakapan kerja tidak hanya menjadi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Problem ini telah menjadi isu global. Negara-negara maju seperti USA juga menghadapi permasalahan serupa. Hal ini dapat dilihat dari kajian dalam sebuah konferensi ketenagakerjaan yang diadakan oleh *The Partnership for 21st Century Skills*, *Corporate Voices for Working Families*, dan *The Society for Human Resource Management*. Hasil konferensi, sebagaimana dilaporkan oleh Casner-Lotto dan Barrington (2006) menekankan tentang perlunya para calon tenaga kerja memiliki pengetahuan dasar dan kecakapan praktis selaras dengan tuntutan pasar tenaga kerja dalam abad 21.

Bila negara maju seperti USA memiliki perhatian serius tentang kesiapan para calon tenaga kerja sebelum masuk pada bursa kerja, maka para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia seharusnya juga memiliki perhatian yang jauh lebih besar terhadap kesiapan para pencari kerja untuk masuk pada pasar tenaga kerja. Para pencari kerja di Indonesia tidak perlu berpikir jauh untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja di level global. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri pun tidak semua para pencari kerja mampu memenuhi kualifikasi kecakapan dan keahlian yang dipersyaratkan oleh para penyedia kerja. Hal inilah yang

menyebabkan angka pengangguran terdidik di Indonesia masih terbilang besar. Sebagai gambaran, pada awal Maret 2012 permintaan pasar tenaga kerja tercatat 113 juta orang, sedangkan jumlah tenaga terdidik dan terampil tercatat 104 juta orang (<http://merdeka.com>, diakses 5 Maret 2012). Artinya ada 9 juta lapangan pekerjaan yang tidak bisa diisi oleh para pencari kerja di dalam negeri. Hal ini juga menggambarkan rendahnya kesiapan bekerja para pencari kerja di Indonesia.

Pengetahuan dasar dan kecakapan praktis apa yang harus dimiliki oleh para pencari kerja sebelum mereka masuk pada pasar tenaga kerja? Mengacu pada kualifikasi tenaga kerja yang dipersyaratkan oleh para penyedia kerja di tingkat global, maka para pencari kerja harus memiliki bekal pendidikan yang memadai, hingga jenjang pendidikan tinggi. Hingga kini tidak ada yang membantah bahwa latar pendidikan pekerja akan mewarnai produktivitas kerja. Semakin tinggi latar belakang pendidikan pekerja, semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja. Hingga kini warga masyarakat sangat meyakini bahwa kecakapan, keahlian, dan ketrampilan pekerja akan didapatkan dari bangku pendidikan formal, terutama pendidikan tinggi. Pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan inilah yang berperan besar untuk meningkatkan produktivitas kerja (Vedder, Denhart, & Robe, 2013). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk menempuh pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Semua organisasi, terutama organisasi bisnis selalu memiliki perhatian utama pada produktivitas usaha. Seiring dengan semakin kuatnya tingkat persaingan, maka upaya untuk meningkatkan produktivitas para pencari kerja menjadi hal yang sangat penting. Dalam abad 21, para pekerja dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa global. Dalam konteks ini, maka penguasaan bahasa, terutama bahasa asing; kemampuan membaca, dan kemampuan menulis menjadi bagian dari pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh para pencari kerja. Selain kemampuan berbahasa, para pencari kerja harus memiliki pengetahuan bidang matematika, pengetahuan umum, sosial ekonomi, nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, seni, sejarah, dan budaya (Casner-Lotto & Barrington, 2006; Brady, 2010). Lazimnya, pengetahuan dasar ini sudah harus dikuasai oleh para pencari kerja ketika mereka menempuh pendidikan di bangku sekolah/kuliah.

Dengan menguasai pengetahuan dasar, maka para pencari kerja akan memiliki kemampuan kognitif dan cakap dalam melakukan tindakan praktis yang dibutuhkan dalam bekerja. Kemampuan kognitif para pencari kerja akan ditunjukkan dari kemampuan berpikir dan terus belajar melalui kegiatan interaksi dengan menggunakan bahasa (terutama bahasa asing), membaca, menulis, matematika, dan menganalisis. Berbagai kemampuan kognitif ini selanjutnya akan mendukung kecakapan praktis dari para pencari kerja. Kecakapan praktis para pencari kerja akan didukung dengan pengetahuan yang didapatkan di bangku sekolah/kuliah untuk diaplikasikan di tempat kerja (Casner-Lotto & Barrington, 2006).

Kecakapan kerja akan diwarnai oleh derajat kemampuan kognitif para pencari kerja, seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, profesionalisme, kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, kreatif dan inovatif, kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi, memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan untuk membelajarkan diri secara terus menerus, kemampuan bekerja dalam tim, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial (Casner-Lotto & Barrington, 2006).

Kemampuan berpikir kritis akan memengaruhi kemampuan pencari kerja untuk memecahkan masalah. Hal ini akan ditunjukkan dari kemampuan menggunakan logika berpikir dan kemampuan menganalisis setiap permasalahan yang kelak akan dihadapi oleh para pencari kerja. Profesionalisme para pencari kerja akan menentukan nilai-nilai etika kerja. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku bertanggung jawab, kebiasaan untuk bekerja secara efektif, tepat waktu, bekerja sesuai dengan bidang tugas yang dibebankan kepadanya, dan mampu bersinergi dengan unit kerja lain (Casner-Lotto & Barrington, 2006; Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011). Kebiasaan berpikir kritis dari para pekerja sangat diperlukan untuk terwujudnya sikap aktif-proaktif dan tanggap dengan tuntutan organisasi, pelanggan, dan masyarakat secara keseluruhan; sehingga kelangsungan hidup organisasi akan dapat diwujudkan.

Kemampuan komunikasi secara lisan diperlukan agar pekerja mampu mengungkapkan apa yang menjadi pemikirannya secara jelas, efektif, dan efisien kepada pihak lain, termasuk kepada warga organisasi di mana ia kelak akan bekerja. Sedangkan kemampuan komunikasi tertulis ditunjukkan dengan kemampuan membuat memo, surat, dan

kemampuan membuat laporan kegiatan yang kompleks secara tertulis secara jelas dan efektif. Kemampuan para pekerja untuk berkomunikasi yang efektif akan menjamin terbangunnya relasi yang positif antar sesama pekerja, antara pekerja dengan organisasi, dan antara organisasi dengan masyarakat (Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011). Komunikasi yang efektif juga akan menjamin terciptanya kepuasan kerja dan kesemuanya ini akan berdampak pada produktivitas kerja (Kamdar & Van Dyne, 2007).

Kemampuan berpikir kreatif dan inovatif ditunjukkan dengan kemampuan para pencari kerja untuk menampilkan pemikiran dan unjuk kerja yang baru dan berbeda, mampu mengintegrasikan berbagai informasi, pengetahuan, dan kecakapan; serta mampu mengkomunikasikan ide baru kepada organisasi di mana kelak mereka akan bekerja. Dalam era sekarang, para pencari kerja dituntut memiliki kecakapan untuk menggunakan perangkat IT dalam mendukung tugas pekerjaannya, mampu menggunakan perangkat teknologi komputer untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di tempat kerja (Casner-Lotto & Barrington, 2006).

Para pekerja dalam masa mendatang juga dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Kemampuan bidang kepemimpinan ini diperlukan untuk mengkoordinir dan memengaruhi sesama pekerja agar mampu mencapai target kerja yang ditetapkan organisasi. Kemampuan bidang kepemimpinan ini juga diperlukan agar para pencari kerja kelak mampu membina, membimbing, memberi contoh baik pada calon pekerja yang baru masuk dalam organisasi dimana ia bekerja (Casner-Lotto & Barrington, 2006).

Kemampuan membelajarkan diri harus dimiliki oleh para pekerja agar para pencari kerja kelak mampu memperbaharui pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh organisasi. Kelak para pekerja diharapkan mampu membuat evaluasi diri berkaitan dengan kecakapan dan keahlian yang dimiliki, apakah masih relevan dengan tuntutan tugas dan tuntutan organisasi dimana ia bekerja. Kemampuan membelajarkan diri sendiri juga memungkinkan para pekerja lebih mampu mengambil hikmah atas kesalahan yang mungkin terjadi selama mereka bekerja (Casner-Lotto & Barrington, 2006; Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011).

Kemampuan bekerja dalam tim sangat diperlukan agar para pencari kerja kelak mampu menjalin komunikasi kerja dengan sesama pekerja dan masyarakat di luar organisasi. Dalam masa mendatang, para pekerja diharapkan mampu menjalin hubungan yang baik dengan pihak pelanggan organisasi, bekerja sama lintas sektoral, mampu bernegosiasi dengan pihak eksternal, dan mampu mengelola potensi konflik kerja yang sangat mungkin akan selalu terjadi di tempat kerja (Casner-Lotto & Barrington, 2006; Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011).

Pada masa mendatang, para pekerja juga diharapkan memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan pada masa mendatang sudah menjadi bagian integral dari tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap warga organisasi juga harus memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya perilaku etis, memiliki kepedulian sosial dengan lingkungan di mana ia bekerja. Kesadaran tanggung jawab sosial harus selalu melekat pada setiap warga organisasi (Casner-Lotto & Barrington, 2006; Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011).

Pengetahuan dasar dan kecakapan praktis akan memengaruhi kompetensi inti dari para pencari kerja. Kompetensi inti para pencari kerja merujuk pada dikuasainya pengetahuan, kecakapan, kemampuan, dan berbagai perilaku yang akan mendukung kesuksesan para pencari kerja kelak pada saat mereka sudah bekerja. Dengan demikian para pencari kerja yang memiliki kompetensi inti diproyeksikan akan memiliki kesiapan untuk bekerja.

Hingga saat ini belum ditemukan kajian mendalam yang mengevaluasi tentang kemampuan pengetahuan dasar dan kecakapan praktis dari para pekerja dan para pencari kerja di Indonesia. Meskipun demikian, kita bisa menggunakan data dari analisis kemampuan pengetahuan dasar dan kecakapan praktis dari para calon tenaga kerja di negara-negara maju seperti di USA. Berdasarkan hasil kajian dari konferensi ketenagakerjaan yang diprakarsai oleh *Partnership for 21st Century Skills*, *Corporate Voices for Working Families*, dan *Society for Human Resource Management* memaparkan bahwa kesuksesan kerja sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara penguasaan kemampuan dasar dan kecakapan praktis dari para pekerja (Casner-Lotto & Barrington, 2006).

Pengetahuan dasar dan kecakapan praktis apa yang memungkinkan para pekerja meraih kesuksesan di tempat kerja? Urutan *pertama*, adalah

berkaitan dengan profesionalisme, etika kerja, kemampuan bekerja dalam tim, dan kemampuan berkomunikasi secara lisan. Atribut ini berhubungan dengan kecakapan praktis paling utama yang harus dimiliki oleh para pencari kerja untuk masuk ke dunia kerja. *Kedua*, penguasaan bahasa asing dalam masa mendatang akan semakin dianggap penting untuk dikuasai oleh para pekerja dan pencari kerja. Atribut ini merupakan bagian dari pengetahuan dasar. Penguasaan bahasa asing dinilai penting untuk dikuasai pekerja di masa mendatang seiring dengan adanya kecenderungan integrasi dan keterbukaan pasar tenaga kerja. Pada masa mendatang, para pekerja tidak lagi bekerja dengan dibatasi oleh wilayah teritorial negara. Pekerja di masa mendatang akan menjadi pekerja global dan melayani pelanggan di level global pula. Oleh karena itu, para pekerja di masa depan harus menguasai bahasa yang berlaku pada masyarakat global. *Ketiga*, berkaitan dengan kemampuan berpikir dan berperilaku kreatif dan inovatif. Atribut ini berkaitan dengan kecakapan praktis (Casner-Lotto & Barrington, 2006; Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011).

Para pekerja di masa datang dituntut untuk terus mampu berinovasi tiada henti, dan berkreativitas tanpa batas. Inovasi dan kreativitas merupakan atribut penting yang akan menggerakkan dan meningkatkan kualitas aktivitas bisnis dan ekonomi dalam skala luas. Ketika tingkat persaingan berada dalam level tertinggi, maka kemampuan para pekerja untuk terus berinovasi dan berkreasi merupakan *conditio sine qua non*. Hasil laporan menunjukkan bahwa kecakapan praktis yang termasuk kategori *soft skills* merupakan hal yang paling memengaruhi kesuksesan kerja. Hal ini berlaku bagi para pekerja dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.

C. Kesiapan Bekerja

Salah satu penanda utama dari abad 21 adalah adanya perubahan dengan tingkat kecepatan pada level *mega speed*. Kecenderungan inilah yang saat ini sedang terjadi di masyarakat. Hal ini selanjutnya berdampak pada pola kerja baru yang menuntut para pekerja dan para pencari kerja harus memiliki cara pandang baru tentang dunia kerja. Mereka dituntut untuk menguasai kecakapan baru yang dibutuhkan oleh organisasi di mana mereka bekerja. Seiring dengan adanya perubahan masyarakat yang cepat, dunia kerja dituntut untuk cepat

melakukan berbagai perubahan di berbagai bidang kegiatan produksi, distribusi, dan pola relasi dengan para pelanggan dan masyarakat luas (Miller, 2009; Kalita, 2009; Friedman, 2005).

Perubahan yang cepat menuntut organisasi bisnis, para pekerja, dan calon pekerja untuk membiasakan diri memperbaharui cara kerja dan kecakapan baru selaras dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Hal ini menuntut para pekerja dan calon pekerja benar-benar memiliki kesiapan kerja yang tinggi, yang ditandai dengan perilaku aktif-proaktif, kreatif, dan inovatif. Dengan memiliki kemampuan tersebut, maka baik organisasi maupun para pekerja akan dalam eksis dalam kancah persaingan yang semakin ketat (Gunn, 2009).

Berbagai kajian telah dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai indikator yang digunakan untuk menilai kesiapan bekerja. Brady (2010) telah mengkaji beberapa atribut kepribadian yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan untuk bekerja. Kajian ini kemudian diperluas dan diperdalam oleh Caballero, Walker, Tyszkiewicz (2011). Mengacu kajian yang dilakukan oleh Brady (2010), ada 6 indikator yang menjadi penanda kesiapan individu untuk bekerja, yaitu: (a) sikap bertanggung jawab, (b) kemampuan berpikir dan bertindak luwes, (c) memiliki berbagai kecakapan hidup, (d) kemampuan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis, (e) kemampuan melakukan evaluasi diri, dan (f) kesadaran akan kesehatan diri dan keselamatan kerja.

Sikap bertanggung jawab akan ditunjukkan dari perilaku para pekerja untuk datang ke tempat kerja tepat waktu dan akan terus menjalankan aktivitas kerja hingga selesai sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan. Mereka memiliki kepedulian yang tinggi dengan berbagai peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk bekerja, memiliki standar kualitas kerja, dan memahami keuntungan dan kerugian atas berbagai perilaku kerja yang hendak diambil. Mereka memiliki kesadaran penuh bahwa kesuksesan dan jenjang karier di tempat kerja akan dipengaruhi oleh prestasi kerjanya sendiri (Reynolds & Ceranic, 2007). Pekerja yang bertanggung jawab selalu ditandai dengan adanya integritas pribadi, kejujuran, dan dapat dipercaya (Gardner, Csikszentmihalyi, & Damon, 2001).

Hasil kajian Gardner, Csikszentmihalyi, & Damon (2001) menyatakan bahwa lebih dari dua per tiga karyawan menilai sikap bertanggung jawab di tempat kerja sebagai atribut kepribadian yang sangat penting. Hal ini

bukan hanya sikap bertanggung jawab untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga sikap bertanggung jawab terhadap sesama karyawan dan organisasi. Akhirnya, sikap bertanggung jawab ini juga diabdikan untuk kemajuan organisasi di mana ia bekerja (Gardner, 2007). Oleh karena itu, Parker (2008) menyatakan bahwa sikap bertanggung jawab merupakan salah satu atribut kepribadian utama yang harus dimiliki oleh para pekerja dan calon pekerja dalam abad 21.

Kemampuan berpikir dan bertindak luwes ditunjukkan dari kemampuan para pekerja untuk terus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di tempat kerja (Moorhouse & Caltabiano, 2007). Mereka menyadari bahwa berbagai kecenderungan baru akan datang dengan sangat cepat. Situasi ini menuntut adanya kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri dengan pola kerja dan kecakapan kerja baru sesuai dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, kemampuan menyesuaikan diri selaras dengan tuntutan kecakapan dan keahlian yang baru merupakan bagian dari kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh para pekerja dan calon pekerja dalam abad 21.

Dalam bukunya yang berjudul *"The World is Flat"*, Friedman (2006) menyatakan bahwa dimilikinya berbagai kecakapan hidup (*soft skills*), modal intelektual, dan berbagai keahlian merupakan faktor penting yang akan menggerakkan kegiatan ekonomi. Yang dimaksud kecakapan hidup di sini adalah bukan hanya berkaitan dengan kecakapan melaksanakan tugas sesuai bidangnya, tetapi juga mencakup kecakapan untuk memperbaharui pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi di mana ia bekerja. Parker (2008) menyebut hal itu sebagai kecakapan pekerja untuk membelajarkan diri sendiri sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Para pekerja yang mampu membelajarkan diri sendiri akan mendorong mereka untuk terus berusaha menguasai berbagai pengetahuan dan ketrampilan baru. Keterlibatan mereka dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan benar-benar disadari sebagai bagian dari kebutuhan, dan bukan karena tuntutan atau tekanan dari pihak organisasi (Brady, 2010). Dengan demikian para pekerja yang memiliki kebutuhan untuk terus memperbaharui pengetahuan, kecakapan, dan keahlian akan lebih memiliki kesiapan untuk bekerja.

Kemampuan berkomunikasi yang baik dari para pekerja, baik secara lisan maupun tertulis; sangat mendukung demi terciptanya suasana kerja yang kondusif. Berbagai permasalahan kerja sering kali

terjadi karena adanya problem komunikasi, baik komunikasi antar sesama pekerja, komunikasi dengan organisasi, maupun komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian kemampuan berkomunikasi dari para pekerja akan dinilai para penyedia kerja sebagai faktor yang menentukan kesiapan bekerja dan kinerja (Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011; Porath & Bateman, 2006; Brady, 2010).

Kesiapan individu untuk bekerja juga dapat diidentifikasi dari kemampuan mereka untuk melakukan evaluasi diri. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan para pekerja untuk menyadari bagaimana posisi dirinya di dalam kehidupan organisasi di mana mereka bekerja, sehingga mereka memahami apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemampuan evaluasi diri memungkinkan para pekerja mudah untuk menerima umpan balik, mendorong mereka untuk terus belajar, dan memperluas wawasan yang berdampak pada munculnya rasa percaya diri. Para pekerja dengan rasa percaya diri yang kuat akan berpengaruh pada kinerjanya (Betz, 2004). Dengan demikian kesediaan para pekerja untuk melakukan evaluasi diri juga mencerminkan kematangan pribadi, dan hal ini berpengaruh terhadap kesiapan untuk bekerja (Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011).

Kesadaran para pekerja terhadap kesehatan dan keselamatan kerja juga mencerminkan kesiapan mereka untuk bekerja. Para pekerja yang sehat secara jasmani dan rohani berdampak pada jiwa yang kuat. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan sikap percaya diri, optimis, menjaga komitmen dan semangat kerja, mudah bekerja sama dalam tim, hormat terhadap sesama pekerja, menerima adanya keberagaman, dan memiliki kebanggaan dengan korps (Caballero, Walker, Tyszkiewicz, 2011). Kesehatan jiwa para pekerja akan memicu terciptanya ketenangan dalam bekerja, dan selanjutnya akan memengaruhi keselamatan kerja. Pemahaman para pencari kerja yang baik tentang hal ini menunjukkan adanya kesiapan untuk bekerja.

Berdasarkan kajian sebagaimana dipaparkan terlihat bahwa kesiapan bekerja lebih dipengaruhi oleh dimensi *soft skills*. Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Wagner (2006) yang memaparkan ada 14 faktor yang membuat para pencari kerja tidak diterima sebagai pekerja. Dua faktor pertama berkaitan dengan kemampuan akademik (*hard skills*), sedangkan 12 sisanya berkaitan dengan kemampuan non akademik (*soft skills*). Ke 14 faktor tersebut meliputi: ketidaksesuaian

keahlian dan kecakapan, prestasi akademik kurang memadai, sikap kepribadian lemah, kurang percaya diri, motivasi kurang kuat, dorongan dan antusiasme rendah, jiwa kepemimpinan lemah, tidak siap menghadapi presentasi wawancara, mengutamakan keuntungan sesaat, tuntutan gaji yang tidak realistis, persiapan untuk bekerja kurang, kegiatan ekstra kurikuler selama belajar sangat minim, kecakapan dasar kurang, dan kurang siap untuk bekerja.

Memperhatikan hasil kajian Wagner (2006), maka para pencari kerja tidak cukup hanya mengandalkan kepemilikan ijazah untuk berkompetisi dalam pasar kerja. Ada banyak atribut *soft skills* yang harus disiapkan oleh para pencari kerja untuk bisa diterima di pasar kerja. Di berbagai negara, umumnya proses seleksi terhadap para pencari kerja didasarkan atas aplikasi lamaran kerja, ijazah, prestasi akademik sebagaimana ditunjukkan oleh besaran indeks prestasi akademik, dan tes potensi akademik (Carles, 2007). Prestasi akademik diyakini dapat menjelaskan kapasitas keahlian, kemampuan belajar, dan motivasi untuk mencapai tujuan. Tetapi ternyata kualifikasi akademik tidak cukup memadai untuk menggambarkan kesiapan individu untuk berkarya. Dalam kaitan inilah diperlukan adanya kecakapan non akademik yang memungkinkan seseorang dapat berhasil dalam bekerja (Hager & Holland, 2006).

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kesiapan individu untuk bekerja tidak cukup hanya didasarkan atas kualifikasi akademik. Ada banyak kecakapan non akademik (*soft skills*) yang harus dipersiapkan individu untuk masuk ke pasar bursa kerja. Dengan demikian secara teoretik dapat dinyatakan bahwa tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara mencerminkan ketidaksiapan para pencari kerja untuk masuk ke pasar bursa kerja.

D. Ekspektasi Para Penyedia Kerja Terhadap Para Pencari Kerja

Analisis ekspektasi para penyedia kerja terhadap para pencari kerja dilakukan dengan analisis deskriptif. Data penelitian didapatkan dari jawaban pertanyaan terbuka yang diajukan peneliti kepada para penyedia kerja. Pokok pertanyaan yang diajukan peneliti adalah berkaitan dengan harapan para penyedia kerja terhadap para pencari kerja. Kegiatan analisis dilakukan peneliti dengan mencari kesamaan semantik atas berbagai jawaban pertanyaan yang diajukan kepadanya. Berbagai jawaban responden diasumsikan merupakan faktor yang

menggambarkan harapan mereka terhadap kesiapan bekerja dari para pencari kerja. Selanjutnya dilakukan analisis kesamaan semantik atas berbagai faktor unik untuk digunakan sebagai dasar mendeskripsikan faktor umum yang diasumsikan memengaruhi kesiapan bekerja. Tabel 5 berikut merangkum berbagai jawaban dari para penyedia kerja ketika ditanyakan tentang berbagai persyaratan apa yang harus dimiliki oleh para pencari kerja untuk bisa diterima sebagai calon pekerja.

Dari hasil analisis diketahui ada 5 faktor utama yang diekspektasikan oleh para penyedia kerja harus dimiliki oleh para pencari kerja. Penentuan faktor utama didasarkan atas berbagai atribut unik dan secara semantik diasumsikan sebagai manifestasi dari faktor utama. Secara berurutan, kelima faktor utama tersebut meliputi faktor: (a) motivasi, (b) kematangan pribadi, (c) kematangan sosial, (d) sikap dalam bekerja, dan (e) kecakapan dalam bekerja. Urutan faktor tersebut menunjukkan hal utama yang diekspektasikan para penyedia kerja terhadap para pencari kerja. Berdasarkan urutan sebagaimana disebutkan maka terlihat bahwa para penyedia kerja lebih menempatkan kecakapan non teknis sebagai hal yang sangat penting. Faktor motivasi, kematangan pribadi, kematangan sosial, dan sikap dalam bekerja lebih berkaitan dengan kecakapan non teknis. Sedangkan kecakapan dalam bekerja lebih berkaitan dengan kecakapan teknis para pencari kerja.

Tabel 2. Berbagai Atribut yang Diekspektasikan Para Penyedia Kerja Dimiliki Para Pencari Kerja

No.	Faktor	Atribut
1.	Motivasi	Kesungguhan dalam bekerja, dorongan bekerja keras, tahan banting, konsisten, condong bekerja dengan sebaik-baiknya, pantang menyerah, tidak mudah mengeluh.
2.	Kematangan Pribadi	Tahan menghadapi cobaan, Tidak emosional ketika dikritik, Bersifat terbuka, Percaya diri, Bertanggung jawab.
3.	Kematangan sosial	Mampu berkomunikasi, Mampu bekerja sama dalam tim kerja, Mampu membangun jejaring, Mampu berinteraksi dengan pelanggan, Berperilaku luwes dan fleksibel.

4.	Sikap kerja	Sikap hormat, Cermat, Tanggap, Realistis dan praktis, sopan santun dalam berperilaku, rendah hati, sabar.
5.	Cakap dalam bekerja	Memiliki pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan bidang pekerjaan, Mampu membuat analisis terhadap permasalahan, Mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan bidang pekerjaannya, Mampu mencari cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien, Berani membuat keputusan, Cepat mengadopsi cara kerja baru.

Sumber: Prianto (2016)

Para penyedia kerja berpendapat bahwa *faktor pertama* yang harus dimiliki oleh para pencari kerja adalah berkaitan dengan dimensi motivasi. Faktor motivasi dianggap para penyedia kerja sebagai hal penting yang akan membuat para pencari kerja akan berhasil mengembangkan karier di lingkungan kerjanya. Faktor motivasi dimanifestasikan oleh adanya kesungguhan dalam bekerja, dorongan untuk bekerja keras, tahan banting, konsisten, condong bekerja dengan target kerja sebaik-baiknya, pantang menyerah, dan tidak mudah mengeluh.

Faktor kedua berkaitan dengan kematangan pribadi. Pribadi-pribadi yang matang menurut para penyedia kerja akan dimanifestasikan oleh berbagai atribut yang meliputi ketahanan dalam menghadapi cobaan, tidak emosional ketika dikritik, bersifat terbuka, percaya diri, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya.

Faktor ketiga adalah kematangan sosial sebagai faktor ketiga yang dianggap penting untuk dimiliki oleh para pencari kerja. Pribadi-pribadi yang memiliki kematangan sosial akan dimanifestasikan oleh kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim kerja, kemampuan membangun jejaring, kemampuan berinteraksi dengan pelanggan, serta mampu berperilaku luwes dan fleksibel.

Faktor keempat berkaitan dengan sikap kerja. Hal ini dimanifestasikan oleh sikap hormat, cermat, tanggap, realistis dan praktis dalam bekerja, sopan santun dalam berperilaku, rendah hati, dan sabar.

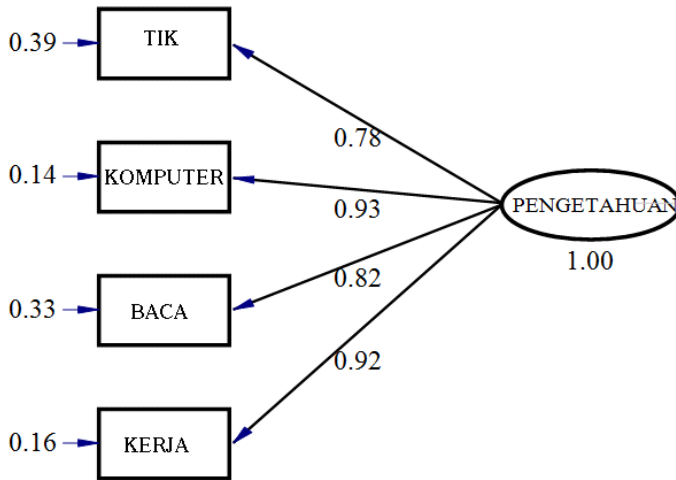
Faktor kelima, berkaitan dengan kecakapan dalam bekerja. Hal ini dimanifestasikan oleh dimilikinya pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan bidang pekerjaan, ditunjukkan oleh kemampuan membuat analisis terhadap permasalahan, mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan bidang pekerjaannya, mampu mencari cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien, berani membuat keputusan, dan cepat mengadopsi cara kerja baru.

Bila dicermati faktor pertama sampai dengan faktor keempat lebih berkaitan dengan kecakapan non teknis. Hal ini menunjukkan bahwa para penyedia kerja menganggap kecakapan non teknis sebagai hal utama yang harus dimiliki oleh para pencari kerja. Hanya sayangnya selama ini pada berbagai lembaga pendidikan formal berbagai kecakapan non teknis sebagaimana telah diuraikan belum dijadikan alat evaluasi utama untuk mengukur keberhasilan belajar siswa/mahasiswa. Di lembaga persekolahan, berbagai kecakapan non teknis tersebut bahkan tidak termasuk mata ajaran yang akan menentukan kelulusan. Pengembangan kecakapan non teknis biasanya dicangkokkan pada berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan faktor kelima lebih berkaitan dengan kecakapan teknis yang didapatkan para pencari kerja ketika menempuh pendidikan di bangku sekolah.

E. Kesiapan Bekerja Para Pencari: Kasus Pencari Kerja di Jawa Timur

Kesiapan bekerja para pencari kerja diukur dari penguasaan pengetahuan dan kecakapan praktis, sebagaimana ditampilkan pada gambar 1 dan gambar 2. Selanjutnya berbagai atribut tersebut digunakan untuk mengukur derajat kesiapan bekerja dari para pencari kerja. Angka koefisien kesiapan bekerja terletak pada skor rentangan 1 (sangat tidak siap) sampai dengan 5 (sangat siap).

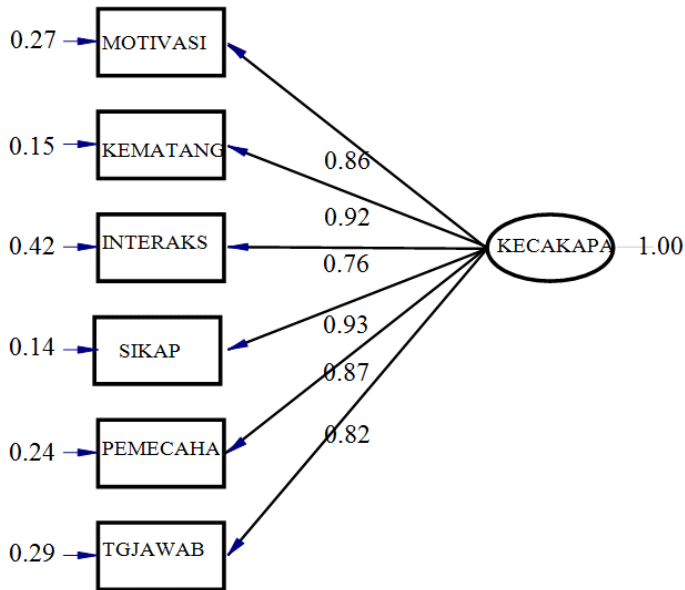
Untuk mengetahui keutuhan dimensi kesiapan bekerja dari sisi penguasaan pengetahuan dan penguasaan kecakapan praktis diuji dengan menggunakan model persamaan struktural dengan memanfaatkan perangkat lunak Lisrel. Ringkasan hasil analisis faktor konfirmatori tampak pada gambar 1 dan gambar 2 yang menunjukkan adanya keutuhan model kesiapan bekerja dilihat dari sisi penguasaan pengetahuan dan model kesiapan bekerja dari sisi kecakapan praktis yang dimiliki para pekerja.



Chi-Square=1.33, df=2, P-value=0.51, RMSEA=0.00

Gambar 1: Model Konstruk Penguasaan Pengetahuan

Ringkasan hasil analisis faktor konfirmatori sebagaimana tampak pada gambar 2 menunjukkan adanya keutuhan model kesiapan bekerja dari sisi kecakapan praktis. Hasil analisis faktor konfirmatori menunjukkan bahwa kecakapan praktis para pencari kerja dimanifestasikan oleh motivasi kerja yang kuat, kematangan pribadi, kemampuan menjalin interaksi di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaan, kemampuan untuk menunjukkan sikap positif dalam bekerja kerja, kemampuan memecahkan masalah, dan rasa tanggung jawab terhadap bidang tugasnya.



Chi-Square=2.54, df=4, P-value=0.61, RMSEA=0.000

Gambar 2: Model Struktural Kecakapan Praktis

Berbagai faktor sebagaimana dipaparkan di atas itulah yang dipersepsikan para pencari kerja sangat memengaruhi kesiapannya untuk memasuki dunia kerja.

Secara ringkas derajat kesiapan bekerja dari para pencari kerja dapat dilihat pada tabel 3. Secara keseluruhan koefisien kesiapan bekerja dari para pencari kerja berada pada skor 4 (siap). Dengan kata lain, dilihat dari dimensi penguasaan pengetahuan para pencari kerja berada dalam kategori *siap untuk bekerja*. Dilihat dari dimensi penguasaan pengetahuan, koefisien kesiapan bekerja para pencari kerja berada pada skor 4,2 (siap). Para pencari kerja memiliki kesiapan bekerja yang sangat baik dilihat dari dimensi penguasaan TIK (koefisien kesiapan 4,7 atau sangat siap) dan aplikasi komputer (koefisien kesiapan 4,8 atau sangat siap). Tetapi pada saat yang sama mereka tampak memiliki persoalan dengan dimensi daya baca (koefisien kesiapan 3,7 atau siap) dan pemahaman bidang pekerjaan (koefisien kesiapan 3,6 atau siap). Tampak ada hubungan interdependensi antara penguasaan TIK dan aplikasi komputer serta daya baca dan pemahaman bidang pekerjaan. Para pekerja umumnya memiliki

kemampuan aplikasi komputer yang baik sehingga hal ini juga memengaruhi penguasaan mereka di bidang TIK. Tetapi daya baca mereka yang belum optimal juga menyebabkan kurang optimalnya pemahaman mereka terhadap bidang pekerjaan. Para pekerja tampaknya perlu membekali diri dengan kemampuan membaca agar lebih cepat melakukan analisis situasi dan orientasi kerja. Kemampuan analisis situasi dan orientasi kerja ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap bidang pekerjaannya. Belum optimalnya pemahaman terhadap bidang pekerjaan juga menggambarkan para pencari kerja terhadap bidang pekerjaannya. Bagi lembaga pendidikan formal, hal ini bisa dijadikan pertimbangan untuk mendekatkan antara kajian teoritik dengan aplikasi praktis. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak kerja praktik, misalnya melalui model studi eksekursi.

Sedangkan dilihat dari dimensi kecakapan praktis, koefisien kesiapan bekerja para pencari kerja berada pada skor 3,8 (siap). Dengan kata lain, dilihat dari dimensi penguasaan kecakapan praktis para pencari kerja berada dalam kategori *siap untuk bekerja*. Para pencari kerja memiliki motivasi kerja dan sikap tanggung jawab yang baik, masing-masing dengan koefisien kesiapan 4,4 (sangat siap) dan 4,3 (sangat siap). Tetapi pada saat yang sama mereka harus memperkuat dimensi kematangan pribadi, kemampuan berinteraksi, sikap kerja, dan kemampuan memecahkan masalah; karena semuanya berada pada rentang skor kesiapan antara 3,5 (siap) sampai dengan 3,6 (siap).

Tabel 3. Derajat Kesiapan Para Pencari Kerja: Kasus Pencari Kerja di Jawa Timur

Variabel	Indikator	Rerata Koefisien	Keterangan
Penguasaan Pengetahuan	Penguasaan TIK	4,7	Sangat Siap
	Aplikasi Komputer	4,8	Sangat Siap
	Daya baca	3,7	Siap
	Pemahaman bidang pekerjaan	3,6	Siap
	Rerata	4,2	Siap

Kecakapan Praktis	Motivasi Kerja	4,4	Sangat Siap
	Kematangan pribadi	3,6	Siap
	Kemampuan interaksi	3,5	Siap
	Sikap kerja	3,6	Siap
	Pemecahan masalah	3,6	Siap
	Tanggung jawab	4,3	Sangat Siap
	Rerata	3,8	Siap
	Rerata Total	4	Siap

Sumber: Prianto (2016)

Kesiapan bekerja para pencari kerja dilihat dari variabel kecakapan praktis dengan skor koefisien 3,8 (siap) ternyata lebih rendah bila dibandingkan dengan skor koefisien penguasaan pengetahuan sebesar 4,2 (siap). Meskipun secara keseluruhan para pencari kerja memiliki skor koefisien kesiapan bekerja sebesar 4 (berada dalam kategori *siap untuk bekerja*), namun hal ini masih menyisakan masalah karena adanya perbedaan negatif (-0,4) antara skor penguasaan pengetahuan dengan skor kecakapan praktis. Hal ini juga mengindikasikan bahwa ilmu pengetahuan yang dimiliki para pencari kerja tidak selalu selaras dengan tuntutan dunia kerja. Bila bidang pekerjaan yang dipilih pencari kerja sama dengan bidang ilmu yang dimiliki, maka hal ini menunjukkan adanya *missmatch* antara kajian teoritik di bangku sekolah dengan tuntutan dunia kerja.

Pada lembaga pendidikan formal terlihat kajian teoritik lebih dominan daripada kajian praktis. Kecenderungan ini selaras dengan apa yang diekspektasikan oleh para penyedia kerja, terutama dikaitkan dengan kesiapan bekerja para pencari pekerja. Dalam konteks ini, maka kurikulum pada lembaga pendidikan formal harus dirancang lebih selaras dengan tuntutan dunia kerja. Skor perbedaan negatif inilah yang kemudian memunculkan pengangguran, sebagaimana tertera pada tabel 1.

Lembaga pendidikan formal ditantang untuk mendekatkan skor penguasaan pengetahuan pencari pekerja dengan skor kecakapan praktis. Bila skor penguasaan pengetahuan mendekati sama sama

dengan skor kecakapan praktis, hal ini menunjukkan kajian teoritik dalam lembaga pendidikan formal benar-benar *matching* dengan kecakapan praktis yang diharapkan dunia kerja.

F. Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Kesiapan Bekerja

Derajat kesiapan bekerja para pekerja dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja tertera pada tabel 4. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa secara keseluruhan kesiapan bekerja para pencari pekerja dengan pengalaman kerja 0 tahun berada pada skor koefisien 3,8 (siap). Pekerja dengan latar belakang pendidikan dasar memiliki skor koefisien 3,2 (cukup siap), latar belakang pendidikan menengah memiliki skor koefisien 3,9 (siap), dan latar belakang pendidikan tinggi memiliki skor koefisien 4 (siap).

Secara keseluruhan kesiapan bekerja para pencari pekerja dengan pengalaman kerja 1-3 tahun berada pada skor koefisien 4,08 (siap). Pekerja dengan latar belakang pendidikan dasar memiliki skor koefisien 3,5 (siap), latar belakang pendidikan menengah memiliki skor koefisien 4 (siap), dan latar belakang pendidikan tinggi memiliki skor koefisien 4,4 (sangat siap).

Secara keseluruhan kesiapan bekerja para pencari pekerja dengan pengalaman kerja >3 tahun berada pada skor koefisien 4,1 (siap). Pekerja dengan latar belakang pendidikan dasar memiliki skor koefisien 4,2 (siap), latar belakang pendidikan menengah memiliki skor koefisien 3,6 (siap), dan latar belakang pendidikan tinggi memiliki skor koefisien 4,4 (sangat siap).

Dilihat dari latar belakang pendidikan, kesiapan bekerja para pencari pekerja dengan latar belakang pendidikan dasar memiliki skor koefisien 3,8 (siap), latar belakang pendidikan menengah memiliki skor koefisien 3,9 (siap), dan latar belakang pendidikan tinggi memiliki skor koefisien 4,3 (sangat siap).

Tabel 4. Kesiapan Bekerja Para Pencari Kerja Menurut Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja

Pengalaman Kerja	Pendidikan	Rerata Koefisien	Keterangan
0 Tahun	Dasar	3,25	Cukup Siap
	Menengah	3,89	Siap
	Tinggi	4,00	Siap
	Total	3,86	Siap
1-3 Tahun	Dasar	3,50	Siap
	Menengah	4,00	Siap
	Tinggi	4,42	Sangat Siap
	Total	4,07	Siap
Lebih 3 Tahun	Dasar	4,28	Sangat Siap
	Menengah	3,63	Siap
	Tinggi	4,42	Sangat Siap
	Total	4,10	Siap
Total	Dasar	3,76	Siap
	Menengah	3,89	Siap
	Tinggi	4,29	Sangat Siap
	Total	4,00	Siap

Sumber: Data diolah peneliti

Tabel 5 menjelaskan perbedaan kesiapan bekerja dilihat dari latar belakang pendidikan para pekerja. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan kesiapan bekerja yang meyakinkan antara pencari kerja berlatar belakang pendidikan dasar dan pencari kerja berpendidikan tinggi. Perbedaan kesiapan bekerja yang meyakinkan juga terlihat pada pencari kerja berpendidikan menengah dengan pencari kerja berpendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi latar belakang pendidikan para pencari kerja membuat kesiapan bekerja mereka juga semakin tinggi.

Tabel 5. Perbedaan Kesiapan Bekerja Menurut Latar Belakang Pendidikan

Latar Pendidikan	Latar Pendidikan	Rerata Perbedaan	Sig ($\alpha=0,05$)
Dasar	Menengah	-0,1259	0,356**
Menengah	Tinggi	-0,3988	0,000*
Dasar	Tinggi	-0,5249	0,000*

Sumber: Prianto (2016)

Keterangan: *) signifikan; **) tidak signifikan

Tabel 6. Perbedaan Kesiapan Bekerja Menurut Latar Belakang Pengalaman Kerja

Pengalaman Kerja	Pengalaman Kerja	Rerata Perbedaan	Sig ($\alpha=0,05$)
0 Tahun	1-3 Tahun	-0,1259	0,059**
1-3 Tahun	> 3 Tahun	-0,0318	0,788**
0 Tahun	> 3 Tahun	-0,2333	0,049*

Sumber: Data diolah peneliti

Keterangan: *) signifikan; **) tidak signifikan

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan kesiapan bekerja yang meyakinkan antara pencari kerja berpengalaman kerja 0 tahun dengan pencari kerja berpengalaman kerja lebih dari 3 tahun. Tidak ada perbedaan kesiapan bekerja yang meyakinkan antara pencari kerja berpengalaman kerja 0 tahun dengan pencari kerja berpengalaman kerja 1-3 tahun. Tidak ada perbedaan kesiapan bekerja yang meyakinkan antara pencari kerja berpengalaman kerja 1-3 tahun dengan pencari kerja berpengalaman kerja lebih dari 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pencari kerja dengan pengalaman kerja lebih dari 3 tahun cenderung lebih memiliki kesiapan untuk bekerja. Artinya, pengalaman kerja terbukti merupakan variabel yang memengaruhi kesiapan bekerja para pencari kerja.

Terdapat 5 faktor faktor yang diekspektasikan oleh para penyedia kerja terhadap para pencari kerja, yang meliputi: (1) Faktor motivasi

kerja, yang dimanifestasikan oleh kesungguhan dalam bekerja, dorongan bekerja keras, tahan banting, konsisten, condong bekerja dengan sebaik-baiknya, pantang menyerah, tidak mudah mengeluh; (2) Faktor kematangan pribadi, yang dimanifestasikan oleh daya tahan menghadapi cobaan, tidak emosional ketika dikritik, bersifat terbuka, percaya diri, dan bertanggung jawab; (3) Faktor kematangan sosial yang dimanifestasikan oleh kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim kerja, kemampuan membangun jejaring, kemampuan berinteraksi dengan pelanggan, dan kemampuan untuk berperilaku luwes dan fleksibel; (4) Faktor sikap kerja yang dimanifestasikan oleh sikap hormat, cermat, tanggap, realistis dan praktis, sopan santun dalam berperilaku, rendah hati, dan sabar; (5) Faktor kecakapan dalam bekerja yang dimanifestasikan oleh dimilikinya pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan bidang pekerjaan, mampu membuat analisis terhadap permasalahan, mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan bidang pekerjaannya, mampu mencari cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien, berani membuat keputusan, dan cepat mengadopsi cara kerja baru.

Kesiapan bekerja para pencari kerja ditentukan oleh dimilikinya pengetahuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan kecakapan praktis. Pengetahuan para pencari kerja terutama berkaitan dengan penguasaan TIK, aplikasi komputer, kemampuan membaca, dan tingkat pemahaman terhadap bidang pekerjaan. Sedangkan kecakapan praktis berkaitan dengan motivasi kerja, kematangan pribadi, kemampuan berinteraksi, sikap kerja, kemampuan memecahkan masalah, dan sikap tanggung jawab.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa dilihat dari dimensi penguasaan pengetahuan, para pencari kerja dalam kategori "sangat siap untuk bekerja". Titik lemah para pencari kerja terletak pada atribut daya baca dan pemahaman terhadap bidang pekerjaan. Dilihat dari dimensi penguasaan kecakapan praktis, para pencari kerja dalam kategori "siap untuk bekerja". Titik lemah para pencari kerja terletak pada atribut kematangan pribadi, kemampuan berinteraksi, sikap kerja, dan kemampuan memecahkan masalah pekerjaan.

Hasil kajian menemukan adanya kesenjangan derajat kesiapan bekerja dilihat dari dimensi penguasaan pengetahuan dan kecakapan praktis para pencari kerja. Dari dimensi penguasaan pengetahuan, para pencari kerja dalam kategori *sangat siap untuk bekerja*. Tetapi dari dimensi kecakapan praktis para pencari kerja dalam kategori *siap untuk*

bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang didapatkan para pencari kerja di bangku pendidikan formal belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan dunia kerja. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah para pengelola lembaga pendidikan formal agar mampu menyajikan kurikulum pendidikan dan aktivitas pembelajaran yang selaras dengan tuntutan dunia kerja. Hal ini menguatkan asumsi bahwa masih besarnya angka pengangguran di Indonesia bukan semata-mata karena tidak tersedianya lapangan kerja, tetapi juga berkaitan dengan apakah ilmu pengetahuan yang didapatkan dari bangku sekolah memiliki relevansi dengan tuntutan dunia kerja. *Missmatch* antara kualifikasi pengetahuan pekerja dengan tuntutan kecakapan yang dibutuhkan dunia kerja terbukti juga menjadi pemicu timbulnya pengangguran.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan para pencari kerja berpengaruh terhadap kesiapan mereka untuk bekerja. Semakin tinggi latar belakang pendidikan para pencari kerja membuat mereka semakin siap untuk bekerja. Artinya, untuk meningkatkan kesiapan bekerja para pencari kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan. Pengalaman kerja para pencari kerja juga memengaruhi kesiapan mereka untuk bekerja. Pengalaman kerja yang lebih lama membuat para pencari kerja lebih siap untuk bekerja. Hal ini berarti para pencari kerja dituntut untuk memperbanyak pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia kerja.

Penguatan Orientasi Kewirausahaan

Semua negara di dunia mengakui bahwa kewirausahaan adalah merupakan kunci dari tumbuhnya inovasi, berkontribusi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan stabilitas politik suatu negara. Pada prinsipnya, kewirausahaan adalah merupakan manifestasi dari penggunaan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola, memproduksi, melayani, mengkreasikan produk atau jasa, dan menciptakan peluang pasar. Kewirausahaanlah yang membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih kompetitif, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Acs, et al (2018) menyatakan bahwa wirausahawan berperan besar dalam menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan dengan ikut menciptakan lapangan kerja, memberikan solusi atas munculnya berbagai permasalahan kehidupan masyarakat, mengkreasikan teknologi atau cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien, dan saling mempertukarkan berbagai ide gagasan dalam kehidupan masyarakat global. Selanjutnya dijelaskan oleh Acs, et al (2018) dalam laporan GEI 2018 bahwa berbagai kondisi yang mendukung tumbuh kembangkan kewirausahaan, secara otomatis juga akan menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Gerakan yang diarahkan untuk mendukung tumbuh suburnya kegiatan kewirausahaan dipastikan akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Berdasarkan pandangan

GEI, maka pengembangan kewirausahaan, terutama di kalangan generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa sudah semestinya ditempatkan pada prioritas utama.

A. Indeks Kewirausahaan

GEI secara rutin menerbitkan laporan peringkat kewirausahaan dari negara di seluruh dunia. Laporan GEI dari tahun ke tahun selalu mendudukan negara-negara yang memiliki peringkat kewirausahaan unggul adalah negara-negara yang kehidupan sosial ekonominya maju dan berkembang pesat. Dengan kata lain, laporan GEI membuktikan bahwa cara yang dinilai efektif untuk membangun keunggulan sebuah bangsa dapat dilakukan dengan memperkuat program kewirausahaan, khususnya bagi para generasi muda.

Indeks kewirausahaan global (GEI) mengukur berbagai indikator yang menjelaskan sejauh mana negara bisa menghadirkan situasi dan kondisi lingkungan yang mendukung tumbuh suburnya aktivitas kewirausahaan. GEI mengidentifikasi 14 komponen yang diyakini berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan berkembangnya kegiatan kewirausahaan, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 1: Komponen Pembentuk Lingkungan yang Kondusif bagi Aktivitas Wirausaha

No	Pilar	Sub Indeks	Cara Pengukuran
1	Persepsi tentang ketersediaan peluang	Sikap, berkait pandangan umum penduduk terhadap responden dan aktivitas kewirausahaan	Apakah semua penduduk mampu mengidentifikasi peluang untuk memulai kegiatan usaha, dan apakah institusi pemerintah menciptakan kemudahan bagi penduduk untuk mendirikan kegiatan usaha sesuai dengan peluang yang sudah diidentifikasi.

2	Kecakapan untuk memulai usaha	Sikap, berkait pandangan umum penduduk terhadap responden dan aktivitas kewirausahaan	Apakah semua penduduk memiliki berbagai kecakapan yang diperlukan untuk memulai kegiatan usaha sesuai dengan bidang usaha yang diminatinya, dan apakah tersedia pendidikan lanjutan sampai jenjang pendidikan tinggi yang menekankan kajian pada pengembangan usaha.
3	Penerimaan terhadap risiko		Apakah para individu mau dan sanggup menanggung risiko dengan menjalankan kegiatan usaha. Apakah lingkungan cenderung mendukung kegiatan usaha, atau apakah instansi pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan pendirian usaha justru dinilai menimbulkan risiko usaha.
4	Jejaring		Apakah para responden mengetahui aktivitas usaha satu sama lain, dan secara geografis seberapa ter-konsentrasi jaringan mereka.
5	Dukungan budaya		Bagaimana negara memandang aktivitas wirausaha? Apakah mudah untuk menjadi responden, atau apakah perilaku koruptif dan kolusif justru mempersulit aktivitas wirausaha dibandingkan dengan aktivitas lainnya?

6	Persepsi tentang peluang untuk menjadi responden		Apakah responden lebih termotivasi menjadi responden karena kemudahan yang dipersepsikan lebih kuat dibandingkan karena kebutuhan untuk menjadi responden? Apakah pemerintahan memberikan jaminan kemudahan untuk menjadi responden?
7	Alih teknologi	Aspek kemampuan, menggambarkan berbagai karakteristik responden dan berbagai	Apakah sektor teknologi berkembang pesat dan para pelaku usaha bisnis dengan mudah dapat menggunakan teknologi untuk menopang kegiatan usahanya?
8	Modal manusia	aktivitas bisnisnya	Apakah para responden terdidik dengan baik, terlatih dalam menjalankan aktivitas bisnis, dan memiliki daya tawar yang memadai dalam pasar tenaga kerja?
9	Kemampuan berkompetisi		Apakah para responden menghasilkan barang dan jasa yang unik dan mampu menjual barang dan jasa tersebut ke dalam pasar?
10	Inovasi produk	Aspek aspirasi, menggambarkan aspek kualitas dari para pelaku usaha bisnis baru.	Apakah negara mampu mengembangkan produk baru dan memanfaatkan teknologi baru untuk pengembangan produk?

11	Proses inovasi	Aspek aspirasi, menggambarkan aspek kualitas dari para pelaku usaha bisnis baru.	Apakah para pelaku usaha bisnis menggunakan teknologi baru dan apakah mereka mampu merekrut sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung usaha mereka?
12	Pertumbuhan yang tinggi		Apakah para pelaku usaha bisnis berniat untuk menumbuh kembangkan usaha dan memiliki kemampuan dan strategis untuk menciptakan pertumbuhan usaha?
13	Internasionalisasi		Apakah para pelaku usaha memiliki keinginan yang kuat untuk memasuki pasar global, dan apakah kegiatan ekonomi memberikan stimulus yang kuat untuk terus menghasilkan ide yang bernilai dalam pasar global
14	Risiko modal		Apakah modal cukup tersedia baik dari sektor individu maupun dari para investor?

Hampir semua pilar sebagaimana dijelaskan di atas berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusia yang ada memiliki mental wirausaha yang kuat atau tidak. sedangkan yang lain (terutama pilar ke-5, 6,10, dan 14) berkaitan dengan dimensi lingkungan sosial budaya, kebijakan pemerintah, dan sektor permodalan apakah mendukung tumbuh suburnya kegiatan wirausaha atau tidak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan pendidikan kewirausahaan bagi para generasi muda.

Pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan secara intensif di berbagai jenjang, baik dalam format pendidikan formal, non formal, maupun informal diharapkan akan memperkuat berbagai pilar sebagaimana disebutkan di atas. Jika berbagai pilar yang berkaitan dengan sumber daya manusia cukup kuat, maka pilar lingkungan sosial budaya kebijakan pemerintah dan permodalan akan mengikutinya. Dengan melakukan penguatan berbagai pilar pendukung kewirausahaan diharapkan akan dapat menumbuhkan sumber daya manusia yang memiliki mental kewirausahaan yang kuat.

Suatu negara yang didukung sumber daya manusia dengan mental kewirausahaan yang kuat dipastikan akan memiliki daya saing yang tinggi. Keberadaan sumber daya manusia dengan mental kewirausahaan yang kuat merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesiapannya untuk menghadapi tingkat persaingan yang ketat.

Bagaimanakah posisi kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dilihat dari mental kewirausahaannya dibandingkan dengan berbagai negara tetangga? Tabel berikut menunjukkan peringkat GEI Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN:

Tabel 2: Peringkat GEI Indonesia Dibandingkan dengan Negara ASEAN

No	Negara	Peringkat GEI	Skor GEI
1	Indonesia	94	21%
2	Singapura	27	53%
3	Malaysia	58	33%
4	Thailand	71	27%
5	Brunai Darusalam	53	34%
6	Filipina	84	24%
7	Vietnam	87	23%
8	Myanmar	127	14%
9	Kamboja	113	18%

Sumber: Acs, et al. (2018)

Mengingat pentingnya kewirausahaan bagi kemajuan perekonomian suatu negara, maka di berbagai negara maju telah memasukkan pendidikan kewirausahaan sebagai kurikulum wajib pada berbagai jenjang pendidikan. Berbagai negara di Eropa, misalnya; telah menjadikan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan berbasis kegiatan usaha sebagai sebuah gerakan nasional yang harus diikuti oleh semua warga negara (Brunila, 2012; Eurydice, 2016). Dengan menjadikan sebuah gerakan nasional, maka berbagai negara maju memberikan dorongan dan perhatian besar agar pelaksanaan kegiatan pendidikan kewirausahaan benar-benar berjalan dengan optimal.

Negara-negara maju berkepentingan agar kewirausahaan benar-benar menjadi bagian dari budaya setiap warga negara. Negara memberikan berbagai fasilitas dan kebijakan yang mendukung berkembangnya kegiatan kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan pilar kelima dari GEI. Dengan menjadikannya sebagai sebuah gerakan nasional kewirausahaan, maka semua aktivitas pendidikan akan dijalankan dengan diwarnai dengan nilai-nilai kewirausahaan. Negara-negara maju seperti di Eropa menjadikan kewirausahaan sebagai kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh setiap warga negara (Minna et al, 2018).

Kewirausahaan diharapkan bisa menjadi sebuah kecakapan yang dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Artinya setiap gerak, langkah, dan aktivitas warga negara di Eropa diharapkan selalu diwarnai dengan nilai-nilai kewirausahaan. Dengan memiliki budaya wirausaha, setiap warga negara diharapkan menjadi pribadi yang mampu bertindak dan bertanggung jawab, aktif, kreatif, inovatif, terbuka dan peka terhadap perubahan lingkungan, mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada, mampu memperhitungkan risiko dari setiap aktivitasnya, dan mampu merencanakan dan mengelola setiap kegiatannya dengan cermat. Negara-negara maju sangat menyadari dan mengharapkan bahwa setiap warga negaranya mampu menjadi warga yang produktif, sehingga keberadaannya memberikan kontribusi riil bagi perkembangan ekonomi negaranya (Minna, et al, 2018).

B. Penguatan Iklim Kewirausahaan

Penguatan mental kewirausahaan dapat dilakukan dengan menciptakan suasana lingkungan yang mendukung tumbuhnya

semangat kewirausahaan. Hampir semua negara di dunia saat ini bekerja keras untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha sendiri bisa tampil dalam bentuk dan ukuran yang sangat beragam, mulai dari kegiatan usaha kaki lima di pinggir jalan dan di pusat keramaian, sampai dengan kegiatan usaha menengah dan usaha besar. Tetapi terlepas dari berbagai bentuk dan ukuran kegiatan usaha, faktor lingkungan di mana kegiatan wirausaha itu dijalankan memegang peranan penting yang sangat menentukan keberlanjutan dan tumbuh kembangnya kegiatan usaha. Itulah sebabnya dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah dan pimpinan berbagai organisasi sosial ekonomi dan lembaga pendidikan untuk menciptakan iklim atau kebijakan yang mendukung tumbuh kembangnya kegiatan kewirausahaan.

Wirausaha sejatinya melekat pada setiap manusia yang tampil di dalam kehidupan dunia dalam keadaan belum final. Untuk bisa hidup di dunia dengan lebih manusiawi, setiap manusia dituntut untuk mengkreasi berbagai kebutuhan hidupnya. Maka setiap manusia sesungguhnya dituntut untuk mampu memerankan diri sebagai pencipta barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Dari aktivitas usaha seperti inilah yang kemudian membuat kehidupan manusia di dunia semakin hari kian gemerlap, mudah, dan nyaman. Inilah yang hendak terus dikatakan bahwa sesungguhnya kegiatan wirausaha akan terus bersentuhan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup manusia.

Wirausaha adalah hak sekaligus kewajiban setiap orang. Sebagai makhluk yang belum final, setiap orang wajib untuk berkreasi dan berinovasi untuk hadirnya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkannya. Pada saat yang sama, setiap orang juga berhak untuk menikmati kesejahteraan hidup; yang antara lain dapat diukur dari sampai sejauh mana ia dapat menikmati barang dan jasa yang mendukung kebutuhan hidupnya. Bila upaya pemenuhan kesejahteraan adalah merupakan hak setiap orang, maka berwirausaha sesungguhnya juga menjadi hak setiap orang. Tidak boleh ada klaim atau pengakuan bahwa wirausaha adalah profesi kelompok orang atau etnis tertentu. Sekali lagi, semua orang berhak dan wajib untuk menjadi responden sesuai dengan level dan kapasitas kewirausahaannya masing-masing.

Tidak menjadi masalah jika aktivitas kewirausahaan seseorang hanya sampai pada level memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, misalnya; menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang dikonsumsi pada hari itu. Dalam level yang paling sederhana, memasak untuk kebutuhan makan dan minum pada hari itu juga harus diakui sebagai aktivitas wirausaha, karena tentu tidak manusiawi jika ada orang yang makan bahan mentah. Tetapi jika ada orang yang berkreasi dan berinovasi dengan membuat makan cepat saji untuk melayani para pekerja yang tidak sempat memasak, tentu ia akan mendapatkan bonus ekonomi yang lebih banyak dari para konsumennya. Pada akhirnya, setiap orang akan mencari celah dan peluang untuk menentukan aktivitas wirausaha apa yang dinilai paling menguntungkan dan menyejahterakan bagi dirinya. Itulah esensi hak dan kewajiban berwirausaha bagi setiap orang.

Dukungan konsisten dari semua pihak untuk memastikan bahwa spirit berwirausaha dapat tumbuh dan berkembang pada setiap orang harus terus mengalir tanpa putus. Pilar penting yang dinilai berperan besar untuk mendukung tumbuhnya spirit wirausaha adalah lingkungan yang mendukung kegiatan kewirausahaan, peraturan atau perundang-undangan yang dilaksanakan dengan konsisten untuk terciptanya kepastian hukum, dan sistem pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk memperkuat spirit kewirausahaan. Iklim kewirausahaan yang kondusif membutuhkan dukungan budaya wirausaha yang kuat dari setiap warga negara.

Lingkungan yang kondusif pada akhirnya akan dapat menumbuhkan minat berwirausaha, dan puncaknya dapat meyakinkan setiap orang untuk benar-benar menjadi responden. Demikian halnya, cerita kesuksesan para responden dalam menjalankan kegiatan usaha juga akan dapat mendorong lahirnya generasi baru yang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan usaha. Setidaknya, hal itu akan menarik minat para calon responden baru untuk ikut berburu kesuksesan dalam kegiatan wirausaha. Minat untuk berwirausaha dari para generasi muda merupakan modal utama dari suatu negara untuk suatu saat bisa mencapai kualitas pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Litan,2014).

Kegiatan kewirausahaan di kalangan generasi muda akan berkembang dengan baik apabila ada dukungan institusional yang memberikan insentif dan kesempatan kepada mereka untuk terus berkreasi dan mengambil risiko. Ada penghargaan yang memadai dari

institusi kepada mereka yang berkarya, dan pada saat yang sama; ada pemakluman yang cukup apabila karya yang dihasilkan belum bisa memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Bagi generasi muda yang sedang menempuh studi, dukungan institusi bisa datang dari sekolah atau lembaga pendidikan di mana ia sedang belajar. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kegiatan wirausaha, faktor lingkungan yang kondusif dan dukungan institusi dinilai berperan lebih besar dibandingkan dengan unsur-unsur lain, seperti perkembangan teknologi dan ketersediaan sumber dana (de Soto,2014).

Bagi Indonesia, pengembangan kewirausahaan dinilai sangat mendesak, mengingat masih sangat besarnya persoalan ketenagakerjaan yang harus dihadapi. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan perkembangan jumlah tenaga kerja. Akibatnya, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih sangat tinggi. Tingginya angka pengangguran secara langsung berdampak pada persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Pengangguran yang tinggi menyebabkan beban sosial yang harus ditanggung masyarakat menjadi kian berat. Maraknya berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggur membuat ketenteraman masyarakat menjadi terusik. Orang-orang yang menganggur juga menjadi mudah stres, mudah tersulut emosinya untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif.

Sejak tahun 2005, Indonesia sesungguhnya telah meratifikasi konvenan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). Hal ini menandai babak baru tentang pengakuan hak asasi manusia tidak hanya dalam kaitan dengan hak sipil dan politik, tetapi juga berkaitan dengan hak ekonomi. Dengan kata lain, negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak ekonomi warga negaranya. Sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak ekonomi warga negaranya, negara harus menyediakan infrastruktur yang memungkinkan semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhannya.

Demi melindungi hak ekonomi warga, negara dituntut untuk memfasilitasi para warganya untuk tidak menjadi pengangguran. Negara dapat mengambil peran untuk mendorong para warganya agar menjadi lebih produktif dan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Untuk maksud itu, negara dapat menyediakan program

pengembangan kewirausahaan bagi para warganya. Dengan segala otoritasnya, negara dapat menjadikan program pengembangan kewirausahaan sebagai sebuah gerakan nasional yang harus diikuti oleh semua warganya. Negara bahkan dapat mewajibkan semua lembaga pendidikan di berbagai jenjang untuk menjadikan pendidikan kewirausahaan sebagai mata kajian yang harus diikuti oleh semua siswa/mahasiswa. Kewirausahaan dapat dijadikan sebagai sebuah gerakan nasional yang juga dapat digunakan untuk memenuhi hak ekososial para warganya.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh negara harus mendukung dan memperkuat kegiatan ekonomi semua warga. Dalam kaitan ini, kebijakan pemerintah terhadap pengembangan kewirausahaan merupakan upaya strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat. China dan India merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan perekonomian masyarakatnya melalui pengembangan kewirausahaan (Goel, *et.al*, 2007). Hingga saat ini, China dan India merupakan dua negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan didukung oleh berkembangnya kegiatan berwirausaha yang dijalankan oleh para warganya. Dan, sebagaimana kita ketahui bersama; kini ke dua negara tersebut telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia, dan secara perlahan-lahan telah menggeser kekuatan ekonomi Jepang dan Amerika. Informasi ini memperlihatkan betapa strategisnya kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagai sarana untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.

Sejak pasca krisis moneter yang menimpa bangsa ini lebih dari satu dasawarsa yang lalu, sesungguhnya perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan yang menggembirakan. Meskipun pada tahun belakangan ini terjadi krisis ekonomi global, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata masih tetap tercatat di atas 5%. Angka PDB dan IPC meningkat cukup signifikan. Meskipun demikian, pulihnya perekonomian Indonesia menjadi kurang bermakna ketika angka pengangguran masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan senjata utama untuk menekan tingkat pengangguran.

Berbagai data ketenagakerjaan berikut dapat menjelaskan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta bisa dengan cepat menekan angka pengangguran. Berdasarkan data yang disampaikan Pusdatinaker (2011), diketahui jumlah angkatan kerja

tercatat 117.370.485 orang, sedangkan yang bekerja tercatat 109.670.399 orang. Jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan (sekolah/kuliah) tercatat sebanyak 13.104.294 orang. Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan adalah mereka yang rata-rata berusia 20 tahun, dan tidak lama lagi mereka sangat berpotensi akan menambah jumlah pengangguran terbuka apabila tidak terserap oleh lapangan kerja. Dengan asumsi optimis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 6%/tahun, diperkirakan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap diperkirakan berkisar 1,6 juta orang. Artinya, angka pengangguran di Indonesia jelas tidak bisa dikurangi hanya dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pengeluaran pembangunan oleh pemerintah. Dalam kaitan inilah diperlukan adanya upaya pengembangan kewirausahaan di kalangan warga masyarakat. Di dalam lembaga pendidikan formal, kewirausahaan perlu untuk dijadikan kajian utama, terutama untuk menekan tingginya angka pengangguran terdidik.

Tingginya angka pengangguran pada suatu negara juga mencerminkan rendahnya jumlah responden pada negara tersebut. Pengangguran yang besar menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penyedia kerja (responden) dengan pencari kerja. Rendahnya kelompok masyarakat dalam suatu negara yang mampu menyediakan lapangan kerja dibandingkan dengan mereka yang mencari pekerjaan menyebabkan tidak semua tenaga kerja dapat terserap dalam dunia kerja. Oleh karena itu, harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari Negara untuk memperkuat budaya wirausaha di masyarakat.

Di tangan para responden inilah berbagai sumber daya yang ada akan dapat dikembangkan (Audretsch & Keilbach, 2005). Solt (2007), yang mengutip pendapat Schumpeter, menyatakan bahwa keberadaan para responden merupakan aktor penting yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan ekonomi merupakan faktor antededen yang mendorong terciptanya lapangan kerja, maka upaya untuk mengurangi pengangguran mestinya harus dilakukan dengan memperkuat gerakan kewirausahaan. Berbagai kajian yang dilakukan oleh Lee & Anderson (2007), Sebora & Li (2006), dan Solt (2007) telah membuktikan bahwa perkembangan perekonomian China yang pesat adalah karena didukung oleh keberadaan responden.

Keberadaan para responden yang tangguh diyakini sangat menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada tahun

2011, peringkat kualitas perekonomian Indonesia berada pada posisi 44. Peringkat Indonesia berada di bawah negara tetangga. Sebagai gambaran, peringkat kualitas perekonomian Malaysia berada pada peringkat 17, Filipina peringkat 43, Thailand peringkat 13, Vietnam peringkat 40, dan Singapura peringkat 1. Di Asia Tenggara kualitas perekonomian Indonesia hanya unggul dari Kamboja yang berada pada peringkat 61 (<http://www.prosperity.com/rankings.aspx>, diakses 12 Maret 2012). Rendahnya kualitas perekonomian Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga ternyata mencerminkan rendahnya jumlah responden.

Berdasarkan data *The 2011 Legatum Prosperity Index*, dari 110 negara di dunia; kewirausahaan dan kesempatan berusaha di Indonesia berada pada peringkat 80. Peringkat kewirausahaan dan kesempatan berusaha di Indonesia ini ada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sebagai perbandingan, Vietnam berada pada peringkat 78, Filipina peringkat 70, Thailand peringkat 53, Malaysia peringkat 36, dan Singapura peringkat 14 (<http://www.prosperity.com/rankings.aspx>, diakses 10 Maret 2012).

Data terbaru yang dikeluarkan oleh GEI dalam Acs, et al. (2018) menunjukkan bahwa indeks kewirausahaan Indonesia berada di peringkat 94 dari 137 negara di dunia. Indeks kewirausahaan Indonesia masih berada di bawah Vietnam (87), Filipina (84), Thailand (71), Malaysia (58), Brunei Darusalam (53), dan Singapura (27). Data ini menunjukkan bahwa selama hampir 10 tahun indeks kewirausahaan Indonesia masih tetap berada di peringkat bawah. Data ini menunjukkan dengan jelas bahwa ternyata kewirausahaan belum menjadi sebuah orientasi hidup dari warga masyarakat. Rendahnya peringkat kewirausahaan dan kesempatan berusaha ini secara langsung berdampak pada kualitas perekonomian Indonesia.

Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, terutama dengan kalangan pendidikan tinggi; harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan kegiatan kewirausahaan dapat berkembang dengan baik. Lingkungan sosial, termasuk lingkungan keluarga juga berperan penting untuk tumbuh suburnya perilaku kewirausahaan. Selama ini lingkungan sosial masyarakat kita sering "dituduh" kurang mendukung berkembangnya kegiatan kewirausahaan. Hingga saat ini ada anggapan bahwa kebanyakan warga masyarakat lebih berorientasi menjadi pegawai, terutama pegawai negeri; daripada menjadi responden. Orientasi menjadi pegawai inilah yang konon masih banyak menjangkiti

kaum terdidik. Para lulusan pendidikan tinggi lebih banyak menunggu menjadi pegawai daripada menjadi responden, meskipun anggapan ini masih perlu dibuktikan kebenarannya.

C. Pengembangan Spirit Kewirausahaan

Tesfom (2006) dan Solt (2007) menyatakan bahwa kegiatan wirausaha berkaitan erat dengan pengembangan kreativitas dan inovasi, dan di tangan responden itulah kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi akan dapat ditingkatkan. Untuk meningkatkan kualitas perekonomian suatu negara, maka perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pula. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas selalu didukung oleh keberadaan sektor riil yang kuat, yang ditandai dengan tumbuh suburnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh warga masyarakat. Dengan kata lain, untuk mewujudkan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus didukung oleh keberadaan responden yang memadai.

Kajian yang dilakukan oleh Wennekens dan Thurik (1999) mengaitkan antara kegiatan kewirausahaan dengan pertumbuhan ekonomi. Temuan kajian ini menemukan bahwa aktivitas kewirausahaan pada berbagai jenjang usaha berdampak pada kualitas pertumbuhan ekonomi. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Davidson (1995) yang menjelaskan bahwa kewirausahaan merupakan kegiatan produktif yang mendorong kegiatan perekonomian. Kegiatan kewirausahaan dinilai tidak hanya menciptakan kegiatan ekonomi baru, tetapi juga menumbuhkan kegiatan inovasi baru (Hayton,*et.al*, 2002; Holcombe, 2003).

Dengan kemampuannya berinovasi, responden dianggap mampu menciptakan berbagai peluang usaha baru, dan hal ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja baru (Scarborough, *et.al*, 2010; Audretsch dan Thurik, 2000). Kualitas pertumbuhan ekonomi akan sangat ditentukan oleh keberadaan para responden melalui pengembangan inovasi, menciptakan, dan meningkatkan kemampuan bersaing. Negara dengan aktivitas kewirausahaan yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sering kali kewirausahaan dianggap salah satu di antara empat faktor produksi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan merupakan sumber daya yang diperlukan oleh semua negara di dunia, terutama negara yang sedang berkembang; agar dapat bersaing dalam pasar global (Kanungo, 1998).

Berbagai kajian di atas jelas menunjukkan betapa pentingnya program pengembangan kewirausahaan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Gerakan pengembangan kewirausahaan dapat dilakukan melalui pendidikan kewirausahaan. Pada beberapa negara maju, pendidikan kewirausahaan memegang peranan penting untuk ikut menumbuhkan semangat berusaha bagi para warga terdidik. Pengembangan kewirausahaan juga memerlukan dukungan lingkungan sosial. Pada lingkungan sosial yang memosisikan responden sebagai profesi yang terhormat dinilai mampu memicu generasi baru untuk mempersiapkan diri sebagai responden.

Berbagai kajian membuktikan bahwa berkembangnya kegiatan kewirausahaan pada suatu negara juga berkaitan erat dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada negara tersebut. Semakin berkualitas tata penyelenggaraan pemerintahan akan berdampak pada terciptanya efisiensi kegiatan layanan masyarakat, dan selanjutnya akan berimbas pada berkembangnya kegiatan kewirausahaan. Kini pemerintah dengan segenap aparat birokrasinya ditantang untuk mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan berwirausaha di masyarakat. Hingga saat ini, peringkat kualitas tata penyelenggaraan pemerintahan Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada pada peringkat 78, jauh di bawah Filipina (59), Vietnam (58), Thailand (57), Malaysia (35), dan Singapura (13) (<http://www.prosperity.com/rankings.aspx>, diakses 10 Maret 2012). Kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Goel, *et.al* (2007) secara jelas memaparkan bahwa berkembangnya kegiatan kewirausahaan pada beberapa wilayah di India dan China sangat dipengaruhi oleh kualitas tata penyelenggaraan negara pada dua negara tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tata penyelenggaraan pemerintahan yang dipersepsikan positif, terutama yang berkaitan dengan kegiatan layanan masyarakat; merupakan faktor yang mendukung tumbuhnya spirit kewirausahaan di kalangan warga masyarakat.

1. Peran Lingkungan

Pandangan hidup atau nilai-nilai yang dianut oleh individu juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan kewirausahaan. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dianut individu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri individu. Nilai-nilai yang

berkembang di masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap terbentuknya nilai-nilai dan pandangan hidup yang dianut oleh individu (Goel, *et.al*, 2007; Ajzen, 1991; Krueger, 1993). Hal ini berarti apakah budaya kewirausahaan akan dapat dikembangkan dengan baik oleh individu, hal itu sangat dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat di mana individu itu berada. Pada sebuah masyarakat yang menganut pandangan bahwa berwirausaha merupakan pilihan hidup yang mulia, maka hal ini akan mengilhami generasi berikutnya untuk menganut sikap hidup yang serupa.

Selain lingkungan sosial, lingkungan keluarga merupakan faktor utama yang ikut menentukan nilai-nilai dan pandangan hidup individu. Keluarga merupakan lembaga sosial utama dan pertama yang akan membentuk nilai-nilai yang dianut oleh individu. Kebiasaan-kebiasaan dan berbagai aktivitas baik di bidang sosial dan ekonomi, termasuk aktivitas usaha yang berkembang dalam keluarga akan segera dipersepsikan oleh individu-individu yang ada dalam keluarga tersebut. Keinginan individu untuk berwirausaha akan muncul melalui sebuah proses interaksi yang intensif melalui aktivitas usaha yang berkembang dalam keluarga. Secara tidak sadar, aktivitas usaha yang berkembang di dalam keluarga akan membiasakan individu dalam keluarga tersebut untuk berwirausaha (Matthews & Moser, 1995).

Pada masa lalu, budaya kewirausahaan dianggap akan bisa muncul secara alami (Blenker, *et al.* (2006). Mereka tumbuh menjadi responden lebih didorong oleh lingkungan, dan mereka akan berwirausaha sesuai dengan latar lingkungannya itu. Mereka akan berusaha dalam bidang yang relevan dengan tuntutan lingkungan di mana mereka berada. Minimal, mereka akan berusaha pada bidang yang telah dikembangkan oleh para orang tua mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Xavier, *et.al* (2010) dalam kajiannya tentang teori "Role Model". Teori ini antara lain menjelaskan bahwa kecenderungan individu untuk berwirausaha sangat dipengaruhi oleh dimensi kultural. Berbagai pengalaman generasi terdahulu dalam berwirausaha, termasuk pengalaman di dalam keluarga dan teman sebaya; juga sangat memengaruhi kecenderungan generasi berikutnya dalam berwirausaha. Dengan kata lain, kualitas lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap berkembangnya kegiatan kewirausahaan.

Penguatan kewirausahaan juga dapat dilakukan melalui pengembangan budaya kewirausahaan. Gerakan kewirausahaan harus disosialisasikan secara intensif ke dalam masyarakat dengan melibatkan struktur sosial yang ada di masyarakat. Indonesia memiliki pengalaman yang baik dalam penanaman kebiasaan-kebiasaan baru. Pada masa lalu, kita pernah berhasil memperkenalkan program keluarga berencana sebagai sebuah budaya hidup baru yang diterima secara luar oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di desa maupun di pelosok desa. Keberhasilan penanaman budaya baru ini antara lain dilakukan pemerintah dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, baik formal maupun non formal. Keterlibatan berbagai struktur sosial di masyarakat dalam penanaman budaya kewirausahaan merupakan faktor penting yang ikut menentukan keberhasilan kegiatan kewirausahaan. Berbagai kebiasaan dan aktivitas yang dijalankan warga masyarakat akan memengaruhi pilihan aktivitas warga masyarakat lainnya. Artinya, apabila di dalam masyarakat kegiatan berwirausaha menjadi pusat aktivitas warga, maka hal ini berpotensi mendorong warga lainnya untuk beraktivitas serupa (Davidson,1995; Goel, *et.al*, 2007).

Penguatan budaya kewirausahaan di masyarakat dapat dilakukan dengan jalan menekankan pentingnya berwirausaha. Sosialisasi tentang kewirausahaan harus dilakukan secara masif, baik di lingkungan keluarga, di masyarakat, di lembaga pendidikan formal. Kajian terdahulu membuktikan bahwa sosialisasi kewirausahaan yang dilakukan secara intensif berdampak pada tumbuhnya sikap positif dari para individu terhadap kegiatan kewirausahaan (Jackson dan Rodkey,1994). Kajian yang dilakukan oleh Matthews dan Moser (1995) membuktikan bahwa aktivitas wirausaha yang dilakukan orang tua dijadikan model generasi berikutnya untuk berwirausaha. Kegiatan wirausaha yang dijalankan keluarga dan orang tua merupakan sosialisasi kewirausahaan paling awal terhadap generasi berikutnya. Sosialisasi kewirausahaan yang terjadi di rumah selanjutnya akan memengaruhi generasi berikutnya dalam memilih karier sebagai responden. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa lingkungan keluarga dan masyarakat yang dinilai mendukung kewirausahaan merupakan faktor yang memengaruhi tumbuhnya spirit kewirausahaan.

2. Peran Pendidikan

Pengembangan kewirausahaan mestinya juga dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan. Beberapa peneliti terdahulu telah mengklaim tentang peran penting pendidikan bagi upaya pengembangan spirit kewirausahaan di kalangan warga terdidik. Pendidikan dianggap sebagai sarana yang strategis untuk menumbuhkan budaya kewirausahaan (Miettinen, 2008; Murugesan, 2010). Seiring dengan kian banyaknya kelompok usia muda yang mampu mengakses pendidikan tinggi, maka diharapkan dunia pendidikan harus ikut bertanggung jawab dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan anak muda. Miettinen (2008) yang mengutip *The Green Paper-Entrepreneurship in Europe* (2003) mengemukakan pertanyaan kritis: “Seberapa jauh pendidikan dapat membantu kaum terpelajar untuk mengembangkan kesadaran dan keterampilan yang diperlukan untuk berwirausaha (apakah pelatihan kewirausahaan sudah menjadi bagian utama dari kurikulum di sekolah, bagaimana kelas-kelas di sekolah dapat menghasilkan responden yang tangguh?; Apakah para siswa benar-benar sudah berkesempatan menjalankan kegiatan magang bersama dengan responden yang berpengalaman?; apakah pelatihan kewirausahaan sudah dilaksanakan secara intensif dan masih di semua universitas?; Dan apakah pengembangan program kajian yang dijalankan universitas sudah diarahkan untuk kegiatan pengembangan kewirausahaan?).

Menurut Miettinen (2008), jawaban atas berbagai permasalahan di atas adalah sebagai berikut: Pengembangan pola pikir tidak akan efektif apabila hanya diajarkan lewat perkuliahan di kelas. Ia akan lebih efektif apabila disimulasikan secara efektif. Artinya, mahasiswa dituntut tidak hanya belajar teori tentang kewirausahaan, lebih dari itu; ia harus belajar berwirausaha dalam arti yang sesungguhnya. Saat ini, sangat sedikit anak-anak muda yang memiliki pilihan yang jelas untuk sejak awal menjadi responden. Untuk itu, diperlukan pengenalan tentang kewirausahaan sejak usia dini. Kegiatan pendidikan diharapkan lebih banyak diisi dengan kegiatan pembelajaran yang diwarnai oleh semangat kewirausahaan. Melalui proses pendidikan seperti ini diharapkan akan lebih banyak generasi muda yang bisa menjadi responden.

Menurut Gibb (2002), pendidikan kewirausahaan akan sangat efektif bila tidak hanya dilakukan secara formal yang hanya menekankan pada kegiatan perkuliahan tatap muka antara dosen dan mahasiswa.

Kegiatan perkuliahan tatap muka dinilai tidak cukup mampu untuk memperkuat kewirausahaan di kalangan kaum terdidik. Untuk itu, kaum terdidik harus mendapatkan kesempatan untuk langsung terlibat dengan kegiatan usaha.

Di kalangan pendidikan tinggi (PT), program pengembangan kewirausahaan dinilai dapat membantu PT dalam mewujudkan misi utamanya, yaitu dalam bidang kajian dan pengajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) Mendorong perusahaan untuk ikut menyediakan dukungan dana untuk kegiatan kajian yang dilaksanakan oleh PT. Keterlibatan perusahaan ini penting dilakukan karena hasil kajian yang dilakukan PT pada akhirnya juga akan dimanfaatkan oleh perusahaan, (b) Memfasilitasi kegiatan pelatihan KWU untuk mahasiswa. Perusahaan juga dapat terlibat pada kegiatan ini, karena ketersediaan tenaga yang terlatih juga akan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Keterlibatan PT dalam aktivitas wirausaha akan membantu PT dalam mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana memulai kegiatan usaha. Hal ini akan sangat berguna untuk mendidik mahasiswa dalam memasuki dunia usaha. Kewirausahaan pun diharapkan akan dijadikan pilihan aktivitas utama kaum terpelajar setelah mereka lulus studi (Miettinen,2008).

Keterlibatan PT dalam pengembangan kewirausahaan juga akan membantu para staf dosen untuk mengomersialisasikan berbagai teknologi baru yang dihasilkannya. Dengan demikian berbagai temuan baru dari PT tidak hanya sekedar menjadi kertas kerja, tetapi bisa dijual di masyarakat. Dengan demikian kegiatan-kegiatan perkuliahan, kajian, dan kajian yang dikembangkan di PT juga dapat digunakan untuk melatih mahasiswa untuk memahami nilai praktis dari kegiatan kajian (Markowitz,2003).

Dari berbagai kajian terdahulu ditemukan bahwa pengembangan kewirausahaan melalui lembaga pendidikan mensyaratkan adanya kebiasaan berpikir non linear, mengutamakan kebiasaan berpikir inovatif dan kreatif (Kirby, 2008). Perekonomian dunia pada abad 21 menurut Kirby (2008) akan lebih banyak digerakkan oleh kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*), yang ditopang oleh para lulusan dari pendidikan formal, terutama pendidikan tinggi. Kebiasaan untuk berpikir non linear, kreatif, dan inovatif dinilai mampu mempercepat berkembangnya potensi kewirausahaan para siswa/ mahasiswa (Miettinen, 2008; Kirby, 2008). Artinya, sejalan dengan upaya

untuk memperkuat potensi kewirausahaan di kalangan siswa/mahasiswa, maka lembaga pendidikan formal dituntut untuk memberikan ruang yang besar bagi berkembangnya kemampuan berpikir non linear, kreatif, dan inovatif.

Kirby (2008), yang mengutip pendapat O'Connor (2002); juga menjelaskan bahwa justru mereka yang menantang arus kebiasaan berpikir linear inilah yang sangat berpotensi menjadi responden. Artinya, upaya penguatan potensi kewirausahaan di kalangan siswa/mahasiswa dapat dilakukan dengan membiasakan untuk berpikir terbuka (ke segala arah), melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, mengutamakan pola pikir kreatif dan inovatif. Lembaga pendidikan juga dituntut untuk toleran dengan pendapat yang bertentangan dengan arus umum (*mainstream*). Selama ini pendapat yang demikian ini sering kali divonis sebagai hal yang salah, sehingga harus dihindari. Jelas sekali bahwa kebiasaan berpikir yang demikian ini akan menumpulkan kreativitas dan inovasi, dua atribut yang sangat besar peranannya dalam pengembangan spirit kewirausahaan.

Pengembangan kewirausahaan, termasuk upaya untuk melahirkan responden dari kalangan terdidik; juga akan efektif dilakukan melalui pendidikan kewirausahaan. Kajian-kajian terdahulu menyimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat berbisnis para lulusan perguruan tinggi (Izedonmi & Okafor, 2010). Selanjutnya Izedonmi dan Okafor (2010) menyimpulkan adanya pengaruh pendidikan kewirausahaan bagi tumbuhnya minat untuk memulai berwirausaha para lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu, ketika angka pengangguran terdidik masih sangat tinggi, maka pendidikan kewirausahaan perlu dijadikan program pendidikan yang utama. Beberapa negara maju, seperti Perancis, Amerika Serikat, dan Jerman; mengakui peran penting pendidikan kewirausahaan bagi pembentukan responden baru.

Kajian yang dilakukan oleh Karl Eller *Centre Berger Entrepreneurship Program University of Arizona* sebagaimana dikutip oleh Izedonmi dan Okafor (2010) menyimpulkan bahwa (a) pendidikan kewirausahaan mampu mendorong seseorang untuk memulai kegiatan usaha, (b) pendidikan kewirausahaan mampu membuat lulusan perguruan tinggi lebih percaya untuk mampu menciptakan pekerjaan sendiri, (c) pendidikan kewirausahaan memungkinkan lulusan perguruan tinggi meningkatkan penghasilannya hingga 27% dan mampu

menguasai aset hingga lebih dari 62%, dan (d) pendidikan kewirausahaan membuat lulusan merasa puas karena mampu menciptakan pekerjaan sendiri. Berbagai dampak positif dari pendidikan kewirausahaan juga membuat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap institusi pendidikan tinggi menjadi meningkat pula.

Pendidikan kewirausahaan adalah program pendidikan yang memusatkan kajiannya pada upaya memberikan pemahaman siswa tentang kewirausahaan. Bidang kajian kewirausahaan dimaksudkan untuk memberikan keterampilan siswa yang meliputi latihan kepemimpinan, keterampilan bernegosiasi, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan berinovasi, keterampilan mengidentifikasi peluang usaha, keterampilan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan usaha, keterampilan menggali modal usaha, keterampilan menghadapi tantangan dalam berusaha, kemampuan memupuk semangat kerja, kemampuan memunculkan ide baru, kemampuan menuangkan rencana dan menjalankan bisnis, kemampuan menganalisis kinerja usaha, keterampilan membangun jejaring atau relasi usaha, dan kemampuan menganalisis lingkungan usaha (Izedonmi dan Okafor,2010).

Melalui pendidikan kewirausahaan diharapkan akan dapat menumbuhkan sikap positif terhadap profesi wirausaha. Apabila seseorang memiliki sikap positif terhadap kewirausahaan, maka hal ini sangat berpotensi untuk bisa membentuk minat wirausaha. Minat wirausaha inilah yang selanjutnya berpotensi untuk menumbuhkan perilaku berwirausaha. Hal ini sejalan dengan pendapat Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa minat adalah merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku spesifik, seperti perilaku berwirausaha.

Kajian lain dilakukan oleh Kruegar, et al (2000) juga mengungkapkan bahwa minat berwirausaha merupakan faktor kunci yang mendorong tumbuhnya perilaku berwirausaha. Demikian halnya dengan kajian yang dilakukan oleh Izedonmi dan Okafor (2010) juga menjelaskan bahwa mahasiswa yang menerima pendidikan kewirausahaan terbukti mampu menumbuhkan minat untuk berwirausaha. Kajian ini selanjutnya menjelaskan bahwa keputusan untuk berwirausaha sangat dipengaruhi oleh minat wirausaha. Dengan demikian ada keterkaitan antara pendidikan kewirausahaan dan minat berwirausaha dengan keputusan untuk berwirausaha. Langkah awal yang harus ditempuh untuk melahirkan responden baru dapat dilakukan melalui pendidikan kewirausahaan. Dengan demikian dapat dinyatakan

bahwa pendidikan kewirausahaan yang diterima individu merupakan faktor yang mendukung tumbuhnya spirit kewirausahaan.

D. Kajian Empirik Peran Pendidikan dalam Membentuk Orientasi Kewirausahaan

Untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan dalam membentuk orientasi kewirausahaan, berikut ini disajikan ringkasan hasil kajian penulis telah melakukan studi tentang spirit kewirausahaan dengan sampel sebanyak 182 lulusan berbagai jenjang pendidikan di Jawa Timur. Dilihat dari latar belakang jenis kelamin dan pendidikan, dari 182 responden 62,6% berjenis kelamin pria dan 37,4% berjenis kelamin wanita. Sebanyak 18,7% berpendidikan dasar, 47,2% berpendidikan menengah, dan 34,1% berpendidikan tinggi. Dilihat dari lokasi responden, sebanyak 30,8% berusaha di Surabaya, sebanyak 26,9% berusaha di Malang, sebanyak 18,1% berusaha di Lamongan, dan sebanyak 24,2% berusaha di Jombang.

Tabel 3: Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

Kota	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan			Jumlah
	Pria	Wanita		Dasar	Menengah	Tinggi	
Surabaya	40	16	56	10	28	18	56
Malang	27	22	49	14	22	14	50
Lamongan	23	10	33	7	15	12	34
Jombang	24	20	44	3	21	20	42
Jumlah	114	68	182	34	86	62	182

Spirit kewirausahaan responden dilihat dari orientasi kewirausahaan secara keseluruhan berada pada skor rerata 4,155 dengan koefisien *standar error* sebesar 0,053. Hal ini berarti para responden memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat. Secara terinci, koefisien orientasi wirausaha responden dilihat dari lokasi tempat tinggal, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan tampak pada tabel 3 berikut:

Tabel 4: Skor Rerata Orientasi Kewirausahaan Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Lokasi Tempat Tinggal

Sumber Data		Skor Rerata	Standar Kesalahan	Keterangan
Latar Belakang	Pria	4,012	0,069	Kuat
Jenis Kelamin	Wanita	4,393	0,083	Sangat Kuat
Latar Belakang	Dasar	3,911	0,106	Kuat
Pendidikan	Menengah	3,946	0,080	Kuat
	Tinggi	4,273	0,093	Sangat Kuat
Lokasi Tempat Tinggal	Surabaya	4,199	0,096	Kuat
	Malang	4,062	0,076	Kuat
	Lamongan	4,098	0,118	Kuat
	Jombang	4,162	0,127	Kuat

Berdasarkan data pada tabel 3 diketahui ternyata koefisien orientasi kewirausahaan paling tinggi ada pada responden di Surabaya, disusul Jombang, Lamongan, dan Malang.

Secara keseluruhan koefisien orientasi kewirausahaan responden wanita lebih tinggi dibandingkan dengan responden pria. Secara rinci koefisien orientasi kewirausahaan responden wanita dan pria di empat kota tampak pada tabel 4 berikut:

Tabel 5: Rerata Orientasi Kewirausahaan Berdasarkan Jenis Kelamin di Empat Kota

Sumber Data		Skor Rerata	Standar Kesalahan	Keterangan
Surabaya	Pria	4,122	0,120	Kuat
	Wanita	4,267	0,136	Sangat Kuat
Malang	Pria	3,777	0,101	Kuat
	Wanita	4,147	0,112	Kuat
Lamongan	Pria	4,097	0,147	Kuat
	Wanita	4,100	0,166	Kuat
Jombang	Pria	3,974	0,163	Kuat
	Wanita	4,250	0,196	Sangat Kuat

Kajian yang dilakukan penulis juga mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berdampak signifikan pada tumbuhnya orientasi kewirausahaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, orientasi kewirausahaan para responden semakin kuat. Tabel 5 berikut menjelaskan latar belakang pendidikan dan rerata orientasi kewirausahaan.

Tabel 6: Rerata Orientasi Kewirausahaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Rerata	Standar Kesalahan	Keterangan
Pendidikan Dasar	3,911	0,106	Kuat
Pendidikan Menengah	3,946	0,080	Kuat
Pendidikan Tinggi	4,273	0,093	Sangat Kuat

Hasil analisis menunjukkan ada perbedaan yang meyakinkan orientasi kewirausahaan para responden dilihat dari latar belakang pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikan para responden menyebabkan orientasi kewirausahaan mereka semakin kuat.

Kajian ini juga mengungkapkan ada tidaknya perbedaan orientasi kewirausahaan para responden dilihat dari latar belakang pendidikan. Berdasarkan hasil analisis univariat didapatkan data-data sebagaimana tampak pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 7: Perbedaan Rerata Orientasi Kewirausahaan Berdasarkan Latar Pendidikan

Tingkat Pendidikan (A)	Tingkat Pendidikan (B)	Perbedaan Rata-Rata (A-B)	Standar Kesalahan	Proporsi (p,sig)
Dasar	Menengah	0,0349	0,10638	0,743
Dasar	Tinggi	-0,3065	0,11207	0,007 ^{*)}
Menengah	Tinggi	-0,3413	0,08749	0,000 ^{*)}

*) Rata-rata perbedaan signifikan pada taraf $\alpha = 0,05$

Berdasarkan data hasil analisis pada tabel 6 terlihat adanya perbedaan orientasi kewirausahaan para responden berlatar belakang pendidikan dasar dengan responden berpendidikan tinggi. Orientasi kewirausahaan para responden berpendidikan menengah dengan

responden berpendidikan tinggi juga berbeda sangat meyakinkan. Sedangkan orientasi kewirausahaan para responden berlatar belakang pendidikan dasar dengan responden berpendidikan menengah tidak berbeda secara meyakinkan. responden berlatar belakang pendidikan tinggi memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan responden berpendidikan menengah dan berpendidikan dasar.

E. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Tumbuhnya Orientasi Kewirausahaan

Kebijakan pemerintah yang dinilai sangat mendukung kegiatan usaha berdampak pada tumbuhnya orientasi kewirausahaan. Responden yang mempersepsikan kebijakan pemerintah sangat mendukung kegiatan usaha mampu melahirkan orientasi kewirausahaan pada kategori “sangat kuat” (skor rerata 4,50 dengan *standar error* 0,155). Berdasarkan hasil analisis univariat, kategori kebijakan pemerintah yang dipersepsikan responden memberikan dampak tumbuhnya orientasi kewirausahaan yang berbeda.

Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dampak kategori kebijakan pemerintah yang dipersepsikan “kurang mendukung” dan “mendukung” dengan kebijakan yang dipersepsikan “sangat mendukung”. Dengan kata lain, semakin baik kebijakan pemerintah akan berdampak pada tumbuhnya orientasi kewirausahaan yang semakin kuat.

F. Dampak Dukungan Lingkungan Terhadap Tumbuhnya Orientasi Kewirausahaan

Hasil analisis data mengungkapkan bahwa lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang dipersepsikan mendukung kegiatan kewirausahaan berdampak pada tumbuhnya orientasi kewirausahaan dari para responden. Tabel 8 berikut ini menggambarkan rerata orientasi kewirausahaan dilihat dari dukungan lingkungan yang dipersepsikan responden.

Tabel 8: Rerata Orientasi Kewirausahaan Berdasarkan Kategori Dukungan Lingkungan

Dukungan Lingkungan	Rerata	Standar Kesalahan	Keterangan
Kurang Mendukung	3,521	0,057	Kuat
Mendukung	3,921	0,047	Kuat
Sangat Mendukung	5,000	0,080	Sangat Kuat

Berdasarkan hasil analisis Anova, derajat dukungan lingkungan memberikan dampak tumbuhnya orientasi kewirausahaan yang berbeda secara meyakinkan. Semakin kuat dukungan lingkungan terhadap kegiatan kewirausahaan, semakin tinggi orientasi kewirausahaan dari para responden.

Berdasarkan hasil analisis univariat, kategori dukungan lingkungan yang dipersepsikan responden memberikan dampak tumbuhnya orientasi kewirausahaan yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa ada perbedaan orientasi kewirausahaan yang meyakinkan dilihat dari kategori dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Semakin kuat dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat terhadap kegiatan kewirausahaan, semakin kuat pula orientasi kewirausahaan dari para responden.

G. Dampak Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Tumbuhnya Orientasi Kewirausahaan

Hasil analisis data mengungkapkan bahwa intensitas pendidikan kewirausahaan yang dipersepsikan responden berdampak pada tumbuhnya orientasi kewirausahaan. Tabel berikut ini menggambarkan rerata orientasi kewirausahaan dilihat dari intensitas pendidikan kewirausahaan yang dipersepsikan responden.

Tabel 9: Rerata Orientasi Kewirausahaan Berdasarkan Intensitas Pendidikan Kewirausahaan

Intensitas Pendidikan Kewirausahaan	Rerata	Standar Kesalahan	Keterangan
Kurang Intensif	3,025	0,064	Cukup
Intensif	4,019	0,055	Kuat
Sangat Intensif	4,867	0,055	Sangat Kuat

Berdasarkan hasil analisis Anova, derajat dukungan lingkungan memberikan dampak tumbuhnya orientasi kewirausahaan yang berbeda secara meyakinkan. Semakin intensif responden mengikuti pendidikan kewirausahaan, semakin tinggi orientasi kewirausahaan dari para responden. Berdasarkan hasil analisis, kategori dukungan lingkungan yang dipersepsikan responden memberikan dampak tumbuhnya orientasi kewirausahaan yang berbeda.

Hasil kajian menunjukkan bahwa ada perbedaan orientasi kewirausahaan yang meyakinkan dilihat dari intensitas keterlibatan responden dalam mengikuti pendidikan kewirausahaan. Semakin intensif responden mengikuti kegiatan pendidikan kewirausahaan, semakin kuat pula orientasi kewirausahaan yang terbentuk.

H. Dampak Kebijakan Pemerintah, Dukungan Lingkungan, dan Pendidikan Kewirausahaan terhadap Tumbuhnya Orientasi Kewirausahaan

Dari hasil kajian mengungkapkan bahwa faktor dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat serta intensitas keterlibatan dalam pendidikan kewirausahaan memberikan dampak yang signifikan bagi tumbuhnya orientasi kewirausahaan. Faktor kebijakan pemerintah dipersepsikan responden belum memberikan pengaruh yang signifikan bagi tumbuhnya orientasi kewirausahaan. Secara keseluruhan, kontribusi dukungan lingkungan, intensitas keterlibatan dalam pendidikan kewirausahaan, dan kebijakan pemerintah bagi tumbuhnya orientasi kewirausahaan sebesar 84,6%. Kontribusi terbesar bagi tumbuhnya orientasi kewirausahaan tentu ada pada dukungan lingkungan dan intensitas pendidikan kewirausahaan.

Interaksi antara variabel dukungan lingkungan dan intensitas pendidikan kewirausahaan yang terbukti sebagai pemicu utama bagi tumbuhnya orientasi kewirausahaan juga memberikan informasi yang menarik untuk dicermati, sebagaimana tampak pada tabel 12 berikut ini.

Tabel 10: Rerata Orientasi Kewirausahaan Berdasarkan Kategori Dukungan Lingkungan dan Intensitas Pendidikan Kewirausahaan

Dukungan Lingkungan	Intensitas Pendidikan	Rerata	Standar Kesalahan	Keterangan
Kurang Mendukung	Kurang Intensif	3,042	0,083	Cukup
	Intensif	4,000	0,080	Kuat
Mendukung	Kurang Intensif	3,000	0,102	Cukup
	Intensif	4,037	0,076	Kuat
	Sangat Intensif	4,667	0,064	Sangat Kuat
Sangat Mendukung	Sangat Intensif	5,000	0,080	Sangat Kuat

Berdasarkan tabel 12 terbukti bahwa meskipun dukungan lingkungan dan intensitas pendidikan kewirausahaan sama-sama memberikan dampak bagi tumbuhnya orientasi kewirausahaan, namun intensitas pendidikan memberikan dampak yang lebih kuat bila dibandingkan dengan dukungan lingkungan yang dipersepsikan responden. Hal ini juga mengindikasikan variabel intensitas pendidikan kewirausahaan jauh lebih berdampak pada tumbuhnya orientasi kewirausahaan bila dibandingkan dengan variabel dukungan lingkungan.

Sebagaimana terlihat pada tabel 12, meskipun dukungan lingkungan dipersepsikan “kurang mendukung” tetapi bila responden menerima pendidikan kewirausahaan yang dipersepsikan “intensif”, maka hal itu masih mampu menumbuhkan orientasi kewirausahaan yang baik. Sebaliknya, meskipun dukungan lingkungan dipersepsikan “mendukung” tetapi bila responden merasa “kurang intensif” dalam menerima pendidikan kewirausahaan; maka hal itu ternyata kurang mampu menumbuhkan orientasi kewirausahaan. Yang ideal adalah bila lingkungan dipersepsikan “sangat mendukung” dan menerima pendidikan kewirausahaan “sangat intensif” maka orientasi kewirausahaan responden akan berada pada level maksimal.

Kajian ini juga mengungkapkan ternyata responden berjenis kelamin wanita memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan responden pria. Hal ini berlaku di empat kota yang dijadikan lokasi kajian. Responden dalam kajian ini memang lebih banyak diisi responden pria (62,6%) dibandingkan dengan responden

wanita (37,4%). Meskipun demikian, fakta ini seperti hendak menyatakan bahwa saat ini potensi kaum wanita Indonesia dalam kegiatan dunia usaha bisa disejajarkan dengan kaum pria. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam kajian terdahulu, sebagaimana dilakukan oleh Brush (1992) menyatakan bahwa responden wanita kurang mendapatkan kesempatan untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan usahanya. Faktor inilah yang menyebabkan kaum wanita di berbagai Negara menjadi kurang mampu mengembangkan spirit kewirausahaannya (Aderemi, *et.al*, 2009). Hal yang sama disampaikan oleh Scheiner, *et.al* (2008) dengan mengutip kajian dari *Global Entrepreneurship Monitor* (2004, 2005) menyatakan bahwa meskipun komposisi kaum wanita di Jerman mencapai 50%, tetapi hanya 29% dari mereka yang tergerak untuk berwirausaha. Meskipun demikian, dalam 20 tahun terakhir, peran responden wanita di negara-negara maju, seperti USA dan Kanada menunjukkan adanya peningkatan.

Terbukanya akses informasi diduga menjadi pendorong kian terbukanya kesempatan bagi kaum wanita Indonesia untuk berwirausaha. Hal ini kemudian berdampak pada tumbuhnya orientasi berwirausaha dari kaum wanita. Dalam konteks sosial dan budaya, selama ini kedudukan kaum wanita Indonesia selalu di bawah bayang-bayang kaum pria. Namun kajian ini berhasil mengungkapkan bahwa dalam era keterbukaan seperti saat ini orientasi kewirausahaan kaum wanita ternyata tidak kalah dibandingkan dengan kaum pria. Informasi ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah agar kaum wanita diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan gerakan pengembangan kewirausahaan.

Kajian ini juga mengungkapkan bahwa semakin tinggi pendidikan para responden berdampak pada semakin kuatnya orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan responden yang berpendidikan dasar dengan yang berpendidikan menengah tidak berbeda signifikan. Perbedaan orientasi kewirausahaan secara signifikan ada pada para responden berpendidikan dasar dengan responden berpendidikan tinggi, serta pada responden berpendidikan menengah dengan responden berpendidikan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan formal, terutama pendidikan tinggi (PT); masih merupakan variabel penting yang akan menentukan orientasi kewirausahaan. Dengan kata lain, untuk memperkuat orientasi kewirausahaan di masyarakat dapat

dilakukan dengan semakin memperluas akses kepada mereka untuk bisa menempuh pendidikan sampai pada level PT. Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Miettinen (2008) dan Gibb (2002) yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi (universitas dan politeknik) berperan penting untuk mengembangkan spirit kewirausahaan.

Kebijakan pemerintah yang dipersepsikan responden tidak berdampak signifikan pada tumbuhnya orientasi kewirausahaan. Meskipun demikian, kajian ini berhasil mengungkapkan adanya perbedaan pengaruh derajat dukungan kebijakan negara yang dipersepsikan responden dengan orientasi kewirausahaannya. Semakin kuat dukungan kebijakan negara terhadap kegiatan usaha berdampak pada kian kuatnya orientasi kewirausahaan. Hal ini berarti upaya untuk memperkuat gerakan kewirausahaan di masyarakat dapat dilakukan pemerintah dengan jalan menciptakan iklim usaha yang kompetitif.

Pemerintah harus berusaha keras agar birokrasi pemerintahan di Indonesia mampu menghadirkan kegiatan layanan yang efektif, efisien, mudah, dan murah. Peringkat kualitas tata penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang hingga masih rendah harus segera diperbaiki. Temuan kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Kreft dan Sobel (2005), Sebora dan Li (2006), dan Goel (2007). Berbagai kajian terdahulu tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan negara yang dipersepsikan mendukung kegiatan usaha berdampak pada tumbuhnya spirit kewirausahaan dari para warganya.

Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat terhadap kegiatan usaha memberikan dampak yang meyakinkan pada tumbuhnya orientasi kewirausahaan dari para responden. Demikian halnya, derajat dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat terhadap kegiatan usaha juga memberikan dampak yang berbeda pada derajat orientasi kewirausahaan dari para responden. Semakin tinggi dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat terhadap kegiatan usaha berdampak pada semakin kuatnya orientasi kewirausahaan.

Hasil kajian ini mengisyaratkan pentingnya peran lingkungan dalam membentuk orientasi kewirausahaan. Lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan tempat sosialisasi nilai-nilai, sikap, kebiasaan dalam berperilaku yang pertama dan utama. Melalui proses sosialisasi yang berlangsung secara alami dan terus menerus, aktivitas usaha yang dijalankan oleh keluarga dan masyarakat akan diadopsi oleh generasi

berikutnya sebagai sebuah pilihan karier yang dianggap paling baik. Pengalaman keberhasilan dan kegagalan anggota keluarga dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha akan mewarnai pilihan karier dari generasi berikutnya. Hasil kajian ini memperkuat kajian-kajian terdahulu yang menjelaskan peran penting lingkungan keluarga dan masyarakat dalam membentuk perilaku wirausaha (Goel,*et.al*, 2007; Ajzen,1991; Krueger,1993; Matthews dan Moser,1995; Xavier,*et.al*,2010; Davidson,1995; Jackson dan Rodkey,1994).

Pendidikan kewirausahaan memiliki pengaruh paling kuat bagi tumbuhnya orientasi kewirausahaan. Intensitas para responden dalam pendidikan kewirausahaan berpengaruh pada derajat orientasi kewirausahaan mereka. Kajian ini mengungkapkan tiga derajat intensitas para responden dalam pendidikan kewirausahaan, yaitu: (a) kurang intensif, (b) intensif, dan (c) sangat intensif. Derajat intensitas mengikuti pendidikan kewirausahaan ini berhubungan sangat linear dengan derajat orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan responden yang memperoleh pendidikan kewirausahaan kurang intensif berada dalam kategori “cenderung berorientasi”. Responden yang memperoleh pendidikan kewirausahaan intensif berada dalam kategori “berorientasi”. Sedangkan responden yang memperoleh pendidikan kewirausahaan sangat intensif berada dalam kategori “sangat berorientasi”.

Hubungan yang sangat paralel antara intensitas pendidikan kewirausahaan yang dipersepsikan para responden dengan orientasi kewirausahaan mereka mengindikasikan peran yang sangat kuat dari pendidikan kewirausahaan bagi terbentuknya orientasi kewirausahaan. Kajian ini membuktikan bahwa upaya penguatan budaya kewirausahaan di masyarakat harus dilakukan melalui kegiatan pendidikan kewirausahaan. Di dalam pendidikan formal, Pendidikan kewirausahaan harus diikuti oleh semua warga belajar; apa pun level pendidikan dan latar belakang keilmuan mereka. Pendidikan kewirausahaan seharusnya bukan hanya “milik” mereka yang belajar ilmu ekonomi, tetapi ia juga menjadi “milik” mereka yang mempelajari ilmu-ilmu lain.

Kajian ini mengungkapkan fakta lain yang menarik untuk dicermati. Dilihat dari latar belakang pendidikan formal yang pernah ditempuh responden. Responden berlatar belakang pendidikan dasar dan menengah memiliki orientasi kewirausahaan yang tidak berbeda. Perbedaan orientasi kewirausahaan yang lebih baik baru muncul pada

mereka yang berpendidikan tinggi. Di sisi lain, intensitas keterlibatan responden dalam mengikuti pendidikan kewirausahaan berdampak sangat signifikan pada derajat orientasi kewirausahaan. Sebagaimana diungkapkan di atas, pendidikan kewirausahaan bahkan bisa dikatakan memiliki hubungan yang sangat linear dengan orientasi kewirausahaan. Hal ini seolah-olah hendak menjelaskan adanya fakta (meskipun tetap harus dikaji lebih dalam kajian berikutnya) bahwa pada level pendidikan dasar dan pendidikan menengah para siswa diduga kuat sama-sama belum mendapatkan sentuhan pendidikan kewirausahaan yang memadai. Pendidikan kewirausahaan baru didapatkan setelah mereka menempuh pendidikan tinggi.

Muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia memang belum memberikan ruang yang cukup untuk pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan diberikan agak intensif pada sekolah menengah kejuruan. Pembelajaran pendidikan kewirausahaan pun lebih banyak diberikan dalam format teoretik melalui ceramah dan miskin kegiatan praktik, sehingga kurang melibatkan siswa untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan wirausaha. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan dasar dan menengah kurang mampu membangkitkan orientasi kewirausahaan para lulusannya.

Meskipun kajian ini membuktikan bahwa latar belakang pendidikan tinggi berdampak signifikan terhadap tumbuhnya orientasi kewirausahaan, namun para responden justru mendapatkan pendidikan kewirausahaan secara intensif dari lingkungan keluarganya. Sebagaimana diungkapkan oleh responden, intensitas pendidikan kewirausahaan paling tinggi didapatkan para responden dari dalam lingkungan keluarga, berikutnya dari mengamati kegiatan usaha di masyarakat, baru kemudian dari pendidikan formal.

Hasil kajian ini memperkuat kajian terdahulu yang membuktikan bahwa untuk memperkuat budaya kewirausahaan, maka pendidikan kewirausahaan harus dilaksanakan secara intensif, tidak hanya dalam bentuk pembelajaran teoretik melalui kegiatan ceramah, tetapi harus melibatkan warga belajar secara aktif untuk terjun dalam kegiatan usaha. Di lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan kewirausahaan diharapkan dapat menjadi sarana warga belajar untuk “menjual” ide-ide dan temuan kajian kepada dunia industri dan masyarakat pada umumnya (Izedonmi dan Okafor, 2010; Gibb, 2002; Shane, 2004; Miettinen, 2008; dan Murugesan, 2010). Oleh karena itu, pendidikan

kewirausahaan diterapkan pada pendidikan tinggi di negara-negara maju (sebagaimana diteliti oleh para peneliti terdahulu) benar-benar dirancang untuk menumbuhkan budaya kewirausahaan. Sedangkan dalam kajian ini, pendidikan kewirausahaan lebih intensif terjadi di lingkungan keluarga.

Akhirnya, kajian ini mengungkapkan bahwa dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, intensitas keterlibatan dalam pendidikan kewirausahaan baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat serta dukungan pemerintah secara bersama-sama mampu memberikan kontribusi bagi terbentuknya orientasi kewirausahaan sebesar 84,6%. Kontribusi terbesar ada pada intensitas pendidikan kewirausahaan dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Artinya, kajian ini membuktikan bahwa upaya untuk memperkuat budaya kewirausahaan dengan pendidikan kewirausahaan tidak cukup melalui pendidikan formal saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendidikan di dalam keluarga dan di masyarakat. Pendidikan kewirausahaan perlu dilaksanakan sejak di pendidikan dasar dan menengah, karena hasil kajian ini telah mengungkapkan bahwa orientasi kewirausahaan mereka yang berpendidikan dasar dan berpendidikan menengah dalam kategori sama: "cenderung berorientasi"; berbeda signifikan dengan mereka yang berpendidikan tinggi: "cenderung sangat berorientasi". Hal ini menunjukkan pendidikan kewirausahaan belum dilaksanakan dengan intensif pada pendidikan dasar dan menengah.

Hasil kajian juga mengungkapkan pendidikan dasar dan pendidikan menengah terbukti belum mampu memberikan kontribusi yang kuat bagi terbentuknya orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan cenderung menguat pada mereka yang mengenyam pendidikan tinggi. Pendidikan kewirausahaan dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat adalah dua variabel utama yang berdampak sangat signifikan bagi terbentuknya orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan akan tumbuh dengan kuat melalui pendidikan kewirausahaan di dalam keluarga dan di masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, harus diakui bahwa program pengembangan kewirausahaan belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kurikulum pada berbagai jenjang pendidikan. Kewirausahaan belum menjadi mata kuliah wajib pada berbagai program studi. Mata kuliah kewirausahaan bahkan cenderung dikelompokkan sebagai mata kuliah yang hanya wajib ditempuh oleh

mereka yang mempelajari ilmu ekonomi dengan kegiatan perkuliahan yang didominasi oleh kegiatan ceramah. Pada beberapa program studi, kewirausahaan hanya disediakan sebagai mata kuliah pilihan. Padahal melalui mata kuliah kewirausahaan inilah mahasiswa akan lebih bisa dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Baru akhir-akhir ini, beberapa mahasiswa fakultas teknik pada beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia mulai diajarkan teknopreneurship. Melalui mata kuliah teknopreneurship, mahasiswa diajarkan untuk bisa “menjual” ilmu teknik yang telah dikuasainya. Apa pun bidang ilmu yang dipelajari dan dikuasai oleh siswa/mahasiswa, hal itu menjadi kurang bermakna apabila tidak bisa “dijual”. Dalam konteks inilah mestinya kewirausahaan harus diajarkan, dipahami, dan dipraktikkan oleh semua siswa/mahasiswa; apa pun latar belakang bidang ilmu yang dipelajarinya.

Meskipun tidak berdampak signifikan, derajat kualitas kebijakan pemerintah yang dipersepsikan responden memberikan pengaruh berbeda pada tumbuhnya orientasi kewirausahaan. Semakin berkualitas kebijakan pemerintah dipersepsikan oleh responden di empat kota, semakin kuat pula orientasi kewirausahaan mereka.

Berdasarkan hasil kajian maka perlu ada penguatan orientasi kewirausahaan kepada semua warga negara, baik kepada kaum pria dan wanita. Pendidikan kewirausahaan perlu diberikan pada pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan kewirausahaan perlu diberikan kepada semua siswa/mahasiswa, apa pun latar belakang keilmuan yang dipelajari oleh siswa/mahasiswa. Pendidikan kewirausahaan terbukti mampu menumbuhkan orientasi kewirausahaan yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat program pendidikan kewirausahaan melalui kegiatan pendidikan masyarakat. Pendidikan kewirausahaan harus dijadikan gerakan nasional dan disebarluaskan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga bisa melalui pendidikan non formal dan informal.

Penguatan Daya Saing Bangsa

A. Optimalisasi Pemanfaatan IT

Dalam era sekarang, yang ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, maka kesiapan suatu bangsa dalam menghadapi era persaingan sangat dipengaruhi oleh familiaritas dan kemampuan penduduk dalam mengoptimalkan pemanfaatan perangkat teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri, dalam era sekarang dan masa depan; teknologi informasi memegang peran penting untuk semua aktivitas kehidupan, meningkatkan kemampuan membangun jejaring, dan memperkuat kegiatan bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan terciptanya efisiensi ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Dalam era persaingan, negara yang mampu menciptakan efisiensi ekonomi dan meningkatkan produktivitas berpeluang untuk memenangkan persaingan.

Data pada tabel 1 menggambarkan kemampuan penduduk Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperkuat jejaring kegiatan usaha bisnis.

Tabel 1: Indeks Kemampuan Membangun Jejaring

Peringkat 2013 (dari 144 Negara)	Negara	Koefisien Indeks	Peringkat 2012 (dari 142 Negara)
2	Singapura	5.98	3
30	Malaysia	4.82	29
57	Brunei	4.11	54
74	Thailand	3.87	77
76	Indonesia	3.84	80
84	Vietnam	3.74	83
86	Filipina	3.73	86

Sumber: The Global Information Technology Report, 2013; WEF 2013

Berkembangnya teknologi informasi membuat berbagai aktivitas di berbagai belahan dunia menjadi saling terkoneksi. Dalam kaitan ini kemampuan negara dalam membangun jejaring akan mencerminkan kesiapannya dalam menghadapi persaingan di tingkat global. Tabel 10 menggambarkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi persaingan, dilihat dari sisi kemampuan membangun jejaring. Secara *head to head* dengan sesama negara anggota ASEAN, Indonesia pada posisi relatif setara dengan Thailand, unggul di atas Vietnam dan Filipina; tetapi berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Brunei Darusalam. Meskipun demikian, Indonesia berpotensi untuk memperbaiki posisi karena dari sisi pemanfaatan IT Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Vietnam, Filipina, dan Thailand. Tabel 2 menjelaskan peringkat pemanfaatan IT dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN.

Tabel 2: Indeks Pemanfaatan IT Beberapa Negara ASEAN

Rank	Negara	Skor	Individual Usage		Business Usage		Government Usage	
			Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor
3	Singapura	5.86	11	6.13	14	5.18	1	6.29
29	Malaysia	4.83	46	4.44	26	4.49	7	5.57
41	Brunei	4.21	49	4.32	59	3.56	33	4.75

70	Indonesia	3.58	92	2.74	40	3.81	58	4.20
73	Vietnam	3.52	78	3.08	88	3.30	62	4.16
76	Filipina	3.46	95	2.69	47	3.65	67	4.04
83	Thailand	3.39	88	2.84	63	3.50	86	3.84

Sumber: The Global Information Technology Report,2013; WEF 2013

Peringkat Pemanfaatan IT untuk mendukung kegiatan bisnis di Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Singapura dan Malaysia. Dilihat dari posisi peringkat, pemanfaatan perangkat IT oleh lembaga bisnis di Singapura dan Malaysia jauh lebih intensif dibandingkan dengan Indonesia. Dilihat dari skor indeks, bisa dikatakan intensitas pemanfaatan IT di Singapura dan Malaysia dua kali lipat dibandingkan dengan Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga pemerintahan, dimana Indonesia menduduki posisi keempat di bawah Singapura, Malaysia, dan Brunei. Sedangkan pemanfaatan IT oleh individu di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Thailand. Pemanfaatan IT oleh individu di Indonesia hanya unggul dibandingkan dengan Filipina. Oleh karena itu, keberadaan IT yang diakui telah membuat kehidupan di era global semakin terkoneksi ternyata belum mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang optimal bagi Indonesia. Tabel 3 berikut ini menggambarkan kenyataan tersebut.

Tabel 3: Pemanfaatan IT dan Dampaknya Terhadap Dimensi Sosial Ekonomi

Rank	Negara	Skor	Dampak Ekonomi		Dampak Sosial	
			Rank	Skor	Rank	Skor
1	Singapura	6.13	2	5.98	1	6.28
27	Malaysia	4.52	29	4.02	25	5.02
39	Brunei	4.07	48	3.43	35	4.71
68	Filipina	3.50	56	3.37	76	3.62
75	Vietnam	3.39	89	2.97	64	3.81
86	Indonesia	3.30	101	2.85	72	3.74
88	Thailand	3.28	108	2.77	72	3.74

Sumber: The Global Information Technology Report,2013; WEF 2013

Secara keseluruhan intensitas pemanfaatan IT di Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Brunei; serta di atas Vietnam, Filipina, dan Thailand. Pemanfaatan IT baik oleh individu, lembaga bisnis, dan lembaga pemerintahan belum memberikan dampak sosial ekonomi yang optimal. Dampak pemanfaatan IT terhadap aktivitas ekonomi masih menempatkan Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam. Sedangkan dampak pemanfaatan IT bagi terbangunnya kehidupan sosial masih menempatkan Indonesia sejajar dengan Thailand, dan berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Vietnam.

Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan IT di Indonesia belum mampu dimanfaatkan optimal untuk kegiatan yang lebih produktif. Sebagian besar generasi muda Indonesia menggunakan perangkat IT untuk kegiatan yang paling dasar, misalnya sekedar untuk sarana komunikasi dan untuk tujuan *having fun* dan simbol *lifestyle*; serta belum mampu menggunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih kompleks dan produktif. Hingga saat ini intensitas pemanfaatan IT untuk menunjang kegiatan produktif dari para individu belum terlihat secara masif. Demikian halnya pada lembaga-lembaga pemerintahan, kehadiran IT belum sepenuhnya membuat layanan publik dengan mudah dapat diakses. Kehadiran IT terbukti belum memberikan dampak pada terciptanya kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha bisnis di Indonesia.

B. Pemanfaatan IT dan Kesiapan Menghadapi Persaingan

Dengan kehidupan dunia yang semakin terkoneksi berkat keberadaan perangkat IT, maka negara-negara yang mampu mengakses penguasaan IT berpotensi cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar sehingga lebih mampu memenangkan persaingan dan menangkap peluang bisnis. Tabel 4 menjelaskan bagaimana kehadiran IT mempengaruhi kesiapan masing-masing negara untuk menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang usaha.

Kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan IT guna mendukung kemampuan memperebutkan peluang pasar jelas terlihat berada di bawah Singapura, relatif setara dengan Malaysia dan Thailand; dan relatif unggul dibandingkan dengan Vietnam. Indonesia harus membangun sarana infrastruktur di bidang IT dan mendorong masyarakat untuk menggunakan perangkat IT di berbagai bidang kehidupan agar lebih mampu bersaing di tingkat global.

Tabel 4: Peringkat Kesiapan Menghadapi Perubahan dan Memanfaatkan Peluang

Indikator	Negara				
	Indonesia	Singapura	Malaysia	Thailand	Vietnam
Indikator Kemampuan Industri	38	1	23	16	77
Kapabilitas Usaha Bisnis	27	1	13	12	70
Kapabilitas Pemerintah	50	1	33	23	79
Pasar Tenaga Kerja	47	1	3	17	14
Diversifikasi Ekonomi	20	3	35	1	67
Inovasi, R&D	28	2	16	38	89
Lingkungan Bisnis	49	1	16	24	82
Pasar Keuangan	31	1	32	14	80
Infrastruktur Perekonomian	44	1	12	20	70
Sektor Informal	5	-	29	13	61
Keterbukaan Ekonomi dan Perdagangan	41	1	3	8	9
Kapabilitas penduduk dan masyarakat sipil	40	5	27	30	64
Nilai Tambah Sektor Pertanian (% GDP)	15	0	12	12	22

Nilai Ekspor Barang dan Jasa (% GDP)	26	207	92	77	87
Nilai Investasi Asing (\$ juta)	19,241	55,923	12,001	7,780	7,430
Nilai Tambah Kegiatan Industri %GDP)	47	27	40	41	41
Nilai Tambah Sektor Jasa (%GDP)	38	73	48	46	37

Sumber: 2013 Change Readiness Index, dalam <http://www.kpmg.com/global>

C. Menakar Daya Saing Bangsa di Kawasan ASEAN

Daya saing masing-masing negara ASEAN dalam menghadapi forum AEC juga tidak dapat dipisahkan dengan berbagai indikator tata penyelenggaraan negara. Semakin efektif tata penyelenggaraan negara akan berdampak positif pada efektivitas kehidupan bernegara, termasuk dalam kegiatan bisnis; sehingga akan berdampak positif pula pada daya saing perekonomian suatu bangsa. Tabel 5 menggambarkan kualitas tata penyelenggaraan negara ASEAN menurut data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (2013).

**Tabel 5: Kualitas Tata Penyelenggaraan Negara Anggota ASEAN
(Dalam Angka Koefisien Antara 0,00 – 1,00)**

Indikator	Negara				
	Indonesia	Singapura	Malaysia	Thailand	Vietnam
Kualitas Regulasi	0,52	0,77	0,69	0,51	0,46
Penegakan Hukum	0,48	0,88	0,72	0,48	0,51
Kontrol Korupsi	0,36	0,92	0,64	0,39	0,36

Stabilitas Politik	0,59	0,71	0,84	0,57	0,68
Efektivitas Pemerintahan	0,49	0,89	0,73	0,49	0,39
Akuntabilitas Publik	0,52	0,76	0,65	0,48	0,43

Sumber: Worldwide Governance Indicators, www.data.bankdunia.org

Di negara ASEAN, kualitas tata penyelenggaraan negara Indonesia selevel dengan Thailand dan Vietnam, tetapi tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia merupakan dua negara di ASEAN yang dinilai telah mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara, dan hal ini tentu akan mempengaruhi efektivitas kegiatan bisnis, kualitas perekonomian negara, daya saing bangsa, serta meningkatkan kemampuan bersaing dalam forum AEC. Khusus untuk Singapura, tingginya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara telah mendorong negara tersebut untuk mengembangkan inovasi baru. Hal ini sejalan dengan rilis data yang dikeluarkan oleh WEF (2013) yang menempatkan Singapura sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang perekonomiannya digerakkan oleh mesin inovasi. Sedangkan Malaysia yang memiliki level efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara di bawah Singapura juga mampu mengantarkan negara tersebut untuk memasuki masa transisi menuju pada perekonomian yang digerakkan oleh kekuatan inovasi. Dari indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel 12, secara *head to head* Indonesia akan mendapatkan pesaing yang sepadan dengan Thailand dan Vietnam. Dengan sisa waktu menuju pemberlakuan AEC yang tinggal 2 tahun, mulai sekarang Indonesia harus berjuang keras untuk melakukan pembenahan di berbagai bidang agar mampu menghadapi Singapura dan Malaysia.

Tata penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien juga berdampak pada kemampuan negara dalam membangun sarana infrastruktur dan berperan besar untuk menciptakan kemudahan dalam berbisnis. Di lingkup ASEAN, kualitas sarana infrastruktur tertinggi ada di Singapura disusul Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Kualitas infrastruktur Indonesia bersama dengan Vietnam dan Filipina memiliki angka koefisien kurang dari 4. Sedangkan koefisien Thailand mendekati

5, Malaysia menuju angka 6; sedangkan Singapura sudah lebih dari 6 (koefisien tertinggi 7). Sedangkan untuk sarana infrastruktur dasar, Indonesia justru berada posisi terendah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina (Seneviratne dan Sun, 2013).

Tata penyelenggaraan negara yang baik juga terlihat dari kualitas regulasi yang dikeluarkan masing-masing negara ASEAN. Kualitas regulasi dan sarana infrastruktur berpengaruh besar pada kemudahan berbisnis. Sampai dengan tahun 2010, kualitas regulasi di Indonesia hanya unggul atas Vietnam, tetapi berada di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Hal ini kemudian berdampak pada indeks kemudahan berbisnis, yang untuk tahun yang sama menempatkan Indonesia di bawah Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Untuk urusan kemudahan berbisnis, Indonesia hanya unggul atas Filipina (Seneviratne dan Sun, 2013).

Laporan Global Competitiveness Report 2013 menampilkan 5 faktor utama yang membuat kegiatan bisnis di Indonesia menjadi tidak mudah. Kelima faktor tersebut memberikan sumbangan lebih dari 50% kesulitan berbisnis. Sumbangan kelima faktor dalam kegiatan bisnis di Indonesia adalah meliputi: korupsi (19,3%), inefisiensi birokrasi pemerintahan (15%), Infrastruktur yang kurang memadai (9,1%), akses keuangan (6,9%), dan peraturan perburuan yang tidak kondusif (6,3%) (WEF, 2013). Para pengusaha yang akan memulai bisnis harus menyelesaikan 9 prosedur (peringkat 104) selama 47 hari (peringkat 128). Sampai dengan tahun 2013 perekonomian Indonesia berada pada kategori digerakkan oleh efisiensi ekonomi (*grade 2*).

Di tengah berbagai masalah yang menghambat kemudahan dalam berbisnis, Indonesia masih beruntung karena memiliki keunggulan di sektor ukuran pasar (*market size*) yang sangat besar (peringkat 15), kondisi makro ekonomi relatif stabil (peringkat 26), dan faktor inovasi (peringkat 33) yang tetap menjadi daya tarik bagi berkembangnya kegiatan usaha. Kedua hal ini memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing Indonesia, dari peringkat 50 (dari 144 negara) pada tahun 2012 menjadi peringkat 38 (dari 148 negara) pada tahun 2013. Indonesia patut bersyukur karena dalam satu dasawarsa terakhir terus konsisten menciptakan pertumbuhan ekonomi positif, di saat berbagai negara di dunia mengalami resesi ekonomi. Hal ini berdampak pada membesarnya GDP dan meningkatkan rerata pendapatan per kapita. Indikator inilah yang menyebabkan Indonesia mampu menciptakan ukuran pasar yang sangat besar dan berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas

ekonomi. Dua variabel utama inilah yang membuat lanskap perekonomian Indonesia menjadi tampak berkilau.

Di kawasan ASEAN, pada tahun 2013 Indonesia mampu mendapatkan kenaikan peringkat daya saing yang signifikan, dan hal ini tentu menjadi modal berharga untuk persaingan di tingkat global yang semakin ketat. Di ASEAN, negara yang memiliki daya saing dari tertinggi menuju yang rendah berturut-turut adalah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Di kawasan ASEAN, daya saing Singapura masuk dalam kategori *outlier*, sehingga secara *head to head* tidak bisa dijadikan perbandingan dengan negara ASEAN lainnya. Untuk urusan daya saing, Singapura adalah *leader* di kawasan ASEAN. Meskipun memiliki daya saing yang bagus, Brunei tidak dimasukkan dalam analisis, karena ukuran pasar dan volume ekonominya yang terbatas. Di tingkat ASEAN, selama dua tahun berturut-turut (2012-2013) Brunei merupakan satu-satunya negara yang dianggap investor global paling tidak menarik untuk kegiatan investasi (2011-12 & 2013 ASEAN-BAC Survey On ASEAN Competitiveness).

Dalam bab ini akan dianalisis kekuatan daya saing Indonesia dikomparasikan dengan daya saing Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Pilihan negara ini didasarkan atas ukuran pasar dan potensi ekonomi masing-masing negara yang dinilai penulis layak untuk dikomparasikan. Semua data yang digunakan untuk kegiatan analisis diadopsi dari laporan WEF (2013).

Sebagai perbandingan pertama, Malaysia pada tahun 2013 memiliki daya saing pada peringkat 24 (dari 148 negara). Malaysia sampai dengan tahun 2013 dinilai telah mampu menciptakan efisiensi ekonomi, dan sedang berada pada masa transisi menuju pada perekonomian yang digerakkan oleh kekuatan inovasi (transisi dari *grade 2* ke *grade 3*). Bukti bahwa Malaysia telah mampu menciptakan efisiensi dapat dilihat dari kegiatan memulai usaha bisnis hanya 3 prosedur (peringkat 10) dengan jumlah hari yang diperlukan hanya 6 hari (peringkat 16). Berbagai pilar penentu daya saing Malaysia juga jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia (WEF, 2013). Keberhasilan Malaysia untuk melewati masa transisi menuju pada perekonomian yang digerakkan oleh inovasi akan memberikan kekuatan besar dalam menghadapi AEC. Secara *head to head* kualitas perekonomian Indonesia masih berada di bawah Malaysia. Artinya, dalam arena AEC Indonesia harus bersaing sangat keras dengan Malaysia untuk memperebutkan pasar.

Perbandingan kedua, Thailand pada tahun 2013 memiliki daya saing pada peringkat 37 (dari 148 negara). Peringkat daya saing Thailand berimbang dengan Indonesia yang berada pada peringkat 38. Namun Indonesia berhasil melakukan lompatan peringkat sampai 12 level dari peringkat 50 pada tahun 2012, sedangkan Thailand naik satu level dari peringkat 38 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan daya saing Indonesia menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan Thailand. Sebagaimana Indonesia, perekonomian Thailand juga berada dalam tahap efisiensi ekonomi (*grade 2*). Lima faktor menyumbang lebih dari 70% yang menjadi penyebab terhambatnya kegiatan bisnis. Kelima faktor tersebut meliputi: korupsi (20,2%), instabilitas pemerintahan (16,5%), kebijakan pemerintah yang tidak stabil (13,5%), inefisiensi birokrasi pemerintahan (13,4%), dan keterbatasan kemampuan berinovasi (7,5%). Thailand memiliki keunggulan dalam hal ukuran pasar (*market size*) pada peringkat 22, kondisi makro ekonomi pada peringkat 31, pasar keuangan peringkat 32, dan efisiensi pasar barang peringkat 34. Ada 4 prosedur (peringkat 20) yang harus dilalui untuk memulai kegiatan bisnis dengan waktu yang diperlukan sebanyak 29 hari (peringkat 106). Berdasarkan data-data tersebut, maka kemampuan perekonomian Indonesia dan Thailand relatif berimbang. Indonesia tentu memiliki keunggulan dalam hal ukuran pasar yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Thailand. Dapat dikatakan, Thailand memiliki level yang relatif sama dengan Indonesia untuk menghadapi AEC.

Perbandingan ketiga, Vietnam pada tahun 2013 memiliki daya saing pada peringkat 70 (dari 148 negara). Vietnam berhasil melakukan lompatan peringkat 5 level dari peringkat 75 pada tahun 2012. Perekonomian Vietnam masih sangat tergantung pada ketersediaan faktor produksi (*grade 1*). Hingga saat ini keunggulan Vietnam hanya pada ukuran pasar (*market size*) yang berada pada peringkat 36. Selebihnya Vietnam masih harus berjuang keras untuk meningkatkan daya saing. Lima faktor menyumbang lebih dari 70% yang menjadi penyebab terhambatnya kegiatan bisnis. Kelima faktor tersebut meliputi: akses keuangan (18,4%), kebijakan pemerintah tidak konsisten (11,4%), keterbatasan tenaga kerja terdidik (10%), inflasi (9,9%), dan keterbatasan sarana infrastruktur, regulasi perpajakan, dan korupsi (25,2%). Ada 10 prosedur (peringkat 116) yang harus dilalui untuk memulai kegiatan bisnis dengan waktu yang diperlukan sebanyak 34 hari (peringkat 114). Berbagai data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Vietnam

masih jauh dari efisien. Bila diukur pada saat ini, daya saing Vietnam dalam kancah AEC berada di bawah Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Dengan demikian secara *head to head* kualitas perekonomian Indonesia relatif lebih unggul dibandingkan dengan Vietnam.

Perbandingan keempat, Filipina pada tahun 2013 memiliki daya saing pada peringkat 59 (dari 148 negara). Bersama dengan Indonesia, Filipina berhasil melakukan lompatan peringkat daya saing, karena pada tahun 2012 masih berada pada peringkat 65 (dari 144 negara), dan tahun 2011 pada peringkat 75 (dari 142 negara). Sampai dengan tahun 2013, Filipina masih sedang berjuang untuk bertransisi dari perekonomian yang tergantung pada ketersediaan faktor produksi menuju pada efisiensi ekonomi (transisi dari *grade 1* ke *grade 2*). Ada lima faktor yang membuat kegiatan bisnis di Filipina menjadi tidak mudah. Kelima faktor tersebut bahkan menyumbang terjadinya kesulitan bisnis hingga lebih dari 70%. Kelima faktor tersebut meliputi: sarana infrastruktur belum memadai (21,1%), korupsi (17,8%), inefisiensi birokrasi (16,9%), regulasi perpajakan (8,6%), dan regulasi perburuan yang tidak kondusif (8,4%). Ada 16 prosedur (peringkat 145) yang harus dilalui untuk memulai kegiatan bisnis dengan waktu yang diperlukan sebanyak 36 hari (peringkat 118). Berbagai faktor inilah yang menyebabkan Filipina belum mampu mencapai efisiensi ekonomi. Problem di Filipina sebenarnya hampir sama dengan di Indonesia, namun Indonesia beruntung memiliki ukuran pasar yang sangat besar dan mampu menciptakan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil. Dengan demikian secara *head to head* kualitas perekonomian Indonesia relatif lebih unggul dibandingkan dengan Filipina.

Dengan menggunakan berbagai parameter yang dikeluarkan oleh WEF 2013, maka secara *head to head* daya saing Indonesia masih berada di bawah Singapura dan Malaysia, selevel dengan Thailand, dan berada di atas Filipina dan Vietnam. Dapat dikatakan, pesaing utama Indonesia pada AEC nanti adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Meskipun demikian, Vietnam dan Myanmar akan menjadi ancaman serius, karena akhir-akhir ini mulai mampu menarik minat para investor global untuk menanamkan kegiatan investasinya (2011-12 & 2013 ASEAN-BAC Survey On ASEAN Competitiveness).

Di mata investor global, perekonomian di negara-negara ASEAN memiliki daya tarik yang luar biasa untuk tujuan investasi. Data tahun 2011/2012 menunjukkan, dibandingkan dengan USA, China, India, dan

negara lainnya di dunia; 37,5% investor global memilih untuk menanamkan kegiatan investasinya di negara-negara ASEAN. Bila dibandingkan secara *head to head* dengan China, ASEAN tetap lebih dinilai menarik dari segi tempat pasar barang dan jasa, serta lokasi kegiatan bisnis. Sedangkan data tahun 2013/2014 menunjukkan sebanyak 57%. Dengan kata lain ada peningkatan daya tarik sebesar 52% antara tahun 2012-2013 (2011-12 & 2013 ASEAN-BAC Survey On ASEAN Competitiveness). Pertanyaannya, apakah Indonesia dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menarik para investor global menanamkan kegiatan investasi di dalam negeri.

Tabel 6 berikut ini menggambarkan bahwa daya tarik Indonesia dimata investor global berada di bawah Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Pada tahun 2012, daya tarik Indonesia sejajar dengan Thailand, dan berada di atas Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, dan Brunei. Sedangkan tahun 2013, daya tarik Indonesia berada di bawah Myanmar, Malaysia, Singapura; tetapi berada di atas Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, Filipina, dan Brunei.

**Tabel 6: Daya Tarik Negara ASEAN Di Mata Investor Global
(Dalam %)**

Negara	2011-2014	Peringkat	Negara	2013-2015	Peringkat
Singapura	7,9	1	Myanmar	12,4	1
Vietnam	7,9	2	Malaysia	11,4	2
Malaysia	7,3	3	Singapura	8,1	3
Thailand	3,8	4	Indonesia	6,8	4
Indonesia	3,8	5	Vietnam	6,2	5
Laos	2,2	6	Laos	3,9	6
Myanmar	1,9	7	Thailand	3,3	7
Kamboja	0,6	8	Kamboja	3,3	8
Filipina	0,6	9	Filipina	1,3	9
Brunei	0,3	10	Brunei	0,3	10
Total	37,5		Total	57	

Sumber: 2011-12 & 2013 ASEAN-BAC Survey On ASEAN Competitiveness

Malaysia dan Singapura adalah dua negara ASEAN yang konsisten mampu menarik para investor global. Negara ASEAN yang mengalami peningkatan daya tarik adalah Myanmar dan Indonesia. Negara ASEAN yang mengalami penurunan daya tarik adalah Vietnam dan Thailand. Meskipun demikian, pada tahun 2011 Vietnam juga secara fenomenal mampu mengungguli Malaysia dalam menarik investor global. Sedangkan negara ASEAN yang tetap dinilai kurang menarik oleh para investor adalah Laos, Kamboja, Filipina, dan Brunei. Selain Indonesia, Myanmar merupakan negara di ASEAN yang paling fenomenal dalam meningkatkan daya tarik bagi investor global. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya serius yang dilakukan oleh Myanmar untuk menghadapi persaingan.

Data-data terdahulu seolah-olah menunjukkan bahwa persaingan dalam masyarakat ASEAN cenderung hanya melibatkan Malaysia, Thailand, Indonesia, dengan Singapura sebagai *top leader*. Kini muncul negara Vietnam dan Myanmar yang mulai mampu mengusik keamanan Malaysia, Thailand, dan Indonesia dalam urusan membangun daya tarik kegiatan investasi. Dengan kata lain, dalam AEC selain harus bersaing keras dengan Singapura, Malaysia, Thailand; Indonesia akan mendapatkan tekanan yang kuat dari Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Bila menggunakan parameter tahun 2013, pada saat ini daya saing Indonesia berada di bawah Singapura dan Malaysia, sejajar dengan Thailand; tetapi berada pada peringkat di atas negara anggota ASEAN lainnya.

Sektor lain yang memiliki potensi besar untuk mengangkat perkembangan perekonomian negara adalah bidang jasa pariwisata. Perekonomian negara yang sudah modern dan mapan biasanya bertumpu pada bidang jasa, termasuk jasa pariwisata. Implementasi AEC akan semakin membuka ruang gerak para turis dari negara ASEAN. Bagaimanakah kesiapan Indonesia menjual sektor pariwisata dan prospeknya seiring dengan akan diterapkannya AEC? Tabel 7 memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Daya saing sektor pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya akan dianalisis dengan menggunakan data yang dikeluarkan oleh The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, WEF (2013).

Tabel 7: Daya Saing Sektor Pariwisata Negara ASEAN Tahun 2013 di Kawasan Asia Pasifik

Negara	Peringkat	Sub Indeks		
		Regulasi Kepariwisataan	Infrastruktur dan Lingkungan Bisnis Wisata	Faktor SDM, Budaya, dan Lingkungan Alam
Singapura	1 (10)	6	4	25
Malaysia	8 (34)	55	41	17
Thailand	9 (43)	76	44	23
Indonesia	12 (70)	95	84	31
Brunei	13 (72)	94	57	67
Vietnam	16 (80)	88	94	43
Filipina	17 (82)	70	89	64
Kamboja	20 (84)	105	112	78

Sumber: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, WEF 2013

Keterangan: Angka dalam kurung adalah peringkat dari 140 negara di dunia

Berikut ini adalah gambaran tentang kemampuan Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya untuk menjual sektor pariwisata sampai dengan tahun 2013. Data diambil dari *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, WEF 2013*. Peran industri pariwisata dalam membentuk GDP sebesar \$ 27,028 milyar, atau menyumbang 3,1% dari total GDP. Dalam 10 tahun ke depan sektor pariwisata diperkirakan akan tumbuh 6,9%. Tenaga kerja yang terserap dalam industri pariwisata mencapai 3,048 juta orang. Potensi ekonomi sektor pariwisata dalam membentuk GDP diperkirakan mencapai \$77,311 milyar, atau 8,9 dari total GDP; dengan potensi tenaga kerja yang bisa diserap mencapai 8,9 juta orang. Sampai dengan tahun 2011, turis mancanegara yang datang ke Indonesia sebanyak 7,649 juta orang; dan menyumbang devisa sebesar \$7,997 milyar.

Kelemahan Indonesia dalam pengembangan sektor kepariwisataan adalah pada pilar-pilar: keberlanjutan, kelestarian, dan perlindungan

lingkungan kepariwisataan (peringkat 125), infrastruktur kepariwisataan (peringkat 113), kesehatan lingkungan (peringkat 112), daya dukung masyarakat terhadap sektor kepariwisataan (peringkat 114), produk peraturan dan kebijakan di bidang kepariwisataan (peringkat 93), infrastruktur teknologi informasi (peringkat 87), keamanan dan keselamatan (peringkat 85), dan infrastruktur jalan raya (peringkat 87). Indonesia dinilai unggul dalam hal sumber daya alam, budaya, dukungan untuk memprioritaskan sektor wisata, dan daya saing biaya wisata yang terbilang murah.

Bagaimanakah posisi Indonesia di bidang kepariwisataan dibandingkan dengan sesama negara ASEAN? Berikut ini akan diuraikan posisi sektor kepariwisataan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Perbandingan pertama, industri pariwisata Singapura. Sektor industri pariwisata Singapura berperan membentuk GDP sebesar \$ 13,477 milyar, atau menyumbang 4,8% dari total GDP. Dalam 10 tahun ke depan sektor pariwisata diperkirakan akan tumbuh 4,1%. Tenaga kerja yang terserap dalam industri pariwisata mencapai 140 ribu orang. Potensi ekonomi sektor pariwisata dalam membentuk GDP diperkirakan mencapai \$28,748 milyar, atau 10,3% dari total GDP; dengan potensi tenaga kerja yang bisa diserap mencapai 281 ribu orang. Sampai dengan tahun 2011, turis mancanegara yang datang ke Indonesia sebanyak 10,4 juta orang; dan menyumbang devisa sebesar \$17,990 milyar.

Apa yang membuat Singapura, negara kota yang amat kecil; tetapi jumlah wisatawan yang datang mencapai 2 kali lipat jumlah penduduknya? Singapura memiliki peringkat yang tinggi untuk semua pilar pendukung kegiatan kepariwisataan, terutama dalam hal sarana infrastruktur kepariwisataan. Singapura hanya memiliki kelemahan dalam hal sumber daya alam (peringkat 92), budaya (peringkat 35), serta biaya wisata yang sangat mahal (peringkat 66). Di luar ketiga pilar tersebut, Singapura sangat siap untuk menyambut kedatangan para wisatawan.

Perbandingan kedua, industri pariwisata Malaysia. Sektor industri pariwisata Malaysia berperan membentuk GDP sebesar \$ 19,521 milyar, atau menyumbang 6,8% dari total GDP. Dalam 10 tahun ke depan sektor pariwisata diperkirakan akan tumbuh 4,3%. Tenaga kerja yang terserap dalam industri pariwisata mencapai 769 ribu orang. Potensi ekonomi sektor pariwisata dalam membentuk GDP diperkirakan

mencapai \$43,081 milyar, atau 15,1% dari total GDP; dengan potensi tenaga kerja yang bisa diserap mencapai 1,6 juta orang. Sampai dengan tahun 2011, turis mancanegara yang datang ke Indonesia sebanyak 24,7 juta orang; dan menyumbang devisa sebesar \$19,6 milyar.

Apa yang membuat Malaysia bisa didatangi wisatawan manca negara lebih dari 3 kali lipat jumlah wisatawan di Indonesia? Malaysia memiliki peringkat yang sangat tinggi untuk pilar kebijakan dan peraturan yang sangat mendukung industri kepariwisataan (peringkat 9), daya dukung bandara (peringkat 26), sumber daya alam (peringkat 18), budaya (peringkat 31), dukungan masyarakat terhadap industri kepariwisataan (peringkat 16), dukungan sumber daya manusia bidang kepariwisataan (peringkat 28), dan biaya wisata sangat murah (peringkat 5). Kelemahan Malaysia terletak pada kelestarian lingkungan (peringkat 61), keselamatan dan keamanan (peringkat 66), kesehatan lingkungan (peringkat 73), dan infrastruktur kepariwisataan (peringkat 73).

Perbandingan ketiga, industri pariwisata Thailand. Sektor industri pariwisata Thailand berperan membentuk GDP sebesar \$ 25,295 milyar, atau menyumbang 7% dari total GDP. Dalam 10 tahun ke depan sektor pariwisata diperkirakan akan tumbuh 6,3%. Tenaga kerja yang terserap dalam industri pariwisata mencapai 1,954 juta orang. Potensi ekonomi sektor pariwisata dalam membentuk GDP diperkirakan mencapai \$58,171 milyar, atau 16% dari total GDP; dengan potensi tenaga kerja yang bisa diserap mencapai 4,7 juta orang. Sampai dengan tahun 2011, turis mancanegara yang datang ke Indonesia sebanyak 19,230 juta orang; dan menyumbang devisa sebesar \$27,184 milyar.

Apa yang membuat Thailand bisa didatangi wisatawan manca negara lebih dari 2,5 kali lipat jumlah wisatawan di Indonesia? Thailand memiliki peringkat yang sangat tinggi untuk pilar dukungan masyarakat terhadap industri kepariwisataan (peringkat 18), transportasi udara (peringkat 21), sumber daya alam (peringkat 23), biaya wisata murah (peringkat 25), infrastruktur kepariwisataan (peringkat 31), dan prioritas pada pengembangan kepariwisataan (peringkat 33). Kelemahan Thailand terletak pada pilar kelestarian lingkungan (peringkat 99), infrastruktur teknologi informasi (peringkat 90), keamanan dan keselamatan (peringkat 87), kesehatan lingkungan (peringkat 84), kebijakan dan peraturan di bidang kepariwisataan (peringkat 77), dan sarana transportasi darat (peringkat 66).

Perbandingan keempat, industri pariwisata Vietnam. Sektor industri pariwisata Vietnam berperan membentuk GDP sebesar \$ 5,420 milyar, atau menyumbang 4,3% dari total GDP. Dalam 10 tahun ke depan sektor pariwisata diperkirakan akan tumbuh 6,1%. Tenaga kerja yang terserap dalam industri pariwisata mencapai 1,861 juta orang. Potensi ekonomi sektor pariwisata dalam membentuk GDP diperkirakan mencapai \$12,433 milyar, atau 9,9% dari total GDP; dengan potensi tenaga kerja yang bisa diserap mencapai 4,355 juta orang. Sampai dengan tahun 2011, turis mancanegara yang datang ke Indonesia sebanyak 6,014 juta orang; dan menyumbang devisa sebesar \$5,620 milyar.

Keunggulan Vietnam dalam industri pariwisata hanya terletak pada pilar biaya wisata murah (peringkat 18), pilar budaya (peringkat 28), dan sumber daya alam (peringkat 50). Pilar-pilar lainnya memiliki peringkat yang rendah, yang meliputi pilar dukungan masyarakat terhadap industri kepariwisataan (peringkat 108), transportasi udara (peringkat 79), infrastruktur kepariwisataan (peringkat 112), dan prioritas pada pengembangan kepariwisataan (peringkat 110), pilar kelestarian lingkungan (peringkat 128), infrastruktur teknologi informasi (peringkat 68), keamanan dan keselamatan (peringkat 58), kesehatan lingkungan (peringkat 81), kebijakan dan peraturan di bidang kepariwisataan (peringkat 60), dan sarana transportasi darat (peringkat 98).

Dengan memperhatikan kontribusi dan potensi sektor pariwisata dalam pembentukan GDP, maka terlihat Indonesia adalah negara yang belum memanfaatkan secara optimal industri pariwisata. Belum optimalnya kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan potensi pariwisata menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia belum dikembangkan dengan optimal. Hal inilah yang kemudian menyebabkan proporsi sektor pariwisata Indonesia dalam membentuk GDP juga berada posisi yang paling rendah dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Tabel 8 berikut memperlihatkan kecenderungan tersebut.

Tabel 8: Kontribusi dan Potensi Sektor Pariwisata dalam Membentuk GDP

Negara	Kontribusi terhadap GDP (\$ milyar)	Potensi Membentuk GDP (\$ milyar)	Pemanfaatan Potensi Pariwisata (%)	Prosentase terhadap GDP
Singapura	13,477	28,748	47	4,8
Malaysia	19,521	43,081	45	6,8
Thailand	25,295	58,171	43	7
Indonesia	27,280	77,300	35	3,1
Vietnam	5,420	12,433	44	4,3

Sumber: Data diolah penulis dari The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, WEF 2013

Kenyataan ini juga membuktikan bahwa efisiensi industri pariwisata di Indonesia berada pada posisi terendah, meskipun secara absolut memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan 4 negara ASEAN lainnya. Meskipun dari sisi peringkat lebih tinggi 3 level dibandingkan dengan Vietnam, namun industri pariwisata Vietnam sesungguhnya lebih efisien dibandingkan dengan Indonesia. Bisa dikatakan pasar pariwisata Indonesia dan Vietnam berada pada posisi yang setara. Pada saat AEC diberlakukan, diperkirakan Vietnam akan menjadi pesaing serius bagi Indonesia, selain Singapura, Malaysia, dan Thailand yang lebih dulu menggarap sektor pariwisata dengan intensif.

Untuk kegiatan kepariwisataan Indonesia beruntung memiliki Bali yang sudah terkenal sebagai tujuan wisata internasional. Bahkan pariwisata Indonesia cenderung diidentikkan dengan Bali. Padahal Indonesia sesungguhnya sangat kaya tempat wisata yang berpotensi untuk dijadikan tempat tujuan wisata. Keterbatasan sarana infrastruktur dan kemampuan menjual tempat wisata yang belum optimal yang membuat industri pariwisata Indonesia belum berkembang optimal.

Sebagai perbandingan sederhana, untuk wisata sejarah; baik sejarah kerajaan nusantara maupun sejarah kolonialisme; Indonesia nyaris kurang mampu mengemas dan menjual kepada wisatawan. Wisata sejarah kerajaan abad 10 di Indonesia seolah-olah hanya diwakili

oleh Borobudur dan Prambanan. Situs kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan yang melegenda itu nyaris tidak bisa kita jual, telah rusak oleh kegiatan ekonomi sesaat sebagai akibat dari kekurangpekaan kita dalam melihat potensi wisata yang ada. Generasi muda kita pun barangkali sudah mulai banyak yang melupakannya. Bandingkan dengan Malaysia yang mampu menjual reruntuhan bangunan bangsa Portugis di kota Melaca yang kini dilindungi oleh Unesco. Situs Sriwijaya dan Majapahit yang ratusan tahun lebih tua dibandingkan dengan Melaca nyaris kehilangan bekas. Padahal dari nilai kesejarahan, Melaca tentu tidak sebanding dengan situs Sriwijaya dan Majapahit. Baru pada awal tahun 2014 Presiden Indonesia menyempatkan diri untuk melihat jejak kerajaan Majapahit, dengan mewacanakan rekonstruksi kampung Majapahit.

Semua gambaran di atas memberikan peringatan kepada kita bahwa daya saing sektor kepariwisataan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Artinya, ketika pasar persaingan kepariwisataan di ASEAN nanti dibuka lebar-lebar, terpampang tantangan berat yang harus dihadapi Indonesia. Pada saat ini saja, keadaannya justru memperlihatkan banyak wisatawan Indonesia yang lebih bangga melancong ke Singapura, Malaysia, dan Thailand daripada mengunjungi tempat wisata di dalam negeri. Wisatawan Indonesia bangga mengenang penjajah Portugis dengan mengunjungi kota Melaca, Malaysia; tetapi justru tidak ingat bahwa di negerinya ribuan tahun yang lalu pernah ada 2 kerajaan besar yang dulu bahkan menguasai Asia Tenggara, dan kini bernama ASEAN.

Menggelembungnya jumlah kelas menengah di Indonesia pasti akan berdampak pada permintaan di sektor wisata. Besarnya jumlah wisatawan nusantara yang melancong ke negara tetangga membuktikan bahwa negara tetangga lebih mampu bersaing dibandingkan dengan Indonesia. Hal seperti ini yang selalu menjadi kekawatiran para pebisnis dalam negeri. Penduduk Indonesia memiliki daya beli yang meningkat pesat, tetapi justru pihak di luar Indonesia yang memenuhi kebutuhan mereka. Pasar Indonesia yang sangat besar akhirnya menjadi "pasar empuk" bagi pelaku usaha dari luar Indonesia. Semoga hal ini segera menggugah ikhtiar semua pihak di dalam negeri, termasuk pemerintah; untuk segera mengambil langkah riil dan taktis dalam menghadapi persaingan global. Tanpa ada ikhtiar riil, taktis, dan sungguh-sungguh; kita khawatir pasar Indonesia yang saat ini sudah

terasa “empuk”, akan lebih bisa dimanfaatkan pelaku usaha dari luar Indonesia. Berdasarkan sajian berbagai data tentang kinerja perekonomian Indonesia dan berbagai variabel yang mempengaruhi daya saing negara-negara di kawasan ASEAN, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hingga saat ini, Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki ukuran pasar paling besar di kawasan ASEAN. Dengan proporsi jumlah penduduk dan GDP mencapai 40% dari total penduduk dan GDP negara ASEAN, dan didukung dengan rerata pendapatan per kapita lebih dari \$3.500 (kelompok negara berpendapatan menengah), membuat Indonesia ibarat sebuah pasar yang berukuran jumbo. Pertumbuhan ekonomi positif selama beberapa tahun terakhir membuat Indonesia berpotensi menjadi pusat bisnis di kawasan ASEAN.
2. Meningkatnya rerata pendapatan per kapita penduduk Indonesia telah meningkatkan daya beli masyarakat. Konsumsi nasional meningkat sangat pesat, dan hal ini menjadi salah faktor yang menggerakkan perekonomian nasional. Peningkatan konsumsi nasional juga membuka peluang usaha yang sangat besar. Negara-negara ASEAN telah memanfaatkan peluang pasar ini yang ditandai dengan membanjiri produk-produk barang impor ke dalam pasar di Indonesia. Hal ini mengindikasikan ada persoalan daya saing yang dialami oleh pelaku usaha di dalam negeri. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk merupakan dua variabel yang harus bisa diwujudkan oleh para pelaku usaha di dalam negeri agar peluang usaha di dalam negeri yang sangat besar dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di Indonesia.
3. Peningkatan produktivitas dan kemampuan menciptakan produk berkualitas sangat berkaitan dengan kemampuan melakukan *research and development* (R&D). R&D merupakan pilar utama dari inovasi, dan kemampuan berionasi akan mempengaruhi terciptanya budaya wirausaha. Di kawasan ASEAN, budaya wirausaha Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini menjadi peringatan bagi Indonesia, sebab kalau budaya wirausaha tidak tumbuh dengan kuat dikawatirkan pasar ekonomi Indonesia yang sangat besar justru akan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dari luar Indonesia. Untuk menghadapi persaingan global, negara dengan budaya wirausaha yang kuat merupakan persyaratan utama harus bisa dipenuhi. Budaya

wirausaha yang kuat merupakan salah satu faktor utama pembentuk daya saing bangsa

4. Dalam era persaingan, setiap negara harus mampu memanfaatkan IT untuk membangun jejaring usaha dan meningkatkan produktivitas. Sarana IT membuat berbagai aktivitas bisnis akan dapat berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien. Dalam era persaingan global, keberadaan IT bukan sekedar untuk aksesori diri dengan tujuan *having fun*. Penguasaan IT yang optimal juga memungkinkan seseorang untuk menangkap peluang usaha. Indonesia harus mendorong para warganya untuk memanfaatkan IT untuk meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja; sehingga dapat tercipta daya saing.
5. Tata penyelenggaraan negara yang baik, yang meliputi kualitas regulasi, penegakan hukum, kontrol terhadap korupsi, stabilitas politik dan keamanan, efektivitas pemerintahan, dan akuntabilitas publik merupakan berbagai variabel yang ikut mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara dan daya saing bangsa. Berbagai variabel ini akan sangat mempengaruhi tata kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kemampuan untuk bersaing dalam era AEC nanti dapat dipotret dari daya saing Indonesia pada saat ini dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Daya saing Indonesia pada saat ini berada di bawah Singapura dan Malaysia, relatif setara dengan Thailand; dan relatif unggul dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa poin yang perlu diperhatikan agar Indonesia lebih mampu bersaing di tingkat global:

1. Para pelaku usaha di dalam negeri harus mampu memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan terciptanya peluang usaha dalam skala yang sangat besar. Untuk itu, para pelaku usaha di dalam negeri harus memahami berbagai hal yang mempengaruhi daya saing dalam menghadapi persaingan global, terutama berkaitan dengan produktivitas dan kemampuan meningkatkan kualitas produk.
2. Institusi pendidikan tinggi harus mengambil peran nyata untuk meningkatkan daya saing bangsa, ikut menumbuhkan budaya wirausaha bagi para mahasiswanya, dan meningkatkan kegiatan

penelitian dan pengembangan guna menciptakan inovasi guna ikut mendorong tumbuh suburnya budaya wirausaha.

3. Budaya wirausaha harus diperkuat dan dijadikan *lifestyle* baru dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat, terutama lembaga pendidikan tinggi harus memiliki program riil untuk memperkuat budaya wirausaha. Penguatan budaya wirausaha harus dilaksanakan secara masif, dan menjadi program nasional yang menyentuh sampai level pelosok desa; sebagaimana pemerintah melaksanakan program keluarga berencana pada masa lampau.
4. Pemerintah harus memiliki komitmen kuat untuk menciptakan tata penyelenggaraan negara yang baik melalui peningkatan kualitas regulasi, penegakan hukum, kontrol terhadap korupsi, stabilitas politik dan keamanan, efektivitas pemerintahan, dan akuntabilitas publik. Berbagai variabel ini harus hadir dalam kehidupan berbangsa apabila Indonesia berkeinginan untuk memenangkan persaingan dalam persaingan global.

- Bab 9 -

Let's Go to the Global Society

Kehidupan dunia saat ini diwarnai dengan adanya fenomena perubahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan dan kecakapan, serta berbagai produk berubah dengan sangat cepat. Lihatlah, betapa umur semua produk menjadi sangat singkat. Produk teknologi yang pada hari ini tampak keren, dalam waktu yang singkat bisa terlihat usang karena hadirnya varian produk sejenis dengan fitur yang lebih canggih dan menarik. Sebagaimana kita ketahui, berbagai produk teknologi tersebut ikut mempengaruhi tata cara kerja pada berbagai bidang. Oleh karena itu, ketika produk teknologi berubah dengan sangat cepat, maka tata cara kerja pun juga ikut berubah cepat.

Tema “perubahan” inilah yang akhir-akhir ini menarik minat para ahli di berbagai bidang untuk dijadikan bahan kajian. Masa lalu ditandai oleh peristiwa yang sudah terjadi, sehingga situasinya tidak dapat diubah; sedangkan masa depan adalah sebuah era yang pada saat ini belum bisa diketahui, dilihat, dan bahkan mungkin belum bisa diprediksi ketika perubahan bergerak sangat cepat dan liar.

Seandainya ada yang abadi di dunia ini, maka hampir bisa dipastikan ia adalah “perubahan” itu sendiri. Perubahan di dunia menjadi semakin dahsyat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang telah membuat relasi kehidupan di dunia ini menjadi kian cair (*fluid*); bahkan mungkin menjadi kian liar (*wild*). Sekarang ini sulit rasanya kita menemukan relasi antar manusia yang benar-benar *linear*. Coba perhatikan, ketika kita membutuhkan taksi; hal itu tidak mengharuskan kita keluar rumah menuju sebuah jalan atau pangkalan

taksi. Begitu juga ketika kita ingin makan siang dengan jenis makanan tertentu, kita tidak harus datang ke toko roti atau ke rumah makan. Kita tetap bisa tinggal di rumah atau kantor. Dengan mengutak-atik sebuah Android, kita bisa memesan taksi dan jenis makanan tertentu yang kita inginkan. Dan, dalam waktu yang tidak lama; pesanan kita akan sampai. Inilah salah satu tren kehidupan dalam abad 21. Apa yang harus disiapkan oleh generasi era sekarang untuk bisa eksis dalam abad 21? Uraian berikut ini semoga mampu memberikan perspektif agar Anda memiliki kesiapan dini untuk hidup dalam era yang terus berubah.

A. Refleksi Aktivitas Pendidikan dalam Era IT

Berkembangnya IT ikut mengubah wajah dan aktivitas pendidikan. Harus diakui aktivitas pendidikan formal selama ini meletakkan pendidik dan peserta didik dalam posisi yang tidak setara. Peserta didik sebagai *client*, sedangkan para pendidik dan institusi pendidikan sebagai *patron*. Pola transaksi antara institusi pendidikan dengan pengguna jasa layanan pendidikan sebagaimana layaknya pola transaksi antara produsen dan konsumen. Sebagai produsen, institusi pendidikan seolah-olah tampil sebagaimana layaknya pabrik yang menghasilkan produk. Produk inilah yang kemudian hendak dibeli oleh para peserta didik sebagai bekal untuk hidup di masyarakat di kemudian hari. Sebagai penyedia produk, institusi pendidikan seolah-olah merupakan pihak yang paling mengetahui tentang apa yang dibutuhkan para peserta didik. Oleh karena itu, institusi pendidikan kemudian tampil sebagaimana layaknya dewa, dan para peserta didik harus tunduk pada titah sang dewa.

Institusi pendidikan seolah-olah memiliki kekuasaan yang sangat luas untuk menentukan berbagai produk pendidikan, dan bahan apa saja (berkaitan dengan kurikulum) yang harus disediakan untuk menghasilkan produk tersebut. Sebagai *client*, para peserta didik sering kali tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan bahan alternatif yang bisa jadi dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Singkatnya, suka atau tidak suka; para peserta didik harus menerima dengan tanpa *reserve* terhadap apa saja yang ditentukan oleh institusi pendidikan.

Di berbagai sekolah bahkan sampai harus mengatur tentang hal-hal yang tidak selalu berkaitan langsung dengan tujuan pendidikan. Kurikulum dan berbagai mata pelajaran yang ada di dalamnya, cara

mengajar pendidik, susunan kelas dan tempat duduk, durasi waktu belajar dalam satu jam pelajaran, satu hari, satu semester, sampai pada hal yang sebenarnya remeh temeh (corak baju seragam, warna sepatu, warna kaos kaki, warna ikat pinggang, dan masih banyak lagi yang lainnya) harus diterima peserta didik dengan tanpa reserve. Setiap hari peserta didik dihadapkan pada situasi yang homogen dalam rangka menciptakan suasana tertib, karena institusi pendidikan yang baik adalah adalah institusi yang tertib dan teratur. Kelak, setelah peserta didik lulus dari institusi pendidikan dan hidup di masyarakat; ia baru mengetahui ternyata dunia yang dihidupinya tidak selalu tertib dan teratur. Ia akan hidup dalam dunia yang terus berubah.

Ketertiban dan keteraturan yang tersaji dalam institusi pendidikan formal ini ibarat ban berjalan yang ada di pabrik. Inilah yang disebut dengan *factory model education*. Dalam model pendidikan seperti ini, kegiatan belajar peserta didik dikendalikan oleh pendidik dengan buku-buku yang ditentukan pendidik. Belakangan, buku-buku yang harus dipelajari peserta didik juga ditentukan oleh pebisnis buku. Pebisnis buku tidak salah. Mereka sekedar memanfaatkan peluang. Mereka mengetahui bahwa pendidik mengajar peserta didik dengan berpusat pada buku. Peluang inilah yang diambil pebisnis buku. Mereka melobi pengelola pendidikan untuk menggunakan buku yang dihasilkannya sebagai buku wajib. Singkatnya, buku menjadi perangkat penting dalam kegiatan pendidikan. Hampir semua kegiatan belajar peserta didik diarahkan pada buku. Padahal, sering kali informasi yang disajikan dalam buku merupakan cerita masa lampau (*out of date*) bila dibandingkan dengan berbagai kecenderungan yang berkembang di masyarakat. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan cermat. bagaimana mungkin peserta didik mempelajari informasi yang sudah lewat, sedangkan kelak ia harus menghidupi dunia di masa depan dengan berbagai kecenderungan yang lebih baru?

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, kegiatan pendidikan tidak cukup dilakukan hanya dengan mengajak para peserta didik hanya untuk sekedar menghafal materi pelajaran. Dalam dunia yang bergerak sangat cepat, apa yang dipelajari dan dihafalkan oleh para peserta didik pada hari ini bisa jadi sudah tidak relevan dengan apa yang terjadi pada hari esok. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan para peserta didik agar siap menjadi warga masyarakat global, kegiatan pendidikan tidak cukup dilakukan hanya

dengan mengajak para peserta didik untuk memahami materi pelajaran secara parsial. Para peserta didik harus disiapkan sejak dini untuk mampu berpikir secara holistik, dengan menggabungkan antar konsep dari berbagai mata pelajaran. Kemampuan peserta didik untuk menggabungkan berbagai konsep inilah yang akan memicu kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Kemampuan berpikir kreatif dan kritis adalah salah satu kemampuan berpikir yang harus dimiliki oleh siapa saja yang akan hidup dalam dunia yang terus berubah.

Sekolah masa depan bukan sekedar berupa bangunan gedung yang megah. Sekolah masa depan harus mampu menjadi tempat pusat kajian ilmu dari para pendidik dan peserta didik yang tergabung sebagai sebuah tim. Hadirnya perangkat teknologi informasi (IT) membuat kedudukan pendidik relatif setara dengan peserta didik. Pendidik bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan. Dalam era IT, pendidik harus mampu memerankan diri sebagai seorang dirigen yang menggerakkan peserta didik untuk belajar dan menggali berbagai informasi dan memformulasikannya menjadi pengetahuan. Pendidik harus mampu membantu peserta didik memahami pengetahuan, dan menjadikan pengetahuan itu sebagai penuntun tumbuhnya sikap bijak. Pendidik harus mampu membangun budaya mencari, menggali informasi, dan menemukan tata kerja baru yang lebih baik.

Kegiatan pada pendidikan formal umumnya memosisikan peserta didik sebagai peserta didik yang datang ke sekolah pada waktu tertentu, untuk materi pelajaran tertentu, dan oleh pendidik tertentu yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Peserta didik belajar untuk mendapatkan nilai tertentu sebagai syarat untuk bisa dinyatakan lulus. Dengan berkembangnya IT dan dunia yang terus berubah, pendidik ditantang untuk tampil sebagai sosok yang mampu menginspirasi para peserta didik untuk menjadi manusia pembelajar. Dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat, setiap institusi pendidikan dituntut untuk mampu mengantarkan para peserta didiknya agar memiliki dorongan kuat untuk mempelajari berbagai informasi pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan.

Generasi era sekarang dituntut untuk mampu meramu berbagai informasi pengetahuan guna melahirkan pemikiran baru sesuai dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Dalam kaitan inilah, maka setiap institusi pendidikan harus membiasakan para peserta didik untuk bersikap terbuka, terbiasa berpikiran luwes dan luas, serta bersikap

toleran dalam menghadapi perbedaan cara pandang. Bila hal tersebut dapat dihadirkan di setiap institusi pendidikan, kita boleh berharap dari sana akan dapat dilahirkan para peserta didik yang dapat menjelma menjadi pembelajar yang antusias, memiliki kemauan yang kuat untuk terlibat dalam sebuah proyek kerja, meneliti, mengkaji, dan mampu mengembangkan pola pikir yang terbaru. Kita membayangkan dari institusi pendidikan yang demikian akan bermunculan berbagai pemikiran yang segar dan kreatif, relevan dengan tuntutan global.

B. Tantangan Era Disruptif

Sekolah/kampus adalah miniatur masyarakat. Pada masa lalu, ungkapan ini sering disampaikan oleh para pakar pendidikan. Artinya, bagaimana kondisi kehidupan di masyarakat pada masa yang akan datang dapat ditelisik dari bagaimana praktik pendidikan yang terjadi di lembaga persekolahan atau kampus pada saat ini. Pendapat ini menemukan relevansinya bila kita merujuk makna pendidikan sebagai sebuah upaya untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa, agar siap untuk menjalani kehidupan di masyarakat, dengan segala kompleksitas tantangan yang ada di dalamnya.

Kondisi kehidupan negara, politik, ekonomi, dan kebudayaan Indonesia di masa depan tentu sangat tergantung pada kontribusi para generasi yang saat ini sedang belajar di bangku sekolah. Kualitas generasi yang pada saat ini sedang belajar di bangku sekolah sesungguhnya mencerminkan kualitas kehidupan masyarakat di masa depan. Inilah tantangan utama yang pertama-tama harus dijawab oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Pemerintah, masyarakat, para orang tua, para pendidik (guru-dosen), dan para peserta didik harus memiliki kesadaran bersama bahwa mereka berkontribusi untuk menentukan kualitas kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecakapan berubah dengan sangat cepat. Berbagai produk yang dihasilkan oleh masyarakat juga menjadi tampak cepat usang. Berbagai kecakapan yang berlaku di masyarakat juga cepat mengalami perubahan. Apa yang pada hari ini disebut sebagai sebuah tren dalam waktu yang tidak lama tiba-tiba menjadi tampak ketinggalan jaman. Lihatlah berbagai produk yang dihasilkan oleh usaha industri, seperti produk-produk di bidang informasi dan

komunikasi. Apa yang pada hari ini tampak terlihat canggih dalam waktu yang tidak lama seperti tampak ketinggalan jaman, karena sudah ada produk baru yang jauh lebih modern.

Berkembangnya teknologi digital sebagai dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membuat pola kehidupan menjadi semakin kompleks. Interaksi antar manusia menjadi semakin mudah, cepat, dan nyaris tidak mengenal jarak dan waktu. Dengan teknologi internet, manusia dalam era sekarang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan siapa pun, dan dari berbagai belahan dunia mana pun. Manusia dalam era sekarang bisa saja terpisah dengan jarak yang berjauhan, bahkan melampaui batas negara. Tetapi kehadiran teknologi internet membuat seseorang mampu berkomunikasi dengan orang lain meski berada dalam jarak yang berjauhan, antar benua sekali pun. Jarak menjadi kehilangan arti dengan berkembangnya teknologi internet.

Satu dasawarsa yang lalu, sebagian besar orang harus datang ke kantor agen perjalanan untuk membeli tiket pesawat. Bayangkan kalau tempat agen penjualan tiket itu ada di pusat kota, berjarak beberapa kilometer dari rumah Anda. Berapa waktu dan biaya yang Anda keluarkan hanya untuk membeli sebuah tiket. Mungkin tidak cukup satu jam hanya untuk sebuah urusan tiket. Kini, Anda cukup klik di tiket *online* di telepon seluler untuk menemukan tiket yang diperlukan. Dalam waktu beberapa menit urusan tiket sudah beres. Anda tidak perlu beranjak dari tempat di mana Anda saat itu beraktivitas. Dengan cara yang sama, Anda dapat memesan barang dan jasa yang diperlukan; tanpa harus meninggalkan tempat. Hidup seperti benar-benar semakin mudah dan cepat. *Simplicity*, itulah kecenderungan yang harus diikuti oleh generasi era sekarang dan yang akan datang. Maka, siapa pun yang saat ini masih hobi menghadirkan suasana *mbulet* dan *ruwet* pasti akan ditinggalkan pelanggannya.

Dua puluh tahun yang lalu, sebagian besar orang mungkin harus menunggu waktu sehari-hari untuk sebuah pesan, berita, dan data yang dikirimkan oleh sebuah media. Pada saat itu, untuk mendapatkan berita terbaru, seseorang harus menunggu informasi pada pagi hari. Seseorang mungkin masih harus menggunakan jasa pos dengan biaya yang mahal dan memakan waktu yang tidak cukup sehari dua hari untuk mengirimkan sebuah data dari satu wilayah ke wilayah yang lain; apalagi dari satu negara ke negara lain. Tapi pada hari ini, Anda hanya

perlu berkorban pulsa setara dua ratus rupiah dengan durasi waktu pengiriman tidak lebih dari lima detik untuk mengirimkan ringkasan hasil penelitian kepada pengelola jurnal internasional di luar negeri.

Bayangkan, berapa ribu kilometer jarak antara tempat tinggal Anda dengan kantor pengelola jurnal di Kanada. Bayangkan, berapa juta rupiah dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampainya ringkasan hasil penelitian bila Anda kirimkan 20 tahun yang lalu. Tetapi dalam era sekarang, seiring dengan berkembangnya teknologi internet; biaya dan waktu menjadi semakin kehilangan makna. Inilah buah dari fenomena ledakan *dot com* (Prianto dan Winardi, 2015). Artinya, siapa pun yang hidup dalam era ledakan *dot com*, sepanjang mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi; maka mereka akan dapat mengkreasikan sebuah karya sebagaimana dikreasikan oleh orang lain. Ledakan *dot com* memberikan kesempatan yang sama besar kepada siapa pun untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan bidang kemampuannya.

Ledakan *dot com* benar-benar membuat dinding dan arena kehidupan semakin terbuka, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi siapa saja yang akan berkompetisi di dalamnya. Suka atau tidak suka, secara otomatis Anda akan menjadi salah satu kontestan yang harus berkompetisi dengan orang lain. Persaingan menjadi bagian kehidupan yang harus Anda hadapi. Anda tidak bisa mundur sejengkal pun dalam arena persaingan itu, karena menghindari persaingan hanya akan membuat Anda akan semakin tergilas dan kian tertinggal dengan orang lain yang memiliki keahlian serupa. Lihatlah, tuntutan persaingan itu bahkan sudah sampai merambah pada level kuli. Fenomena hadirnya para pekerja dari China yang mengerjakan berbagai proyek di Indonesia menunjukkan kecenderungan tersebut. Kalau sudah demikian, apakah Anda masih hendak mengelak untuk berkompetisi dalam sebuah arena persaingan kehidupan? Anda hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu mempersiapkan diri sedini mungkin untuk suatu saat bertarung dalam arena persaingan kehidupan. Inilah tantangan yang harus dijawab oleh siapa pun yang hidup dalam era disruptif!

C. Perlombaan Menuju Masyarakat Global

Teknologi informasi yang berkembang pesat membuat kehidupan di dunia semakin datar dan setara (Friedman, 2006). Tidak ada pihak yang lebih unggul dibandingkan dengan pihak lain. Semua orang

memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses informasi untuk mengkreasikan sebuah karya. Teknologi informasi yang berkembang sangat pesat digambarkan Bill Gates dengan sebuah ungkapan “*information at your fingertips*”, informasi ada di ujung jari Anda! Maka Anda jangan coba-coba untuk mengatakan tidak mengetahui tentang segala sesuatu, karena hanya dengan klik google dan mengetik kata kunci tertentu Anda akan mendapatkan jutaan sajian tentang apa yang Anda inginkan. Anda juga jangan keburu *ge-er*, merasa sebagai orang yang paling mengetahui tentang sesuatu; sebab dalam hitungan detik mungkin ada orang di luar sana yang memiliki informasi terbaru tentang apa yang Anda ketahui.

Karena itu, keunggulan yang dikreasikan seseorang pada hari ini, bisa saja akan lebih diungguli oleh karya orang lain pada keesokan hari. Barkema, *et.al* (2002) menggambarkan kecenderungan seperti ini dengan sebuah fenomena “*red queen*” sebagai dampak dari berkembang pesatnya teknologi internet. *Red Queen* merupakan cerita tentang seorang raja yang merasa paling hebat di atas muka bumi. Perasaan sebagai orang yang paling hebat itulah yang membuat ia terlena untuk mengembangkan kemampuan. Ia tiba-tiba menjadi *shock* ketika mendapati sebuah kenyataan tentang adanya orang lain yang jauh lebih hebat dari dirinya. Singkatnya, dalam era internet; hanya sekedar merasa mampu, pintar, dan mengklaim sebuah kebenaran itu hukumnya menjadi tabu. Dalam era sekarang, hal demikian adalah kebiasaan yang harus dihindari oleh siapa pun, kalau ia tidak ingin menanggung malu.

Perasaan menjadi orang yang paling benar dan paling pintar itu yang justru menjerumuskan seseorang untuk lupa meng-*update* pengetahuan dan kecakapan. Akibatnya, kebiasaan negatif itu yang justru membuat seseorang menjadi tampak *katrok* atau *ndeso* di hadapan orang yang terus memperbarui pengetahuan dan kecakapannya. Maka, pada era sekarang kita menyaksikan seseorang, masyarakat, bangsa dan negara yang terlibat dalam perlombaan untuk menjadi yang terunggul dan terdepan. Siapa pun yang tidak memiliki semangat untuk terlibat dalam perlombaan untuk menjadi yang terunggul dan terdepan, maka bisa dipastikan mereka akan tampil sebagai penonton.

Generasi yang hidup dalam era sekarang dan yang akan datang harus sejak dini dibelajarkan untuk menyediakan energi yang cukup guna membiasakan diri *update* informasi, pengetahuan, dan kecakapan. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi yang kian canggih, seperti

smartphone memungkinkan siapa pun untuk *update* informasi, pengetahuan, dan kecakapan dalam hitungan detik. Kalau kebiasaan *update* sudah menjadi budaya, maka siapa saja akan memiliki kedudukan yang setara dengan orang lain dari belahan bumi mana pun! Yang repot, generasi muda masa kini kesukaannya baru sebatas *update* foto *selfie*, supaya tampilan fisiknya yang baru bisa dilihat orang lain. Generasi muda yang *update* gagasan, pengetahuan, dan kecakapan masih sangat jarang. Generasi kita masih menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk sekedar *having fun*! Singkatnya, kalau kecenderungan seperti itu benar adanya; maka generasi kita sesungguhnya belum layak diberi predikat sebagai *The Net-Generation*; sebuah predikat yang dibutuhkan dalam masyarakat global.

Mereka yang *lemot* dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pasti tidak akan mampu menjadi aktor utama dalam kehidupan modern. Dengan kata lain, generasi era sekarang harus mampu mengoptimalkan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka juga harus dibangun semangat dan karakternya untuk membiasakan diri sebagai sosok yang memiliki dorongan untuk menjadi yang terunggul dan terdepan. Ini yang harus ditumbuhs suburkan oleh dunia pendidikan agar dari sana dapat dilahirkan generasi yang mampu tampil sebagai aktor kehidupan, bukan sekedar sebagai penonton dalam kehidupan.

Era ledakan *dot com*, sebagaimana yang terjadi pada saat ini; membuat pola interaksi antar manusia menjadi kian cair, sekat ruang dan waktu menjadi kian tipis maknanya. Dalam era mendatang, kehidupan manusia tidak lagi bisa dibatasi oleh sekat daerah dan wilayah negara. Karena itu, generasi era sekarang dan masa yang akan datang harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kelompok masyarakat dari wilayah mana pun. Mereka harus sejak dini dibiasakan untuk *outward looking*. Generasi sekarang tidak boleh hanya jago kandang. Mereka harus dibiasakan untuk keluar kadang.

Profesor Rhenald Kasali, pendidik manajemen dari Universitas Indonesia; sudah beberapa tahun mewajibkan para peserta didiknya untuk berkelana ke luar negeri. Negara tujuannya, bukan negara ASEAN yang berbahasa Melayu, tetapi negara-negara Eropa dan Amerika yang berbahasa Inggris. Tampaknya Sang Profesor bermaksud agar para mahasiswanya lebih banyak mengenal dunia luar, dan membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat global; agar kelak setelah lulus kuliah segera bisa menjadi bagian dari masyarakat global.

Hadirnya fenomena ledakan *dotcom* membuat pembicaraan tentang klasterisasi masyarakat berdasarkan golongan kelas menjadi tidak relevan lagi. Kini tidak relevan lagi menyebut orang kota lebih kosmopolit bila dibandingkan orang desa. Anda yang tinggal di pelosok desa, tapi memiliki kapasitas untuk mengoptimalkan informasi; bisa saja tampil lebih *keren* dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota tapi hanya mampu menggunakan perangkat IT untuk sekedar *having fun*. Meski tinggal di kota metropolis, bisa saja Anda akan tampak *bloon* jika alpa meng-update pengetahuan dan teknologi. Bila semua orang di muka bumi ini memiliki kemampuan yang setara untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, maka pembicaraan tentang negara dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga; orang desa, orang kota, orang kulit hitam, orang kulit putih, dan seterusnya...; menjadi sama sekali tidak penting!

Prianto dan Winardi (2013) mengutip pendapat Friedman (2000) dalam bukunya "The Lexus and The Olive Tree", menyatakan bahwa "...today there is no first world, second world, or the third world.... just the fast world ... and the slow world...". Saat ini tidak relevan lagi kita bicara tentang dunia pertama, dunia kedua, atau dunia ketiga; demikian kata Friedman. Yang ada adalah dunia yang lambat dan dunia yang cepat. Siapa yang mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, maka ia akan menjadi bagian dari warga dunia yang cepat. Dan siapa yang tidak mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, maka ia akan menjadi bagian warga dunia yang lambat. Apakah kita termasuk bagian dari dunia yang lambat atau dunia yang cepat? Kunci jawaban atas pertanyaan ini terletak pada kesiapan kita untuk mengoptimalkan teknologi informasi guna meng-*update* ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menyikapi pendapat Friedman (2000), Prianto dan Winardi (2013) menyatakan bahwa pada era sekarang dan ke depan, semua orang ditantang untuk bisa menjadi yang terbaik, dan kesempatan untuk menjadi yang terbaik itu sesungguhnya juga ada pada semua orang, siapa pun dia, di mana pun dan dari kelompok mana pun ia berasal. Oleh karena itu, era sekarang dan ke depan sudah tidak relevan lagi kita berbicara tentang ras, gender, suku, lokasi tempat tinggal, bahkan status pendidikan formal. Era ledakan *dotcom* sesungguhnya memberikan kesempatan yang setara kepada semua orang untuk meraih keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Tentu saja kata kuncinya adalah

sejauh mana generasi dalam era sekarang ini terdorong untuk bersikap proaktif dan mampu bekerja keras.

Era persaingan yang ketat dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memunculkan berbagai kecenderungan baru dalam kehidupan masyarakat. Fenomena lain yang terjadi dalam era baru antara lain ditandai dengan gejala umur produk, ilmu pengetahuan, dan teknologi; serta tata kerja dalam organisasi yang menjadi tampak cepat usang sehingga perlu untuk segera diperbaharui. Menghadapi fenomena tersebut, maka semua orang dituntut untuk mengembangkan budaya kerja baru. Barkema, *et.al* (2002) menjelaskan beberapa budaya kerja baru yang harus dikembangkan oleh semua warga masyarakat global adalah kesiapan untuk berubah, budaya bekerja cepat, cepat mengambil keputusan, cepat belajar, serta cepat untuk mengembangkan kreasi dan inovasi kerja.

Menurut Kasali (2003), kesiapan untuk berubah antara lain dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang mampu mengadopsi pengetahuan dan teknologi terbaru. Untuk menghadapi kecenderungan tersebut, Kasali (2005) menyarankan perlunya pengenalan sejak dini tentang pengetahuan dan teknologi terbaru melalui berbagai jenjang pendidikan. Pimpinan organisasi, baik privat maupun bisnis; terlebih organisasi bidang pendidikan; dituntut untuk mampu mengembangkan budaya belajar yang baru, yaitu budaya belajar yang mendorong warga organisasi untuk selalu meng-*update* pengetahuan dan teknologi, ketrampilan, dan kecakapan terbaru yang dibutuhkan oleh masyarakat global.

Pimpinan organisasi diharapkan segera membuat program yang memungkinkan warga organisasi mampu menerapkan program kerja baru dengan menggunakan teknologi terbaru. Program kerja baru tersebut akan berjalan lebih efisien apabila didukung oleh kesiapan institusi untuk menerapkan budaya kerja yang baru. Budaya kerja baru membutuhkan sumber daya manusia yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Hal ini berarti pimpinan organisasi perlu memperkuat budaya untuk terus belajar kepada semua warga organisasi. Singkatnya, semua orang yang hidup dalam era global seperti saat ini dituntut untuk bisa menjadi manusia pembelajar. Semua orang yang memiliki hasrat dan gairah tertinggi untuk terus memperbarui pengetahuan dan teknologi yang telah dimilikinya; itulah yang disebut dengan manusia pembelajar.

Beberapa peneliti terdahulu, seperti Armenakis, *et.al.* (1993), dan Lehman, *et.al.* (2002) menyimpulkan bahwa seseorang yang memiliki hasrat tertinggi untuk memperbarui pengetahuan dan teknologi yang sudah dimilikinya akan cenderung memiliki kesiapan untuk berubah yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang condong mempertahankan *status quo*. Hasil kajian tersebut juga mengungkapkan bahwa mereka yang memiliki kesiapan untuk berubah terbukti mampu untuk tetap eksis dan kian berkembang dalam kancah persaingan global. Dengan kata lain, berbagai lembaga pendidikan harus mendorong para peserta didiknya untuk menjadi manusia pembelajar.

Hal senada dikatakan oleh Friedman dalam bukunya “The Lexus and The Olive Tree” (2000). Friedman (2000) berpesan kepada siapa saja bahwa untuk hidup dalam era sekarang dan era masa datang, maka seseorang dan organisasi hanya memiliki dua pilihan, yaitu menjadi bagian dari dunia yang *cepat* atau menjadi bagian dari dunia yang *lambat*. Seseorang dan organisasi yang memiliki kesiapan berubah akan mampu menjadi bagian dari dunia yang cepat. Mereka akan memiliki keunggulan untuk berkompetisi (*competitive advantage*) dalam iklim persaingan yang sangat ketat. Dan bukan tidak mungkin, mereka akan mampu menjadi pemimpin pasar global (*market leader*).

Sebaliknya, seseorang dan organisasi yang tidak siap berubah akan memerosokkan mereka menjadi bagian dari dunia yang lambat. Mereka dipastikan tidak akan mampu berkompetisi (*competitive disadvantage*) dalam iklim persaingan yang sangat ketat. Dan konsekuensinya, mereka hampir dapat dipastikan menjadi pengikut para pemimpin pasar global (*market follower*). India dan China adalah contoh mutakhir dua negara yang pada dua dasawarsa yang lalu dikelompokkan sebagai *The First World*; negara terbelakang; tetapi saat ini menjelma menjadi penguasa panggung ekonomi dunia, menjadi bagian dari *The Fast World* berkat dukungan para warganya yang memiliki kesiapan untuk berubah (Prianto dan Winardi, 2013).

India dan China menjadi kekuatan ekonomi dunia antara lain karena didukung oleh sumber daya manusia yang terbiasa untuk menjadi yang terunggul. Guerra (2008) menyatakan bahwa generasi yang hidup dalam era global dituntut untuk memiliki kinerja yang super, *superperformance*. Menurut Guerra (2008), *superperformance* hanya akan terwujud apabila didukung oleh budaya berubah dan kemampuan untuk terus melakukan pembaruan (*continous improvement*). Dalam konteks

pengembangan sumber daya manusia Indonesia, meminjam istilah Mario Teguh; generasi ke depan harus bisa menjadi “Generasi Indonesia Super”, yaitu sebuah generasi yang didukung sumber daya (pengetahuan, kecakapan, ketrampilan, dan nilai-nilai etika global) yang serba *up to date*.

Sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi *super performance* selalu berorientasi pada mutu (Guerra,2008). Dellana dan Hausser (1999) mengidentifikasi faktor budaya yang dikembangkan oleh seseorang yang dapat mendukung program peningkatan mutu kerja; meliputi: kreativitas kerja, keberanian untuk mengambil risiko dalam bekerja, kemampuan bekerja dalam tim, memiliki jiwa kepemimpinan yang kreatif, dan bersikap proaktif. Menurut Lehman, *et.al.* (2002), kreativitas kerja, keberanian untuk mengambil risiko, kepemimpinan kreatif, terbangunnya tim kerja yang tangguh, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam bekerja juga merupakan faktor yang menentukan kesiapan organisasi untuk berubah.

Berbagai kajian empirik membuktikan bahwa orientasi pada mutu berpengaruh positif terhadap pencapaian kinerja (Hendricks dan Singhal,2001), kepuasan pelanggan (Choi dan Eboch,1998), dan kualitas output (Agus,2005). Individu dan organisasi yang eksis dalam persaingan global adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi terhadap variabel kinerja, kepuasan pelanggan, dan mutu kerja. Beberapa peneliti lain menemukan keterkaitan antara pencapaian mutu kerja dengan faktor-faktor budaya kerja (Jabnoun,2001; Souza-pozza,*et.al.*,2001). Penelitian yang dilakukan oleh Powel (1995) menunjukkan adanya hubungan positif antara budaya orientasi kepada mutu yang dikembangkan individu dan organisasi dengan kinerja individu dan organisasi.

Selanjutnya dikatakan oleh Powel (1995), bahwa program pengembangan individu dan organisasi merupakan faktor penting yang akan memunculkan berbagai budaya kerja baru, seperti budaya terbuka terhadap nilai-nilai dan kecenderungan baru, tersedianya program pemberdayaan individu dan staf, serta meningkatkan komitmen untuk tercapainya kemajuan organisasi. Samson dan Terziovski (1999) yang meneliti berbagai organisasi swasta di Australia dan New Zealand menemukan adanya keterkaitan antara diterapkannya orientasi budaya pengembangan mutu dengan kinerja organisasi. Studi yang mereka lakukan menemukan bahwa budaya orientasi kepada mutu berdampak positif terhadap kinerja. Studi lain yang dilakukan

oleh Dowe & Samson, (1999) menemukan bahwa berbagai komponen dari budaya orientasi terhadap mutu kerja dan orientasi kepada kepuasan pelanggan secara bersama-sama berhubungan positif dengan mutu kerja.

Hasil berbagai kajian di atas menunjukkan bahwa ternyata budaya orientasi kepada mutu kerja berdampak positif terhadap kinerja dan kelangsungan hidup organisasi. Lehman, *et.al.* (2002) juga mengemukakan bahwa berbagai unsur dari budaya orientasi kepada mutu berhubungan positif dengan kesiapan organisasi untuk menghadapi perubahan. Dengan kata lain, untuk mempersiapkan organisasi dan individu dalam menghadapi perubahan, maka hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat budaya mutu. Orientasi pada mutu harus dijadikan paradigma baru dalam kehidupan.

Berbagai kajian yang dilakukan oleh para cerdik pandai menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara kesiapan untuk berubah dengan mutu kerja. Seseorang dan organisasi yang mampu bertahan dalam iklim persaingan yang ketat adalah mereka yang selalu mampu menampilkan mutu kerja yang tinggi (Kasali, 2005; Guerra, 2008; Lehman, *et al.*, 2002). Institusi pendidikan di berbagai jenjang, organisasi, dan semua orang yang ingin eksis dalam dunia yang mengglocal harus menjadikan mutu sebagai orientasi utama. Dengan kata lain, penguatan budaya mutu menjadi hal yang tidak dapat ditawar oleh siapa pun yang hidup dalam era global. Institusi pendidikan menjadi salah satu garda depan untuk menyiapkan para peserta didiknya agar sedini mungkin menjadikan mutu sebagai sebuah orientasi kehidupan. Kegiatan belajar dan aktivitas kerja yang asal-asalan harus dibenam dalam-dalam.

Membudayakan mutu kadang-kadang harus diawali dengan sebuah paksaan. Semua orang yang merasa sebagai calon penghuni dalam era mendatang harus dipaksa untuk berorientasi pada mutu. Mungkin pada tahap berikutnya orang merasa terpaksa berorientasi pada mutu. Tapi kalau hal itu dilaksanakan secara konsisten, lama-lama orang akan terbiasa untuk berorientasi pada mutu. Orientasi mutu kemudian akan menjadi sebuah kebiasaan, dan puncaknya menjadi budaya: budaya hidup bermutu! Proses yang demikian oleh Kasali (2010) disebut sebagai proses untuk membangun *muscle memory*. Sering kali sebuah aktivitas terasa berat untuk dilaksanakan semata-mata karena belum terbiasa. Bagi orang yang terbiasa melaksanakan sebuah tugas, seberat apa pun tugas itu; maka ia akan tampak ringan untuk dilaksanakan.

Maka, saya ingin meyakinkan kepada Anda; bahwa tertib dan disiplin itu berat semata-mata karena belum terbiasa dijadikan pedoman hidup. Bagi yang sudah memedomani nilai-nilai ketertiban dan kedisiplinan, maka ia akan ringan saja menjalankannya. Pada awal-awal memimpin negeri Singapura yang kumal, miskin, dan semrawut pada pertengahan tahun 1960an; Lee Kuan Yew harus mendisiplinkan warganya dengan keras. Hukuman bagi orang yang tidak tertib aturan dan disiplin, misalnya membuang sampah di sembarang tempat; dibuat sangat berat. Pendisiplinan dari pemimpin Singapura kepada warganya itu kini berbuah manis. Saat ini Anda melihat Singapura tampil sebagai negara yang maju, bersih, tertib, dan disegani oleh komunitas dunia internasional. Padahal pada pertengahan tahun 1960-an kualitas kehidupan warga Singapura sama dengan Indonesia. Tapi kini harus diakui negeri Singapura yang kecil itu jauh lebih maju dibandingkan dengan Indonesia.

Coba perhatikan juga dengan apa yang ditorehkan oleh Korea Selatan, sebuah negara yang hari kemerdekaannya hanya selisih 2 hari dibandingkan dengan Indonesia. Sebagaimana Indonesia, Bangsa Korea juga memiliki sejarah kelam karena pernah diinvasi oleh Jepang. Bangsa Korea bahkan harus berurusan dengan perang saudara, yang membuat negeri itu terbelah menjadi 2 negara: Korea Utara dan Korea Selatan. Pada awal kemerdekaannya, sebagaimana Indonesia; Bangsa Korea juga mengalami berbagai peristiwa turbulensi politik. Tetapi karena didukung oleh sumber daya manusia yang sangat terampil, disiplin, dan berorientasi pada mutu maka Korea Selatan kini tampil sebagai negeri yang maju.

Berbagai produk di bidang teknologi informasi bahkan menguasai pasar dunia. *Smartphone* yang Anda gunakan hampir selalu bermerek Samsung. Merek Toshiba yang dihasilkan Jepang, negara yang dulu menginvasi Korea sudah lama disingkirkan oleh Samsung. Apa yang membuat Toshiba bisa dieliminasi oleh Samsung, padahal Jepang juga memiliki budaya pembaharuan tiada henti (populer disebut *kaizen*)? Hal itu tidak lain karena Korea memiliki budaya pembaruan yang jauh lebih masif dibandingkan dengan Jepang. Sudah lama Korea Selatan meledek Jepang karena memiliki masa kerja 10 jam per hari. Dengan masa kerja 10 jam per hari, Korea mengejek Jepang sebagai negeri yang malas; karena Korea sudah menerapkan masa kerja 12 jam per hari dan ditambah dengan tuntutan kedisiplinan yang sangat ketat. Bagaimana

dengan Indonesia? Konon masa kerja di Indonesia 8 jam per hari. Tapi apakah 8 jam itu benar-benar efektif digunakan untuk berkarya? Bagaimana dengan kedisiplinan kerja? Bagaimana dengan mutu kerja? Anda sendiri yang harus menjawabnya dengan jujur!

Socrates (469-399 BC) adalah filosof Yunani Kuno yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Sejak ribuan tahun yang lalu Socrates juga menekankan pentingnya disiplin dan usaha yang sangat keras untuk meraih kesuksesan. Alkisah ada seorang pemuda Yunani yang meminta bimbingan pada Socrates agar meraih kesuksesan hidup. Socrates kemudian mengajak pemuda tadi ke laut. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba Socrates meneggelamkan kepala pemuda tadi. Dengan sekuat tenaga pemuda tadi berusaha untuk muncul ke permukaan. Setelah hampir menyerah, Socrates kemudian mengangkat kepala pemuda tadi. Begitu muncul di permukaan air, pemuda itu langsung menarik nafas kuat-kuat untuk mengisi paru-parunya dengan udara. Socrates kemudian bertanya kepada pemuda itu, "Sewaktu di dalam air, apa yang paling kamu butuhkan?" "Udara", jawab pemuda itu singkat sambil terengah-engah.

"Itulah rahasia kesuksesan. Jika ingin sukses, Anda harus berjuang seperti pada saat membutuhkan udara di dalam air. Anda pasti sukses!" Demikian sang filosof mengajarkan kepada pemuda tentang cara meraih kesuksesan. Mahatma Gandhi, pemimpin besar Bangsa India mengajarkan senada: "Kekuatan seseorang bukan datang dari kapasitas fisiknya, tetapi dari kemauan yang sungguh-sungguh". Untuk melahirkan generasi yang tangguh dibutuhkan kehadiran *melieu* (lingkungan sosial, pendidikan, orang tua, dan pendidik) yang mampu memaksa siapa saja untuk berdedikasi, disiplin, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sebuah aktivitas. Dengan kata lain, upaya membangun generasi yang tangguh sesungguhnya merupakan "gerakan" bersama.

D. Catatan Akhir

Dalam era disruptif, Anda harus memiliki kesiapan untuk menjadi bagian dari masyarakat global. Dalam masyarakat global, kehidupan antar masyarakat di berbagai wilayah, lintas negara, dan berbagai bidang kehidupan menjadi saling terkoneksi. Karena itu, siapa pun yang berkehendak untuk menjadi wara masyarakat global harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang kompatibel dengan tuntutan masyarakat global.

Para calon penghuni masyarakat global dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai kecenderungan pada masyarakat global. Salah satu penanda utama dalam era global adalah adanya perubahan dalam berbagai bidang kehidupan yang tidak pernah berhenti (Kasali, 2003). Dengan demikian calon penghuni masyarakat global harus memiliki kesiapan untuk berubah dan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat.

Belajar dari pengalaman individu, organisasi, dan berbagai negara yang mampu meraih keunggulan bersaing dalam era *hypercompetition*, penulis tetap berkeyakinan bahwa ajakan kepada semua orang, khususnya para peserta didik; untuk berorientasi kepada mutu itu harus diawali dengan sebuah pemaksaan. Harus ada instrumen pengikat yang membuat siapa pun tidak bisa menghindar untuk tidak berorientasi kepada mutu. *It is a must, just not a should*; berorientasi pada mutu itu *harus*, bukan *seharusnya*. Karena bersifat *harus*, maka bagi siapa pun yang tidak berorientasi pada mutu juga *harus* dipaksa untuk memulai aktivitas yang berorientasi pada mutu. Hal ini tentu saja juga berlaku untuk Anda yang saat ini sedang belajar! Sebab bila tidak, maka budaya mutu tidak akan mengakar kuat di dalam kehidupan Anda. Tanpa orientasi pada mutu, jangan pernah bermimpi bahwa suatu saat Anda akan mampu menjadi *market leader* dalam iklim persaingan global yang sangat ketat. Dan, kalau itu yang terjadi; Anda bahkan belum layak disebut sebagai warga masyarakat global (*global citizen*). Warga masyarakat global lainnya mungkin akan menertawakan Anda, karena tampilan Anda tampak *katrok*! Semoga hal seperti ini tidak sampai terjadi pada diri Anda! Oleh karena itu, *let's go to the global society!*

Indeks

A

Albert Einstein 69

Albert Georgyi 70

Arcandra Tahar 77

B

Beasiswa Bidikmisi 44

BJ Habibi 1, 13, 78

BJ Habibie 1, 13

C

Centre Berger Entrepreneurship Program University of Arizona 141
computer literacy 18

Corporate Voices for Working Families 100, 104

D

Digital literacy 18

G

Global Competitiveness Report 22, 58, 59, 163

Global Entrepreneurship Monitor 150

I

information literacy 18

*International Convention on The Rights of All Migrant Workers and Members of
their Families* 48

Internet literacy 18

Ivana Lie 78

J

Jack Welch 89

John Kotter 89

K

K13 33, 34, 36

kaizen 192

Karl Eller 141

M

Mahatma Gandhi 193

Majapahit 174

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 22

Melaca 174

Ministry of Communication and Information Technology 18

N

Net-Generation 186

O

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 16

P

Partnership for 21st Century Learning (P21) 11

Partnership for 21st skills 14, 15

Paulo Freire 45

Petroneering 77

R

Rudi Giuliani 89

S

Socrates 193

Sriwijaya 174

Susi Susanti 79

T

teknopreneurship 155

The Global Competitiveness Report 2017-2018 22, 58, 59

The Green Paper-Entrepreneurship in Europe 139

The Lexus and The Olive Tree 83, 187, 189

The Society for Human Resource Management 100

The World Bank 41

Thomas Alva Edison 37, 69, 80

U

UNDP 24, 32, 46

Unesco 47, 48, 50, 174

W

Webometric 24

WEF 24, 157, 158, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 173

Daftar Pustaka

- Aaron Flaaen, Ejaz Ghani, & Saurabh Mishra. "How to avoid middle-income traps Evidence from Malaysia", dalam www.voxeu.org, diakses 2/12/2013
- Abrahamson, E. 2000. Change Without Pain. *Harvard Business Review*. 78 (4) pp.75-79
- Acs, Z.J.; Szerb, L.; Lloyd. 2018. *The Global Entrepreneurship Index 2018*. Washington, D.C.: The Global Entrepreneurship and Development Institute
- Aderemi, H.O.S.; Siyanbola, W.O.; Abereijo, I.O., 2009. An Assessment of The Choice and Performance of Women Entrepreneurs in Technological and Non- Technological Enterprises in Southwestern Nigeria. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol. V pp. 25-43
- Agus, A. 2005. The Structural Linkages Between TQM, Product Quality Performance, and Business Performance: Preliminary Empirical Study in Electronic Companies. *Singapore Management Review*. Vol.27 No.1 pp.87-105
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. No. 50 pp. 179-211
- Asean Economic Community (AEC) Blueprint, dalam www.asean.org/communities, diakses 2/1/2014
- Assesing the Integration of Vietnam's Distribution Services in AEC*, dalam www.icird.org, diakses 2/12/2013
- Armenakis, A.A., Harris, S.G., Mossholder, K.W. 1993. Creating Readiness for Organizational Change. *Human Relation*. 46 (6) pp. 681-703

- Audretsch, D.B. dan Keilbach, M. 2005. Entrepreneurship Capital Determinants and Impact. *CEPR Discussion Paper*. CEPR Discussion Papers
- Barkema, Harry G.; Baum, Joel A.C.; dan Mannix, Elizabeth A. 2002. Management Challenges in a new time. *The Academy of Management Journal*. 45 (5):916-930
- Baron, R.A. 2004. The Cognitive Perspective: A Valuable Tool for Answering Entrepreneurship's Basic "Why" Question. *Journal of Business Venturing*. Vol. 19 pp. 221-239
- Batey, M, & Furnham, A. 2006. Creativity, Intelligence and Personality: A critical review of the scattered Literature. Genetic, Social and General Psychology Monograph. 132. Pp. 355-429
- Berita Resmi Statistik. 2018. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018*. No. 42/05/Th.XXI. 1-16
- Betz, N.E. 2004. Contribution of self-efficacy theory to carrer counseling: A personal perspective. *Carrer Development Quarterly*. 52. pp. 340-353
- Blenker, O.; Dreisler, P.; Kjeldsen, J. 2006. Entrepreneurship Education- The New Challenge Facing the Universities. *Working Paper 2006-2*, Aarhus Business School, Department of Management, Aarhus
- Brady, R.P.2010. *Work Readiness Inventory (The booklet designed to accompany the Work Readiness Inventory)*. Indianapolis: JIST Publishing
- Brunila, K. 2012. A diminished self: Entrepreneurial and therapeutic ethos operating with common aim. *European Educatioan Reasearch Journal*. 11 (4) pp.477-486
- BPS: *Jumlah Angkatan Kerja 2013 Capai 118,2 Juta*, dalam www.investor.co.id, diakses 9/1/2014
- Brush, C.G. 1992. Research on Women Business Owners: Past Trends, A New Perspective and Future Direnction. *Entrepreneurship Theory and Practice*.
- Caballero, C. L., Walker, A., Fuller-Tyszkiewicz. 2011. The Work Readiness Scale (WRS): Developing a measure to assess Work Readiness in college graduates. *Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability*. 2 (2) pp. 41-54
- Caballero, C.L., & Walker, A.2010. Work readiness in graduate recruitment and selection: A review of current assessment methods. *Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability*. 1(1) pp. 13-25

- Carless, S.A.2007. Graduate recruitment and selection in Australia. *International Journal of Selection and Assessment*. 15 (2) pp. 153-166
- Casner-Lotto, J., & Barrington, L. 2006. *Are They really ready to work? Employers' perspectives on the basic knowladge and applied skills of new entrants to the 21st century U.S. workforce*. USA: The Conference Board, Inc., the Partnership for 21st Century Skills, Corporate Voices for Working Families, and the Society for Human Resources Management.
- Choi, T.Y dan K, Eboch.1998. The TQM Paradox: Relation Among TQM Practices, Plant Performance, and Customer Satisfaction. *Journal of Operation Research*. 17 pp.59-75
- Cole, Robert E.2001. From Continuous Improvement to Continuous Innovation. *Quality Management Journal*. 8 pp. 7-21
- Cropley, A. (2006). In praise of convergent thinking. *Creativity Research Journal*, (18)3, 391–404.
- Davidson, P.1995. Culture, Structure, and Regional Levels of Entrepreneurship. *Entrepreneurship and Regional Development*. 7. Pp. 41-62
- De Jager, P.2001. Resistance to Change: A New View of An Old Problem. *The Futuris* (35) pp.24-27
- De Soto, Hernando.2014. How do Institutions Facilitate Entrepreneurship? In: *Creating the Environment for Entrepreneurial Success*. Washington, DC: Center for International Private Enterprise (CIPE)
- Dellana, S.A. dan R.D. Hausser. 1999. Toward Defining The Quality Culture. *Engineering Management Journal*. 11 (2) pp.11-15
- Desplaces, David. 2005. A Multilevel Approach to Individual Readiness to Change. *The Journal of Behavioral and Applied Management*. 7 (1) pp.25-39
- Drucker, P.F.1985. *Innovation and Entrepreneurship*. New York: Harper&Row
- Dowe, D., Sampson, D..1999. Exploring The Myth: Do All Quality Management Practices Contribute to Superior Quality Performance? *Production and Operation Management*. Vol.8 No.1. pp.1-27
- Entrepreneurship in Indonesia: The Importance of Educational institutions*, dalam www.unescobkk.org/education, diakses 20/10/2013
- Eurydice.2016. *Entrepreneurship education at school in Europe*. European Commission/EACEA. Luxembourg: Publications Office of The European Union

- Fadel, C. 2008. *Partnership for 21st century skills. 21st century skills: How can you prepare students for the new global economy*. Paris: OECD CERI
- Florida, R.; Mellander, C.; Stolarick, K.; Silk, K. Matheson, Z.; Hopgood, M. 2011. *Creativity and Prosperity: The Global Creativity Index*. The Martin Prosperity Institute
- Florida, Richard; Mellander, Charlotta; King, Karen. 2015. *The Global Creativity Index 2015*. University of Toronto's Rotman School of Management: The Martin Prosperity Institute
- Friedman, Thomas L. 2000. *The Lexus and The Olive Tree*. Farar, Straus and Gioux
- Friedman, Thomas L. 2006. *The World is Flat*. Jakarta: Dian Rakyat
- Friere, P. 1993. *Pedagogy of The Oppressed*. NY: The Continuum International Publishing Group Inc.
- Gardner, H. 2007. *Responsibility at Work*. San Fransisco: Jossey-Bass
- Gardner, H., Csikszentmihalyi, M., & Damon, W. 2001. *Good Work*. New York: Basic Books
- Gibb, A.A. 2002. In Pursuit of A New "enterprise" and "Entrepreneurship" Paradigm for Learning: Creative Deconstruction, New Values, New Ways of Doing Things and New Combination of Knowledge. *International Journal of Management Review*. Vol.4 pp. 233-269
- Global Entrepreneurship and Development Index, 2013*, dalam www.thegedi.org, diakses 3/1/2014
- Global Entrepreneurship and Development Index, 2013*, dalam www.thegedi.org, diakses 3/1/2014
- Goel, Abhishek; Vohra, Neharika; Zhang, Liyan; Arora, Bhupinder. 2007. Attitudes of The Youth Towards Entrepreneurs and Entrepreneurship: A Cross-Cultural Comparison of India and China. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol. III pp. 29-62
- Guerra, Dave. 2008. Superperformance: A New Theory for Optimization. *Performance Improvement*. 47 (5):8-14
- Gunn, E. 2009 March 31. Avoid getting reorganized out of your company. *The Wall Street Journal*. 74 D6.
- Hager, P. & Holland, S. 2006. Introduction in P. Hager and S. Holland (Eds). *Graduates Atribute Learning and Employability*. The Netherlands: Springer

- Hayton, C.J.; George, G.; Zahra, S.A. 2002. National Culture and Entrepreneurship: A Review of *Behavioral Research Entrepreneurship Theory and Practice*. Vol.26. 4 pp.33-52
- Hendricks, K.B. dan V.R. Singhal.1997. Does Implementing an Effective TQM Programs Actually Improve Operating Performance? Empirical Evidence from Firms that Have Won Quality Award. *Management Science*. 43 (9) pp.1259-1274
- HSBC *Value of Education Survey 2018*, dalam <http://www.hsbc.com>
- Holcombe, R.G. 2003. Progress and Entrepreneurship. *The Quarterly Journal of Austrian Economics*. Vol.6.3 pp 3-26
- Jerald, C.D. 2009. *Defining a 21st Century Education*. The Center for Public Education.
- Izedonmi, Prince Famous dan Okafor, Chinonye. 2010. The Effect of entrepreneurship Education on Students' Entrepreneurial Intentions. *Global Journal of Management and Business Research*. Vol.10 pp. 49-60
- Jabnoun, N. 2001. Values Underlying Continuous Improvement. *TQM Magazine*. Vol.7 No.12
- Jackson, J.E.; Rodkey, G.R. 1994. The Attitudinal Climate for Entrepreneurial Activity. *Public Opinion Quarterly*, 58. Pp.358-380
- Kalita, S.M. 2009, May 13. Americans see 18% of wealth vanish. *The Wall Street Journal*. 59 pp. 1, A8
- Kamdar, D. & Van Dyne, L. 2007. The joint effect of personality and workplace social exchange relationships in predicting task performance and citizenship performance. *Journal of Applied Psychology*. 92. pp. 1286-1298
- Kanungo, R.N. 1998. *Entrepreneurship and Innovation: Models for Development*. New Dehli: Sage Publ.
- Kasali, Rhenald.2003. *Change!*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kasali, Rhenald. 2005. *Change! Manajemen Perubahan dan Harapan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kasali, Rhenald.2010. *MYELIN Mobilisasi Intangibles Menjadi Kekuatan Perubahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kaufman, J.C. & Sternberg, R.J. 2010. *The Cambridge Handbook of Creativity*. Cambridge University Press

- Kewirausahaan Indonesia Dan Negara Asean*, dalam www.bisnis.com, diakses 28/12/2013
- Kewirausahaan Indonesia Tertinggal*, dalam www.pikiran-rakyat.com, diakses 7/1/2014
- Kaufman, J. C., & Sternberg, R. J. (2007). Resource review: Creativity. *Change*, 39(4), 55–58.
- Kewirausahaan Indonesia Dan Negara Asean*, dalam www.bisnis.com, diakses 28/12/2013
- Kewirausahaan Indonesia Tertinggal*, dalam www.pikiran-rakyat.com, diakses 7/1/2014
- Kirby, David. 2008. Higher Education, ADHD and The Creation of Student Entrepreneurs: Is There a Need to Rethink? *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol.IV.4. pp. 110-122
- Kreft, S.F. dan Sobel, R.S. 2005. Public Policy, Entrepreneurship and Economic Freedom. *Cato Journal*. Vol 25 No. 3
- Krueger, N.F.; Reilly, M.D.; & Carsrud, A.L. 2000. Competing model of entrepreneurial intentions. *Journal of Business Venturing*. 15 (5/6) pp. 411-432
- Krueger, N.F. 1993. The Impact of Entrepreneurial Exposure on Perceptions of New Venture Feasibility and Desirability. *Entrepreneurship: Theory and Practice*. No. 18 pp. 5-21
- Lazenby, Hugh. 2016. What is equality of opportunity in education? *Theory and Research in Education*. 14 (1) 65-76
- Lee, Edward Yiu-chung; Anderson, Alistair R. 2007. The Role of Guanxi in Chinese Entrepreneurship. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol.III.3. pp.38-51
- Lehman, W.E.K., Greener, J.M. & Simpson, D.D. 2002. Assessing Organizational Readiness for Change. *Journal of Substance Abuse Treatment*. 22 (4) pp.197-209
- Litan, Robert. 2014. *Entrepreneurship and Economic Growth. Dalam Creating The Environment for Entrepreneurial Success*. Washington DC: Centre for International Private Enterprise
- Livne, N. L., & Milgram, R. M. (2006). Academic versus creative abilities in mathematics: Two components of the same construct. *Creativity Research Journal*, 18(2), 199–212.

- Lopez, R.E.; Thomas, V.; Wang, Y. 2008. The Quality of Growth: Fiscal Policies for Better Results. *IEG Working Paper 2008/6*. Washington DC: World Bank
- Manolova, T., Shirokova, G., Tsukonova, T & Edelman, L. 2014. The impact of family support on young nascent entrepreneurs's start-up activities: A family embeddedness perspective. *Working Paper*. Saint Petersburg: St. Petersburg State University Graduate School of Management
- Manos, Anthony. 2007. The benefit of kaizen and kaizen events. *Quality Progress*. 40 (2) 47
- Markowitz, H. 2003. Research Group and "Quasi-Firms": The Intervention of The Entrepreneurial University. *Research Policy*, 32. Pp. 109-121
- Mathews, L.G. 1999. Promoting economic literacy: ideas for your classroom. Paper prepared for the 1999 AAEA annual meeting Nashville, Tennessee
- Matthews, C.H. dan Moser, S.B. 1995. Family Background and Gender: Implication for Interest in Small Firm Ownership. *Entrepreneurship and regional Development*. No. 7 pp. 365-377
- Miettinen, Asko. 2008. Entrepreneurship Education Among Students in Higher Education. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol.IV. 4 pp. 1-14
- Miller, J.W. 2009, March 24. WTO predicts global trade will slide 9% this year. *The Wall Street Journal*. 68 p.A8
- Ministry of Communication Information and Technology: (2006-version 1.0). *The strategic blue print of planning and developing The ICT-Literate human resources in Indonesia*. Jakarta
- Minna, Hamalainen; Elena, Ruskovaara; Timo, Pihkala. 2018. Principals promoting entrepreneurship education: the relationships between development activities and school practices. *Journal of Entrepreneurship Education*. 21 (2) pp. 1-19
- Moorhouse, A., & Caltabiano, M.L. 2007. Resilience and unemployment: Exploring risk and protective influences for the outcome variables of depression and assertive job searching. *Journal of Employment Counseling*. 44. pp. 115-125
- Murugesan, R. 2010. A Comparative Study on the Terminal and Instrumental Value System of Entrepreneurs and Students. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol.VI.2 pp.85-101

- Nichols, R. 2013. Who pays, who plays: mapping video game production and consumption globally. In; a. Huntemann & B. Aslinger (eds). *Gaming Globally: Production, Play and Place*. NY: Palgrave-McMillan
- O'Connor, G.C. 2008. Major innovation as a dynamic capability: A system approach. *Journal of Product Innovation Management*. 25. Pp. 313-330
- Partnership for 21st Century skills. Dalam www.imls.gov/assets. Diakses 12 Mei 2018.
- Parker, P. 2008. Promoting Employability at "Flat" World. *Journal of Employment Counseling*. 45 pp.2-13.
- Pengangguran Terbuka Nasional Menurut Pendidikan dan Lokasi tempat Tinggal*, dalam www.pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id, diakses 12/12/2013
- Pengangguran terdidik di Indonesia masih sangat besar dalam <http://merdeka.com>. diakses 5 Maret 2012
- Pengangguran di Indonesia Mencapai 7,39 Juta*, dalam www.tribunnews.com, diakses 6/1/2014
- Pederit, S.K. 2000. Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A Multidimensional View of Attitudes Toward of An Organizational Change. *Academy of Management Review*. 25 (4) pp.697-713
- Persiapan Indonesia Menghadapi Pasar Bebas Asean Masih Belum Optimal*, dalam www.m.beritasatu.com/ekonomi, diakses 18/12/2013
- Pink, D. (2005). *A whole new mind: Why right-brainers will rule the future*. New York: Penguin.
- Prianto, Agus. 2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan para pegawai pemerintah daerah penerima Otonomy Award di Jawa Timur. *Manajemen USAHAWAN Indonesia*. 8 (XXXVI). 33-50
- Prianto, Agus. 2013. Menakar kulaitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen USAHAWAN Indonesia*. 42. Pp.74-97
- Prianto, Agus. 2016. The effect of the involvement intensity in extracurricular activities and soft skills towards readiness to work for higher education graduates in East Java Indonesia. *International Journal of Business and Management Intention*. 5 (8) pp 79-87
- Prianto, Agus. 2012. Identifikasi Berbagai Faktor Pemicu Orientasi Kewirausahaan (Studi Pada Para Pewirausaha di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen USAHAWAN INDONESIA*. Vol.41 hal.243-270

- Prianto, Agus & Winardi. 2015. Menjadi Manusia Pembelajar: Sebuah Tantangan Dalam Era Ledakan Dotcom. Dalam *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*. Malang: Setara Press
- Porath, C.L. & Bateman, C.S. 2006. Self-regulation: From goal orientation to job performance. *Journal of Applied Psychology*. 91. pp. 185-192
- Powel, T.C.1995. Total Quality Management as Competitive Advantage: A Review and Empirical Study. *Strategic Management Journal*. Vol.16 No.1 pp15-28
- Rafferty, A.E. & Simons, R.H. 2001. An Empirical Examination of The Relationship Between Change Readiness Perceptions and Types of Change. *Paper Presented at The Academy of Management Meeting*. Washington DC.
- Research dan Development Expenditure % to GDP*, dalam www.worldbank.org, diakses 17/11/2012
- Reynold, S.J. & Ceranic, C.L. 2007. The effect of moral judgment and moral identity on moral behavior: An empirical examination of the moral individual. *Journal of Applied Psychology*. 92. Pp.1610-1624
- R&D in Asean*, dalam www.asnet.asean.org, diakses 12/12/2013
- Rhoades, L. dan Eisenberger, R. 2002. Perceived Organizational Support: A Review of The Literature. *Journal of Applied Psychology*. 87 (4) pp.698-714
- Robinson, K. (2011). *Out of our minds*. New York: Wiley.
- Rodgers, C.R. & Raiderroth, M.B. 2006. Presence in teaching. *Teachers and Teaching*. 12 (3) 265-287
- Saleh, B.2015. Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Masyarakat di Kawasan Mamminasata. *Jurnal Pekommas*. 18 (3) 151-160
- Samson, D. dan M., Terziovski.1999. The Relationship Between Total Quality Management Practices and Operational Performance. *Journal of Operations Management*. Vol.17 pp.393-409
- Scharborough, N.M.; Wilson, D.; Zimmerer, T.W. 2010. *Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach 9th Edition*. Pearson Prentice Hall
- Scheiner, Christian; Laspita, Stavroula; Brem, Alexander; Chlosta, Simone; Voigt, Kai-Ingo. 2008. Founding Intention: A Gender perspective. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol.IV (4) pp. 15-35

- Schein, E.H.1996. Kurt Lewin's Change Theory in The Field and in The Classroom: Notes Toward a Model of Managed Learning. *System Practice*. 9 (1) pp.27-47
- Sebora, Terrence; Li, Weixing. 2006. The Effects of Economic Transtition on Chinese Entrepreneurship. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vo,II.3 pp.26-42
- Schwab, K. (Ed). 2017. *The Global Competitiveness Report 2017-2018*. Geneva: World Economic Forum
- Seneviratne, Dulani and Sun, Yan. 2013. Infrastructure and Income Distribution in ASEAN-5: What are the link. *IMF Working Paper*
- Shane, S. 1994. The Effect of National Culture on the Choice Between Licensing and Foreign Direct Invensment. *Startegic Management Journal*. Vo. 15.8 pp.627-643
- Silver, W.S.; Mitchell, T.R., dan Gist, M.E. 1995. Responses to Succesful and Unsucesful Performance: The Moderating Effect to Self Efficacy on The Relationship Between Performance and Attribution. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 62 (3) pp.286-299
- Singh, K. 2014. Right to education and equality of education opportunities. *Journal of International Cooperation in Education*. 16 (2) pp. 5-19
- Smith,C.S.; R, Barness, dan M.C.Townsend.2002. Culture Surveys: Monitoring and Enhancing The Impact of Change Programs. *Total Quality Management*. 13 (6) pp.855-861
- Solt, Michael E. 2007. Transforming China in The 21st Century Through Entrepreneurship. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol. III.1 pp.64-89
- Souza-Poza,A.; H. Nystrom, dan H. Wiebe.2001. A Cross-Cultural Study of The Differing Effects of Corporate Culture on TQM. *The International Journal of Quality and Reliability Management*. 18 (6/7) p.174
- Stanley J. Baran, Dennis K.Davis. 2010. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future*. Belmont: CA, Wadsworth
- Stigler, J. W., & Hiebert, J. (2004). Improving mathematics teaching. *Educational Leadership*, 61(5), 12–17.
- Suyanto. 2015. Profesionalisme Pendidik di Era MEA. *Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi UNY bekerjasama dengan ASPROPENDO tanggal 9 Mei 2015*.

- Telematika Indonesia.2004. *Kebijakan dan Perkembangan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKPI)*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi RI
- Tesfom, Goitom.2006. The Role of Social Networks on the Entrepreneurial Drive of First Generation East African Origin Entrepreneurs in The Seattle Area. *Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability*. Vol. II.3. pp. 2-25
- Thailand 2012: The Year of English Speaking*, dalam www.etc-thai.com, diakses 8/11/2013
- The Global Innovation Index 2014 The Human Factor in Innovation. Dalam www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf. Diakses 2 Januari 2015
- The 2011 Legatum Prosperity Index*, dalam www.prosperity.com/rankings.aspx, diakses, 13/12/2013
- The EY G20 Entrepreneurship Barometer 2013*, dalam www.ey.com, diakses 3/1/2014
- The Global Information Technology Report,2013*, WEF 2013, dalam www.weforum.org/reports, diakses 1/1/2014
- The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013*, WEF 2013, dalam www.weforum.org/reports , diakses 1/1/2014
- The Legatum Prosperity Index 2018 12th Edition. Legatum Institute. www.prosperity.com
- The Legatum Prosperity Index 2018 12th Edition*. Legatum Institute. www.prosperity.com
- The EY G20 Entrepreneurship Barometer 2013*, dalam www.ey.com, diakses 3/1/2014
- The Global Information Technology Report,2013*, WEF 2013, dalam www.weforum.org/reports, diakses 1/1/2014
- Torrance, E. P., & Goff, K. (1990). *Fostering academic creativity in gifted students*. Washington: DC: Educational Resources Distribution Center. Retrieved from www.kidsource.com/kidsource/content/academic_creativity.html
- Ulku, Hulya.2004. R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empirical Analysis. *IMF Working Paper*, dalam www.imf.org, diakses 7/1/2014

- UNESCO Institute for Statistics, July 2011, dalam www.en.unesco.org, diakses 3/3/2012
- UNDP.2012. *Asia Pacific Human Development Report 2012*. Dalam <https://www.undp.org/>
- UNESCO. 2013. *EFA Global Monitoring Report 2013-2014, Teaching and Learning: Achieving Quality for All*. UNESCO Publishing
- Vedder, R., Denhart, C., & Robe, J. 2013. *Why Are Recent College Graduates Underemployed?* Washington, D.C.: A Policy Paper from The Centre for College Affordability and Productivity
- Wagner, J. O. 2006. Work readiness skills. Youthwork Information Briefs. From: www.learningworkconnection.org. Diakses 12 Januari 2013
- Wennekers, S. dan Thurik, R. 1999. Linking Entrepreneurship and Economic Growth. *Small Business Economics*. Vol 13 No.1 pp. 27-55
- Worldwide governance indicators, www.data.bankdunia.org
- Worldwide Governance Indicators*, www.data.bankdunia.org, diakses 1/10/2013
- The World Bank. 2010. *World Development Report 2010: Development and Climate Change*. Washington, D.C.: The World Bank
- Xavier, Siri Roland; Ismail, Ahmad Zaki; Ahmad, Syed Zamberi. 2010. Culture and Economic Determinants of Entrepreneurial Propensity: A Study of Multi Ethnic Society in Malaysia. *Journal of Asia entrepreneurship And Sustainability*. Vol.VI.2. pp. 67-83
- Yanyun, Zhao; Mingqiang, Zhang. Tanpa Tahun. R&D and Economic Growth, *Panel Data Analysis in ASEAN+3 Countries*. The Center for Applied Statistics, Renmin University of China, dalam www.kdi.re.kr/upload, diakses 2/1/2014
- Zampetakis, Leonidas A; Gotsi, Manto; Andriopoulos, Constantine & Moustakis, Vassilis.2011. Creativity and Entrepreneurial Intention in Young People. *Entrepreneurship and Innovation*. Vol. 12 pp. 189-199
- 2011-12 & 2013 ASEAN-BAC Survey On Asean Competitiveness, dalam www.lkyspp.nus.edu.sg/2013-ASEAN-BAC-Survey, diakses 3/1/2014
- 2013 *Change Readiness Index, Assessing Countries' Ability to Manage Change and Cultivate Opportunity*, dalam www.kpmg.com/global, diakses 2/1/2014

www.hdr.undp.org/education. Diakses 8 April 2015

www.webometrics.info. Diakses 8 April 2015

[www://thoughtfullearning.com/resources](http://www.thoughtfullearning.com/resources). Diakses 8 April 2015

<http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb13/vol70/num05/Creativity-Requires-a-Mix-of-Skills.aspx>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read220393/apa-itu-literasi-keuangan.html>

Tentang Penulis



Agus Prianto, lahir di Kediri 21 Mei 1968. Mem peroleh pendidikan S1 dari Program Studi Ekonomi Koperasi FPIPS IKIP Surabaya Tahun 1992. Menyelesaikan Program Magister, Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah dari Universitas Negeri Malang Tahun 2001. Merampung Program Doktor, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang Tahun 2005. Yang bersangkutan merupakan dosen tetap dpk pada Program S1 Pendidikan Ekonomi dan Program Magister Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang. Ia aktif melakukan kajian dan penelitian bidang pendidikan kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia. Berbagai karya hasil kajian dan penelitian telah dipublikasikan pada berbagai forum seminar nasional dan seminar internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan berbagai jurnal internasional. Yang bersangkutan sudah menghasilkan beberapa buku atau *book chapter* yang diterbitkan di berbagai penerbit, antara lain: Menakar Kualitas Pelayanan Publik, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Analisis Data Statistik, Tantangan Pendidikan Dalam Era Ledakan Dotcom, Welcome to The Disruption Era. Beberapa karya dalam bentuk buku siap terbit juga akan mewarnai khasanah perbukuan nasional. Berbagai karya yang bersangkutan selengkapnyanya juga dapat diakses melalui Google Scholar.



Winardi, adalah dosen PNS Dpk di STKIP PGRI Jombang sejak 1986. Lahir di Jajag, Banyuwangi 2 Juni 1957. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember 1984. Magister Hukum diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang 2001. Tahun 2012 menyelesaikan program Doktor Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Karya ilmiah berupa buku:

- 1) *Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*. Setara Press 2008.
- 2) *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*. Setara Press 2011.
- 3) *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press 2016.
- 4) *Politik Hukum*. Setara Press 2019



Umi Nur Qomariyah lahir di Malang 01 Januari 1972. Memperoleh pendidikan S1 dari Program Studi Pendidikan Matematika FPMIPA IKIP PGRI Malang Tahun 1995. Menyelesaikan Program Magister Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Tahun 2006. Saat ini sedang melangsungkan Program Doktor, Program Studi Pendidikan matematika Universitas Negeri Surabaya. Yang bersangkutan merupakan dosen tetap yayasan YPLP PT PGRI Jombang pada Program S1 Pendidikan Matematika STKIP PGRI Jombang. Aktif melakukan kajian dan penelitian bidang pendidikan dan pengembangan pembelajaran matematika. Berbagai karya hasil kajian dan penelitian telah dipublikasikan pada berbagai forum seminar nasional, seminar internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional. Menjabat sebagai kepala bidang pengabdian pada masyarakat mulai tahun 2007 sampai dengan saat ini, sehingga menghasilkan beberapa kegiatan dan artikel tentang pemberdayaan masyarakat baik sebagai pemenang hibah Dikti maupun hibah lembaga. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikembangkan meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan peningkatan

SDM, Program Belajar Bekerja Terpadu sebagai sarana mahasiswa belajar dan bekerja serta sebagai pemerhati kegiatan kewirausahaan mahasiswa melalui pendamping Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)/ Kompetensi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) dan surveyor pemetaan Industri Kecil Menengah kabupaten Jombang. Beberapa karya dalam bentuk buku siap terbit juga akan mewarnai khazanah perbukuan nasional. Berbagai karya yang bersangkutan selengkapnya juga dapat diakses melalui google scholar.

